



Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.

Pengantar EKONOMI PEMBANGUNAN

**Kata Pengantar: Prof. Daniel D. Kameo, PhD
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga**

PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN



Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

Penulis:
Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xi, 330, Uk: 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-147-516-9

Cetakan Pertama:
September 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

Copyright © 2024 By Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau
Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota Ikapi (216/Jte/2021)

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi banyak yang bertujuan menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan secara struktural dalam berbagai aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya baik pada tataran lokal, nasional, regional, bahkan global. Oleh sebab itu untuk memahami apalagi untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan maka idealnya para pemangku kepentingan (stakeholders) terutama birokrat, politisi, masyarakat dunia usaha dan akademisi perlu mempunyai pengetahuan dasar tentang apa itu pembangunan. Bagi mereka yang mempunyai pemahaman tentang konsep-konsep dasar tentang teori, pemikiran dan dialog-dialog terkait teori dan praktek-praktek pembangunan akan sangat membantu dalam berperan aktif pada berbagai tataran dan tahapan proses pembangunan.

Buku PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN karya Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si ini merupakan buku teks yang bertujuan memperkenalkan dan meliterasi pembaca terhadap konsep-konsep dan teori-teori dasar serta praktek pembangunan ekonomi. Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si yang sukses memberikan literasi tersebut secara sistematis dan komprehensif serta mudah dipahami bahkan oleh pembaca yang tidak berlatar belakang ilmu ekonomi. Saya anjurkan buku ini untuk menjadi salah satu referensi bagi para dosen, mahasiswa, politisi dan birokrat bahkan untuk pembaca umum lainnya yang tertarik pada issue-issue pembangunan (ekonomi).

Prof. Daniel D. Kameo, PhD
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024195689, 28 September 2024

Pencipta

Nama : Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Sc.

Alamat : Kelurahan Pamona, RT/RW:11/004, Kel/Desa: Pamona, Kec.: Pamona, Puselemba Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Pamona Puselemba, Poso, Sulawesi Tengah, 94663

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Sc.

Alamat : Kelurahan Pamona, RT/RW:11/004, Kel/Desa: Pamona, Kec.: Pamona, Puselemba Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Pamona Puselemba, Poso, Sulawesi Tengah 94663

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 September 2024, di Surakarta (solo)

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000768152

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN	1
A. ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN.....	1
1. Kelangkaan dan Pilihan dalam Ilmu Ekonomi.....	2
2. Keterkaitan antara Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan	2
3. Pentingnya Mempelajari Ekonomi Pembangunan	3
B. NILAI DAN TUJUAN INTI PEMBANGUNAN.....	4
1. Nilai Inti Pembangunan	4
2. Tujuan Inti Pembangunan	5
C. TEORI PEMBANGUNAN KLASIK.....	8
1. Teori Tahapan Pertumbuhan Linear Rostow	8
2. Model Pertumbuhan Harrod-Domar.....	10
3. Teori Pembangunan Dua Sektor.....	11
4. Model Ketergantungan Neokolonial.....	14
5. Model Paradigma Palsu	15
6. <i>Big Push Theory</i>	17
7. Teori Cincin O.....	18
BAB 2 CIRI NEGARA BERKEMBANG	22
A. NEGARA BERKEMBANG	22
1. Pendapatan Per Kapita yang Rendah.....	23
2. Tingginya Tingkat Kemiskinan	23
3. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat.....	24
4. Ketergantungan pada Sektor Pertanian.....	25
5. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesehatan	26
6. Infrastruktur yang Kurang Berkembang	26
7. Tingkat Pengangguran dan Pekerjaan Informal yang Tinggi	27
B. KARAKTERISTIK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG	29
1. Ekonomi.....	29
2. Pendapatan dan Distribusi Kekayaan	29
3. Kesehatan dan Pendidikan	30
4. Infrastruktur	31

5. Pertumbuhan Penduduk	31
6. Stabilitas Politik dan Tata Kelola	32
7. Ketergantungan Ekonomi	33
8. Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup	34
C. CONTOH KASUS NEGARA-NEGARA BERKEMBANG	35
BAB 3 FAKTOR PEMBANGUNAN	37
A. SUMBER DAYA ALAM	37
1. Sumber Daya Alam Hasil Tambang	38
2. Sumber Daya Lahan Pertanian	46
B. SUMBER DAYA MANUSIA	49
C. SUMBER DAYA MODAL	58
1. Investasi dalam Modal Fisik	58
2. Modal Finansial	59
3. Modal Intelektual dan Inovasi	59
4. Keterlibatan Sektor Swasta	60
5. Kebijakan Pemerintah dan Stabilitas Ekonomi	62
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia	63
D. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	65
E. INFRASTRUKTUR	67
F. STABILITAS POLITIK	70
G. KELEMBAGAAN DAN TATA PEMERINTAHAN	74
H. SOSIAL BUDAYA	75
1. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Ekonomi	75
2. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pendidikan dan Pembelajaran	76
3. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Kohesi dan Integrasi Sosial ..	78
4. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Kebijakan Publik dan Tata Kelola	79
5. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan	79
6. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Perubahan Sosial dan Inovasi ..	80
I. STABILITAS DUNIA INTERNASIONAL	81
BAB 4 STRUKTUR EKONOMI	82
A. SEKTOR PRIMER	82
1. Peran Sektor Pertanian Dalam Struktur Ekonomi Indonesia	83
2. Peran Sektor Kehutanan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia	84
3. Peran Sektor Perikanan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia	85

4. Peran Sektor Pertambangan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia	86
B. SEKTOR SEKUNDER	88
C. SEKTOR TERSIER	91
D. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIDAKSETARAAN EKONOMI	99
1. Sektor dominan	99
2. Diversifikasi Ekonomi	100
3. Kebijakan Pemerintah.....	101
4. Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja.....	103
5. Globalisasi dan Perdagangan Internasional	104
E. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI EKONOMI	106
1. Perdagangan Internasional	107
2. Dampak Investasi Asing Langsung (FDI).....	108
3. Globalisasi dan Integrasi Ekonomi.....	110
F. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SEIRING WAKTU	111
1. Pengaruh Teknologi.....	111
2. Perubahan Sosial	114
BAB 5 HAMBATAN PEMBANGUNAN	116
A. FAKTOR EKONOMI	116
1. Ketidaksetaraan Pendapatan	116
2. Ketergantungan Pada Sektor Tertentu	117
B. ASPEK SOSIAL	118
1. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan dan Kesehatan	118
2. Ketidaksetaraan Gender	120
C. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI.....	121
1. Keterbatasan Infrastruktur	121
2. Kesenjangan Teknologi.....	122
D. KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA.....	123
1. Korupsi dan Ketidakstabilan Politik.....	123
2. Ketidakefektifan Kebijakan Pembangunan.....	127
E. ASPEK LINGKUNGAN.....	128
F. GLOBALISASI	132
BAB 6 PRASYARAT PEMBANGUNAN.....	135
A. STABILITAS EKONOMI MAKRO	135
B. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI.....	137

1. Infrastruktur Fisik (Jalan, Listrik, Air).....	137
2. Infrastruktur Teknologi dan Informasi.....	139
3. Inovasi dan Teknologi Baru	141
C. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	142
1. Pendidikan dan Pelatihan.....	143
2. Kesehatan dan Gizi.....	145
3. Produktivitas Tenaga Kerja.....	147
D. LEMBAGA DAN KEBIJAKAN PUBLIK	148
1. Efektivitas Pemerintah.....	148
2. Transparansi dan Akuntabilitas	149
3. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Mendukung	149
E. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA.....	150
1. Nilai dan Norma Sosial.....	151
2. Kohesi Sosial dan Integrasi.....	151
3. Peran Gender dalam Pembangunan.....	152
F. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM.....	154
1. Pengelolaan Sumber Daya Alam	154
2. Keberlanjutan Lingkungan.....	155
3. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	156
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA	158
A. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL	158
1. Definisi dan Pengukuran.....	158
2. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB)	160
B. PENDAPATAN PER KAPITA	162
1. Pengertian dan Pengukuran.....	162
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Per Kapita	165
C. DISTRIBUSI PENDAPATAN	173
1. Ketimpangan Pendapatan	173
2. Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan	176
D. PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN.....	178
1. Hubungan Antara Pendapatan dan Kesejahteraan	178
2. Indikator Kesejahteraan Selain Pendapatan	180
3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan.....	181

BAB 8 PERTUMBUHAN, KEMISKINAN, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	184
A. PERTUMBUHAN EKONOMI.....	184
1. Definisi dan Konsep Dasar	184
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	186
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	188
4. Contoh Kasus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	190
B. KEMISKINAN	191
1. Definisi Kemiskinan.....	191
2. Pengukuran Kemiskinan.....	192
3. Penyebab Kemiskinan	195
4. Dampak Kemiskinan terhadap Pembangunan.....	210
5. Dampak Politik.....	221
C. PEMERATAAN PEMBANGUNAN	227
1. Definisi dan Konsep Pemerataan	227
2. Indikator Pemerataan Pembangunan	234
3. Kebijakan untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan	237
D. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN, KEMISKINAN, DAN PEMERATAAN.....	239
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	239
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan	241
3. Ketimpangan dan Efeknya terhadap Pertumbuhan	242
4. Kemiskinan dan Pemerataan	244
5. Sinergi antara Pertumbuhan, Pengurangan Kemiskinan, dan Pemerataan	247
6. Teori <i>Trickle-Down Effect</i>	248
7. Pendekatan Pembangunan yang Inklusif	252
BAB 9 KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN	259
A. KEBIJAKAN FISKAL.....	259
1. Pengertian dan Tujuan	260
2. Instrumen Kebijakan Fiskal	261
3. Peran Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan	262
B. KEBIJAKAN MONETER.....	263
1. Pengertian dan Tujuan	263
2. Instrumen Kebijakan Moneter.....	264
3. Peran Kebijakan Moneter dalam Pembangunan.....	265

C. KEBIJAKAN PERDAGANGAN	266
1. Kebijakan Perdagangan Internasional	267
2. Tarif dan non-tarif	267
3. Peran Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi	268
D. KEBIJAKAN INVESTASI.....	269
1. Iklim Investasi.....	270
2. Kebijakan untuk Meningkatkan Investasi.....	272
3. Dampak Investasi terhadap Pembangunan	273
E. KEBIJAKAN SOSIAL.....	275
1. Perlindungan Sosial.....	276
2. Pendidikan dan Kesehatan	277
3. Kebijakan Pembangunan Desa.....	280
BAB 10 SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN	283
A. SUMBER PEMBIAYAAN DOMESTIK	283
1. Pajak dan Retribusi.....	284
2. Pinjaman Pemerintah.....	285
3. Tabungan Masyarakat dan Investasi.....	286
B. SUMBER PEMBIAYAAN INTERNASIONAL	287
1. Bantuan Luar Negeri	288
2. Pinjaman dari Lembaga Internasional	289
3. Investasi Asing Langsung (FDI).....	290
C. PEMBIAYAAN MELALUI PASAR KEUANGAN	291
1. Pasar Modal dan Saham.....	292
2. Obligasi dan Instrumen Hutang Lainnya	293
3. Peran Bank dan Lembaga Keuangan.....	294
D. INOVASI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN.....	296
1. Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan.....	297
2. Teknologi Finansial (FinTech)	298
3. Kemitraan Publik-Swasta	299
E. MANAJEMEN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	301
REFERENSI.....	303
PROFIL PENULIS	330

BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN

A. ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

Ilmu ekonomi telah berkembang sejak zaman kuno, namun sebagai disiplin akademis, ia mulai terstruktur pada abad ke-18. Adam Smith, sering disebut sebagai "Bapak Ekonomi," karena meletakkan dasar teori ekonomi modern dengan karyanya "The Wealth of Nations" pada tahun 1776. Smith memperkenalkan konsep penting seperti pembagian kerja, pasar bebas, dan "tangan tak terlihat" yang mengatur ekonomi. Sejak itu, ilmu ekonomi telah berkembang melalui berbagai aliran pemikiran, termasuk aliran Klasik, Marxis, Neoklasik, Keynesian, dan lain sebagainya.

Definisi ilmu ekonomi bervariasi menurut para ahli. Adam Smith mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang kekayaan bangsa dan bagaimana kekayaan itu dibuat dan didistribusikan (Smith, 1776). Alfred Marshall, dalam bukunya "Principles of Economics" (1890), mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang manusia dalam kegiatan sehari-harinya, mencari kekayaan (Marshall, 2005). John Maynard Keynes, di "The General Theory of Employment, Interest, and Money" (1936), menyatakan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan konsumsi barang serta jasa (Keynes, 2018). Lionel Robbins, pada tahun 1932, memberikan definisi yang lebih luas, menyatakan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang terbatas yang memiliki penggunaan alternatif. Paul Samuelson, dalam "Economics" (1948), memperluas definisi ekonomi sebagai studi tentang cara orang dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa penggunaan uang, untuk mengalokasikan sumber daya yang langka yang bisa memiliki banyak penggunaan, untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi, sekarang dan di masa depan, di antara berbagai orang dan kelompok di dalam masyarakat.

1. Kelangkaan dan Pilihan dalam Ilmu Ekonomi

Konsep kelangkaan dan pilihan adalah inti dari ilmu ekonomi. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tidaklah cukup. Hal ini memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan tentang cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara efisien. Pilihan ini mengharuskan pengorbanan atau *trade-off*, di mana memilih satu alternatif berarti melepaskan opsi lainnya.

Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana keputusan ini dibuat dan dampaknya terhadap alokasi sumber daya. Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk menilai opsi yang berbeda. Dengan demikian, ekonomi membantu dalam mengidentifikasi pilihan yang paling efisien atau yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Pemahaman tentang kelangkaan dan pilihan juga membantu dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sebanyak mungkin. Ini mencakup keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

2. Keterkaitan antara Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan

Ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan saling terkait erat. Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Ilmu ekonomi menyediakan alat analitis dan teoretis yang diperlukan untuk memahami bagaimana ekonomi beroperasi, sementara ekonomi pembangunan menerapkan alat-alat ini untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh negara-negara dalam proses pembangunan.

Pengembangan ekonomi melibatkan strategi dan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan tingkat hidup. Ilmu ekonomi membantu dalam merumuskan kebijakan yang efisien untuk mencapai tujuan-tujuan ini melalui analisis ekonomi makro dan mikro. Selain itu, ilmu ekonomi membantu memahami distribusi sumber daya yang tidak merata, yang seringkali menjadi hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ekonomi

pembangunan sangat penting untuk merancang dan menerapkan strategi pembangunan yang berhasil.

Ekonomi pembangunan telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan berbagai cara. Menurut Michael P. Todaro, ekonomi pembangunan adalah studi tentang bagaimana ekonomi negara-negara berkembang beroperasi dan kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan (Todaro & Smith, 2020). Amartya Sen menganggap ekonomi pembangunan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi; bagi dia, itu adalah tentang memperluas kebebasan yang dinikmati oleh individu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang mereka pilih sendiri (Sen, 2015, 2017). Dudley Seers, sementara itu, berpendapat bahwa fokus dari ekonomi pembangunan seharusnya pada pengurangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran (Seers, 1972, 2016). Menurut Paul Streeten, ekonomi pembangunan harus berfokus pada kebutuhan dasar manusia, memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, perumahan, dan nutrisi yang memadai (Streeten, 1979, 2023).

3. Pentingnya Mempelajari Ekonomi Pembangunan

Mempelajari ekonomi pembangunan penting karena memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, ekonomi pembangunan menawarkan wawasan tentang bagaimana distribusi sumber daya yang adil dan efisien dapat dicapai, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ini juga membantu dalam memahami peran lembaga, baik lokal maupun internasional dalam proses pembangunan.

Terakhir, mempelajari ekonomi pembangunan memungkinkan individu dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi inovatif untuk masalah pembangunan. Hal ini termasuk intervensi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial.

B. NILAI DAN TUJUAN INTI PEMBANGUNAN

1. Nilai Inti Pembangunan

Todaro & Smith, (2020) membagi nilai inti pembangunan menjadi tiga yakni kecukupan, harga diri dan kebebasan. **Kecukupan**, dalam konteks pembangunan merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang dianggap esensial untuk menjalani kehidupan yang layak. Semua itu merupakan fondasi dari pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar minimal kehidupan. Kecukupan tidak hanya mengacu pada kuantitas tetapi juga kualitas sumber daya yang tersedia, menekankan pentingnya nutrisi, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang efektif sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia.

Harga Diri. Harga diri berkaitan dengan kemampuan individu untuk merasa dihargai dan dihormati dalam masyarakatnya, yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak individu, kesetaraan, dan keadilan sosial. Pembangunan yang menghargai harga diri berupaya menghilangkan diskriminasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan akses yang adil terhadap berbagai peluang. Hal ini juga mencakup pengembangan kebijakan yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuh mereka, berkontribusi pada masyarakat, dan merasa bahwa mereka memiliki suara yang penting dalam hal yang menentukan hidup mereka sendiri.

Kebebasan. Kebebasan dalam konteks pembangunan mencakup kebebasan ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini melibatkan pemberdayaan individu dan masyarakat untuk membuat pilihan tentang cara hidup mereka, termasuk kebebasan untuk bekerja, memilih pemimpin, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, serta memiliki akses terhadap informasi. Kebebasan juga berarti mengurangi hambatan yang menghalangi individu untuk mencapai kemampuan mereka, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengekangan politik. Pembangunan yang berfokus pada kebebasan menekankan pentingnya struktur pemerintahan yang demokratis, ekonomi yang inklusif, dan masyarakat yang toleran.

2. Tujuan Inti Pembangunan

Todaro & Smith, (2020) juga mengelompokkan tujuan inti pembangunan menjadi tiga yakni pertama, **Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok yang Merata**. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah memastikan bahwa kebutuhan pokok, seperti makanan, air, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai dan sistem distribusi yang efisien untuk menjangkau populasi yang paling terpinggirkan. Pembangunan harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan dalam akses ke sumber daya ini, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar mereka.

Kedua, **peningkatan Standar Hidup**. Peningkatan standar hidup melibatkan perbaikan kualitas hidup individu melalui peningkatan pendapatan, akses yang lebih baik terhadap layanan sosial ekonomi, dan peningkatan kondisi hidup. Tujuan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada distribusi hasil pertumbuhan tersebut secara adil di antara semua lapisan masyarakat. Peningkatan standar hidup juga mencakup perlindungan lingkungan, akses terhadap kegiatan budaya dan rekreasi, serta pemeliharaan kualitas udara dan air yang baik.

Ketiga, **keterbukaan Pilihan Ekonomi dan Sosial**. Keterbukaan pilihan ekonomi dan sosial mengacu pada kemampuan individu untuk memilih jalur hidup mereka, termasuk karier, pendidikan, dan gaya hidup, tanpa batasan yang tidak perlu. Ini mencakup penciptaan peluang kerja, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan berusaha. Keterbukaan ini memungkinkan individu untuk mengejar cita-cita mereka dan berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

Sustainable Development Goals

Sebelum *Sustainable Development Goals* (SDGs), pertama-tama kita dikenalkan dengan *Milenium Development Goals* (MDGs), yang diluncurkan pada tahun 2000, terdiri dari delapan tujuan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan global, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, pencapaian pendidikan dasar universal, promosi kesetaraan gender, dan pengurangan angka kematian anak. MDGs menetapkan target kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2015. Meskipun MDGs berhasil menginspirasi kemajuan signifikan dalam beberapa area, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap pendidikan, mereka juga dikritik karena tidak cukup mengatasi kesenjangan struktural dan lingkungan.

Sebagai kelanjutan dari MDGs, *Sustainable Development Goals* (SDGs) diperkenalkan pada tahun 2015 dengan 17 tujuan yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hingga tahun 2030. SDGs lebih inklusif dan ambisius, mencakup tujuan seperti mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuknya, memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan segera untuk melawan perubahan iklim. SDGs mengakui bahwa pembangunan harus memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

SDGs dan MDGs bersama-sama menekankan pentingnya pendekatan global terhadap pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia sambil mempertahankan integritas lingkungan bumi. Kedua inisiatif ini mendorong kerja sama internasional, kemitraan antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta pembagian sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ambisius namun penting ini.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, 2023). Berikut adalah ringkasan singkat dari masing-masing tujuan:

- a. Mengakhiri Kemiskinan: Menghapuskan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia.

- b. Mengakhiri Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di semua usia.
- d. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup.
- e. Kesenjangan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua secara berkelanjutan.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
- j. Pengurangan Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara.
- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Tindakan Iklim: Mengambil tindakan segera untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Kehidupan di Daratan: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan dari ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengatasi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

- p. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Memajukan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses ke keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat sarana implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs dirancang untuk menjadi sebuah "*blueprint*" untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua, dengan menangani masalah global utama yang dihadapi dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan.

C. TEORI PEMBANGUNAN KLASIK

1. Teori Tahapan Pertumbuhan Linear Rostow

Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam karyanya pada tahun 1960, "*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*," mengusulkan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui lima tahap linear yang berurutan. Teori ini sering disebut sebagai model lima tahap Rostow atau teori tahapan pertumbuhan ekonomi. Rostow berpendapat bahwa setiap negara harus melewati lima tahap ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (Corbett & Rostow, 1960; Todaro & Smith, 2020). Berikut adalah rincian dari masing-masing tahap tersebut:

- a. Masyarakat Tradisional. Karakteristik ekonomi didominasi oleh aktivitas subsisten, dengan teknologi terbatas dan metode pertanian tradisional. Investasi dalam pembangunan sangat kecil, dengan fokus pada pertanian dan kehidupan yang sangat bergantung pada lingkungan alam. Contohnya dapat di lihat di beberapa wilayah di Afrika Sub-Sahara mungkin masih dianggap berada dalam tahap ini, di mana sektor pertanian tradisional masih mendominasi.
- b. Prasyarat untuk Take-off. Karakteristiknya yaitu proses modernisasi dimulai, dengan peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Terjadi perubahan sosial dan persiapan infrastruktur untuk pertumbuhan

ekonomi. Investasi mulai meningkat namun masih dibawah 10% dari PDB Nasional. Contoh kasus dapat di lihat di Negara-negara seperti Myanmar dan beberapa negara lain di Asia Selatan yang sedang dalam proses modernisasi dan pembangunan infrastruktur.

- c. Take-off. Karakteristiknya adalah pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena yang berkelanjutan. Sektor industri mulai berkembang dengan cepat, investasi mencapai lebih dari 10% dari PDB. Terjadi transformasi struktural dari pertanian ke manufaktur. Contoh kasus, Vietnam dan Bangladesh, dengan pertumbuhan industri mereka yang cepat, dapat dianggap sebagai negara yang berada di tahap take-off.
- d. Menuju Kematangan. Karakteristiknya adalah diversifikasi ekonomi terjadi ke berbagai sektor. Investasi di bidang teknologi tinggi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus. Pertumbuhan ekonomi menyebar ke seluruh bagian masyarakat. Contoh kasus, Negara-negara seperti India dan Indonesia, yang saat ini sedang mengalami diversifikasi ekonomi dan peningkatan investasi dalam teknologi.
- e. Konsumsi Massal Tinggi. Memiliki karakteristik ekonomi mencapai tingkat di mana konsumsi barang-barang konsumsi menjadi sangat tinggi. Kualitas hidup penduduk meningkat secara signifikan, dengan fokus pada layanan dan konsumsi daripada industri berat. Contoh Kasus: Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat seperti Jerman dan Prancis, serta Jepang, adalah contoh negara yang telah mencapai tahap konsumsi massal tinggi.

Teori Rostow telah mendapat kritik karena mengasumsikan bahwa semua negara akan mengikuti jalur linear yang sama menuju pertumbuhan ekonomi, mengabaikan perbedaan budaya, sejarah, dan kondisi geografis yang dapat mempengaruhi jalur pembangunan mereka. Selain itu, model ini tidak memperhitungkan kemungkinan adanya hambatan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, perang, atau intervensi asing yang dapat mempengaruhi proses pembangunan (Z. Khan & Slavador, 2017). Namun, teori Rostow tetap menjadi salah satu kerangka kerja yang penting dalam studi pembangunan ekonomi, memberikan pandangan umum tentang bagaimana negara-negara dapat bergerak melalui berbagai tahap pertumbuhan ekonomi.

2. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Model pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori ekonomi paling awal yang menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan tersebut. Model ini dikembangkan secara independen oleh Sir Roy F. Harrod pada tahun 1939 dan Evsey D. Domar pada tahun 1946. Model ini fokus pada peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi dan bagaimana investasi tersebut mempengaruhi kapasitas produksi suatu ekonomi.

Model Harrod-Domar mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama didorong oleh jumlah investasi yang dilakukan. Model ini menunjukkan hubungan langsung antara tingkat pertumbuhan ekonomi (G), tingkat tabungan (S), dan rasio modal-produksi (K). Rasio modal-produksi adalah jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Dalam model ini, ada dua persamaan utama:

- a. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi: ($G = S / K$), Di mana (G) adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, (S) adalah tingkat tabungan (yang diasumsikan setara dengan tingkat investasi), dan (K) adalah rasio modal-produksi (yang menunjukkan jumlah kapital yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi tambahan).
- b. Fungsi Produksi: Menunjukkan bahwa output ekonomi (Y) berhubungan langsung dengan jumlah modal (K). Model ini mengasumsikan rendahnya substitusi antara faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, dan fokus pada pentingnya akumulasi modal.

Model Harrod-Domar menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, suatu negara perlu meningkatkan tingkat tabungannya. Tingkat tabungan yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak investasi, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, model ini mengimplikasikan bahwa efisiensi investasi (yaitu, rasio modal-produksi yang rendah) sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena menunjukkan bahwa lebih sedikit modal diperlukan untuk menghasilkan output tambahan.

Walaupun model Harrod-Domar memberikan wawasan penting tentang pentingnya investasi untuk pertumbuhan ekonomi, model ini juga menerima beberapa kritik, antara lain:

- a. Ketergantungan pada Investasi: Model ini menekankan terlalu banyak pada investasi sebagai penggerak pertumbuhan dan kurang mempertimbangkan faktor lain seperti inovasi, peningkatan efisiensi, atau peran pendidikan dan kesehatan dalam pertumbuhan ekonomi.
 - b. Kestabilan Ekonomi: Harrod sendiri mengakui bahwa modelnya mengarah pada "pertumbuhan yang tidak stabil", di mana ekonomi bisa berakhir di jalur pertumbuhan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan "alami" atau optimal.
 - c. Fleksibilitas Faktor Produksi: Model ini mengasumsikan bahwa ada sedikit substitusi antara modal dan tenaga kerja, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi nyata di mana teknologi dan inovasi dapat mengubah kebutuhan akan modal relatif terhadap tenaga kerja.
- Meskipun memiliki keterbatasan, model Harrod-Domar tetap menjadi dasar penting dalam teori pertumbuhan ekonomi dan telah membantu membentuk pemahaman tentang peran investasi dalam pembangunan ekonomi. Model ini juga membuka jalan bagi pengembangan teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya, termasuk model pertumbuhan Solow, yang mengatasi beberapa keterbatasan model Harrod-Domar.

3. Teori Pembangunan Dua Sektor

Teori pembangunan dua sektor yang dikemukakan oleh Sir Arthur Lewis pada tahun 1954, merupakan salah satu konsep paling berpengaruh dalam ekonomi pembangunan. Model Dua Sektor Lewis menggambarkan transisi tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri) dan bagaimana proses ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini berfokus pada ide bahwa sektor tradisional memiliki kelebihan tenaga kerja dengan produktivitas marginal rendah atau nol, sedangkan sektor modern menawarkan upah yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar karena penerapan teknologi dan kapital.

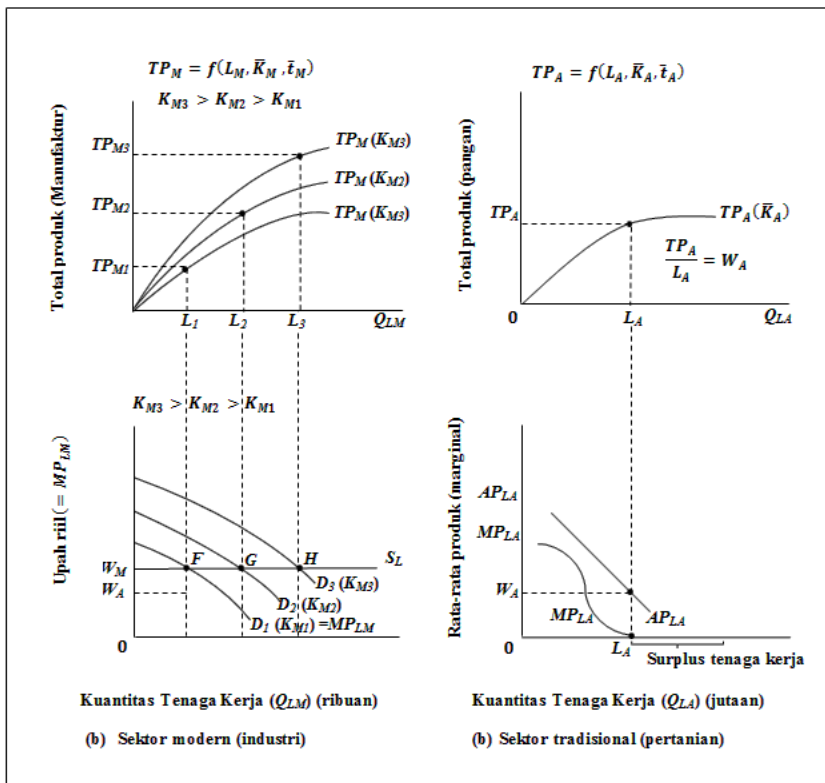
- a. Sektor Tradisional: Sektor ini terutama agraris, dicirikan oleh produktivitas rendah dan kelebihan tenaga kerja. Lewis mengasumsikan bahwa sektor ini memiliki "pasokan tenaga kerja yang tak terbatas", artinya tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa mempengaruhi output sektor tradisional. Oleh karena itu produktivitas marginal tenaga kerja sangat rendah, dan dalam beberapa kasus, bisa dianggap mendekati nol. Tenaga kerja bisa

dipindahkan dari sektor ini ke sektor modern tanpa mempengaruhi output sektor tradisional secara signifikan.

- b. Sektor Modern: Sektor ini adalah industri dan layanan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan menggunakan teknologi lebih maju. Sektor ini dapat berkembang dengan menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional, meningkatkan investasi, dan dengan demikian meningkatkan output keseluruhan ekonomi. Upah di sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor tradisional, sehingga menarik migrasi tenaga kerja. Keuntungan yang dihasilkan dalam sektor ini direinvestasikan untuk memperluas produksi, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Terdapat empat point yang dapat menjadi landasan dalam memahami proses pembangunan menurut Lewis:

- a. Transfer Tenaga Kerja: Lewis mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dengan transfer tenaga kerja dari sektor tradisional, di mana margin produktivitasnya rendah atau nol, ke sektor modern, yang menawarkan produktivitas dan upah yang lebih tinggi. Transfer ini tidak akan mengurangi output agraris karena adanya kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional.
- b. Reinvestasi Keuntungan: Di sektor modern, profit yang dihasilkan dari peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dipindahkan harus direinvestasikan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan teknologi produksi yang lebih efisien. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Penurunan Kelebihan Tenaga Kerja: Seiring waktu, penyerapan tenaga kerja oleh sektor modern akan mengurangi kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional. Ketika kelebihan tenaga kerja berkurang, upah di sektor tradisional akan mulai naik.
- d. Keseimbangan Baru: Akhirnya, ekonomi akan mencapai titik di mana tidak ada lagi kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional. Pada titik ini, pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada peningkatan produktivitas di kedua sektor melalui inovasi dan investasi dalam modal manusia serta teknologi.



Gambar 1. 1 Model Pembangunan Dua Sektor Lewis

Sumber: (Todaro & Smith, 2020)

Teori Lewis telah digunakan untuk menjelaskan proses industrialisasi di banyak negara berkembang dan memberikan dasar bagi strategi pembangunan yang menekankan pentingnya investasi di sektor industri. Namun, teori ini juga menghadapi kritik, termasuk:

- Pengabaian Peran Sektor Jasa: Teori ini terutama fokus pada industri sebagai penggerak pertumbuhan, sementara sektor jasa yang berkembang dapat juga memainkan peran kritis dalam ekonomi modern.
- Pengabaian Ketidaksetaraan: Lewis menganggap upah di sektor modern akan naik secara merata seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam prakteknya, pertumbuhan seringkali disertai dengan peningkatan ketidaksetaraan.

- c. Realitas Pasar Tenaga Kerja: Asumsi tentang "pasokan tenaga kerja tak terbatas" dari sektor tradisional mungkin tidak selalu berlaku, terutama di negara-negara dimana sektor tradisional sudah cukup efisien atau di mana migrasi tenaga kerja terbatas oleh faktor sosial atau geografis.

Meskipun menghadapi kritik, teori Lewis tetap menjadi kerangka kerja penting dalam studi pembangunan ekonomi, memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat mengalihkan sumber dayanya untuk

4. Model Ketergantungan Neokolonial

Model ketergantungan neokolonial merujuk pada teori ketergantungan yang berkembang dalam konteks studi pembangunan internasional selama tahun 1960-an dan 1970-an. Teori ini berfokus pada dinamika hubungan antara negara-negara maju (sering disebut sebagai Pusat atau Metropolis) dan negara-negara berkembang (disebut Periferi), mengusulkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini mempertahankan dan memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Ini sering dikaitkan dengan pengaruh neokolonialisme, di mana kontrol ekonomi dan politik secara tidak langsung dilanjutkan oleh negara-negara bekas kolonial dan kekuatan imperial baru melalui cara ekonomi, politik, dan budaya, daripada melalui pemerintahan kolonial langsung. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari model ketergantungan neokolonial:

- a. Struktur Ekonomi yang Tidak Merata. Teori ketergantungan menyoroti bagaimana negara-negara periferi terintegrasi ke dalam ekonomi dunia sebagai pemasok bahan mentah dan pasar untuk barang-barang jadi dan teknologi dari negara-negara pusat. Ini menciptakan struktur ekonomi global yang tidak merata, di mana negara-negara periferi terus-menerus berada dalam posisi yang lemah.
- b. Pengaruh Eksternal dalam Pembangunan. Menurut model ini, kebijakan dan kondisi ekonomi di negara-negara periferi sering kali ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan politik negara-negara pusat serta korporasi multinasional. Ini bisa termasuk investasi asing langsung, pinjaman, dan bantuan ekonomi yang menyertakan kondisi yang menguntungkan bagi donor atau investor.

- c. Transfer Keuntungan ke Luar. Eksploitasi sumber daya di negara-negara periferi dan dominasi pasar oleh perusahaan multinasional sering kali mengarah pada aliran kekayaan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, memperdalam ketidaksetaraan global.
- d. Ketergantungan Teknologi. Negara-negara periferi sering kali bergantung pada teknologi dari negara-negara pusat, membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan industri sendiri dan memperkuat ketergantungan ekonomi.
- e. Pembatasan pada Pembangunan Otonom. Model ketergantungan neokolonial mengemukakan bahwa struktur ekonomi global dan hubungan politik membatasi kemampuan negara-negara periferi untuk mengambil jalur pembangunan yang independen dan mandiri, memperdalam ketergantungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi sejati.

Meskipun teori ketergantungan memberikan wawasan penting mengenai dinamika ketidaksetaraan global dan efek neokolonialisme, ia juga menghadapi kritik. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori ini terlalu menyederhanakan hubungan kompleks antara negara-negara dan tidak cukup mempertimbangkan kemampuan agen lokal untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi mereka sendiri. Selain itu, beberapa negara berkembang telah menunjukkan kemampuan untuk mengurangi ketergantungan mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui strategi seperti diversifikasi ekonomi dan pembangunan industri domestik.

5. Model Paradigma Palsu

Model paradigma palsu merujuk pada kritik terhadap cara pandang atau teori-teori dalam ekonomi dan pembangunan yang dianggap menyajikan pemahaman yang salah atau menyesatkan mengenai realitas ekonomi negara-negara berkembang. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan kritik terhadap neoliberalisme dan teori-teori konvensional lainnya yang diduga tidak memperhitungkan kompleksitas dan keunikan kondisi lokal, sekaligus gagal mengakui keberadaan struktur kekuasaan global yang tidak merata. Paradigma palsu cenderung menawarkan solusi yang terlalu umum dan tidak efektif, atau bahkan merugikan negara-negara yang berupaya untuk berkembang dan mengatasi ketidaksetaraan. Beberapa ciri dari paradigma palsu: 1) **Universalisme**, menerapkan teori

dan model ekonomi yang sama ke semua negara tanpa mempertimbangkan perbedaan sejarah, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Ini sering kali mengabaikan faktor lokal dan kontekstual yang dapat mempengaruhi hasil dari penerapan kebijakan tertentu. **2) Penekanan pada Pasar Bebas**, memfokuskan pada deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi sebagai solusi universal untuk pertumbuhan dan pembangunan, tanpa memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul dari kebijakan semacam itu. **3) Ketergantungan pada Investasi Asing**, mendorong investasi asing langsung (FDI) sebagai motor utama pembangunan, mengabaikan potensi negatif seperti eksploitasi sumber daya lokal, aliran keuntungan keluar negeri, dan dampak terhadap industri lokal. **4) Pengabaian Struktur Kekuasaan Global**, tidak mengakui bagaimana sistem ekonomi global dan hubungan neokolonial mempengaruhi pembangunan ekonomi dan politik negara-negara berkembang, termasuk bagaimana praktik perdagangan internasional dan utang luar negeri dapat memperkuat ketidaksetaraan. **5) Mengabaikan Ketidaksetaraan Sosial**, kurangnya fokus pada distribusi kekayaan dan pendapatan di dalam negara, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang meningkat dan menghambat pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Kritikus paradigma palsu menegaskan bahwa pendekatan ini seringkali menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya tidak efektif tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Mereka menyerukan pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan pengembangan kapasitas lokal, serta pengakuan atas pentingnya negara dalam mengatur ekonomi dan melindungi kepentingan publik.

Untuk menggantikan paradigma palsu, para kritikus mendorong penggunaan teori dan model yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal, yang menekankan pada:

- a. Pengembangan industri lokal dan perlindungan sektor-sektor strategis.
- b. Kebijakan perdagangan yang adil dan mempertimbangkan asimetri kekuatan ekonomi global.

- c. Investasi dalam infrastruktur sosial dan ekonomi untuk mendorong pembangunan yang mandiri.
- d. Pendekatan yang lebih holistik dan multidisiplin dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Model paradigma palsu menjadi penting dalam diskursus pembangunan karena menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap asumsi yang mendasari kebijakan dan praktik pembangunan, serta mempromosikan pencarian solusi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi negara-negara berkembang.

6. **Big Push Theory**

Teori Dorongan Besar (*Big Push Theory*) merupakan konsep dalam ekonomi pembangunan yang pertama kali diuraikan secara luas oleh ekonom Rosenstein-Rodan pada tahun 1943. Teori ini berpendapat bahwa dalam rangka untuk mengatasi perangkap kemiskinan dan memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, diperlukan investasi besar-besaran secara simultan di berbagai sektor ekonomi. Inti dari teori Dorongan Besar adalah bahwa investasi terkoordinasi dan komprehensif, yang mencakup infrastruktur, industri, dan layanan, dapat menciptakan sinergi yang mendorong ekonomi keluar dari stagnasi dan memulai siklus pertumbuhan positif (Rosenstein-Rodan, 1961).

Teori ini menekankan pentingnya koordinasi investasi di berbagai sektor untuk menghindari kegagalan karena efek eksternalitas. Rosenstein-Rodan berargumen bahwa investasi di satu sektor saja tidak akan cukup untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena kekurangan permintaan agregat. Sebagai contoh, pembangunan pabrik akan lebih efektif jika disertai dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan permintaan di sektor lain.

Negara-negara berkembang seringkali menghadapi apa yang disebut sebagai "hambatan awal" terhadap pembangunan, termasuk infrastruktur yang buruk, kurangnya modal, dan pasar domestik yang terbatas. Teori Dorongan Besar berpendapat bahwa hanya melalui investasi skala besar dan terpadu yang dapat mengatasi hambatan ini secara efektif.

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah penciptaan pasar melalui peningkatan pendapatan dan permintaan. Investasi yang besar dan

serentak di berbagai sektor akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi, yang pada gilirannya menciptakan pasar untuk produk dan jasa baru, mendorong lebih banyak investasi dan pertumbuhan.

Teori Dorongan Besar seringkali mengimplikasikan peran aktif negara dalam perencanaan dan koordinasi investasi. Ini termasuk alokasi sumber daya, penyediaan insentif untuk investasi swasta, dan pembangunan infrastruktur dasar. Negara dianggap memiliki peran kunci dalam mengatasi kegagalan pasar dan memastikan bahwa investasi dilakukan secara efisien dan efektif.

Meskipun teori Dorongan Besar memberikan kerangka kerja yang menarik untuk pembangunan ekonomi, ia juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan, antara lain: Investasi besar-besaran yang tidak sesuai dengan kapasitas absorpsi ekonomi dapat menyebabkan overkapasitas dan inefisiensi. Selain itu peran besar yang diberikan kepada negara dalam perencanaan ekonomi dapat menyebabkan masalah seperti korupsi, inefisiensi, dan alokasi sumber daya yang salah. Pada akhirnya kesuksesan teori Dorongan Besar bergantung pada kemampuan untuk memprediksi dan merencanakan dengan akurat kebutuhan ekonomi masa depan, yang sering kali sulit dilakukan.

Namun demikian, Pada praktiknya, teori Dorongan Besar telah menginspirasi berbagai program pembangunan, termasuk rencana lima tahun di beberapa negara berkembang dan strategi industrialisasi yang mencoba untuk meniru model pertumbuhan ekonomi negara maju. Meskipun hasilnya bervariasi, teori ini tetap menjadi bagian penting dari diskusi mengenai strategi pembangunan ekonomi.

7. Teori Cincin O

Teori Cincin O tentang Pembangunan Ekonomi, yang juga dikenal sebagai "Teori Pertumbuhan Terkonsentrasi" atau "*Growth Pole Theory*", pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Prancis, François Perroux, pada tahun 1950-an. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom lain seperti Gunnar Myrdal. Teori ini berfokus pada ide bahwa pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah suatu negara atau di antara negara-negara, tetapi cenderung terkonsentrasi di sekitar beberapa "cicin pertumbuhan" atau "pol pertumbuhan" tertentu. Pol pertumbuhan ini merupakan pusat ekonomi yang dinamis, di mana aktivitas ekonomi terkonsentrasi dan dari situ

memancar efek stimulasi ke daerah sekitarnya. Terdapat empat konsep dasar dari teori ini yaitu:

- a. Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*): Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau sektor ekonomi yang memiliki kapasitas inovasi tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lain melalui efek pengganda dan linkage industri. Pusat-pusat ini sering kali berupa kota besar, kluster industri, atau sektor ekonomi tertentu yang memiliki keunggulan kompetitif.
- b. Efek Pengganda (*Multiplier Effect*): Aktivitas ekonomi yang terjadi di pusat pertumbuhan menciptakan permintaan tambahan yang memicu pertumbuhan di industri-industri terkait atau pendukung. Efek pengganda ini merujuk pada peningkatan output, pendapatan, dan pekerjaan yang terjadi sebagai hasil dari investasi awal.
- c. Keterkaitan Industri (*Industrial Linkages*): Pusat pertumbuhan menciptakan jaringan yang saling terkait antara industri yang berbeda, baik melalui pasokan bahan baku (keterkaitan ke belakang) maupun distribusi produk (keterkaitan ke depan). Keterkaitan ini memperkuat keterkaitan ekonomi dan mendorong diversifikasi ekonomi.
- d. Polarisasi dan Penyebaran: Teori ini mengakui adanya proses polarisasi, di mana pusat-pusat pertumbuhan menarik sumber daya dari daerah sekitarnya, seringkali mengakibatkan ketimpangan regional. Namun, pada tahap tertentu, pertumbuhan akan mulai menyebar ke daerah-daerah sekitarnya, mengurangi ketimpangan tersebut.

Michael Kremer, seorang ekonom pemenang Hadiah Nobel, memperkenalkan konsep yang berbeda dari "Teori Cincin O" tradisional yang dikaitkan dengan François Perroux dan Gunnar Myrdal. Kremer, dalam karyanya, tidak secara langsung mengembangkan "Teori Cincin O" tentang pembangunan ekonomi. Namun, dia membuat kontribusi signifikan pada teori pembangunan ekonomi melalui penelitian tentang dinamika populasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu ide paling terkenal dari Kremer adalah "Teori Pertumbuhan Populasi dan Teknologi", yang mungkin menjadi bingung dengan konsep "Teori Cincin O" karena kedua teori tersebut berbicara tentang pertumbuhan dan distribusi tidak merata.

Teori pertumbuhan populasi dan teknologi Michael Kremer berfokus pada bagaimana populasi dan teknologi berinteraksi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah manusia. Kremer berargumen bahwa sepanjang sejarah, pertumbuhan populasi telah mendorong inovasi teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas untuk mempertahankan populasi yang lebih besar. Ini menciptakan siklus positif di mana pertumbuhan populasi memicu inovasi, yang kemudian memungkinkan dukungan untuk populasi yang lebih besar, yang kemudian mendorong lebih banyak inovasi poin utama dari Teori Kremer:

- a. Pertumbuhan Populasi Sebagai Pemicu Inovasi. Kremer menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah penemu potensial dan dengan demikian, meningkatkan kemungkinan inovasi teknologi.
- b. Skala Ekonomi dan Teknologi. Dengan populasi yang lebih besar, ekonomi dapat mencapai skala yang lebih besar, yang memfasilitasi spesialisasi dan pertukaran, mendorong lebih lanjut inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Pertumbuhan Teknologi adalah Kunci Pertumbuhan Ekonomi. Dalam jangka panjang, inovasi teknologi dan penyebarannya menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi, lebih daripada akumulasi modal atau tenaga kerja.

Implikasi dari teori Kremer adalah bahwa kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pertukaran ide secara global dapat mempercepat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung peningkatan populasi terdidik dan terkoneksi, serta lingkungan yang kondusif untuk penemuan dan inovasi. Secara keseluruhan, meskipun Michael Kremer tidak secara langsung mengembangkan "Teori Cincin O" tentang pembangunan ekonomi, kontribusinya memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pertumbuhan populasi dan teknologi dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah manusia. Teori Cincin O telah dikritik karena beberapa alasan:

- a. Ketimpangan Regional. Fokus pada pusat-pusat pertumbuhan bisa meningkatkan ketimpangan antar wilayah, karena daerah yang tidak terpilih sebagai pusat pertumbuhan mungkin mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran ekonomi.

- b. Peran Negara. Terdapat perdebatan mengenai seberapa aktif peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam menentukan dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan.
- c. Pertumbuhan Menyebar (*Spread Effects*) vs. *Backwash Effects*. Meskipun teori ini mengakui potensi penyebaran pertumbuhan ke daerah sekitarnya, efek backwash, di mana pusat pertumbuhan sebenarnya menarik sumber daya dari daerah sekitarnya, mungkin mengakibatkan hasil yang berlawanan.

Dalam praktiknya, teori ini telah digunakan untuk memandu kebijakan pembangunan regional di banyak negara, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi di pusat-pusat pertumbuhan, dan penguatan linkage industri. Ini telah mendorong pembangunan kluster industri, taman teknologi, dan zona ekonomi khusus sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Meskipun menghadapi kritik, teori Cincin O tetap menjadi konsep penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan regional, memberikan wawasan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diinisiasi dan diperkuat melalui strategi terfokus pada pol pertumbuhan.

BAB 2 CIRI NEGARA BERKEMBANG

A. NEGARA BERKEMBANG

Istilah "negara berkembang" merujuk pada negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi dan pembangunan sosial yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Ciri utama dari negara berkembang meliputi pendapatan per kapita yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang kurang berkembang, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah. Ekonomi di negara berkembang sering kali didominasi oleh sektor pertanian, dengan sektor industri dan jasa yang kurang berkembang. Selain itu, mereka mungkin memiliki sistem pemerintahan yang kurang stabil, dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi dan tata kelola yang lemah.

Negara berkembang juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi dunia. Dalam perdagangan internasional, mereka sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang harganya fluktuatif dan rentan terhadap syok eksternal. Ini membuat negara-negara ini lebih rentan terhadap krisis ekonomi global. Selain itu, mereka sering kali mengalami kesulitan untuk menarik investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembangunan, terutama karena persepsi risiko yang lebih tinggi dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan negara berkembang adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan penanganan masalah lingkungan. Untuk mencapai hal ini, negara berkembang membutuhkan investasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi. Selain itu, penting bagi negara-negara

ini untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil memastikan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Kerjasama internasional dan dukungan dari negara maju, termasuk transfer teknologi dan bantuan keuangan, juga kritis untuk membantu negara berkembang mengatasi berbagai tantangan ini.

1. Pendapatan Per Kapita yang Rendah

Pendapatan per kapita merupakan indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan individu dalam suatu negara, memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator ini sering digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antarnegara dan untuk mengidentifikasi negara yang berkembang dan negara maju. Negara berkembang umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju, yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat kemakmuran ekonomi dan akses terhadap sumber daya.

Pendapatan per kapita yang lebih rendah di negara berkembang sering dikaitkan dengan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Ini termasuk akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, infrastruktur yang kurang memadai, serta ketidakcukupan lapangan kerja berkualitas tinggi. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan peluang ekonomi juga berperan dalam membatasi kemampuan negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Ini mengakibatkan keterbatasan dalam hal peningkatan standar hidup dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Selain itu, rendahnya pendapatan per kapita di negara berkembang juga mencerminkan struktur ekonomi yang berorientasi pada sektor primer dengan nilai tambah rendah, seperti pertanian dan pertambangan. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan fluktuasi harga global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pendapatan nasional. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, negara berkembang perlu mengalihkan fokusnya ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti manufaktur dan jasa, serta meningkatkan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan yang luas dan mendalam di negara berkembang merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Banyak penduduk di negara-negara ini hidup di bawah garis kemiskinan, yang

menandakan kesulitan ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ini seringkali bukan hanya masalah kekurangan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam, termasuk akses yang terbatas pada sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar.

Kemiskinan di negara berkembang sering kali diperburuk oleh faktor struktural dan kebijakan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, korupsi, kebijakan yang tidak efektif, dan kurangnya investasi dalam sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Faktor eksternal seperti utang luar negeri yang besar dan fluktuasi harga komoditas juga dapat memperparah kondisi kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendalam ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Ini termasuk pembangunan ekonomi yang inklusif, reformasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, investasi dalam infrastruktur sosial, dan program yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan. Dibutuhkan juga kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mendukung negara berkembang dalam upaya mereka mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

3. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat

Negara berkembang seringkali mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang menyajikan berbagai tantangan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tekanan besar pada sumber daya dan infrastruktur yang sudah ada. Misalnya, sistem pendidikan dan layanan kesehatan dapat menjadi terbebani dengan kebutuhan yang meningkat secara dramatis, sementara ketersediaan pekerjaan yang layak menjadi lebih terbatas. Ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup secara langsung tetapi juga memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi sering kali menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, yang bisa berdampak negatif pada lingkungan. Misalnya, permintaan yang meningkat untuk perumahan, makanan, air, dan energi seringkali mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan penurunan

kualitas sumber daya alam lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga mengurangi kapasitas negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya di masa depan.

Untuk mengatasi tekanan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, negara-negara berkembang memerlukan strategi yang komprehensif. Strategi tersebut mungkin mencakup investasi dalam perencanaan keluarga, pendidikan, terutama pendidikan perempuan, dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur dan layanan publik. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

4. Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Dalam banyak negara berkembang, ekonomi seringkali didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini biasanya menjadi sumber utama pekerjaan dan pendapatan bagi sebagian besar populasi. Pertanian tradisional sering kali mengandalkan metode yang intensif tenaga kerja dan kurang efisien, yang menghasilkan produktivitas yang relatif rendah. Ketergantungan yang berlebihan pada pertanian juga membuat ekonomi negara-negara ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kondisi cuaca ekstrem, seperti kekeringan atau banjir.

Di sisi lain, sektor industri dan jasa di negara berkembang cenderung kurang berkembang. Ketidakcukupan infrastruktur, investasi terbatas, kekurangan tenaga kerja terampil, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dapat menjadi penghalang utama dalam perkembangan sektor-sektor ini. Sektor industri yang kurang berkembang berarti kurangnya diversifikasi ekonomi dan peluang pekerjaan di luar pertanian, yang bisa membatasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan, negara berkembang perlu memfokuskan pada diversifikasi ekonomi mereka. Ini termasuk pengembangan sektor industri dan jasa melalui investasi dalam teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Pendekatan ini bisa membantu negara-negara ini mengurangi ketergantungan mereka pada pertanian dan memperluas peluang ekonomi untuk penduduknya.

5. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesehatan

Di banyak negara berkembang, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan seringkali sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah seperti tingkat buta huruf yang tinggi dan harapan hidup yang lebih rendah. Ketidaktersediaan atau kualitas pendidikan yang rendah berarti bahwa banyak anak-anak dan remaja tidak mendapatkan keterampilan dasar atau pendidikan lanjutan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kesempatan hidup mereka. Ini juga berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk berkontribusi secara produktif dalam ekonomi dan masyarakat.

Dari sisi kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas menyebabkan banyak masalah kesehatan yang tidak diatasi dengan baik. Ini termasuk tingkat mortalitas ibu dan anak yang tinggi, serta prevalensi penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi atau perawatan dasar. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang praktik kesehatan yang baik dan akses terhadap air bersih dan sanitasi memperburuk situasi kesehatan.

Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana kesehatan dan pendidikan yang buruk memperburuk kemiskinan dan sebaliknya. Pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai menghambat kemampuan individu untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan mengurangi produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan langkah penting dalam upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di negara berkembang.

6. Infrastruktur yang Kurang Berkembang

Akses terbatas pada air bersih, sanitasi, dan infrastruktur transportasi merupakan masalah serius di banyak negara berkembang. Kekurangan akses ke air bersih dan sanitasi yang layak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Tanpa air bersih, risiko penyebaran penyakit seperti kolera dan diare meningkat, yang berdampak pada tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat. Sanitasi yang buruk juga berkontribusi pada masalah kesehatan dan polusi lingkungan.

Infrastruktur transportasi yang tidak memadai juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Transportasi yang efisien diperlukan untuk akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jika jalan dan

transportasi umum tidak memadai atau tidak aman, ini dapat membatasi mobilitas masyarakat, menghambat perdagangan dan akses ke peluang.

Karena itu, peningkatan akses pada air bersih, sanitasi, dan infrastruktur transportasi adalah kunci untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam area ini dapat memiliki dampak positif yang besar pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

7. Tingkat Pengangguran dan Pekerjaan Informal yang Tinggi

Negara berkembang sering menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, yang merupakan tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Banyak individu yang bekerja di negara-negara ini sering kali terlibat dalam sektor informal, yang seringkali tidak diatur dan tidak memberikan keamanan pekerjaan atau manfaat yang sama seperti pekerjaan formal. Pekerjaan informal ini sering kali kurang stabil, dengan penghasilan yang tidak teratur dan tidak ada perlindungan seperti asuransi kesehatan atau pensiun. Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memperburuk masalah kemiskinan. Oleh karena itu, mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan pengembangan sektor formal menjadi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di negara berkembang.

Negara berkembang juga sering berjuang dengan masalah politik seperti stabilitas pemerintahan, korupsi, dan konflik. Setiap negara memiliki tantangan dan keadaan uniknya, dan oleh karena itu, pembangunan di negara berkembang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing.

Bagaimana dengan Negara maju? negara maju memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakannya dari negara berkembang. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aspek-aspek penting yang umumnya menggambarkan negara maju:

- a. **Ekonomi yang Tinggi dan Stabil:** Negara maju memiliki ekonomi yang stabil dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang tinggi. Ekonomi mereka sering didominasi oleh sektor industri dan jasa, dengan teknologi canggih dan tingkat produktivitas yang tinggi.
- b. **Pendapatan Per Kapita yang Tinggi:** Penduduk di negara maju umumnya menikmati standar hidup yang tinggi dengan pendapatan

per kapita yang tinggi, yang memungkinkan akses yang lebih baik ke barang dan jasa.

- c. **Infrastruktur yang Berkembang:** Negara maju memiliki infrastruktur yang sangat berkembang, termasuk sistem transportasi, komunikasi, dan energi yang efisien dan modern.
- d. **Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas:** Tingkat buta huruf yang rendah dan akses ke pendidikan yang baik merupakan ciri khas negara maju. Mereka juga memiliki sistem perawatan kesehatan yang efisien dan dapat diakses oleh sebagian besar penduduk.
- e. **Kualitas Hidup yang Tinggi:** Indikator kualitas hidup, seperti harapan hidup, tingkat kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial, umumnya tinggi di negara maju.
- f. **Pemerintahan yang Stabil dan Efisien:** Negara maju biasanya memiliki sistem pemerintahan yang stabil, efisien, dan relatif bebas dari korupsi. Sistem hukum mereka kuat dan dihormati, dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
- g. **Teknologi Tinggi dan Inovasi:** Negara maju sering menjadi pemimpin dalam teknologi dan inovasi, dengan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan.
- h. **Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:** Meskipun negara maju berkontribusi besar terhadap perubahan iklim secara historis, banyak dari mereka sekarang memimpin upaya global dalam pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
- i. **Partisipasi Aktif dalam Politik Global:** Negara maju sering memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik global dan ekonomi internasional, dan mereka aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, NATO, WTO, dan lainnya.
- j. **Pasar Kerja yang Maju dan Diversifikasi:** Negara maju memiliki pasar kerja yang maju dengan tingkat pengangguran yang rendah dan berbagai macam peluang kerja di berbagai sektor, termasuk teknologi tinggi, pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan.

Negara maju sering dihadapkan pada tantangan unik mereka sendiri, seperti penuaan penduduk, keberlanjutan jaminan sosial, integrasi imigran, dan menanggapi perubahan iklim. Mereka terus beradaptasi dan mengembangkan kebijakan untuk mengatasi isu-isu ini dalam konteks global yang berubah.

B. KARAKTERISTIK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Untuk menjelaskan lebih rinci tentang negara berkembang, kita bisa mempertimbangkan beberapa aspek yang menentukan karakteristik dan tantangan yang mereka hadapi:

1. Ekonomi

Negara berkembang sering kali bergantung pada sektor primer seperti pertanian, pertambangan, dan pengumpulan sumber daya alam. Sektor ini umumnya menyumbang bagian besar dari ekonomi mereka. Namun, fokus pada sektor primer ini memiliki kelemahan. Pertama, ini berarti negara berkembang sering kali mengandalkan ekspor komoditas tertentu. Ketergantungan ini menjadikan ekonomi mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Perubahan harga komoditas bisa memiliki dampak besar pada ekonomi mereka, terutama jika mereka mengandalkan satu atau dua ekspor utama.

Selain itu, sektor industri dan teknologi di negara berkembang sering kali kurang berkembang. Tanpa sektor industri yang kuat, negara-negara ini menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurangnya perkembangan teknologi juga berarti bahwa negara-negara ini mungkin ketinggalan dalam revolusi industri modern, yang lebih mengutamakan inovasi dan efisiensi.

Untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, negara berkembang harus berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi mereka. Ini termasuk investasi dalam pengembangan sektor industri dan teknologi, yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Diversifikasi ini juga penting untuk memperluas basis ekonomi negara dan menciptakan ekonomi yang lebih seimbang.

2. Pendapatan dan Distribusi Kekayaan

Ketimpangan ekonomi di banyak negara berkembang merupakan masalah yang kompleks dan menonjol. Di satu sisi, kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin mengalami kemakmuran yang besar, seringkali dikaitkan dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, sumber daya, dan peluang ekonomi. Di sisi lain, sebagian besar populasi sering hidup di bawah garis kemiskinan, berjuang untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka. Perbedaan mencolok ini dalam distribusi kekayaan dan pendapatan sering mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat.

Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah sistem pajak yang tidak efisien dan masalah korupsi yang berakar dalam. Sistem pajak yang tidak efisien sering gagal menangkap pendapatan dari kelompok-kelompok yang paling kaya, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk investasi publik. Sementara itu, korupsi dapat mengarah pada pengalokasian sumber daya yang tidak adil dan tidak efisien, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan sosial malah dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini, diperlukan reformasi dalam kebijakan publik dan pemerintahan. Kebijakan harus dirancang untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi ekonomi, termasuk reformasi pajak yang lebih adil dan langkah-langkah yang efektif untuk memerangi korupsi. Dengan mendorong sistem yang lebih adil dan transparan, negara-negara berkembang dapat mengejar pembangunan yang lebih seimbang dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

3. Kesehatan dan Pendidikan

Di banyak negara berkembang, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sering kali terbatas, terutama di daerah pedesaan. Ketidaktersediaan layanan ini menyebabkan masalah sosial dan kesehatan yang serius. Misalnya, tingkat buta huruf yang tinggi dapat muncul akibat kurangnya fasilitas pendidikan atau guru yang berkualitas. Hal ini menghambat kemampuan penduduk untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang penting untuk pembangunan pribadi dan ekonomi.

Di sisi kesehatan, fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya akses ke layanan kesehatan berkontribusi pada kondisi kesehatan yang buruk. Masalah seperti gizi buruk, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya seringkali lebih lazim di negara berkembang, terutama di daerah yang kurang memiliki akses ke perawatan kesehatan preventif dan pengobatan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga menurunkan produktivitas dan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan menjadi sangat penting. Memperbaiki akses ini bisa membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, negara berkembang dapat melangkah lebih jauh menuju pertumbuhan dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

4. Infrastruktur

Banyak negara berkembang menghadapi masalah infrastruktur yang kurang memadai, termasuk jalan, transportasi, sanitasi, dan akses ke air bersih. Infrastruktur yang tidak memadai ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dengan membatasi akses ke layanan dasar dan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, jalan yang buruk dan transportasi yang tidak efisien dapat menghambat mobilitas dan akses ke pasar, pekerjaan, dan layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, kurangnya sanitasi yang layak dan akses ke air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan yang signifikan, mengurangi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban perawatan kesehatan.

Dari perspektif ekonomi, infrastruktur yang tidak memadai menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kesulitan dalam transportasi dan logistik menghambat perdagangan dan distribusi barang, sementara kurangnya fasilitas sanitasi dan air bersih menurunkan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang efektif dan inklusif menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan negara-negara berkembang.

5. Pertumbuhan Penduduk

Negara berkembang sering mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menimbulkan berbagai tantangan. Pertumbuhan cepat ini meningkatkan tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permintaan terhadap air, makanan, dan sumber daya alam lainnya meningkat, yang bisa menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan layanan publik lainnya sering

kali menjadi terbebani di bawah tekanan populasi yang bertambah, yang mempersulit penyediaan layanan yang efektif. Akhirnya, pertumbuhan penduduk yang cepat juga meningkatkan permintaan terhadap pekerjaan, menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja yang cukup, terutama untuk generasi muda.

6. Stabilitas Politik dan Tata Kelola

Isu-isu seperti korupsi, kurangnya transparansi, konflik politik, dan lemahnya lembaga negara memang sering kali menjadi tantangan utama bagi negara berkembang. Korupsi, sebagai contoh, dapat sangat merusak perekonomian sebuah negara. Korupsi menimbulkan biaya tidak langsung yang besar melalui pengalihan sumber daya yang seharusnya untuk pembangunan umum menjadi keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya mengurangi efisiensi alokasi sumber daya tetapi juga menurunkan kepercayaan investor. Ketidakpercayaan ini datang dari risiko yang lebih tinggi dan kurangnya kepastian dalam melakukan bisnis, yang pada gilirannya bisa mengurangi investasi asing langsung dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.

Selanjutnya, kurangnya transparansi sering kali berkorelasi dengan korupsi dan dapat memperburuk kondisi ekonomi suatu negara. Transparansi yang rendah berarti kurangnya informasi yang tersedia bagi publik mengenai kegiatan pemerintah dan penggunaan dana publik, yang membuat sulit untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak efisien dan penyelewengan dana, yang berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini juga membuat sulit bagi investor untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap risiko dan peluang, sehingga dapat mengurangi aliran investasi ke negara tersebut.

Konflik politik dan lemahnya lembaga negara juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Konflik politik dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi normal. Ini sering kali mengakibatkan pengurangan investasi asing dan domestik, serta penerbangan modal. Di sisi lain, lembaga negara yang lemah dan tidak efektif sering kali gagal menyediakan layanan dasar, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak sipil, yang semuanya

merupakan prasyarat penting untuk pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Lemahnya lembaga negara dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Kesimpulannya, isu-isu seperti korupsi, kurangnya transparansi, konflik politik, dan lemahnya lembaga negara memang memberikan dampak negatif yang signifikan pada negara berkembang. Solusi untuk masalah-masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan tata kelola, penguatan lembaga, dan peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik. Stabilitas politik dan pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

7. Ketergantungan Ekonomi

Negara berkembang seringkali bergantung pada bantuan internasional atau pinjaman dari institusi global seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Ketergantungan ini muncul karena banyak negara berkembang yang memiliki sumber daya domestik yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur penting, program kesehatan, pendidikan, dan inisiatif pembangunan lainnya. Pinjaman dan bantuan ini penting karena dapat membantu negara-negara ini mengatasi kesenjangan pendanaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pinjaman ini seringkali datang dengan serangkaian kondisi yang harus dipenuhi, yang bisa mempengaruhi kebijakan dan prioritas Nasional.

Ketergantungan pada bantuan dan pinjaman internasional ini dapat membuat negara berkembang rentan terhadap tekanan ekonomi eksternal. Kondisi yang melekat pada pinjaman ini seringkali mengharuskan negara penerima untuk menerapkan kebijakan tertentu, seperti restrukturisasi ekonomi, liberalisasi pasar, atau pengurangan pengeluaran publik. Meskipun tujuannya adalah untuk memperbaiki stabilitas dan efisiensi ekonomi, kebijakan ini dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti pengurangan subsidi untuk barang kebutuhan pokok atau pengurangan pengeluaran untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali menjadi yang paling terdampak.

Selain itu, ketergantungan pada bantuan dan pinjaman asing juga bisa membatasi kedaulatan sebuah negara dalam menentukan kebijakannya sendiri. Pemerintah mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan kebijakannya untuk memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan oleh donor atau lembaga pemberi pinjaman, bahkan jika kebijakan tersebut tidak selaras dengan kebutuhan atau kepentingan domestiknya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, terutama jika kebijakan yang dipaksakan ini tidak populer di kalangan penduduk lokal. Juga, hal ini dapat menyebabkan siklus utang, di mana negara-negara meminjam lebih banyak untuk membayar utang sebelumnya, yang pada gilirannya memperburuk ketergantungan mereka pada bantuan dan pinjaman asing.

Dalam jangka panjang, untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dan pinjaman internasional, negara-negara berkembang harus fokus pada pembangunan kapasitas domestik, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan tata kelola. Ini termasuk membangun institusi yang kuat, memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pinjaman dan bantuan juga sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efektif untuk pembangunan berkelanjutan.

8. Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup

Negara berkembang sering kali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, sebagian besar karena kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari peristiwa cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan jangka panjang. Contohnya, ketika terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai, negara-negara ini sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan respons dan pemulihan yang cepat dan efektif. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem drainase yang buruk atau bangunan yang tidak tahan gempa, sering kali memperburuk dampak bencana tersebut. Selain itu, banyak negara berkembang memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sektor-sektor seperti pertanian, yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan.

Pencemaran dan degradasi lingkungan juga merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, terutama di kota-kota besar. Pertumbuhan

penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali sering kali menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Di kota-kota besar, emisi dari kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik berkontribusi terhadap pencemaran udara yang serius, yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Masalah pengelolaan limbah yang tidak memadai juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, merusak sumber daya alam dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan deforestasi dapat menyebabkan degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang berdampak negatif pada ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, negara berkembang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap iklim, seperti sistem drainase yang lebih baik dan bangunan yang tahan terhadap bencana alam. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan tanah, juga penting untuk mencegah degradasi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Di samping itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang isu-isu lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tindakan perlindungan lingkungan, sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Keterlibatan dan dukungan dari masyarakat internasional, termasuk transfer teknologi dan bantuan keuangan, juga sangat diperlukan untuk membantu negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

C. CONTOH KASUS NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Menurut klasifikasi Bank Dunia untuk tahun fiskal 2024 (1 Juli 2023 - 30 Juni 2024), negara-negara di seluruh dunia dikategorikan ke dalam empat kelompok pendapatan: rendah, menengah-bawah, menengah-atas, dan tinggi. Klasifikasi ini diperbarui setiap tahun berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita dari tahun kalender sebelumnya. Berikut adalah beberapa

contoh negara yang tergolong dalam kategori masing-masing (World Bank, 2022; Hamadeh et al., 2023):

1. Ekonomi Berpendapatan Rendah (\$1,135 atau kurang), beberapa contoh termasuk Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, dan Malawi.
2. Ekonomi Berpendapatan Menengah-Bawah (\$1,136 hingga \$4,465), Termasuk negara-negara seperti Angola, India, Kenya, Nepal, dan Nigeria.
3. Ekonomi Berpendapatan Menengah-Atas (\$4,466 hingga \$13,845), di antaranya adalah Argentina, China, Mesir, Indonesia, dan Afrika Selatan.
4. Ekonomi Berpendapatan Tinggi (\$13,846 atau lebih), Negara-negara seperti Australia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris.



Gambar 2. 1 Klasifikasi Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Negara-negara di Dunia Tahun 2024

BAB 3 FAKTOR PEMBANGUNAN

A. SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara. Beberapa alasan pentingnya sumber daya alam sebagai faktor pembangunan karena menjadi sumber pendapatan bagi perekonomian negara, sumber mata pencaharian masyarakat, sumber pengembangan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, pengembangan investasi, serta sumber kemandirian energi.

Sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan kayu memberikan pendapatan signifikan bagi banyak negara. Ekspor sumber daya alam menyediakan pendapatan signifikan dalam bentuk devisa yang sangat penting untuk perekonomian negara. Negara yang kaya sumber daya alam sering memiliki keuntungan kompetitif dalam perdagangan internasional. Pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk investasi di berbagai sektor lain dalam ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam menciptakan banyak lapangan kerja. Dari pertambangan hingga pertanian, sektor-sektor ini sering menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Industri yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan sering menjadi sumber pekerjaan utama di banyak wilayah. Sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan pekerjaan langsung dalam ekstraksi dan pengolahan sumber daya, tetapi juga pekerjaan tidak langsung di sektor terkait seperti transportasi dan pemasaran. Penciptaan lapangan kerja yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini

penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur ini penting untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya, memfasilitasi perdagangan, dan memperbaiki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur sering kali merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang.

Meskipun bergantung pada sumber daya alam dapat berisiko karena fluktuasi harga dan sumber daya yang terbatas, negara-negara dapat menggunakan pendapatan dari sumber daya alam untuk diversifikasi ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi risiko ketergantungan dengan menggunakan pendapatan dari sumber daya alam untuk mengembangkan sektor industri dan jasa. Dengan demikian akan membantu menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi untuk mendukung pertumbuhan sektor lain, seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Negara-negara dengan sumber daya alam yang kaya, seperti minyak atau gas, seringkali dapat mencapai kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan keamanan energi mereka. Kemandirian energi ini dapat meningkatkan keamanan nasional dan stabilitas ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap krisis energi global atau fluktuasi harga.

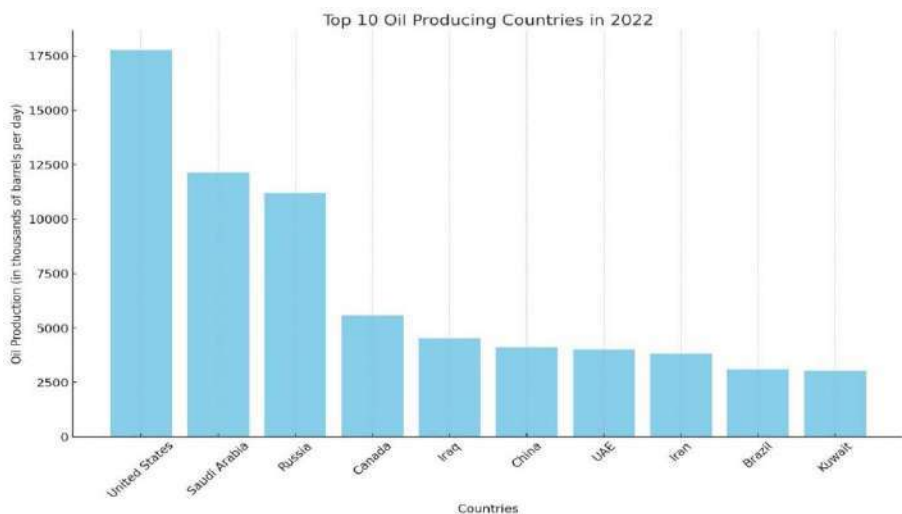
Pada bagian ini kita akan melihat beberapa sumber daya alam seperti berbagai jenis tambang (minyak bumi, gas, batu bara, dan nikel) dan sumber daya lahan yang menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian dan pembangunan sebuah negara.

1. Sumber Daya Alam Hasil Tambang

Minyak bumi

Sejumlah negara memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada produksi minyak, gas, dan mineral. Berdasarkan data dari beberapa sumber seperti *Visual Capitalist* dan *World Population Review* beberapa negara teratas dalam produksi minyak adalah Amerika Serikat dengan telah menjadi produsen minyak mentah terbesar di dunia sejak tahun 2018. Dengan produksi harian mencapai sekitar 17.770 ribu barel per hari,

AS berkontribusi secara signifikan terhadap pasokan minyak global. Selanjutnya adalah Arab Saudi, negara ini memproduksi sekitar 12.136 ribu barel minyak per hari, yang menyumbang sekitar 13% dari pasokan minyak global. Arab Saudi juga dikenal memiliki cadangan minyak yang besar. Rusia dengan produksi sekitar 11.202 ribu barel per hari, Rusia merupakan salah satu pemain kunci dalam industri minyak global. Kanada sebagai produsen minyak terbesar keempat, Kanada memiliki produksi sekitar 5.576 ribu barel per hari. Irak, memproduksi sekitar 4.520 ribu barel per hari, menjadikannya produsen minyak terbesar kelima di dunia. Negara-negara lain seperti China, Uni Emirat Arab, Iran, Brazil, dan Kuwait juga merupakan produsen minyak utama, dengan masing-masing negara memproduksi ribuan barel minyak per hari. Selain itu, negara-negara OPEC, sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak, mengontrol sekitar 35% dari produksi minyak dunia dan sekitar 70% dari cadangan minyak dunia. Secara regional, Timur Tengah merupakan kontributor utama dalam produksi minyak global, dengan hampir sepertiga dari total produksi. Amerika Utara juga menyumbang hampir sepertiga lainnya dari produksi global. Selain itu, negara-negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, yang sebagian besar merupakan negara-negara pasca-Soviet, memiliki peran penting dengan menyumbang sekitar 15% dari produksi minyak dunia. Ekonomi negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh industri minyak mereka, yang memberikan manfaat ekonomi dan politik yang signifikan. Namun, banyak dari negara-negara ini juga sedang berupaya untuk mendiversifikasi ekonomi mereka, terutama mengingat inisiatif global untuk beralih ke energi terbarukan (Rao et al., 2023; Rao & Conte, 2023; World Population Review, 2024f).



Gambar 3. 10 Negara Produsen Minyak Terbesar di Dunia Tahun 2022

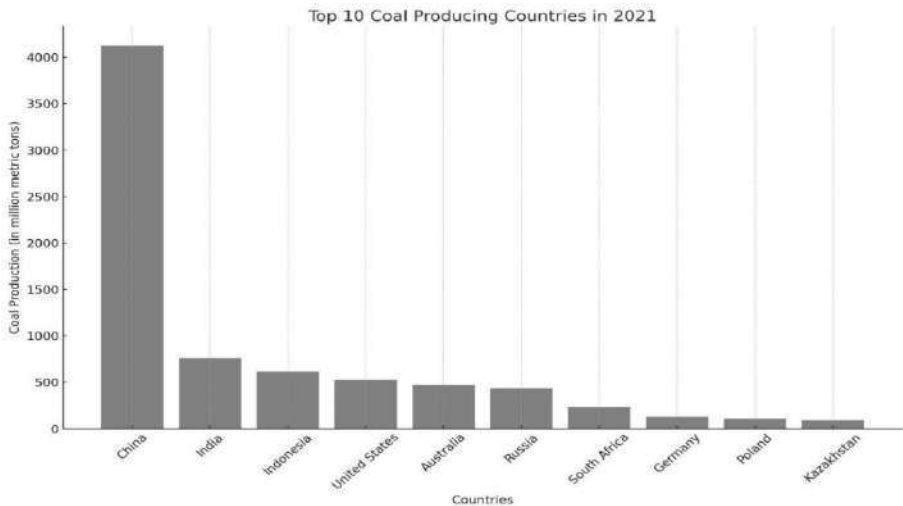
Batu bara

Untuk produksi batu bara, berdasarkan data dari World Population Review, (2024a), negara-negara produsen batu bara terbesar di dunia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- China merupakan produsen batu bara terbesar dengan margin yang signifikan, memproduksi lebih dari 4.100 juta ton metrik (mt) pada tahun 2021.
- India menempati posisi kedua sebagai produsen batu bara terbesar, dengan produksi mencapai sekitar 762 juta mt pada tahun 2021.
- Indonesia berada di peringkat ketiga dalam produksi batu bara, dengan produksi sekitar 614 juta mt pada tahun 2021.
- Meskipun telah mengalami penurunan produksi batu bara, Amerika Serikat masih menempati peringkat keempat dengan produksi sekitar 524 juta mt pada tahun 2021.
- Australia juga merupakan produsen batu bara utama, dengan produksi mencapai sekitar 467 juta mt pada tahun 2021.

Negara-negara produsen batu bara lainnya yang penting termasuk Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Polandia, dan Kazakhstan. Negara-negara ini, bersama dengan lima besar, memainkan peran penting dalam produksi batu bara global. Penting untuk dicatat bahwa meskipun batu bara tetap menjadi

sumber energi utama, ada pergeseran global menuju sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan karena kekhawatiran lingkungan. Pergeseran ini telah menyebabkan penurunan produksi dan penggunaan batu bara di beberapa wilayah.



Gambar 3. 2 10 Negara Produsen Batu Bara Terbesar di Dunia Tahun 2021

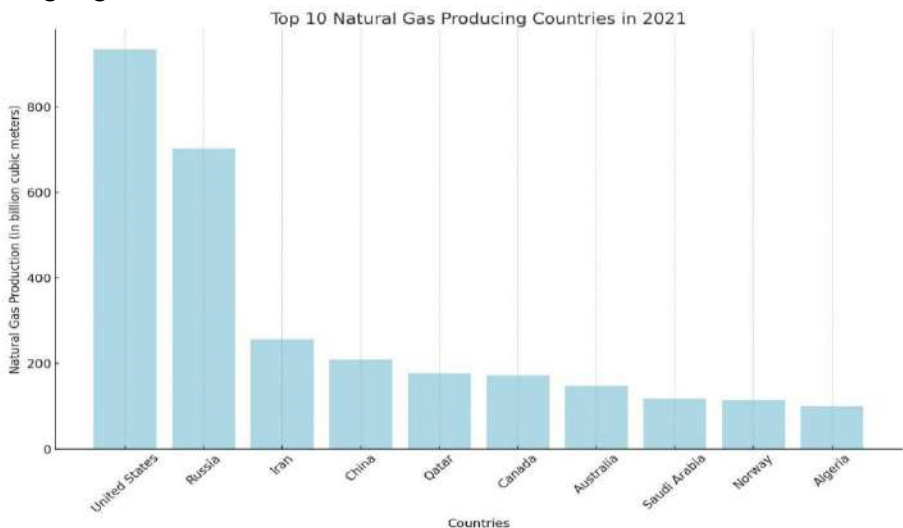
Gas alam

Setelah minyak bumi dan batu bara, komoditas pertambangan lainnya yang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi adalah gas alam. Pada tahun 2021, negara-negara produsen gas alam terbesar di dunia menurut (Venditti & Lam, 2022) adalah sebagai berikut:

- Amerika Serikat menjadi produsen gas alam terbesar, dengan produksi mencapai 934,2 miliar meter kubik, yang merupakan sekitar 23,1% dari total produksi global.
- Rusia berada di posisi kedua dengan produksi sebesar 701,7 miliar meter kubik, atau sekitar 17,4% dari total produksi global. Rusia juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia.
- Iran menjadi produsen ketiga terbesar dengan produksi sekitar 256,7 miliar meter kubik, atau sekitar 6,4% dari total produksi global.
- China dengan produksi sekitar 209,2 miliar meter kubik, atau sekitar 5,2% dari total produksi gas alam dunia menempati posisi keempat.

- e. Qatar menduduki posisi kelima dengan produksi sekitar 177,0 miliar meter kubik, yang menyumbang sekitar 4,4% dari total produksi global.

Negara-negara lain seperti Kanada, Australia, Arab Saudi, Norwegia, dan Aljazair juga termasuk dalam daftar 10 besar produsen gas alam di dunia. Keseluruhan, 10 negara teratas ini bertanggung jawab atas sekitar 73% dari total produksi gas alam dunia. Penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 32% dari total konsumsi energi primer mereka dalam bentuk gas alam, menjadikannya negara dengan konsumsi gas alam terbesar. Sementara itu, Rusia, sebagai produsen terbesar kedua, juga memiliki cadangan gas alam yang sangat besar. Di sisi lain, China telah mengalami pertumbuhan produksi gas alam yang signifikan sejak tahun 2011, sebagian besar karena kebijakan pemerintah yang mendorong penggantian batu bara dengan gas alam.



Gambar 3. 3 10 Negara Produsen Gas Alam Terbesar di Dunia Tahun 2021

Nikel

Nikel memegang peranan penting dalam perekonomian dunia karena kegunaannya yang beragam, terutama dalam pembuatan baterai, baja tahan karat, dan berbagai paduan logam. Sifat nikel yang kuat dan tahan suhu tinggi membuatnya sangat kritis dalam pembuatan berbagai produk ini. Terlebih lagi, nikel adalah komponen kunci dalam baterai lithium-ion yang digunakan

oleh produsen kendaraan listrik, seperti Tesla, di mana sekitar 80% dari katoda NCA terbuat dari nikel.

Ketika kita melihat negara-negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia menempati posisi pertama dengan produksi sebesar 1,8 juta metrik ton pada tahun 2023. Filipina berada di posisi kedua dengan produksi 400.000ton metrik, dan New Caledonia di posisi ketiga dengan 230.000 metrik ton. Rusia dan Kanada masing-masing berada di posisi keempat dan kelima dengan produksi 200.000-ton metrik dan 180.000 metrik ton. Australia, China, Brazil, dan Amerika Serikat juga termasuk dalam daftar 10 negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Peningkatan permintaan nikel, terutama dari industri kendaraan listrik, telah mempengaruhi pasar nikel secara signifikan, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa kebanyakan nikel dalam rantai pasokan global tidak cocok untuk produksi baterai, yang menimbulkan tantangan dalam memenuhi permintaan yang meningkat ini.



Gambar 3. 4 Anjungan pengeboran minyak, tambang batu bara, lokasi ekstraksi gas alam, dan operasi penambangan nikel

Ketergantungan ekonomi dan pembangunan pada sektor tambang sering menghadapi berbagai kritik, terutama karena dampak jangka panjang dan tantangan yang timbul dari model pembangunan semacam ini. Beberapa kritik utama meliputi:

- a. Kerusakan Lingkungan. Penambangan sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, erosi tanah, pencemaran air dan udara, dan kehilangan habitat serta keanekaragaman hayati. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan pada ekosistem lokal.
- b. Volatilitas Harga Komoditas. Perekonomian yang sangat bergantung pada sektor tambang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama di negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah.
- c. Ketergantungan Sumber Daya. Ketergantungan pada sektor tambang dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Banyak negara dengan ekonomi yang didominasi oleh penambangan sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain.
- d. Isu Sosial dan Kesehatan. Penambangan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk penggusuran komunitas lokal, konflik tenaga kerja, dan masalah kesehatan akibat pencemaran. Pekerja tambang juga sering kali menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi.
- e. Ketidakadilan dan Korupsi. Di banyak wilayah, keuntungan dari penambangan tidak selalu didistribusikan secara adil, menyebabkan ketidakadilan sosial. Selain itu, sektor tambang sering kali dikaitkan dengan korupsi dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak.
- f. Kehilangan Keanekaragaman Ekonomi. Negara yang bergantung pada penambangan sering kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain, sehingga keanekaragaman ekonomi menjadi terbatas.
- g. Sumber Daya yang Terbatas. Ketergantungan pada sumber daya alam dapat menjadi masalah jangka panjang karena sumber daya ini adalah terbatas dan dapat habis.
- h. Dampak pada Perubahan Iklim. Industri pertambangan, terutama batu bara, minyak, dan gas, merupakan sumber emisi karbon yang signifikan, berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global.

Menanggapi kritik ini, banyak pihak menyerukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor tambang, serta upaya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Dalam eksploitasi tambang, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan seperti lingkungan hidup. Perlu adanya perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan limbah dan polusi untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan tanah. Diperlukan pula rehabilitasi lahan pasca tambang untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial lahan.

Keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu menjadi perhatian. Industri-industri pertambangan harus menerapkan standar keselamatan yang tinggi untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pemantauan secara rutin terhadap kondisi kerja dan risiko kesehatan. Selain itu, aspek yang juga perlu diperhatikan adalah sosial dan masyarakat seperti memastikan hak dan kepentingan masyarakat lokal terpenuhi, Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan serta memberikan kompensasi dan manfaat yang adil kepada masyarakat setempat.

Pelaku eksploitasi tambang juga perlu memperhatikan hukum dan regulasi. Mematuhi semua regulasi dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan eksploitasi. Mematuhi standar internasional dan prinsip-prinsip industri yang berlaku. Efisiensi dan teknologi juga perlu untuk diperhatikan karena penggunaan teknologi dan metode penambangan yang efisien untuk mengoptimalkan ekstraksi sumber daya begitu penting. Selain itu diperlukan penerapan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keamanan kerja.

Manajemen risiko dan tanggap darurat dengan mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya di lokasi tambang serta menyiapkan rencana tanggap darurat untuk situasi bencana atau kecelakaan. Sebagai tanggung jawab terhadap eksploitasi pertambangan, diperlukan langkah pemeliharaan dan konservasi sumber daya alam dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Baik sebelum maupun dalam proses eksploitasi melakukan penelitian dan pengembangan untuk teknik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat diperlukan. Perlu juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan

operasional penambangan. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pertambangan. Memperhatikan aspek-aspek ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan dan sosial, tetapi juga untuk kesuksesan jangka panjang industri pertambangan itu sendiri.

2. Sumber Daya Lahan Pertanian

Sumber daya lahan (tanah) memainkan peran penting dalam pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Lahan yang subur dan dikelola dengan baik merupakan kunci untuk mencapai keamanan pangan dan mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Praktik manajemen lahan berkelanjutan (SLM) seperti konservasi tanah dan air, manajemen sumber daya alam, dan pengelolaan lanskap terintegrasi sangat penting untuk mencapai ekosistem yang produktif dan sehat. Pendekatan ini mengintegrasikan kebutuhan dan nilai sosial, ekonomi, fisik, dan biologis, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pedesaan.

Di berbagai negara, seperti Malawi dan Brasil, inisiatif untuk meningkatkan akses pada lahan dan menjamin hak atas tanah telah terbukti meningkatkan penghasilan dan mengurangi kemiskinan. Program-program ini sering kali mencakup bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas tanah yang diperoleh. Di Afrika, peningkatan tata kelola tanah dan pemanfaatan lahan secara efektif dan inklusif dapat membantu mengakhiri 'perebutan tanah', meningkatkan produksi pangan, dan menghapuskan kemiskinan ekstrem.

Pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan solusi terkait manajemen lahan dapat ditemukan melalui sumber-sumber seperti *World Bank* dan *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*. FAO, misalnya, mendukung negara-negara anggotanya dalam mengembangkan norma, standar, dan kebijakan, menyediakan nasihat teknis, dan melaksanakan program-program nasional dan lokal melalui pengembangan kapasitas dan manajemen pengetahuan teknis. Berbagai proyek SLM yang didanai oleh *Global Environment Facility (GEF)* juga sedang dilaksanakan, menangani masalah degradasi lahan lintas batas dan meningkatkan ketahanan pangan di berbagai negara.

Beberapa negara dikenal karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, berkontribusi signifikan baik untuk keamanan pangan nasional maupun global. Negara-negara ini sering memiliki area tanah yang luas

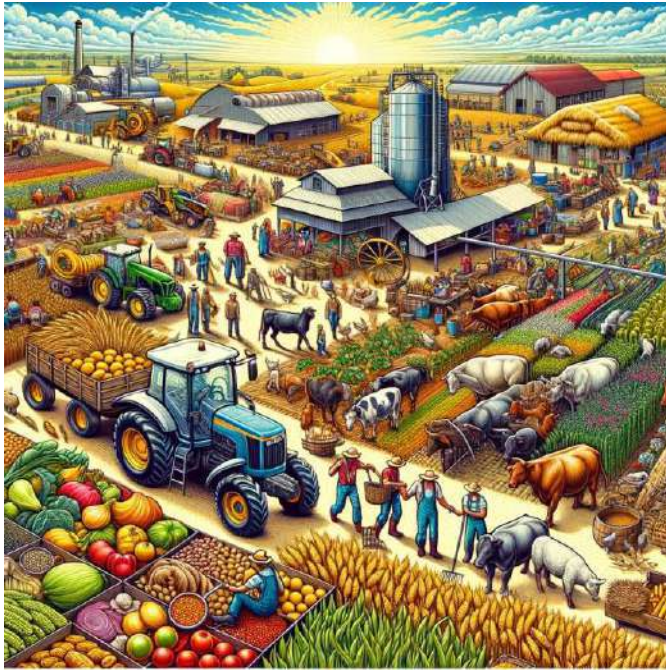
untuk pertanian, kondisi iklim yang menguntungkan, serta praktik pertanian yang canggih seperti Amerika Serikat (AS). AS memiliki lahan pertanian yang sangat subur, terutama di Midwest, yang sering disebut sebagai "lumbung" negara itu. Wilayah ini dikenal untuk produksi jagung, kedelai, gandum, dan tanaman pokok lainnya. Selain AS, Brasil merupakan kekuatan pertanian utama, dengan area tanah yang besar dan cocok untuk berbagai aktivitas pertanian. Negara ini adalah salah satu produsen terbesar kedelai, kopi, tebu, dan daging sapi. Demikian pula dengan China, meskipun memiliki populasi yang besar, China berhasil memproduksi sebagian besar makanannya sendiri berkat luasnya area pertanian. Negara ini adalah produsen beras terbesar di dunia dan juga memproduksi gandum, jagung, dan berbagai tanaman lainnya.

India juga memiliki iklim dan jenis tanah yang beragam yang memungkinkan untuk berbagai kegiatan pertanian. India adalah salah satu produsen terbesar beras, gandum, buah-buahan, sayuran, dan susu. Negara lain yang juga memiliki potensi lahan yang besar adalah Rusia. Rusia memiliki jumlah lahan pertanian yang besar, terutama di bagian baratnya. Negara ini adalah produsen gandum dan biji-bijian lainnya yang signifikan. Australia juga dikenal dengan peternakan dan ladangnya yang luas, Australia adalah produsen besar gandum, barley, dan daging sapi. Sektor pertaniannya sangat mekanisasi dan efisien. Kanada memiliki sektor pertanian yang terkonsentrasi di prairies, dikenal untuk produksi gandum dan kanola, serta di daerah lain untuk produksi susu dan buah. Argentina juga memiliki wilayah pertanian yang cukup terkenal yaitu di wilayah Pampas yang merupakan salah satu area paling subur di dunia dan merupakan produsen kunci kedelai dan daging sapi global. Ukraina juga sering disebut sebagai "lumbung Eropa," Ukraina memiliki tanah yang subur dan merupakan produsen utama gandum, jagung, dan barley. Negara-negara ini memainkan peran krusial dalam rantai pasokan pangan global. Namun, penting untuk mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan untuk memastikan produktivitas jangka panjang dan perlindungan lingkungan.

Bagaimana dengan lahan pertanian di Indonesia? Pertanian di Indonesia memegang peran penting dalam ekonomi dan keamanan pangan nasional, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian. Indonesia

memiliki kondisi iklim yang memungkinkan berbagai jenis pertanian, mulai dari tanaman padi, palawija, hingga perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Lahan sawah, terutama untuk padi, sangat dominan di Indonesia. Wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi merupakan penghasil utama padi. Sistem irigasi seperti subak di Bali menunjukkan pengelolaan air yang unik dan berkelanjutan. Di luar lahan sawah, terdapat pertanian lahan kering yang digunakan untuk budidaya palawija seperti jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta berbagai jenis hortikultura. Perkebunan besar seperti kelapa sawit dan karet banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan, sementara perkebunan kopi, teh, dan coklat banyak dijumpai di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi (Guampe, 2014, 2021; Guampe et al., 2022).

Beberapa tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia termasuk konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, ancaman perubahan iklim, penggunaan teknologi pertanian yang belum optimal, serta masalah distribusi dan infrastruktur yang mempengaruhi akses pasar. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian, termasuk pengembangan varietas unggul, teknologi pertanian modern, dan sistem irigasi yang lebih baik. Lahan pertanian di Indonesia sangat krusial untuk ketahanan pangan, mengingat negara ini memiliki populasi yang besar dan terus bertambah. Dengan demikian, pengelolaan lahan pertanian di Indonesia memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif untuk memastikan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani (Guampe, 2014, 2021; Guampe et al., 2022).



Gambar 3. 5 Industri Pertanian

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan inti dan penggerak utama dari setiap proses pembangunan, baik itu dalam skala organisasi, masyarakat, maupun negara. Melalui kemampuan, keahlian, pengetahuan, serta kreativitas yang dimiliki oleh SDM, berbagai strategi pembangunan dapat dirancang, diimplementasikan, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran krusial SDM dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, seperti peningkatan produksi atau efisiensi, tetapi juga meluas ke bidang sosial, pendidikan, teknologi, dan lingkungan.

Kualitas SDM yang tinggi, yang dicapai melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan yang terus menerus, memungkinkan suatu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk revolusi industri, perubahan iklim, dan dinamika global lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud, di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring

dengan peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan.

SDM yang kuat juga berarti adanya kemampuan untuk inovasi dan kreativitas yang tinggi. Inovasi merupakan kunci dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, SDM yang berkualitas mampu menghasilkan kepemimpinan yang visioner dan efektif, yang sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan, memobilisasi sumber daya, serta mengarahkan masyarakat menuju tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat, peran SDM menjadi semakin penting. Negara-negara dengan SDM yang berkualitas tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tantangan global, memanfaatkan peluang yang ada, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang paling berharga bagi masa depan suatu bangsa.

Dengan demikian, sumber daya manusia memainkan peran yang tak tergantikan dan fundamental dalam semua aspek pembangunan. SDM bukan hanya sebagai faktor produksi, melainkan juga sebagai pelaku utama yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan akan membawa pada kemajuan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana SDM menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan:

1. **Tenaga Kerja dan Produktivitas.** SDM menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan berbagai sektor ekonomi. Kualitas tenaga kerja, yang ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan output dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa.
2. **Inovasi dan Kemajuan Teknologi.** SDM yang berkualitas dan terdidik mampu melakukan inovasi dan mengembangkan teknologi baru. Inovasi dan teknologi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri. Riset dan pengembangan yang dilakukan oleh

ilmuwan, insinyur, dan profesional lainnya berkontribusi pada penemuan dan inovasi yang meningkatkan daya saing dan produktivitas.

3. Pembangunan Ekonomi dan Industri. SDM yang terampil diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola industri. Pengembangan sektor-sektor industri tertentu sering bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. SDM yang mampu mengelola dan melaksanakan strategi bisnis efektif adalah kunci untuk kesuksesan ekonomi.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan. SDM yang sehat secara fisik dan mental lebih produktif. Oleh karena itu investasi dalam layanan kesehatan dan kesejahteraan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat dan efisien. Kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, meningkatkan kualitas hidup, yang secara langsung mempengaruhi produktivitas dan pembangunan ekonomi.
5. Manajemen dan Kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dan manajemen sumber daya manusia yang baik adalah kunci untuk organisasi atau negara yang sukses. SDM yang memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang baik dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Adaptasi dan Fleksibilitas. SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan teknologi sangat penting dalam dunia yang terus berkembang dan berubah. Karyawan yang fleksibel dan adaptif dapat mempelajari keterampilan baru dan mengadopsi teknologi baru, yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi.
7. Keterlibatan Sosial dan Politik. SDM juga memainkan peran dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Masyarakat yang terdidik dan terinformasi lebih mungkin terlibat dalam proses demokrasi dan membantu membentuk kebijakan publik yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. IPM dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Indeks ini menggabungkan beberapa indikator utama untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia:

1. Harapan Hidup

Ini adalah ukuran kesehatan dan panjang umur populasi. Harapan hidup saat lahir merupakan indikator utama yang menggambarkan kondisi kesehatan di suatu negara. Harapan hidup global telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama karena peningkatan kualitas kesehatan dan akses ke perawatan medis. Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan data dari United Nations, beberapa tren umum dalam harapan hidup rata-rata di seluruh dunia secara umum mengalami peningkatan, dengan beberapa negara mencapai angka harapan hidup di atas 80 tahun.

Pada tahun 2024, harapan hidup bervariasi secara signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa contoh mencolok termasuk Liechtenstein dengan rata-rata harapan hidup 84,95 tahun, Swiss sebesar 84,38 tahun, dan Singapura dengan harapan hidup rata-rata 84,27 tahun. Italia juga menunjukkan harapan hidup yang tinggi, yaitu 84,20 tahun. Menariknya, Kota Vatikan, meskipun memiliki demografi yang unik, memiliki harapan hidup 84,16 tahun. Korea Selatan adalah negara lain dengan harapan hidup tinggi, dengan rata-rata 84,14 tahun. Di sisi lain, beberapa negara memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Misalnya, negara-negara seperti Kroasia, Estonia, dan Oman memiliki harapan hidup berkisar antara 78,68 hingga 79,40 tahun. Negara lain seperti Cina, Turki, dan Polandia memiliki harapan hidup yang sedikit lebih rendah, dengan Cina pada 78,79 tahun, Turki pada 78,68 tahun, dan Polandia pada 78,60 tahun. Penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas layanan kesehatan, gaya hidup, kondisi ekonomi, dan faktor sosial (World Population Review, 2024c).

Negara-negara maju cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, gizi, dan kondisi hidup yang lebih baik. Dari segi gender, secara umum, wanita cenderung memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan pria. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya harapan hidup yaitu faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan, pendapatan, dan kondisi kerja. Selain itu, penyakit kronis, pandemi, dan masalah kesehatan publik lainnya dapat mempengaruhi harapan hidup di berbagai negara.

2. Pendidikan

Pendidikan di seluruh dunia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Menurut World Population Review, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman termasuk di antara negara dengan sistem pendidikan terbaik. Sementara itu, negara-negara seperti Sudan Selatan, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah memiliki tingkat melek huruf yang lebih rendah. Dari perspektif gender, hingga baru-baru ini, laki-laki lebih mungkin menghadiri sekolah daripada perempuan. Namun, upaya global telah difokuskan untuk menutup kesenjangan ini, dan kini, secara global, kesenjangan tersebut telah banyak hilang. Untuk pendidikan tinggi, saat ini wanita muda lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk terdaftar di pendidikan tinggi. Meski perbedaan globalnya kecil, masih ada beberapa negara di mana perbedaan ini cukup besar, seperti Afghanistan, di mana perempuan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk sekolah dibandingkan laki-laki.

Dalam konteks yang lebih luas, World Bank mengidentifikasi pendidikan sebagai hak asasi manusia dan pendorong utama pembangunan. Pendidikan menghasilkan keuntungan yang besar dan konsisten dalam hal pendapatan, dan merupakan faktor paling penting untuk memastikan kesetaraan dan inklusi. Namun, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan besar pada sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk penutupan sekolah fisik selama rata-rata 141 hari antara Februari 2020 dan Februari 2022. Khususnya di Asia Selatan dan Amerika Latin & Karibia, dampak dari pandemi ini berlangsung lebih lama. Sebelum pandemi, telah ada krisis belajar global yang besar, dan pandemi telah memperburuknya. OECD, melalui publikasi "Education at a Glance", menyediakan informasi terperinci tentang struktur, pembiayaan, dan kinerja sistem pendidikan di berbagai negara. Edisi terbaru mereka termasuk fokus pada pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta bab baru mengenai langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara OECD untuk mengintegrasikan pengungsi Ukraina ke dalam sistem pendidikan mereka.

Data partisipasi sekolah di seluruh dunia menunjukkan variasi yang signifikan antar negara. Di beberapa negara, tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan sangat tinggi, sementara di negara lain, terutama di

beberapa negara berkembang, angkanya lebih rendah. Menurut World Population Review, negara-negara seperti Chad, Mali, dan Burkina Faso memiliki tingkat melek huruf dewasa yang rendah, dengan Chad hanya 27%. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman menempati peringkat teratas dalam sistem pendidikan mereka (World Population Review, 2024b). Our World in Data juga melaporkan bahwa meskipun sebagian besar anak di seluruh dunia mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ratusan juta anak masih tidak bersekolah. Pada tahun 2019, sekitar 260 juta anak tidak bersekolah, dengan lebih banyak anak atau remaja yang tidak menghadiri pendidikan sekunder dibandingkan pendidikan dasar (Ritchie et al., 2024).

Tingkat melek huruf global pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Secara umum, rata-rata tingkat melek huruf di kalangan pria dan wanita berusia 15 tahun ke atas adalah sekitar 86,3%, dengan pria mencapai sekitar 90% dan wanita sedikit di belakang pada 82,7%. Namun, terdapat perbedaan yang besar antar negara. Beberapa negara maju hampir selalu memiliki tingkat melek huruf dewasa di atas 96%. Di beberapa kawasan, terutama di Afrika Utara dan Timur Tengah, terdapat peningkatan drastis dalam melek huruf dalam satu generasi. Negara-negara ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam tingkat melek huruf antar generasi, dengan lebih dari 90% generasi muda melek huruf dibandingkan dengan kurang dari sepertiga generasi yang lebih tua. Beberapa negara dengan tingkat melek huruf yang sangat tinggi termasuk Italia, Spanyol, Argentina, dan Taiwan, semuanya dengan tingkat melek huruf mendekati atau setara dengan 99%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan dan literasi di negara-negara tersebut (Our World in Data, 2024; World Economic Forum, 2022; World Population Review, 2024d).

Namun, data dari World Bank menunjukkan adanya variasi besar dalam tingkat melek huruf di berbagai negara, dengan beberapa negara masih berjuang untuk meningkatkan tingkat literasi di kalangan penduduknya. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya global dalam pendidikan dan literasi telah membawa perubahan positif, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan di beberapa daerah (World Bank, 2023).

3. Pendapatan Nasional Bruto per Kapita

Indikator ini digunakan untuk mengukur standar hidup. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita dihitung berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP) untuk memberikan perbandingan yang lebih adil antar negara. Berdasarkan data dari beberapa sumber seperti World Population Review, Our World in Data, dan World Bank pada tahun 2024, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita di seluruh dunia. Negara-negara seperti Norwegia dan Swiss termasuk di antara yang terkaya, dengan ekonomi yang kuat dan tingkat standar hidup yang tinggi. Norwegia, khususnya, dikenal karena ekonomi yang didasarkan pada ekspor petroleum dan hasil laut, sementara Swiss menonjol dalam perbankan internasional dan industri pariwisata. Di sisi lain, negara-negara seperti Burundi, Afghanistan, dan Mozambik memiliki GNI per kapita terendah di dunia. Contohnya, pada tahun 2021, GNI per kapita Burundi hanya sekitar \$240, sementara Afghanistan sekitar \$380. Pendapatan per kapita ini dapat memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan ekonomi dan standar hidup rata-rata penduduk suatu negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa GNI per kapita hanya merupakan salah satu indikator dan tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil atau kualitas hidup yang sebenarnya di setiap negara.

Indeks Pembangunan Manusia kemudian dihitung dengan menggabungkan ketiga indikator tersebut. Nilai IPM berkisar dari 0 (rendah) hingga 1 (tinggi) dan biasanya dikategorikan menjadi:

Tabel 3. 1 Kriteria dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Kriteria	Angka IPM
Sangat tinggi	> 0,800
Tinggi	0,700 - 0,799
Menengah	0,550 - 0,699
Rendah	< 0,550

Negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) tertinggi di dunia yang memiliki IPM tinggi termasuk Norwegia, Swiss, Australia, Irlandia, Jerman, Islandia, Hong Kong (SAR), Singapura, dan Swedia. Negara-negara ini seringkali

memiliki skor tinggi di semua tiga dimensi IPM: harapan hidup yang panjang, akses pendidikan yang luas, serta standar hidup yang tinggi. Untuk informasi yang paling akurat dan terkini, Anda dapat merujuk langsung ke laporan Human Development Report yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP).

IPM memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap pembangunan suatu negara, menekankan pentingnya kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, selain dari sekedar pendapatan ekonomi. Ini mengakui bahwa pembangunan manusia yang seimbang dan inklusif adalah lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi semata. Pada tahun 2024, negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi didominasi oleh negara-negara Eropa dan beberapa negara lainnya. Berikut adalah daftar sepuluh negara dengan IPM tertinggi menurut (Data Pendas, 2024):

Tabel 3. 2 Negara dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada Tahun 2024

Rank	Country	HDI
1	Switzerland	0.962
2	Norway	0.961
3	Iceland	0.959
4	Hong Kong	0.952
5	Australia	0.951
6	Denmark	0.948
7	Sweden	0.947
8	Ireland	0.945
9	Germany	0.942
10	Netherlands	0.941

IPM adalah ukuran komposit yang menggabungkan indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup untuk mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Negara-negara dengan IPM tinggi cenderung memiliki pendidikan berkualitas tinggi, harapan hidup yang panjang, dan pendapatan per kapita yang tinggi, yang menunjukkan kualitas hidup yang tinggi untuk warganya.

Hubungan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat erat dan saling terkait. IPM, yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), mengukur kemajuan pembangunan suatu negara tidak hanya berdasarkan output ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan kesejahteraan warganya, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendidikan (SDM sebagai Penerima dan Penyumbang). Pendidikan adalah salah satu komponen utama IPM. SDM yang terdidik dan terampil meningkatkan nilai indikator pendidikan dalam IPM. SDM yang terdidik memiliki kemampuan untuk berkontribusi lebih efektif dalam ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi komponen pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita dalam IPM. Kualitas dan akses pendidikan menggambarkan kemampuan suatu negara untuk mengembangkan potensi SDM-nya.

Kesehatan (Harapan Hidup), harapan hidup yang tinggi, yang menunjukkan tingkat kesehatan yang baik, merupakan indikator lain dalam IPM. SDM yang sehat dapat bekerja lebih produktif dan berkontribusi lebih lama dalam kegiatan ekonomi. Investasi dalam kesehatan, seperti layanan kesehatan yang lebih baik dan program pencegahan penyakit, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga produktivitas SDM.

Pendapatan (PNB per Kapita), SDM yang terdidik dan sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Nasional. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan standar hidup, yang juga merupakan komponen IPM.

Dengan demikian, pengembangan SDM melalui peningkatan akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, serta peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, merupakan kunci untuk meningkatkan nilai IPM suatu negara. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif lebih penting daripada hanya pertumbuhan ekonomi semata.

Beberapa perbedaan umum antara kedua kelompok negara maju dan negara berkembang tersebut. Berdasarkan tingkat pendidikan; negara maju umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Akses terhadap pendidikan dasar hingga tinggi cenderung lebih merata dan berkualitas. Tingkat literasi tinggi dan rata-rata tahun pendidikan lebih lama. Negara Berkembang, mengalami tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah pedesaan atau bagi kelompok marginal.

Tingkat literasi dan rata-rata tahun pendidikan cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju.

Dari segi tingkat kesehatan, negara maju pada umumnya memiliki sistem kesehatan yang lebih baik dan terorganisasi, dengan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan berkualitas. Harapan hidup cenderung lebih tinggi, dan tingkat mortalitas anak serta ibu hamil lebih rendah. Negara berkembang, menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan akses terhadap perawatan kesehatan. Hal ini dapat berpengaruh pada harapan hidup yang lebih rendah dan tingkat mortalitas yang lebih tinggi.

C. SUMBER DAYA MODAL

Sumber daya modal memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. "Sumber daya modal" secara umum mencakup modal fisik (seperti gedung, mesin, dan infrastruktur), modal finansial (uang dan aset keuangan), serta modal intelektual (pengetahuan, keahlian, dan teknologi). Berikut adalah beberapa cara di mana sumber daya modal berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi:

1. Investasi dalam Modal Fisik

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan utilitas publik lainnya adalah kunci untuk mendukung kegiatan ekonomi. Investasi dalam peralatan dan teknologi meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Tingkat investasi ini umumnya diukur sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Negara maju biasanya memiliki tingkat investasi yang stabil dan sering kali tinggi. Ini didukung oleh infrastruktur keuangan yang matang, lingkungan hukum dan bisnis yang stabil, dan pasar yang sudah mapan. Negara berkembang dan negara dengan ekonomi emerging memiliki tingkat investasi yang bervariasi. Beberapa dari negara-negara ini menarik tingkat investasi yang signifikan karena potensi pertumbuhan yang tinggi, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang lebih murah. Namun, faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, risiko keuangan, dan infrastruktur yang kurang berkembang dapat mempengaruhi tingkat investasi. Negara-negara lain adalah negara dengan ekonomi yang sedang mengalami transisi. Negara-negara ini mungkin dalam proses restrukturisasi ekonomi

dan politik, yang bisa berpengaruh pada tingkat investasi. Perubahan kebijakan dan reformasi ekonomi dapat menarik atau menghalangi investor.

2. Modal Finansial

Kapital finansial memberikan dana yang diperlukan untuk investasi dalam bisnis, penelitian, dan pengembangan. Pasar keuangan yang berkembang memungkinkan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien, mendukung inovasi, dan membantu manajemen risiko.

Negara-negara dengan modal finansial terbesar di dunia umumnya adalah negara-negara yang memiliki ekonomi besar dan pasar keuangan yang berkembang. Beberapa negara ini termasuk: Amerika Serikat, AS memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan pasar keuangan yang sangat berkembang, termasuk Bursa Saham New York dan NASDAQ. China, dengan pertumbuhan ekonominya yang cepat, China telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, dengan pasar keuangan yang terus berkembang. Jepang, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia, Jepang memiliki modal finansial yang signifikan dan pasar keuangan yang matang, termasuk Bursa Saham Tokyo. Negara-negara Uni Eropa, beberapa negara anggota Uni Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris (sebelum Brexit), memiliki ekonomi besar dengan modal finansial yang signifikan. Swiss dikenal sebagai pusat keuangan global, terutama dalam perbankan dan asuransi. Singapura dan Hong Kong, keduanya merupakan pusat keuangan utama di Asia. Modal finansial suatu negara tidak hanya diukur dari besar PDB-nya, tetapi juga dari pengembangan dan kecanggihan infrastruktur keuangannya, termasuk pasar modal, lembaga keuangan, dan sistem perbankannya.

3. Modal Intelektual dan Inovasi

Pendidikan, penelitian, dan pengembangan merupakan tiga pilar utama yang memainkan peranan kritis dalam membentuk modal intelektual suatu bangsa atau organisasi. Modal intelektual ini bukan hanya sekedar akumulasi pengetahuan, tapi juga termasuk keterampilan, inovasi, proses, dan paten yang menjadi hasil dari pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai proses inovatif, sementara penelitian menggali pengetahuan

baru, dan pengembangan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menciptakan solusi baru yang inovatif.

Ketiga aspek ini berinteraksi dalam suatu siklus yang dinamis, di mana pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang terlatih, yang kemudian dapat melakukan penelitian untuk mengungkap pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini selanjutnya digunakan dalam pengembangan untuk menciptakan produk, proses, atau layanan baru yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Melalui proses ini, inovasi tercipta, mendorong kemajuan teknologi yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

Produktivitas yang lebih tinggi berarti bahwa lebih banyak barang dan jasa dapat dihasilkan dengan jumlah input yang sama atau bahkan lebih sedikit. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga memungkinkan perusahaan dan negara untuk bersaing lebih efektif di panggung global. Kemajuan teknologi yang dihasilkan dari modal intelektual ini juga membuka peluang baru dalam ekonomi, menciptakan sektor-sektor baru dan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, kemajuan dalam teknologi digital telah membuka era baru bagi ekonomi digital, termasuk e-commerce, fintech, dan ekonomi berbagi.

Selain itu, inovasi dan kemajuan teknologi sering kali memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti penyakit, perubahan iklim, dan akses ke pendidikan, membawa manfaat yang luas tidak hanya dari sudut pandang ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, pendidikan, penelitian, dan pengembangan tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi melalui inovasi dan produktivitas tetapi juga sebagai katalis untuk solusi terhadap tantangan global, memperkuat pemahaman bahwa investasi dalam ketiga area ini adalah investasi ke dalam masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

4. Keterlibatan Sektor Swasta

Modal dari sektor swasta memegang peran kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi. Investasi bisnis dari sektor ini tidak hanya menanamkan sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha, tetapi juga seringkali membawa bersamaan pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang dapat memberikan nilai tambah signifikan. Dalam konteks kewirausahaan dan inovasi bisnis,

kebutuhan akan investasi modal awal tidak bisa dianggap remeh. Para pengusaha yang memiliki ide-ide inovatif sering kali berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, hingga ekspansi pasar. Tanpa adanya suntikan modal dari investor, banyak dari ide-ide ini yang mungkin tidak akan pernah berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan.

Investasi modal awal tidak hanya memungkinkan sebuah usaha untuk memulai operasinya, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan ekspansi. Dengan adanya dana, sebuah bisnis dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk, memperluas operasional, meningkatkan kapasitas produksi, atau memasuki pasar baru. Selain itu, investasi ini sering kali disertai dengan bimbingan dan akses ke jaringan profesional yang dapat membantu mengarahkan usaha muda tersebut ke jalur yang lebih stabil dan menguntungkan.

Lebih lanjut, investasi dari sektor swasta memiliki dampak yang meluas terhadap ekonomi secara keseluruhan. Ketika bisnis-bisnis baru berkembang, mereka tidak hanya menciptakan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efektif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, inovasi yang dihasilkan dapat memicu lebih banyak kompetisi, mendorong efisiensi dan produktivitas di seluruh industri.

Investasi modal dari sektor swasta juga memainkan peran vital dalam mempercepat siklus inovasi. Dengan adanya dukungan finansial, bisnis dapat lebih cepat merespons kebutuhan pasar dan perubahan teknologi, sering kali menghasilkan solusi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu memastikan bahwa ekonomi tetap dinamis, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Kesimpulannya, modal dari sektor swasta melalui investasi bisnis adalah katalis penting untuk pembangunan ekonomi. Investasi ini tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis, tetapi juga menstimulasi inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas. Melalui siklus investasi yang sehat dan

berkelanjutan, sektor swasta dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Kebijakan Pemerintah dan Stabilitas Ekonomi

Dalam konteks ekonomi modern, peran pemerintah sangatlah krusial dalam membentuk lingkungan yang kondusif untuk investasi modal. Melalui pengaturan kebijakan, pemerintah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan arah dan volume investasi yang mengalir ke dan dari sebuah negara. Kebijakan perpajakan, regulasi industri, dan kebijakan moneter adalah beberapa alat utama yang digunakan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung atau, dalam beberapa kasus, menghambat investasi.

Kebijakan perpajakan, misalnya, dapat dirancang untuk menarik investor dengan menawarkan insentif pajak untuk investasi dalam sektor-sektor tertentu atau untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria tertentu, seperti teknologi hijau atau inovasi. Di sisi lain, sistem perpajakan yang berat dan rumit dapat menjadi penghalang bagi investor karena menambah beban biaya dan risiko ketidakpastian.

Regulasi juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa menarik sebuah negara sebagai destinasi investasi. Regulasi yang efektif dan efisien dapat membantu menjamin hak-hak investor, memastikan persaingan yang adil, dan melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat. Namun, regulasi yang berlebihan atau tidak konsisten dapat menghambat inovasi dan membuat birokrasi menjadi beban yang mengurangi efisiensi dan profitabilitas investasi.

Kebijakan moneter, yang dilaksanakan oleh bank sentral negara, juga berpengaruh besar terhadap investasi. Kebijakan ini, yang meliputi pengaturan suku bunga dan pengelolaan pasokan uang, dapat mempengaruhi nilai mata uang dan tingkat inflasi, yang kedua-duanya berdampak pada biaya dan daya tarik investasi. Suku bunga yang lebih rendah, contohnya, dapat membuat pinjaman lebih murah dan merangsang investasi, sementara tingkat inflasi yang stabil menunjukkan keadaan ekonomi yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor.

Stabilitas ekonomi dan politik adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung mencari kepastian dan prediktabilitas, yang lebih mudah ditemukan di negara-negara dengan pemerintahan yang stabil,

kebijakan ekonomi yang konsisten, dan sistem hukum yang kuat. Ketidakstabilan politik atau ekonomi, sebaliknya, dapat meningkatkan risiko dan mendorong investor untuk mencari lokasi lain yang lebih aman untuk modal mereka.

Dalam lingkup yang lebih luas, kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal perpajakan, regulasi, dan kebijakan moneter tidak hanya menentukan kondisi saat ini untuk investasi modal tetapi juga membentuk ekspektasi untuk masa depan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran strategis dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mendorong aliran modal yang sehat, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Investasi dalam modal manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan, memegang peran fundamental dalam menentukan kualitas dan efektivitas tenaga kerja dalam suatu ekonomi. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa kualitas sumber daya manusia, keterampilan, dan kesehatan mereka sangat menentukan dalam mengoptimalkan penggunaan modal fisik, yang mencakup infrastruktur, mesin, dan teknologi. Tanpa tenaga kerja yang terdidik dan sehat, modal fisik tidak dapat digunakan secara maksimal, yang pada gilirannya menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan memberikan dasar untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk tidak hanya melakukan tugas-tugas mereka dengan efektif tetapi juga untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kondisi pasar. Sebagai contoh, dalam industri yang menggunakan teknologi tinggi, pekerja yang terdidik memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami dan mengoperasikan peralatan kompleks, menganalisis data, dan mengimplementasikan solusi inovatif untuk masalah yang muncul. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendorong inovasi dalam proses dan produk.

Di sisi lain, investasi dalam kesehatan memastikan bahwa tenaga kerja tidak hanya hadir tetapi juga beroperasi pada kapasitas penuh.

Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan absensi yang tinggi, produktivitas yang rendah, dan, dalam beberapa kasus, kecacatan jangka panjang yang mengurangi pasokan tenaga kerja efektif. Sebaliknya, pekerja yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki energi dan konsentrasi yang lebih baik, dan mampu bekerja lebih lama. Kesehatan yang baik juga berkontribusi pada kemampuan belajar, yang membuat investasi dalam pendidikan menjadi lebih efektif.

Lebih lanjut, investasi dalam modal manusia menghasilkan eksternalitas positif yang melampaui peningkatan produktivitas individu. Pekerja yang terdidik dan sehat cenderung meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan dalam keluarga dan komunitas mereka, menciptakan siklus virtuous yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara lebih luas. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas tinggi menarik investasi dari perusahaan yang mencari keterampilan khusus, yang pada gilirannya mendorong pembentukan modal fisik dan inovasi lebih lanjut.

Dengan demikian, investasi dalam modal manusia bukan hanya tentang memaksimalkan pemanfaatan modal fisik saat ini tetapi juga tentang mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan. Karena kemajuan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi global terus mengubah lanskap kerja, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi sama pentingnya dengan keterampilan teknis spesifik. Melalui pendidikan dan peningkatan kesehatan, tenaga kerja dapat terus mengembangkan dan menerapkan keterampilan baru yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan modal fisik dengan cara yang paling efektif, memastikan bahwa investasi ini memberikan pengembalian maksimal bagi ekonomi.

Dengan demikian, sumber daya modal dalam berbagai bentuknya adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif dan alokasi modal yang bijaksana diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi di suatu negara.

D. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Keduanya saling terkait dan menjadi kunci dalam banyak aspek, seperti:

1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Teknologi canggih memungkinkan otomatisasi dan mekanisasi, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri, pertanian, dan layanan.
2. Inovasi dan Riset: Ilmu pengetahuan mendorong inovasi melalui riset dan pengembangan. Hal ini menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi baru
3. Pendidikan dan Pelatihan: Teknologi informasi dan komunikasi memperluas akses terhadap pendidikan dan sumber pengetahuan, yang sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia.
4. Kesehatan: Kemajuan dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan, didukung oleh teknologi canggih, telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Sustainability dan Lingkungan: Teknologi hijau dan inovasi ilmiah berperan dalam mengatasi isu-isu lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Konektivitas dan Jaringan Global: Teknologi telah menghubungkan dunia seperti tidak pernah sebelumnya, memudahkan komunikasi, perdagangan, dan kolaborasi lintas negara.
7. Pertahanan dan Keamanan: Kemajuan teknologi dalam pertahanan dan keamanan memainkan peran vital dalam melindungi negara dan warganya.
8. Peningkatan Standar Hidup: Akses ke teknologi canggih seringkali berkorelasi dengan peningkatan standar hidup, karena menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan dasar dan kebutuhan sehari-hari.

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membantu meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan budaya. Negara-negara yang berinvestasi dalam R&D (penelitian dan pengembangan) dan adopsi teknologi canggih sering kali mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2024, sejumlah negara telah menonjol sebagai pemimpin dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa di antaranya mencakup (Basheer, 2024):

1. Amerika Serikat: AS tetap menjadi pemimpin dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), dengan investasi swasta yang besar dan inovasi signifikan dari perusahaan teknologi terkemuka.
2. China: Negara ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam penelitian AI, didukung oleh investasi besar pemerintah dan perusahaan seperti Tencent, Huawei, dan Baidu.
3. Jepang: Jepang dikenal dengan inovasi teknologinya, termasuk kemajuan signifikan dalam AI dan startup teknologi. Jerman: Negara ini fokus pada peningkatan pendanaan untuk penelitian AI dan telah muncul sebagai pemain kunci dalam teknologi AI.
4. Korea Selatan: Dengan skor komposit tertinggi dalam teknologi, Korea Selatan menunjukkan keunggulan dalam inovasi dan penerapan teknologi.
5. Israel: Dikenal sebagai "Start-up Nation", Israel telah berkembang dalam ekosistem AI, dengan penekanan kuat pada aplikasi militer dan sistem otonom.
6. Inggris Raya: UK memiliki ekosistem startup yang berkembang dan berperan penting dalam penelitian AI, dengan investasi pemerintah yang signifikan di sektor ini.
7. Singapura: Negara ini menonjol sebagai pusat AI di Asia Tenggara, dengan investasi pemerintah yang kuat dan sejumlah startup AI yang inovatif.
8. Kanada dan Perancis: Kedua negara ini juga membuat kemajuan signifikan dalam penelitian AI dan penerapan teknologi.

Secara global, dominasi Asia Timur dalam sains dan teknologi cukup jelas. Cluster Tokyo-Yokohama di Jepang, misalnya, menjadi terkemuka dalam aplikasi paten internasional dan publikasi ilmiah. Demikian pula, wilayah Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou di China dan Seoul di Korea Selatan menonjol sebagai pusat inovasi teknologi. 10 negara teratas untuk tingkat teknologi tertinggi di dunia pada tahun 2024 adalah sebagai berikut (Conte & Venditti, 2024; World Population Review, 2024e):

Tabel 3. 3 Negara Teratas Untuk Tingkat Teknologi Tertinggi di Dunia Pada Tahun 2024

Rank	Country	Composite Score
1	South Korea	6.63
2	United States	4.94
3	Taiwan	4.90
4	Denmark	4.79
5	Switzerland	4.68
6	Israel	4.10
7	Finland	3.94
8	Netherlands	3.79
9	Sweden	3.76
10	Norway	3.59

E. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah karena alasan berikut:

1. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi: Infrastruktur yang efisien seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan memudahkan transportasi barang dan jasa, yang vital untuk perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup: Fasilitas seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa infrastruktur dasar ini, kualitas hidup dapat terganggu secara signifikan.
3. Mempermudah Mobilitas: Transportasi yang baik memungkinkan mobilitas pekerja dan konsumen, mempermudah akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Mendorong Investasi: Infrastruktur yang berkualitas tinggi seringkali merupakan faktor kunci yang menarik investasi asing. Investor lebih cenderung menanamkan modal di tempat dengan infrastruktur yang dapat mendukung operasi bisnis.

Buku ini tidak diperjualbelikan

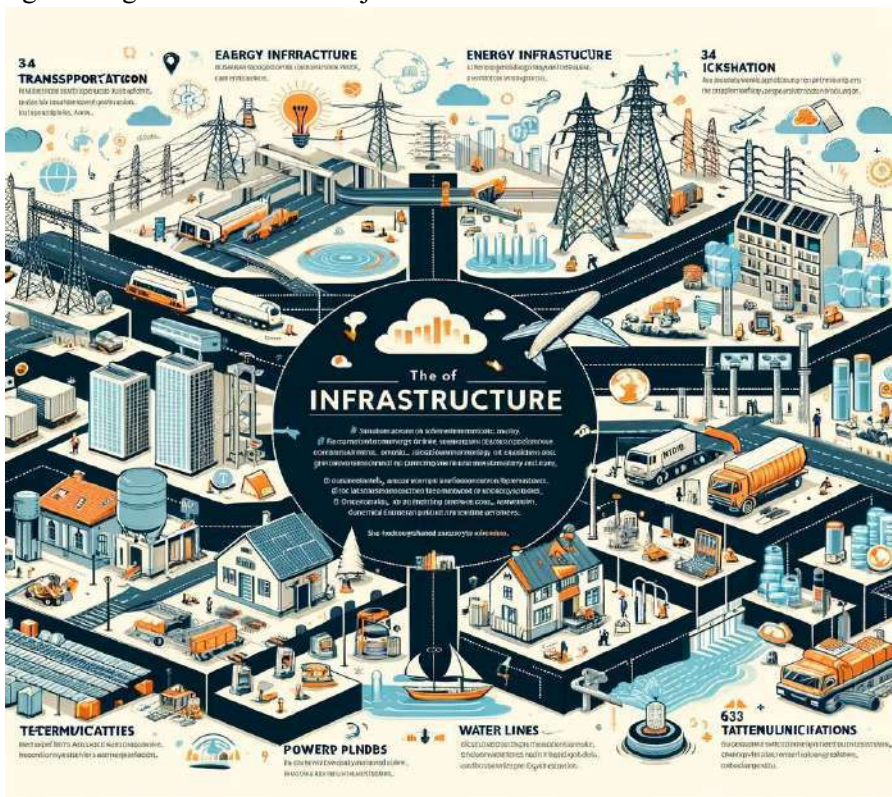
5. Mengurangi Ketimpangan: Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dengan menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat ekonomi yang lebih besar.
6. Mempengaruhi Pendidikan dan Pelatihan: Sekolah dan universitas yang terhubung dengan baik memungkinkan akses yang lebih besar ke pendidikan, yang vital untuk pembangunan modal manusia.
7. Mendukung Inovasi dan Teknologi: Infrastruktur digital seperti broadband dan jaringan telekomunikasi sangat penting untuk ekonomi berbasis pengetahuan, mendukung inovasi dan pengembangan teknologi.
8. Menanggapi Perubahan Iklim: Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi hijau, penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, memungkinkan negara dan wilayah untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Negara-negara dengan infrastruktur yang maju dan berkembang biasanya memiliki sistem transportasi, energi, dan komunikasi yang efisien dan modern. Beberapa contoh negara dengan infrastruktur terbaik di dunia:

1. Singapura: Dikenal dengan infrastruktur transportasi yang efisien, bandara yang terbaik di dunia, dan pelabuhan yang ramai.
2. Jepang: Memiliki sistem kereta api berkecepatan tinggi (Shinkansen) yang terkenal, infrastruktur perkotaan yang canggih, dan teknologi anti-gempa yang inovatif.
3. Jerman: Terkenal dengan Autobahns-nya (jalan bebas hambatan), sistem kereta api yang efisien, dan kualitas tinggi dalam rekayasa dan pembangunan.
4. Uni Emirat Arab: Dubai dan Abu Dhabi dikenal dengan pembangunan infrastruktur skala besar dan canggih, termasuk gedung pencakar langit dan proyek rekayasa mega.
5. Netherlands: Dikenal dengan sistem pengelolaan air dan bendungan yang canggih, serta infrastruktur transportasi dan logistik yang efisien.
6. Hong Kong: Memiliki salah satu pelabuhan terbesar dan bandara terpadat di dunia, serta sistem transportasi umum yang efisien.
7. Swiss: Terkenal dengan sistem kereta api yang akurat dan efisien, serta jaringan jalan yang terawat baik.

8. Korea Selatan: Mempunyai jaringan internet berkecepatan tinggi yang luas dan sistem transportasi umum yang modern.
9. Perancis: Memiliki jaringan kereta berkecepatan tinggi (TGV) yang luas dan infrastruktur energi, khususnya di bidang energi nuklir.
10. Amerika Serikat: Meskipun menghadapi tantangan dalam memodernisasi infrastrukturnya, AS memiliki beberapa bandara, jalan, dan jembatan terbesar dan paling sibuk di dunia.

Negara-negara ini telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam membangun dan memelihara infrastruktur mereka, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang terus-menerus adalah kunci untuk menjaga posisi mereka sebagai negara-negara dengan infrastruktur maju.



Gambar 3. 6 Infrastruktur Sebagai Kunci Penting Dalam Pembangunan

Gambar 3.6 menggambarkan peran infrastruktur dalam ekonomi. Infografis ini menyoroti aspek-aspek kunci seperti sistem transportasi, infrastruktur energi, telekomunikasi, serta sistem air dan sanitasi, dan bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, mendukung industri, meningkatkan kualitas hidup, serta mempromosikan perdagangan dan investasi. Representasi visual ini seharusnya memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran kritis infrastruktur dalam pengembangan ekonomi.

F. STABILITAS POLITIK

Stabilitas politik memang merupakan faktor penting dalam proses pembangunan suatu negara. Stabilitas politik merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menarik. Ketika sebuah negara menunjukkan stabilitas politik, investor domestik dan asing merasa lebih yakin bahwa investasi mereka akan terlindungi dari risiko-risiko politik seperti kekacauan, pergantian kekuasaan yang tidak terduga, atau kebijakan yang tidak konsisten. Lingkungan yang stabil memungkinkan para investor untuk merencanakan dan melaksanakan proyek jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah, yang penting untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Stabilitas ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga mendorong perekonomian lokal dengan membuka pintu untuk lebih banyak lapangan kerja, peningkatan produksi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, stabilitas politik berkontribusi terhadap pengembangan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang efektif. Pemerintahan yang stabil mampu membuat dan menerapkan rencana pembangunan jangka panjang, seperti proyek infrastruktur besar atau inisiatif ekonomi yang membutuhkan waktu dan sumber daya signifikan. Ini menghasilkan lingkungan yang dapat diprediksi untuk bisnis, memfasilitasi perencanaan dan investasi yang lebih baik. Selain itu, stabilitas politik juga menarik bantuan luar negeri dan kerja sama internasional, yang bisa menyediakan dana tambahan dan dukungan teknis untuk proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, stabilitas politik tidak hanya menjamin keamanan investasi tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Stabilitas politik merupakan fondasi penting untuk pemerintah dalam menerapkan dan menjaga kebijakan yang konsisten serta merencanakan strategi pembangunan jangka panjang. Dalam kondisi stabil, pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan inisiatif yang penting tanpa gangguan yang seringkali disebabkan oleh pergolakan politik. Stabilitas ini memungkinkan adanya kontinuitas dalam kebijakan dan program, memastikan bahwa proyek dan reformasi penting dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan kepercayaan bagi masyarakat dan investor dalam stabilitas dan kemajuan negara.

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi, hal ini menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat dan sektor bisnis. Stabilitas kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi jelas dan arah pembangunan yang konsisten, mengurangi ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan investasi. Akibatnya, baik individu maupun bisnis lebih cenderung untuk berinvestasi dalam ekonomi lokal, merencanakan proyek dan ekspansi bisnis jangka panjang dengan kepercayaan yang lebih besar. Investasi yang meningkat ini membantu memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi, memberikan dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan.

Stabilitas politik berperan penting dalam mengurangi risiko konflik internal, yang jika terjadi, dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur vital dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi stabil, kemungkinan konflik sosial, politik, atau etnis berkurang, menjaga agar infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tetap aman dan fungsional. Ini memungkinkan kegiatan ekonomi berlangsung tanpa gangguan, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik juga menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk berfokus pada aktivitas produktif dan inovatif, bukan mengatasi dampak dari ketidakstabilan.

Negara dengan stabilitas politik seringkali memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membangun dan mempertahankan hubungan internasional yang kuat dan menguntungkan. Stabilitas ini menciptakan persepsi positif di mata komunitas internasional, yang dapat mengakibatkan peningkatan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini termasuk mendapatkan akses

ke bantuan luar negeri yang berharga, baik dalam bentuk dana, sumber daya, maupun dukungan teknis. Selain itu, negara stabil biasanya lebih efektif dalam menegosiasikan akses ke pasar ekspor, memperluas peluang untuk perdagangan dan investasi. Keberhasilan dalam hal ini membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan, memperkuat posisi negara tersebut di panggung global.

Stabilitas politik memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum yang kuat dan adil, mempengaruhi baik warga negara maupun bisnis. Ketika sebuah negara politiknya stabil, biasanya lebih mampu mengimplementasikan hukum dan regulasi yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan transparan. Sistem hukum yang kuat dan adil penting untuk melindungi hak-hak individu dan korporasi, serta menjamin bahwa konflik dan sengketa dapat diselesaikan secara adil dan efisien. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, mendorong investasi, dan membangun kepercayaan di antara masyarakat dan pemangku kepentingan internasional. Stabilitas politik juga sering kali dikaitkan dengan pengurangan korupsi dan peningkatan pemerintahan yang baik, yang lebih lanjut memperkuat sistem hukum dan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang stabil lebih efektif dalam mengimplementasikan reformasi yang esensial untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Stabilitas politik menyediakan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan perubahan yang strategis, yang dapat mencakup segala hal dari perbaikan infrastruktur hingga pembaharuan kebijakan pendidikan dan kesehatan. Dalam lingkungan yang stabil, reformasi ini dapat dilakukan secara teratur dan terkendali, memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak hanya bertahan dalam jangka panjang tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Selain itu, pemerintahan yang stabil lebih mungkin untuk menerima dukungan publik dan kolaborasi antarsektor dalam menerapkan reformasi tersebut, yang mempercepat proses pembangunan dan memperkuat fondasi ekonomi dan sosial negara.

Stabilitas politik memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dua faktor yang sering menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah negara memiliki pemerintahan yang stabil, ia lebih cenderung memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mengidentifikasi dan menangani korupsi. Pemerintahan

yang stabil juga cenderung memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, mengurangi peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan mengurangi praktik-praktik ini, stabilitas politik dapat membantu membangun lingkungan bisnis yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan investor, dan secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Singkatnya, stabilitas politik menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem pemerintahan. Beberapa negara mengalami stabilitas politik yang buruk, yang memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan ekonomi mereka. Contoh negara-negara dengan stabilitas politik rendah termasuk Venezuela, Zimbabwe, Sudan, dan Afghanistan. Situasi ini berpengaruh dalam berbagai aspek:

1. **Investasi Asing yang Berkurang:** Ketidakstabilan politik sering kali mengakibatkan penurunan investasi asing. Investor cenderung menghindari negara dengan risiko tinggi akibat ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. **Gangguan dalam Pembangunan Infrastruktur:** Proyek infrastruktur sering terhambat atau terhenti di negara-negara dengan stabilitas politik rendah. Hal ini mengakibatkan kekurangan fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan sanitasi, yang penting untuk pembangunan.
3. **Meningkatnya Kemiskinan dan Pengangguran:** Dengan terhambatnya investasi dan pembangunan, kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih parah. Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan ketidakstabilan, dengan ketidakpuasan sosial yang meningkat berpotensi memicu lebih banyak konflik politik.
4. **Kerusakan pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan:** Sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan sering mengalami kekurangan pendanaan dan gangguan dalam negara yang politiknya tidak stabil, mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
5. **Risiko Konflik dan Kekerasan:** Ketidakstabilan politik meningkatkan risiko konflik dan kekerasan, yang dapat mengakibatkan kerusakan langsung pada infrastruktur dan kehidupan manusia, serta mengusir investasi dan pariwisata.

Negara-negara dengan stabilitas politik yang lebih baik, di sisi lain, sering kali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan di negara-negara ini cenderung lebih merata dan inklusif, mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

G. KELEMBAGAAN DAN TATA PEMERINTAHAN

Kelembagaan, dalam ilmu sosial, adalah pendekatan yang menekankan peran lembaga dalam kehidupan sosial masyarakat. Studi tentang lembaga memiliki sejarah panjang dan memperoleh wawasan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Munculnya kembali minat pada studi kelembagaan di awal tahun 1980-an merupakan reaksi terhadap pemikiran dominan yang mengabaikan konteks lembaga, dalam berbagai aspek. Kelembagaan yang muncul di tahun 1980-an disebut sebagai kelembagaan baru (*new institutionalism*), namun ini lebih merupakan pernyataan ulang dari konsep sebelumnya daripada sesuatu yang benar-benar baru (Barkanov, 2016).

Kelembagaan dan tata pemerintahan yang baik memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut:

1. **Kestabilan dan Kepastian Hukum:** Tata pemerintahan yang efektif dan lembaga yang kuat menciptakan lingkungan hukum yang stabil. Ini sangat penting untuk mendorong investasi, baik domestik maupun asing, serta memungkinkan individu dan bisnis untuk membuat perencanaan bisnis dengan keyakinan dan hati yang tenang.
2. **Pengurangan Korupsi:** Kelembagaan yang kuat sering dikaitkan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, serta menciptakan ketidakadilan. Tata pemerintahan yang baik mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. **Pelayanan Publik yang Efisien:** Tata pemerintahan yang baik memastikan bahwa layanan publik disediakan secara efisien dan efektif. Hal ini termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan dasar lainnya yang vital untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

4. Partisipasi dan Representasi Warga: Tata pemerintahan yang baik memungkinkan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang adil, dan sistem peradilan yang independen.
5. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan: Tata pemerintahan yang efektif memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk penciptaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
6. Stabilitas Sosial dan Politik: Sistem pemerintahan yang kuat dan stabil cenderung mengurangi risiko konflik sosial dan politik, yang penting untuk menjaga lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
7. Respon terhadap Krisis: Negara dengan tata pemerintahan yang baik cenderung lebih efektif dalam merespon krisis, baik itu bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Tata kelola yang efisien memungkinkan respon yang cepat dan terkoordinasi.

Secara keseluruhan, tata pemerintahan dan kelembagaan yang efektif dan kuat membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan stabilitas politik, semua sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

H. SOSIAL BUDAYA

Sosial budaya memang menjadi faktor penting dalam pembangunan sebuah masyarakat atau negara. Ini meliputi berbagai aspek, seperti nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan norma yang membentuk cara hidup dan interaksi sosial dalam masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa sosial budaya penting dalam pembangunan:

1. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Ekonomi

Budaya dapat mempengaruhi pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam sebuah ekonomi. Misalnya, nilai-nilai budaya yang menekankan kerja keras dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaruh sosial budaya terhadap ekonomi dapat diamati dalam berbagai contoh kasus, di mana perubahan dalam nilai-nilai dan preferensi sosial budaya memengaruhi strategi dan kinerja bisnis. Contoh kasus yang jelas adalah adaptasi strategi bisnis McDonald's terhadap perubahan preferensi

konsumen. Awalnya, McDonald's fokus pada menyediakan produk klasik seperti hamburger dan kentang goreng. Namun, seiring berubahnya kecenderungan pelanggan yang menginginkan makanan lebih sehat, McDonald's beradaptasi dengan menambahkan pilihan seperti salad, buah-buahan, dan oatmeal ke dalam menu mereka. Perubahan ini mencerminkan bagaimana perusahaan harus merespons perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen untuk tetap relevan dan berhasil dalam pasar yang kompetitif (Nasarudin, 2023).

Faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi bisnis meliputi pertumbuhan populasi, komposisi usia, struktur rumah tangga dan keluarga, pekerjaan, kekayaan dan kelas sosial, geografi, etnisitas, budaya, kebiasaan, serta keyakinan dan nilai-nilai. Misalnya, peningkatan kesadaran lingkungan telah mendorong konsumen untuk lebih memilih berurusan dengan perusahaan yang memiliki nilai-nilai serupa, yang memaksa perusahaan seperti Unilever untuk mengadaptasi kebijakan dan praktik bisnis mereka agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Nasarudin, 2023). Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan merespons dinamika sosial budaya dalam ekonomi. Bisnis yang berhasil beradaptasi dengan perubahan ini cenderung memiliki daya saing yang lebih baik dan dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.

2. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pendidikan dan Pembelajaran

Sistem nilai sosial budaya berperan dalam menentukan bagaimana pendidikan disampaikan dan diterima. Ini bisa mempengaruhi tingkat literasi, kualitas pendidikan, dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek. Perubahan sosial budaya membawa dampak signifikan terhadap cara pendidikan diselenggarakan, nilai-nilai yang diajarkan, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Salah satu contoh kasus pengaruh sosial budaya pada pendidikan adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, metode pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia telah mengalami perubahan. Penggunaan komputer, internet, dan sumber pustaka digital telah menjadi semakin umum di lingkungan pendidikan. Ini mencerminkan bagaimana perubahan sosial, seperti kemajuan teknologi, mempengaruhi cara pendidikan disampaikan dan diterima oleh para pelajar. Perubahan lain terkait dengan dampak

pandemi Covid-19, yang memaksa sekolah dan universitas beralih ke pembelajaran online. Sebelum pandemi, pembelajaran online telah ada tetapi tidak digunakan secara luas. Situasi pandemi mempercepat adopsi teknologi pembelajaran ini, meskipun terdapat tantangan seperti akses dan efektivitas pembelajaran jarak jauh.

Dalam konteks lebih luas, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi sistem pendidikan. Misalnya, perkembangan ekonomi dan industri mempengaruhi tuntutan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam tenaga kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi kurikulum dan pendekatan pendidikan di sekolah dan universitas. Pendekatan sosiokultural dalam pendidikan menekankan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam pembelajaran. Dengan memahami latar belakang budaya siswa, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan menyediakan pengalaman belajar yang lebih relevan bagi semua siswa. Kolaborasi dan kerja kelompok juga menjadi komponen penting dalam metode ini, karena melalui kerjasama, siswa dapat belajar dari satu sama lain dan membangun keterampilan sosial yang penting. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran yang berbasis perspektif sosiokultural. Penggunaan teknologi membantu menciptakan pengalaman belajar yang kolaboratif dan bermakna, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam interaksi dan kerja sama dengan sesama siswa atau guru di berbagai tempat geografis. Peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perspektif sosiokultural. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya serta memastikan pendidikan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam.

Oleh karena itu, pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan bukan hanya mengubah cara pengajaran, tetapi juga mempengaruhi bagaimana pendidikan dipahami dan dihargai dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan untuk tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan pemahaman budaya.

3. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Kohesi dan Integrasi Sosial

Budaya yang menghargai toleransi, keragaman, dan inklusi dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan stabil. Hal ini penting untuk membangun fondasi sosial yang kuat bagi pembangunan. Sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap kohesi dan integrasi sosial dalam masyarakat. Contoh kasus yang dapat menggambarkan hal ini termasuk peristiwa sejarah dan kegiatan sosial yang terjadi di Indonesia.

Salah satu contoh adalah peristiwa Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan ini, yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dan kemudian melalui G30S/PKI pada tahun 1965, merupakan upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Pemberontakan ini menimbulkan ketegangan dan konflik ideologi dalam masyarakat, yang akhirnya dapat ditumpas melalui intervensi pemerintah dan TNI.

Contoh lain adalah Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang bertujuan untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap Perjanjian Renville dan diakhiri melalui operasi militer oleh TNI. Gerakan Andi Azis di Sulawesi Selatan juga merupakan contoh gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap pasukan APRIS/TNI dan berhasil diatasi melalui konflik militer.

Dalam konteks yang lebih luas, integrasi sosial di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai inisiatif dan praktik yang mendorong persatuan dalam keragaman. Ini termasuk praktik gotong royong, kerjasama dalam pendidikan dan agama, serta berbagai inisiatif lain yang mempromosikan harmoni sosial. Keberagaman budaya di Indonesia seringkali menjadi tantangan dalam pembentukan integrasi sosial, namun melalui berbagai usaha, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, integrasi ini berhasil dicapai. Penting untuk memahami bahwa integrasi sosial membutuhkan waktu dan kesadaran masyarakat untuk menerima perbedaan. Kegagalan dalam pembentukan integrasi sosial bisa menyebabkan konflik, oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat yang beragam.

4. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Kebijakan Publik dan Tata Kelola

Nilai-nilai budaya mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diterapkan. Misalnya, masyarakat yang menghargai keadilan sosial akan cenderung mendukung kebijakan yang promosi kesetaraan dan keadilan. Sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik dan tata kelola. Contoh-contoh kasus yang menunjukkan pengaruh ini mencakup berbagai program dan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menangani isu-isu sosial dan memajukan keadilan sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia, USAID telah bermitra dengan pemerintah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Hal ini termasuk penggunaan sistem LAPOR untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memproses pengaduan masyarakat, serta dukungan terhadap peradilan pidana daring yang memastikan keadilan tetap ada selama pandemi COVID-19. Kebijakan publik ini menunjukkan bagaimana aspek-aspek sosial budaya, seperti kebutuhan pendidikan inklusif, akses keuangan, dan pemahaman tentang manajemen keuangan, memengaruhi cara pemerintah merumuskan dan melaksanakan program-programnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan akses yang lebih baik ke berbagai layanan kepada semua segmen masyarakat, dengan demikian menguatkan integrasi sosial dan mengurangi ketimpangan (Guampe, Kundhani, et al., 2023; Guampe, Rosidah, et al., 2023).

5. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan

Sikap budaya terhadap lingkungan dan sumber daya alam mempengaruhi bagaimana sumber daya ini dikelola. Budaya yang mengutamakan kelestarian dapat mendorong praktik pembangunan berkelanjutan. Sosial budaya memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan, terutama dalam konteks Indonesia. Sebagai contoh, kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia sejak tahun 1960-an telah memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sering kali menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Eksploitasi yang tidak menghiraukan kebutuhan masyarakat setempat dan lingkungan telah menyebabkan ketegangan sosial dan

konflik yang disertai kekerasan, seperti yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan mencakup prinsip-prinsip yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Beberapa contoh praktik pengelolaan ini termasuk pertanian padi sawah yang memerlukan persyaratan kondisi fisik tertentu dan penambangan batubara yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan secara hemat, dan pencarian alternatif berupa sumber daya baru terbarukan perlu diupayakan agar sumber daya ini dapat digunakan sepanjang hayat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa praktik sosial budaya dan pandangan masyarakat terhadap sumber daya alam sangat memengaruhi cara pengelolaan sumber daya tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial budaya dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya dan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Perubahan Sosial dan Inovasi

Budaya yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi dapat mempercepat adaptasi terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi, yang krusial dalam pembangunan. Sosial budaya mempengaruhi perubahan sosial dan inovasi dengan cara yang kompleks. Sebagai contoh, dalam masyarakat, perubahan sosial terlihat dari berubahnya permainan yang digemari anak-anak. Di masa lalu, anak-anak sering bermain petak umpet atau kelereng, tetapi sekarang mereka lebih menyukai game online dan konsol. Perubahan dalam sikap, seperti kritis terhadap pemerintah, dan penguasaan bahasa juga menunjukkan perubahan sosial. Misalnya, masyarakat yang dulu hanya menguasai bahasa daerah kini menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Di desa, modernisasi telah mengubah sistem kerja, gaya hidup, dan ekonomi. Misalnya, penggunaan traktor menggantikan kerbau untuk membajak sawah, yang mengakibatkan perubahan dalam mata pencaharian dan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong. Dengan demikian, sosial budaya bukan hanya latar belakang tetapi juga menjadi pendorong aktif dalam proses pembangunan. Menghargai dan memahami keragaman sosial budaya adalah kunci untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan inklusif.

I. STABILITAS DUNIA INTERNASIONAL

Stabilitas dunia internasional memiliki peranan krusial dalam pembangunan ekonomi global karena mempengaruhi berbagai aspek kegiatan ekonomi yang melintasi batas negara. Stabilitas politik dan keamanan di tingkat internasional memegang peran penting dalam memfasilitasi perdagangan, investasi, serta aliran modal antar negara.

Negara-negara yang stabil secara politik dan keamanan menjadi lebih menarik bagi investor. Investor cenderung mencari lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk menempatkan modalnya. Dalam situasi stabilitas politik dan keamanan, investasi asing cenderung meningkat, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi lainnya di negara tersebut.

Sebaliknya, ketidakstabilan di tingkat global dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang merambat ke seluruh dunia. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, terorisme, atau krisis keamanan lainnya dapat mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan risiko dalam perdagangan dan investasi, serta menciptakan volatilitas dalam pasar keuangan. Akibatnya, bisnis menjadi enggan untuk melakukan investasi jangka panjang, perdagangan menjadi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Oleh karena itu, stabilitas internasional menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh dunia. Kerja sama antarnegara dalam memelihara stabilitas politik dan keamanan menjadi esensial dalam memastikan kelancaran perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Selain itu, inisiatif untuk mencegah konflik dan memperkuat institusi internasional juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan global yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

BAB 4 STRUKTUR EKONOMI

A. SEKTOR PRIMER

Sektor primer, yang mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, memainkan peran penting dalam struktur ekonomi banyak negara, khususnya di negara berkembang. Sektor ini biasanya menjadi landasan ekonomi, menyediakan sumber pendapatan utama, lapangan kerja, dan kontribusi signifikan terhadap produksi nasional. Pertanian, misalnya, tidak hanya berperan dalam menyediakan pangan dan bahan baku untuk industri, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di banyak negara berkembang. Dalam konteks ini, pertanian berkontribusi langsung terhadap keamanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan berperan penting dalam perekonomian pedesaan.

Kehutanan dan perikanan juga memiliki peranan penting. Kehutanan berkontribusi pada perekonomian melalui pemanfaatan kayu dan produk non-kayu, yang penting untuk industri seperti konstruksi, pembuatan kertas, dan furnitur. Namun, penting untuk dikelola secara berkelanjutan agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sementara itu, sektor perikanan penting tidak hanya untuk keamanan pangan tetapi juga sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, terutama di daerah pesisir dan pulau. Namun, overfishing dan kerusakan lingkungan laut bisa menjadi tantangan besar, menimbulkan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Sektor pertambangan juga merupakan kontributor utama dalam beberapa perekonomian, terutama bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Pertambangan dapat menghasilkan pendapatan ekspor yang signifikan, memberikan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan dalam bentuk dampak lingkungan dan sosial, seperti pencemaran, degradasi tanah, dan konflik atas penggunaan lahan. Oleh karena itu, penerapan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan pembagian manfaat yang adil menjadi kunci untuk memastikan

bahwa sektor pertambangan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sektor primer memainkan peran vital dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara berkembang. Namun, agar kontribusi ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat yang luas, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sumber daya ini secara hati-hati, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan, investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, dan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat sektor primer bagi ekonomi secara keseluruhan.

1. Peran Sektor Pertanian Dalam Struktur Ekonomi Indonesia

Tabel 4. 1 Persentase Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023

Jenis Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanaman Pangan	2,82	3,07	2,6	2,32	2,26
2	Tanaman Hortikultura	1,51	1,62	1,55	1,44	1,37
3	Tanaman Perkebunan	3,27	3,63	3,94	3,76	3,88
4	Peternakan	1,62	1,69	1,58	1,52	1,56
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,2	0,19	0,18	0,18
Total kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia		9,4	10,2	9,85	9,22	9,25

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Berdasarkan data yang diolah dari Statistik Indonesia 2024 yang terdapat pada Tabel 4.1 menampilkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Kontribusi disajikan berdasarkan jenis lapangan usaha yang meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan.

Dari tahun 2019 ke 2020, terjadi peningkatan pada setiap subsektor kecuali Peternakan, yang meningkat hanya dari 1,62% menjadi 1,69%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pada setiap subsektor kecuali

Tanaman Perkebunan, yang mengalami kenaikan signifikan dari 3,63% menjadi 3,94%. Kemudian dari tahun 2021 ke 2022, setiap subsektor menunjukkan penurunan kontribusi, dengan Tanaman Pangan turun dari 2,6% ke 2,32%, dan trend serupa terlihat pada subsektor lain.

Pada tahun 2023, Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Jasa Pertanian dan Perburuan terus menunjukkan penurunan persentase. Sementara itu, Tanaman Perkebunan dan Peternakan menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 10,2%, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya menjadi 9,85% pada tahun 2021, dan terus turun hingga 9,25% pada tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa walaupun terdapat fluktuasi pada subsektor tertentu, secara umum terjadi penurunan dalam kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Indonesia selama periode lima tahun tersebut.

2. Peran Sektor Kehutanan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia



Gambar 4. 1 Persentase Sumbangan sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023

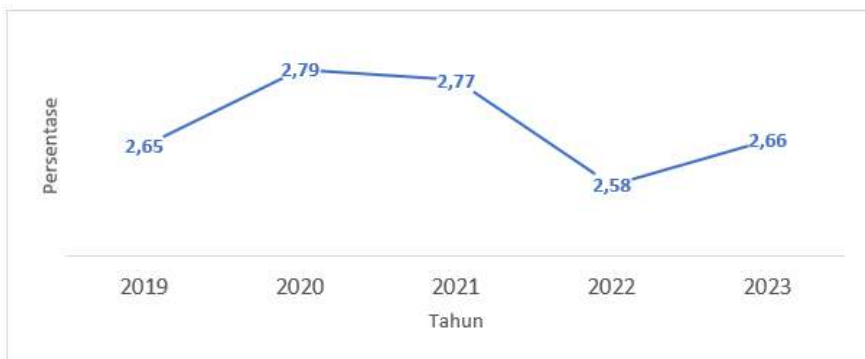
Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Grafik pada Gambar 4.1 menunjukkan persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode tahun 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari Statistik Indonesia 2024. Pada tahun 2019, sektor kehutanan berkontribusi sebesar 0,66% terhadap PDB Indonesia. Tahun berikutnya, di 2020, terjadi peningkatan ke 0,7%, yang menandakan peningkatan kinerja atau output sektor kehutanan dalam perekonomian negara. Namun, setelah tahun tersebut,

terjadi penurunan kontribusi sektor kehutanan yang konsisten tiap tahunnya. Pada tahun 2021, kontribusi sektor kehutanan stabil pada 0,66%, yang sama dengan tahun 2019. Selanjutnya, di tahun 2022, terjadi penurunan lebih lanjut ke 0,6% dan berlanjut menurun menjadi 0,62% pada tahun 2023.

Analisis dari tren yang terlihat di grafik ini dapat menunjukkan bahwa setelah mengalami peningkatan singkat pada tahun 2020, sektor kehutanan Indonesia mengalami penurunan berkelanjutan dalam kontribusinya terhadap PDB. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan produksi atau produktivitas, perubahan dalam praktik pengelolaan kehutanan, kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, perubahan permintaan terhadap produk kehutanan, atau dampak dari masalah lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim.

3. Peran Sektor Perikanan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia



Gambar 4. 2 Persentase Sumbangan sektor perikanan terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Berdasarkan data yang diolah dari Statistik Indonesia 2024, pada tahun 2019 sektor perikanan menyumbang sebesar 2,65% terhadap PDB Indonesia. Tren ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,79%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan atau peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi negara. Persentase tersebut sedikit menurun menjadi 2,77% pada tahun 2021, menunjukkan sedikit penurunan dalam kontribusi sektor ini. Akan tetapi, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih tajam menjadi 2,58%, dan tren penurunan berlanjut hingga

tahun 2023 dengan sumbangan sektor perikanan terhadap PDB Indonesia adalah 2,66%.

Tren grafik tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan mengalami peningkatan kontribusi ke PDB pada awal periode sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti perubahan dalam kebijakan perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan, perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas perikanan, ataupun mungkin penurunan permintaan global atau domestik terhadap produk perikanan. Tren ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut strategi pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan di Indonesia untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap ekonomi, mengingat pentingnya sektor ini bagi banyak komunitas pesisir dan bagi keamanan pangan Nasional.

4. Peran Sektor Pertambangan Dalam Struktur Ekonomi Indonesia

Tabel 4. 2 Persentase Sumbangan sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023

Jenis Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	2,78	2,15	2,72	3	2,49
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	2,33	1,83	3,55	6,62	5,34
3	Pertambangan Bijih Logam	0,61	0,85	1,21	1,24	1,3
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,54	1,6	1,5	1,36	1,38
Total kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia		7,26	6,43	8,97	12,22	10,52

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan persentase sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Data tersebut terbagi dalam beberapa subsektor: Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Pada tahun 2019,

total kontribusi sektor pertambangan adalah 7,26%. Ini meningkat secara signifikan selama periode 5 tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan kontribusi 12,22%, sebelum turun menjadi 10,52% pada tahun 2023. Subsektor Minyak, Gas, dan Panas Bumi menunjukkan penurunan dari 2,78% pada tahun 2019 menjadi 2,15% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 3% pada tahun 2022, dan turun kembali menjadi 2,49% pada tahun 2023. Subsektor Batubara dan Lignit mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 2,33% pada tahun 2019 menjadi 6,62% pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 5,34% pada tahun 2023. Subsektor Pertambangan Bijih Logam menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 0,61% pada tahun 2019 hingga 1,3% pada tahun 2023. Subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya mengalami fluktuasi, dimulai dari 1,54% pada tahun 2019, naik ke 1,6% pada tahun 2020, turun menjadi 1,36% pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 1,38% pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan perikanan yang dibahas sebelumnya, sektor pertambangan menunjukkan pola yang berbeda dimana sektor pertanian menunjukkan penurunan kontribusi secara umum dari tahun 2019 hingga 2023, dengan puncak kontribusi pada tahun 2020. Sektor perikanan mengalami peningkatan pada awalnya tetapi kemudian menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan sektor pertambangan, sebaliknya, menunjukkan tren peningkatan yang kuat, terutama pada subsektor Batubara dan Lignit, dengan puncak kontribusi pada tahun 2022 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023.

Data tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertambangan merupakan kontributor yang kuat terhadap PDB Indonesia selama periode tersebut, dengan pertumbuhan yang paling menonjol di antara sektor-sektor ekonomi yang dibahas. Penurunan pada tahun 2023 dalam sektor pertambangan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga komoditas global, kebijakan pemerintah, investasi dalam teknologi baru, atau isu lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini berbeda dengan tren umum penurunan pada sektor pertanian dan perikanan, yang dapat menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur ekonomi atau dampak dari faktor eksternal yang mempengaruhi sektor-sektor tersebut.

B. SEKTOR SEKUNDER

Sektor sekunder, yang mencakup industri dan manufaktur, berperan vital dalam ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai penghubung antara sektor primer yang menyediakan bahan mentah dan sektor tersier, yang terlibat dalam penyediaan jasa. Proses ini melibatkan konversi bahan mentah menjadi produk yang bisa digunakan atau dijual kepada konsumen.

Sektor sekunder menerima output dari sektor primer seperti hasil pertanian, pertambangan, dan kehutanan, dan mengolahnya menjadi barang-barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, biji-bijian dari pertanian diolah menjadi makanan, logam dan mineral dari pertambangan diubah menjadi komponen mekanis atau struktural, dan kayu dari sektor kehutanan diubah menjadi furniture atau bahan bangunan.

Proses manufaktur dapat meliputi produksi massal dimana barang-barang diproduksi dalam jumlah besar menggunakan lini produksi yang memungkinkan efisiensi dan pengurangan biaya. Ada juga produksi skala besar yang menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Sedangkan yang terakhir adalah spesialisasi dimana fokus pada pembuatan produk tertentu, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keahlian khusus dan meningkatkan kualitas.

Sektor sekunder memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti berkontribusi terhadap PDB. Dengan menambah nilai pada bahan mentah, sektor sekunder meningkatkan nilai ekonomi barang tersebut dan, oleh karena itu, kontribusi terhadap PDB negara. Selain itu, barang-barang manufaktur sering memiliki pasar global dan dapat meningkatkan ekspor suatu negara. Dan pada akhirnya sektor sekunder ini juga akan menciptakan berbagai lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat memperkuat kelas menengah.

Sektor industri dan manufaktur menjadi katalis untuk inovasi dan kemajuan teknologi. Penggunaan mesin dan robot yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan di sektor sekunder juga seringkali berinvestasi dalam penelitian untuk mengembangkan produk baru atau proses yang lebih efisien. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan komunikasi seringkali dibangun dan ditingkatkan untuk mendukung sektor ini.

Tidak terlepas juga sektor sekunder berperan dalam mengubah lanskap tenaga kerja dengan berbagai cara seperti kebutuhan akan keterampilan khusus, pelatihan dan pendidikan serta perubahan sosioekonomi. Pada akhirnya sektor sekunder adalah motor yang mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur di sektor ini dapat membawa manfaat ekonomi yang luas dan memajukan sebuah negara dari segi kemajuan ekonomi dan sosial.

Tabel 4. 3 Persentase Sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023

Jenis Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2,13	1,99	1,88	1,86	1,92
2	Industri Makanan dan Minuman	6,4	6,84	6,61	6,32	6,55
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,89	0,88	0,8	0,69	0,71
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,26	1,21	1,06	1,03	0,98
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	0,27	0,25	0,25	0,25	0,24
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,51	0,51	0,45	0,41	0,39
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,69	0,72	0,67	0,66	0,67
8	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	1,68	1,92	2	1,82	1,75
9	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	0,56	0,54	0,52	0,45	0,4

10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,59	0,56	0,52	0,46	0,47
11	Industri Logam Dasar	0,73	0,78	0,81	0,86	0,94
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,68	1,63	1,52	1,45	1,57
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,3	0,28	0,29	0,28	0,27
14	Industri Alat Angkutan	1,63	1,35	1,48	1,45	1,49
15	Industri Furnitur	0,25	0,25	0,25	0,21	0,2
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
Total kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia		19,7	19,87	19,24	18,34	18,67

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Tabel 4.3 menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, terbagi dalam 16 subkategori industri yang berbeda. Berdasarkan data yang diolah dari Statistik Indonesia Tahun 2024 tersebut dapat dilihat bahwa Industri Makanan dan Minuman adalah kontributor terbesar dalam sektor ini, dengan kontribusi paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 6,55%, meskipun ada fluktuasi selama periode tersebut. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 ke 2021, di mana ia mencapai puncaknya dengan 2%, sebelum mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

Sebagian besar industri menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 ke 2023, seperti Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang turun dari 1,26% ke 0,98%, dan Industri Logam Dasar yang naik dari 0,73% ke 0,94% pada tahun 2022 sebelum menurun sedikit pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia mengalami kenaikan dari 19,7% pada tahun 2019 menjadi 19,87% pada tahun 2020,

sebelum mengalami penurunan secara bertahap hingga 18,67% pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang jauh lebih signifikan terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Meskipun sektor pertambangan menunjukkan tren peningkatan yang tajam hingga tahun 2022 sebelum turun pada tahun 2023, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang lebih stabil tetapi cenderung menurun. Sektor pertanian dan perikanan, di sisi lain, menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten selama periode yang sama. Peningkatan yang tajam dalam sektor pertambangan pada tahun 2022 (12,22%) tidak terlihat dalam sektor industri pengolahan, di mana kontribusinya cenderung stabil tetapi secara umum menurun. Kesimpulannya, sektor industri pengolahan, meskipun menunjukkan penurunan kontribusi, masih memainkan peran yang jauh lebih dominan dalam PDB Indonesia dibandingkan sektor-sektor lain yang dibahas. Penurunan ini bisa menjadi indikator penting untuk evaluasi kebijakan industri, investasi dalam teknologi, dan adaptasi terhadap tren pasar global. Sektor industri pengolahan merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia dan perubahan dalam kontribusinya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

C. SEKTOR TERSIER

Sektor tersier dalam struktur ekonomi suatu negara merujuk pada sektor jasa. Ini melibatkan kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan daripada menghasilkan barang. Sektor ini mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, asuransi, hingga jasa profesional seperti konsultasi, desain, dan teknologi informasi. Sektor tersier berperan penting dalam ekonomi modern karena menawarkan dukungan penting untuk sektor primer (pertanian, perikanan, pertambangan) dan sektor sekunder (industri manufaktur), serta memenuhi kebutuhan layanan langsung bagi individu dan bisnis.

Pertumbuhan sektor tersier sering kali dianggap sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Saat suatu negara berkembang, proporsi kontribusi sektor tersier terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nya

cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan, yang mengarah pada permintaan yang lebih tinggi untuk berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan teknologi informasi.

Dalam ekonomi yang lebih maju, sektor tersier sering menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Teknologi, terutama digitalisasi dan internet, telah secara signifikan mengubah sektor tersier, memungkinkan penciptaan model bisnis baru dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan.

Pengembangan sektor tersier juga dapat memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan sosial. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari pertumbuhan sektor ini, diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan keahlian, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan sistem keuangan yang inklusif.

Jasa perdagangan, jasa perdagangan memainkan peran vital dalam struktur ekonomi suatu negara, mempengaruhi hampir setiap aspek dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial. Berikut ini adalah beberapa peran kunci dari jasa perdagangan dalam ekonomi:

1. **Memfasilitasi Pertukaran Barang dan Jasa.** Jasa perdagangan memudahkan pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini termasuk berbagai aktivitas seperti pemasaran, distribusi, dan penjualan ritel, yang semuanya vital untuk aliran efisien produk dari produsen ke konsumen akhir.
2. **Mendorong Efisiensi dan Spesialisasi.** Dengan memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka di pasar yang lebih luas, jasa perdagangan mendorong spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mengarah pada efisiensi produksi yang lebih besar dan dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk baru.
3. **Penghubung untuk Pasar Global.** Jasa perdagangan, khususnya dalam konteks perdagangan internasional, bertindak sebagai penghubung yang memungkinkan negara untuk mengambil bagian dalam ekonomi global. Hal ini memungkinkan negara untuk mengeksport barang dan jasa yang

mereka produksi secara efisien, sambil mengimpor barang dan jasa yang kurang efisien atau tidak mungkin diproduksi secara domestik.

4. Penciptaan Lapangan Kerja. Sektor perdagangan adalah sumber utama penciptaan lapangan kerja. Dari ritel hingga grosir, dari pemasaran digital hingga logistik, jasa perdagangan menciptakan berbagai jenis pekerjaan yang membutuhkan beragam keterampilan dan spesialisasi.
5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Aktivitas perdagangan, khususnya ekspor, adalah motor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka pasar baru dan memperluas yang sudah ada, jasa perdagangan membantu perusahaan meningkatkan omzet dan laba, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Penyebaran Teknologi dan Inovasi. Melalui perdagangan internasional, teknologi, praktik bisnis terbaik, dan inovasi dapat menyebar dari satu negara ke negara lain. Jasa perdagangan memainkan peran kunci dalam proses ini, memungkinkan pengetahuan dan teknologi baru diadopsi lebih luas dan cepat.
7. Stabilisasi Harga. Dengan mengintegrasikan pasar domestik ke pasar global, jasa perdagangan dapat membantu menstabilkan harga beberapa barang dan jasa dengan mengurangi volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi dalam produksi domestik atau permintaan.
8. Peningkatan Kesejahteraan Konsumen. Jasa perdagangan meningkatkan pilihan konsumen dalam hal kualitas, variasi, dan harga barang dan jasa. Akses ke pasar yang lebih luas berarti konsumen dapat memilih dari berbagai produk yang lebih luas, sering kali dengan harga yang lebih kompetitif.

Dengan demikian, jasa perdagangan memiliki dampak yang mendalam dan luas terhadap ekonomi, mempengaruhi segalanya dari kinerja ekonomi makro hingga pilihan sehari-hari yang dihadapi oleh konsumen individu. Perkembangan jasa perdagangan di Indonesia menunjukkan peran signifikan dalam ekonomi Nasional. Berdasarkan Survei Perdagangan Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata omzet perusahaan di sektor perdagangan pada tahun 2020 adalah 18,23 miliar rupiah per tahun. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa pengusaha di sektor ini mayoritas adalah laki-laki (79,51%) dengan rata-rata usia 45 tahun, dan rata-rata jumlah pekerja per perusahaan adalah 13 orang dengan rata-rata gaji sebesar 38,20 juta rupiah per tahun (Badan Pusat Statistik, 2022).

Laporan Perekonomian Indonesia 2023 dari BPS memberikan gambaran lebih luas mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi Indonesia, mencakup indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi, yang semua memberikan konteks bagi pemahaman perkembangan sektor perdagangan (Sofian et al., 2021). Nilai tambah dari sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyoroti pentingnya sektor ini bagi ekonomi Nasional.

Kedua sumber ini memberikan perspektif yang berharga tentang pentingnya jasa perdagangan dalam ekonomi Indonesia, mencerminkan kontribusi sektor ini tidak hanya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan omzet perusahaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Nasional.

Jasa transportasi, Jasa transportasi memegang peran penting dalam struktur ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai tulang punggung untuk hampir semua jenis kegiatan ekonomi. Peran tersebut meliputi beberapa aspek utama:

1. Mendukung Perdagangan. Jasa transportasi memungkinkan pergerakan barang dari produsen ke konsumen dan dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ini esensial untuk perdagangan domestik dan ekspor-impor, memungkinkan negara untuk mengambil bagian dalam perekonomian global.
2. Mendorong Spesialisasi dan Distribusi. Dengan transportasi yang efisien, perusahaan dapat memanfaatkan spesialisasi regional dan internasional, memproduksi barang di lokasi dimana mereka paling efisien dan efektif untuk melakukannya. Hal ini memungkinkan distribusi barang yang lebih luas dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk dan jasa.
3. Penghubung Pasar. Jasa transportasi menghubungkan berbagai pasar, memungkinkan pertukaran barang dan jasa antar wilayah yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya sistem transportasi yang efektif. Ini membantu dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan antar berbagai wilayah.
4. Penggerak Pertumbuhan dan Pekerjaan. Sektor transportasi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan penciptaan lapangan kerja. Dari pembangunan infrastruktur hingga operasional harian, sektor

ini membutuhkan berbagai macam pekerjaan, mulai dari insinyur hingga operator dan manajer.

5. Meningkatkan Efisiensi Ekonomi. Sistem transportasi yang efektif mengurangi biaya waktu dan uang dalam pengiriman barang dan jasa, meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi, yang pada gilirannya dapat menurunkan harga bagi konsumen.
6. Pendorong Inovasi dan Teknologi. Sektor transportasi seringkali berada di garis depan adopsi dan pengembangan teknologi baru, dari transportasi massal yang ramah lingkungan hingga logistik dan manajemen rantai pasokan berbasis digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sektor tetapi juga membawa manfaat lebih luas bagi ekonomi.
7. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas. Jasa transportasi memperkuat aksesibilitas dan mobilitas bagi individu, memungkinkan mereka untuk bepergian untuk pekerjaan, pendidikan, dan keperluan pribadi lainnya. Hal ini penting untuk kualitas hidup dan mobilitas sosial.

Secara keseluruhan, jasa transportasi tidak hanya vital untuk operasi harian dari ekonomi yang ada saat ini tetapi juga untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sektor ini berperan dalam hampir semua aspek kehidupan ekonomi dan sosial, menjadikannya salah satu sektor paling penting dalam struktur ekonomi modern.

Perkembangan sektor jasa transportasi di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan I 2023, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 15,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipimpin oleh lonjakan di subsektor angkutan rel, yang tumbuh 51,09%, dan angkutan udara, dengan pertumbuhan 41,1%. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut, seiring dengan penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) (Victoria, 2023).

Untuk memberikan perspektif, pada tahun 2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 3,24%, mencapai PDB sebesar Rp406,19 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini menandai pemulihan dari kontraksi sebesar 15,05% pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19. Rata-rata pertumbuhan tahunan sektor ini antara tahun

2011 dan 2019 adalah 7,31%, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat sebesar 8,49% pada tahun 2017 (Kusnandar, 2022).

Data ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia mengalami pemulihan pasca-pandemi yang kuat, didorong oleh peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi. Namun, pertumbuhan ini masih perlu ditingkatkan agar dapat kembali ke level pra-pandemi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Jasa perbankan, Jasa perbankan memegang peran krusial dalam struktur ekonomi suatu negara melalui berbagai cara, berperan sebagai tulang punggung dalam sistem keuangan. Beberapa peran utama jasa perbankan termasuk:

1. **Mobilisasi Tabungan:** Bank merupakan perantara utama antara penyimpan uang (depositors) dan mereka yang memerlukan dana (borrowers). Dengan menerima deposit dari masyarakat dan kemudian meminjamkannya kepada individu atau bisnis yang membutuhkan, bank memobilisasi tabungan dari seluruh ekonomi, membuat dana tersedia untuk investasi produktif.
2. **Pembiayaan untuk Bisnis:** Bank menyediakan modal yang diperlukan untuk memulai, mengoperasikan, dan memperluas bisnis. Kredit yang diberikan oleh bank memungkinkan perusahaan untuk investasi dalam infrastruktur, teknologi baru, dan ekspansi, yang semuanya penting untuk pertumbuhan ekonomi.
3. **Pendorong Inovasi:** Melalui pemberian kredit kepada startup dan perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, bank memainkan peran penting dalam mendukung inovasi. Ini termasuk pembiayaan untuk pengembangan produk baru, teknologi, dan model bisnis.
4. **Stabilisasi Ekonomi:** Bank berperan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral, seperti mengatur suku bunga. Hal ini membantu dalam mengendalikan inflasi dan stabilisasi ekonomi. Selain itu, fasilitas kredit darurat yang disediakan oleh bank dapat membantu mengatasi krisis keuangan.
5. **Peningkatan Efisiensi Pembayaran:** Sistem pembayaran yang efisien adalah kunci untuk ekonomi yang berfungsi dengan baik. Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer dana

elektronik, cek, dan kartu pembayaran, yang memudahkan dan mempercepat transaksi.

6. Akses ke Layanan Keuangan: Bank menyediakan akses ke berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk tabungan, pinjaman, hipotek, dan asuransi. Hal ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mengelola risiko, berinvestasi dalam masa depan, dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek dan panjang.
7. Pembangunan Infrastruktur: Kredit yang disediakan oleh bank sering digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem perawatan air, dan pembangkit listrik. Proyek-proyek ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.
8. Pengelolaan Risiko: Bank membantu individu dan bisnis dalam mengelola risiko melalui produk derivatif dan asuransi. Dengan demikian, bank memainkan peran penting dalam stabilitas keuangan keseluruhan suatu negara.

Dalam semua fungsi ini, perbankan menyokong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi investasi, konsumsi, dan produksi yang efisien. Melalui peran mereka dalam mobilisasi tabungan, pembiayaan investasi, dan pengelolaan risiko, bank sangat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan stabilitas finansial.

Perkembangan sektor perbankan Indonesia sepanjang tahun 2023 menunjukkan kinerja yang kuat di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2023, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 8,99% year on year (yoy). Kredit investasi mencatat pertumbuhan sebesar 10,22% yoy, kredit modal kerja tumbuh 8,10% yoy, dan kredit konsumsi tumbuh 9,28% yoy. Sektor ekonomi yang menjadi utama pendorong pertumbuhan kredit adalah pertambangan (15,23% yoy), transportasi (14,30% yoy), pertanian (8,62% yoy), dan perdagangan (5,70% yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 3,43% yoy, didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 6,01%. Indikator kinerja perbankan lainnya menunjukkan kondisi yang stabil dengan rasio NPL net sebesar 0,77% dan NPL gross sebesar 2,42%. Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 27,48%, menandakan tingkat kecukupan modal yang tinggi, sementara rasio alat likuid terhadap DPK berada di level 26,36%, menunjukkan likuiditas yang memadai (Burhan, 2023).

Laporan Perekonomian Indonesia 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan gambaran umum tentang kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2022 dan perkembangan terkini hingga triwulan kedua tahun 2023, termasuk sektor moneter dan perbankan. Laporan ini mencakup indikator makroekonomi utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi, yang semuanya memberikan konteks bagi pemahaman lebih lanjut tentang kinerja sektor perbankan (Sofian et al., 2021).

Kinerja positif ini menunjukkan ketahanan dan kapasitas adaptasi sektor perbankan Indonesia di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Optimalisasi fungsi intermediasi dan kondisi likuiditas yang memadai mencerminkan prospek positif untuk sektor perbankan di Indonesia ke depan.

Jasa kesehatan, Jasa kesehatan memegang peranan krusial dalam struktur ekonomi sebuah negara, mengintegrasikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai tingkatan, mulai dari tenaga kesehatan profesional hingga industri pendukung seperti farmasi dan teknologi kesehatan, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pasar kerja dan pembangunan ekonomi. Lebih jauh, investasi dalam kesehatan terbukti memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pekerja, yang memperkuat output ekonomi secara keseluruhan.

Kesehatan yang baik dalam populasi berarti individu lebih mampu berkontribusi secara ekonomi, sementara beban penyakit yang tinggi dapat menghambat potensi ekonomi. Sistem kesehatan yang efektif dan terjangkau juga mempromosikan stabilitas sosial, melindungi individu dan keluarga dari kerugian finansial akibat biaya kesehatan yang tinggi, yang sering menjadi penyebab utama kemiskinan. Selain itu, sektor ini merupakan pusat inovasi, dengan penelitian dan pengembangan dalam medis dan farmasi yang tidak hanya memperbaiki standar perawatan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Program kesehatan masyarakat seperti vaksinasi dan promosi gaya hidup sehat mengurangi beban penyakit, yang langsung meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan umum. Di sisi lain, kapasitas sektor kesehatan dalam merespons krisis kesehatan publik, termasuk pandemi, menunjukkan peran pentingnya dalam meminimalkan dampak ekonomi negatif dari krisis tersebut. Melalui semua aspek ini, jasa kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan penting tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan

pembangunan sosial, menegaskan bahwa investasi dalam kesehatan adalah investasi dalam masa depan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara.

Perkembangan jasa kesehatan di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Profil Statistik Kesehatan 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi ini menyajikan data terkini mengenai situasi kesehatan di Indonesia, meliputi berbagai aspek seperti kesehatan penduduk secara umum, kesehatan ibu, anak, dan balita, serta pengeluaran kesehatan masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2023. Data ini mencakup level nasional dan provinsi serta berbagai karakteristik lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga merilis Profil Kesehatan Indonesia yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja sektor kesehatan di negara ini. Publikasi ini disusun berdasarkan data rutin dari Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya, menyoroti data nasional, perbandingan antar provinsi, serta tren kesehatan dari tahun ke tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

D. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIDAKSETARAAN EKONOMI

Struktur ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam menentukan distribusi pendapatan di masyarakat. Struktur ini mencakup berbagai aspek, seperti komposisi sektor ekonomi (pertanian, industri, dan jasa), tingkat diversifikasi ekonomi, tingkat keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah terkait pajak dan redistribusi pendapatan.

1. Sektor dominan

Negara-negara dengan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian tradisional sering menghadapi tantangan dalam hal distribusi pendapatan yang merata. Salah satu alasan utama adalah produktivitas yang relatif rendah dalam sektor pertanian tradisional. Dalam banyak kasus, pertanian tradisional bergantung pada metode bertani manual atau semi-mekanisasi yang tidak efisien, serta pada lahan yang sering kali kurang subur. Ini berarti bahwa untuk memproduksi jumlah pangan yang sama, diperlukan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya

dibandingkan dengan metode pertanian modern atau industri lain. Akibatnya, upah yang diberikan kepada pekerja dalam sektor pertanian cenderung rendah, membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan standar hidup.

Di sisi lain, sektor industri dan jasa menawarkan peluang untuk produktivitas yang lebih tinggi melalui mekanisasi, teknologi, dan inovasi. Industri manufaktur, teknologi informasi, dan layanan keuangan, contohnya, sering kali memanfaatkan teknologi canggih yang memungkinkan produksi barang dan jasa dengan lebih efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya produksi tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menawarkan upah yang lebih tinggi kepada karyawan mereka. Pekerjaan di sektor ini juga cenderung membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang lebih spesifik, yang lebih lanjut meningkatkan potensi penghasilan individu. Akibatnya, negara-negara dengan ekonomi yang berat sebelah pada industri dan jasa cenderung mengalami distribusi pendapatan yang lebih merata dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Pengaruh struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi. Negara-negara yang ingin memperbaiki distribusi pendapatan mereka perlu mempertimbangkan strategi untuk diversifikasi ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri dan jasa. Ini bisa mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memberikan insentif untuk investasi dalam teknologi dan inovasi, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri dan jasa. Melalui pendekatan seperti ini, negara bisa meningkatkan produktivitas dan kompetitivitas ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan penurunan kemiskinan.

2. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi berarti bahwa sebuah negara memiliki berbagai sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga jasa. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih diversifikasi cenderung memiliki sistem ekonomi yang lebih resilien dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Ini karena diversifikasi mengurangi ketergantungan

pada sektor tunggal yang mungkin rentan terhadap fluktuasi harga global, perubahan iklim, atau perubahan permintaan. Misalnya, negara yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah seperti minyak atau mineral bisa mengalami penurunan tajam dalam pendapatan nasional ketika harga komoditas global turun. Diversifikasi membantu meredam dampak negatif ini dengan menyebarkan risiko ekonomi di berbagai sektor.

Selanjutnya, diversifikasi ekonomi menciptakan peluang pekerjaan dalam berbagai bidang, yang masing-masing memiliki struktur upah yang berbeda. Ini memungkinkan individu dengan berbagai tingkat keterampilan dan pendidikan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Sebagai contoh, sektor teknologi informasi dapat menawarkan upah tinggi bagi pekerja terampil, sementara industri pariwisata dan layanan dapat menyediakan banyak pekerjaan bagi pekerja dengan berbagai tingkat keterampilan. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup melalui distribusi pendapatan yang lebih luas. Dengan lebih banyak orang yang bekerja di berbagai sektor, pendapatan cenderung lebih merata dibagi di antara penduduk, berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan pendapatan.

Akhirnya, diversifikasi ekonomi memungkinkan negara untuk lebih baik beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi global, memastikan pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat mempersiapkan tenaga kerjanya untuk memanfaatkan peluang baru yang muncul dari diversifikasi ini. Kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan juga penting untuk mendorong pertumbuhan sektor baru dan menciptakan lapangan kerja. Hasilnya, ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif, di mana kemakmuran dibagi lebih luas di antara seluruh populasi. Ini menciptakan lingkaran positif pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesetaraan sosial, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemakmuran Nasional.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal dan moneter memegang peranan penting dalam menentukan distribusi pendapatan di sebuah negara. Kebijakan fiskal, yang mencakup penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak, dapat secara langsung mempengaruhi kesetaraan pendapatan melalui mekanisme redistribusi. Pajak progresif, di mana individu dengan

pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih rendah, adalah salah satu alat untuk mencapai redistribusi pendapatan ini. Dengan mengumpulkan pendapatan pajak lebih banyak dari kelompok berpendapatan tinggi dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai layanan publik dan program sosial, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpendapatan rendah.

Selain itu, subsidi dan transfer uang tunai kepada kelompok berpendapatan rendah adalah instrumen kebijakan fiskal lain yang berkontribusi terhadap pengurangan ketidaksetaraan. Subsidi, seperti subsidi bahan bakar, pangan, atau pendidikan, dapat membantu mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga berpendapatan rendah, meningkatkan daya beli mereka. Sementara itu, program transfer uang tunai, baik yang bersyarat maupun tanpa syarat, menyediakan pendapatan langsung kepada keluarga miskin, yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau investasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Kedua jenis bantuan ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah secara langsung.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang fokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan dapat tidak sengaja memperlebar kesenjangan pendapatan. Misalnya, kebijakan suku bunga rendah dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, namun manfaatnya mungkin tidak merata. Investor dan pemilik aset cenderung mendapat keuntungan lebih besar dari apresiasi harga aset, sementara kelompok berpendapatan rendah mungkin tidak merasakan dampak positif yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimbangi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang progresif dan intervensi yang bertujuan untuk redistribusi pendapatan, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan semua lapisan masyarakat dan tidak hanya sekelompok kecil individu yang berpendapatan tinggi.

4. Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja

Dalam ekonomi global saat ini, transisi ke industri berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi telah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Industri semacam itu mencakup sektor seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan energi terbarukan, yang semua memanfaatkan inovasi dan penelitian untuk menghasilkan nilai. Sifat industri ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena pekerjaan dalam sektor ini sering melibatkan tugas-tugas yang kompleks, seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data besar, dan desain rekayasa, yang semua membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip teknis dan kemampuan untuk berinovasi.

Akibatnya, terdapat permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi, yang sering kali mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang kurang terampil dalam sektor lain. Ini menciptakan disparitas upah yang signifikan antara pekerja terampil dan pekerja kurang terampil, dengan pekerja terampil menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar dari pertumbuhan industri berbasis pengetahuan dan teknologi. Ketidaksetaraan ini bisa diperburuk jika sistem pendidikan tidak menyediakan akses yang sama kepada semua individu untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memasuki sektor-sektor ini. Tanpa intervensi, kesenjangan ini dapat menyebabkan polarisasi dalam distribusi pendapatan, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan mereka yang memiliki keahlian dan pendidikan yang dibutuhkan oleh industri baru ini.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi sangat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ini. Melalui penyediaan akses yang lebih luas kepada pendidikan berkualitas dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, lebih banyak individu dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dengan meningkatkan potensi penghasilan bagi pekerja kurang terampil, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dengan memastikan bahwa tenaga kerja dapat memenuhi permintaan sektor-sektor yang berkembang. Selain itu, sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja dapat memfasilitasi transisi

yang lebih mulus bagi pekerja dari sektor yang mengalami penurunan ke sektor yang sedang berkembang, sehingga mengurangi risiko pengangguran jangka panjang dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi.

5. Globalisasi dan Perdagangan Internasional

Integrasi ekonomi global dan perdagangan internasional telah menjadi ciri khas ekonomi dunia modern. Melalui pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan konektivitas, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengakses pasar lebih luas untuk barang dan jasa mereka. Teori keunggulan komparatif, yang diajukan oleh ekonom David Ricardo, menjelaskan bahwa negara-negara akan mendapat manfaat dari perdagangan internasional dengan berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keefisienan relatif paling tinggi. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa negara yang berhasil mengeksploitasi keunggulan komparatifnya dapat meningkatkan pekerjaan dan pendapatan dalam sektor-sektor tersebut. Misalnya, sebuah negara dengan banyak sumber daya alam mungkin menemukan keuntungan dalam ekspor bahan mentah, sementara negara lain dengan tenaga kerja terampil dan teknologi canggih mungkin berkonsentrasi pada ekspor barang manufaktur atau jasa.

Namun, globalisasi dan perdagangan bebas juga menimbulkan tantangan terkait distribusi pendapatan. Meskipun perdagangan internasional secara keseluruhan dapat meningkatkan output ekonomi sebuah negara, manfaat yang diperoleh dari perdagangan tersebut tidak selalu didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat. Sektor-sektor yang menghadapi persaingan ketat dari impor mungkin mengalami penurunan, yang bisa mengakibatkan penutupan bisnis dan kehilangan pekerjaan. Pekerja di industri-industri tersebut mungkin menemukan sulit untuk berpindah ke sektor lain tanpa pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan. Sebagai hasilnya, sementara beberapa bagian dari ekonomi mengalami pertumbuhan dan peningkatan pendapatan karena akses ke pasar baru, bagian lain mungkin menderita karena persaingan global, memperlebar kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antar sektor.

Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap distribusi pendapatan, kebijakan domestik memegang peranan kunci. Pemerintah

dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pekerja dan sektor yang terdampak oleh globalisasi, termasuk melalui program pelatihan ulang dan pendidikan, serta bantuan untuk transisi karir. Selain itu, kebijakan fiskal progresif dan dukungan sosial dapat membantu meredakan ketidaksetaraan dengan mendistribusikan kembali sebagian manfaat ekonomi globalisasi kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Melalui pendekatan yang seimbang, negara dapat memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi global sambil memitigasi risiko terhadap koherensi sosial dan distribusi pendapatan yang adil.

Pada intinya, struktur ekonomi suatu negara dan bagaimana struktur itu berkembang seiring waktu sangat memengaruhi bagaimana pendapatan didistribusikan di antara penduduknya. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi, mendukung diversifikasi, dan meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan dapat membantu mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.

Ketidaksetaraan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Ketidaksetaraan merujuk pada distribusi pendapatan atau kekayaan yang tidak merata di antara penduduk sebuah negara, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan sementara mayoritas lainnya memiliki sedikit. Dampak dari ketidaksetaraan ini dapat merentang luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir individu, konsumsi cenderung lebih rendah daripada jika pendapatan tersebut didistribusikan lebih merata. Ini karena individu dengan pendapatan tinggi memiliki kecenderungan untuk menyimpan proporsi pendapatan mereka yang lebih besar, sementara individu dengan pendapatan lebih rendah cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka. Oleh karena itu, ketidaksetaraan dapat mengurangi permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidaksetaraan yang tinggi dapat membatasi akses ke pendidikan dan pelatihan, memperburuk alokasi sumber daya manusia, dan mengurangi insentif untuk inovasi dan investasi.

Dari sudut pandang sosial, ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Persepsi tentang ketidakadilan dan kurangnya peluang sosial ekonomi dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat bermanifestasi dalam bentuk protes sosial, peningkatan tingkat kejahatan, dan bahkan kerusuhan. Ketidaksetaraan dapat mengikis kepercayaan sosial, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa institusi bekerja adil dan untuk kepentingan bersama. Penurunan kepercayaan sosial ini dapat mempersulit implementasi kebijakan publik dan mengurangi keefektifan tata kelola.

Lebih jauh, ketidaksetaraan dapat mempengaruhi stabilitas politik. Ketidakpuasan terhadap ketidaksetaraan ekonomi dapat mendorong dukungan untuk kebijakan populis atau ekstremis, yang sering kali menjanjikan solusi cepat tetapi tidak praktis untuk masalah sosial ekonomi. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi politik dan mengikis norma-norma demokratis, mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang koheren dan berkelanjutan.

Untuk mengurangi dampak negatif ketidaksetaraan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan dan kekayaan menjadi penting. Ini bisa mencakup reformasi pajak progresif, investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk semua, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan mengurangi ketidaksetaraan, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memperkuat kohesi sosial.

E. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI EKONOMI

Struktur ekonomi suatu negara, yang mencakup komposisi sektoral ekonominya serta distribusi kegiatan ekonomi di antara berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan jasa, dapat dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi dengan ekonomi global, perdagangan internasional, dan investasi asing. Interaksi ini memainkan peran kunci dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi, jenis pekerjaan yang tersedia, dan kemampuan kompetitif suatu negara di panggung global. Berikut adalah analisis mengenai cara-cara interaksi ini dapat mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara.

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memperkenalkan konsep keunggulan komparatif, di mana negara-negara didorong untuk berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang dan jasa di mana mereka paling efisien. Ini sering kali mengarah pada restrukturisasi sektor ekonomi, dengan sumber daya dialokasikan ulang ke sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Sebagai contoh, negara yang kaya akan sumber daya alam mungkin menemukan bahwa ekspor komoditas menjadi lebih menguntungkan, sehingga mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian. Sebaliknya, negara dengan tenaga kerja yang sangat terampil dan infrastruktur teknologi informasi yang maju mungkin mengembangkan sektor jasa, seperti keuangan, TI, dan layanan profesional.

Konsep keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, yang pertama kali dijelaskan oleh ekonom David Ricardo pada awal abad ke-19, menyatakan bahwa negara-negara akan mendapat manfaat dengan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang dan jasa di mana mereka memiliki efisiensi relatif terbesar. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa sumber daya—baik itu tenaga kerja, tanah, atau modal—terbatas, dan oleh karena itu, setiap negara harus memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Keunggulan komparatif tidak selalu berarti bahwa negara harus menjadi yang terbaik dalam memproduksi sesuatu, melainkan seharusnya lebih fokus pada produksi barang di mana kerugian relatif mereka paling kecil dibandingkan dengan produksi barang lain.

Perdagangan internasional berdasarkan keunggulan komparatif mendorong restrukturisasi sektor ekonomi negara. Sumber daya dialihkan dari sektor di mana negara kurang kompetitif ke sektor di mana negara memiliki keunggulan. Dalam konteks globalisasi, hal ini sering kali berarti bahwa negara-negara berkembang, yang mungkin memiliki kelebihan dalam tenaga kerja murah atau sumber daya alam, akan mengembangkan sektor seperti pertanian, pertambangan, atau manufaktur sederhana. Sebagai contoh, banyak negara Afrika dan Amerika Selatan kaya akan sumber daya alam dan telah menjadi eksportir utama komoditas seperti minyak bumi, mineral, dan produk pertanian.

Di sisi lain, negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, di mana biaya tenaga kerja relatif tinggi tetapi memiliki tenaga kerja yang terampil dan infrastruktur teknologi informasi yang maju, cenderung mengembangkan sektor jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dan pengetahuan teknis. Sektor-sektor ini dapat mencakup keuangan, teknologi informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Singapura dan Irlandia, misalnya, telah berhasil menarik investasi asing dalam sektor teknologi dan keuangan, yang memanfaatkan tenaga kerja terampil mereka serta lingkungan kebijakan yang mendukung.

Proses restrukturisasi ekonomi ini mempunyai implikasi luas tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pasar tenaga kerja. Di negara-negara yang mengembangkan sektor berbasis sumber daya atau manufaktur, permintaan akan tenaga kerja dalam produksi fisik dapat meningkat, sedangkan di negara-negara yang fokus pada sektor jasa, akan ada peningkatan permintaan untuk tenaga kerja terampil dan profesional. Hal ini menuntut sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang berubah, memastikan bahwa tenaga kerja tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan tetapi juga dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi.

Namun, transisi menuju spesialisasi berbasis keunggulan komparatif juga dapat memperdalam ketidaksetaraan, baik antarnegara maupun dalam negeri. Negara-negara yang tergantung pada ekspor sumber daya alam mungkin rentan terhadap volatilitas harga komoditas, sedangkan negara-negara yang berhasil mengembangkan sektor jasa berbasis pengetahuan dapat melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata. Dalam negeri, pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor yang menyusut mungkin menemukan kesulitan untuk berpindah ke sektor yang berkembang tanpa akses ke pendidikan dan pelatihan ulang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pendidikan, pelatihan vokasional, dan dukungan sosial menjadi krusial dalam memfasilitasi transisi ini dan memastikan bahwa manfaat perdagangan internasional dirasakan secara lebih merata di seluruh masyarakat.

2. Dampak Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi Asing Langsung (FDI) merupakan salah satu katalis utama dalam mengubah dan memajukan ekonomi suatu negara. FDI tidak hanya membawa modal yang sangat dibutuhkan tetapi juga teknologi canggih,

keahlian manajemen, dan akses ke pasar global. Dengan masuknya FDI, negara penerima dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor ekonomi kunci yang sebelumnya terbatas karena keterbatasan sumber daya domestik. Misalnya, investasi asing dalam sektor manufaktur, mulai dari industri berat seperti baja dan otomotif hingga industri ringan seperti tekstil dan elektronik, dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan ekspor negara.

Selain efek langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, FDI juga membawa dampak yang lebih luas terhadap struktur ekonomi suatu negara. Investasi dalam infrastruktur, seperti transportasi dan telekomunikasi, tidak hanya mendukung kebutuhan industri yang berinvestasi tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor lain dalam ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisiensi logistik dan komunikasi, yang penting bagi keberhasilan semua bisnis. Di sisi lain, FDI dalam penelitian dan pengembangan (R&D) membantu membangun dasar bagi inovasi masa depan, memperkuat kemampuan negara dalam teknologi dan sains, dan memajukan posisi negara dalam ekonomi pengetahuan global.

FDI juga sering kali berperan dalam memperkenalkan praktik bisnis global dan standar produksi ke dalam ekonomi penerima. Investor asing cenderung menerapkan standar operasional dan manajemen yang mereka gunakan di negara asal atau di pasar global lainnya. Ini mencakup standar dalam kualitas, efisiensi, praktik ketenagakerjaan, dan keberlanjutan lingkungan. Adopsi praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan lokal tetapi juga mendorong industri domestik untuk meningkatkan standar mereka agar tetap relevan di pasar global. Efek riak dari peningkatan ini bisa sangat signifikan, sering kali mendorong reformasi lebih luas dalam ekonomi dan praktik bisnis.

Investasi dalam sektor jasa, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan, dapat memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi suatu negara. FDI di sektor keuangan, misalnya, dapat meningkatkan akses ke pembiayaan bagi bisnis lokal dan individu, sementara investasi di sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini tidak hanya vital untuk pertumbuhan ekonomi

jangka panjang tetapi juga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui perbaikan di sektor-sektor ini, FDI berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, manfaat FDI tidak otomatis. Efek positifnya tergantung pada kondisi di negara penerima, termasuk kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kualitas infrastruktur dan institusi. Kebijakan yang mendukung lingkungan investasi yang aman dan stabil, mempromosikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta mendorong transfer teknologi dan keahlian, adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat FDI. Dengan demikian, interaksi antara investor asing dan kebijakan domestik sangat menentukan seberapa besar dan seberapa positif dampak FDI terhadap struktur ekonomi dan perkembangan sosial ekonomi suatu negara.

3. Globalisasi dan Integrasi Ekonomi

Globalisasi dan integrasi ekonomi lebih lanjut memperkuat pengaruh eksternal terhadap struktur ekonomi suatu negara. Melalui proses ini, negara-negara menjadi bagian dari jaringan produksi global, di mana barang dan jasa diproduksi di mana pun di dunia yang paling efisien untuk melakukannya. Hal ini dapat mengarah pada spesialisasi lebih lanjut dan pembagian kerja internasional. Sebagai contoh, negara-negara berkembang seringkali menjadi tuan rumah untuk produksi berorientasi ekspor dalam rantai nilai global, seperti perakitan elektronik atau produksi pakaian, yang dapat mempercepat industrialisasi dan urbanisasi.

Namun, interaksi dengan ekonomi global juga menghadirkan tantangan. Persaingan internasional yang ketat dapat memberi tekanan pada industri domestik yang tidak kompetitif, sementara ketergantungan pada FDI atau ekspor tertentu dapat membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan yang berlebihan pada komoditas ekspor, misalnya, dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.

Untuk memanfaatkan interaksi dengan ekonomi global, negara-negara perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang luas di seluruh masyarakat. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kewirausahaan.

F. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SEIRING WAKTU

Evolusi struktur ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial. Interaksi antara faktor-faktor ini membentuk dinamika ekonomi, mengarah pada perubahan dalam komposisi sektoral ekonomi, distribusi pendapatan, dan pola pertumbuhan ekonomi. Analisis tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi beradaptasi dan berubah seiring waktu.

1. Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi telah lama menjadi katalis utama dalam transformasi struktur ekonomi dunia. Dari Revolusi Industri hingga era digital saat ini, setiap gelombang inovasi teknologi membawa perubahan signifikan pada cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Revolusi Industri, yang dimulai di Inggris pada abad ke-18, merupakan contoh klasik dari dampak transformasional teknologi. Pengenalan mesin uap, loom mekanis, dan proses produksi besi menggantikan metode produksi manual dengan manufaktur mekanisasi, memungkinkan produksi massal dan mengurangi biaya unit. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan output tetapi juga mendorong urbanisasi dan pengembangan kelas pekerja industri, mengubah ekonomi yang sebelumnya didominasi pertanian menjadi ekonomi yang berfokus pada industri.

Berlanjut ke abad ke-20 dan awal abad ke-21, revolusi teknologi informasi memicu pergeseran lain, dari ekonomi yang berfokus pada manufaktur ke ekonomi berbasis jasa dan pengetahuan. Komputer, internet, dan teknologi komunikasi lainnya telah meredefinisikan cara kerja, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan penciptaan industri baru seperti perangkat lunak, TI, dan layanan digital. Sektor jasa, termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan, tumbuh secara eksponensial, didorong oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Era ini juga menyaksikan globalisasi ekonomi, di mana perusahaan dapat beroperasi dan bersaing secara global, didukung oleh infrastruktur teknologi yang memungkinkan aliran informasi dan modal yang hampir tanpa hambatan.

Kini, teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan ekonomi digital terus membentuk ulang lanskap ekonomi. AI dan otomatisasi, misalnya, menjanjikan peningkatan produktivitas yang lebih

besar dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia, mulai dari manufaktur hingga layanan pelanggan. Sementara beberapa pekerjaan menjadi usang, teknologi baru juga menciptakan peluang dalam pengembangan AI, analisis data, dan sektor ekonomi digital lainnya. Ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sangat berbeda, menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada kemampuan untuk beradaptasi dan belajar sepanjang hayat.

Perubahan ini, sementara membawa potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, juga menimbulkan tantangan dalam hal ketidaksetaraan. Ada risiko bahwa manfaat dari kemajuan teknologi mungkin tidak didistribusikan secara merata, baik antar individu maupun negara. Pekerja dengan keterampilan rendah atau yang pekerjaannya mudah diautomatisasi mungkin menemukan diri mereka tersisih dari pasar tenaga kerja, sementara mereka dengan keterampilan teknis tinggi mungkin mendapatkan keuntungan yang signifikan. Ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi transisi, seperti melalui reformasi pendidikan, pelatihan ulang tenaga kerja, dan dukungan sosial untuk mereka yang terdampak oleh disrupsi teknologi.

Kesimpulannya, teknologi merupakan pendorong utama di balik evolusi struktur ekonomi, membawa kemajuan serta tantangan. Dalam menghadapi gelombang baru inovasi teknologi, adaptasi dan kebijakan yang proaktif menjadi kunci untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi baru tidak hanya menghasilkan pertumbuhan tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk dan mengarahkan evolusi struktur ekonomi suatu negara. Melalui penggunaan instrumen kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, menentukan insentif untuk berbagai sektor ekonomi, dan mengendalikan tingkat inflasi dan pengangguran. Misalnya, melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan atau mengimplementasikan sistem pajak yang dirancang untuk merangsang investasi dalam industri tertentu. Kebijakan moneter, di sisi lain, melalui

pengaturan tingkat suku bunga dan persyaratan cadangan bank, dapat mempengaruhi ketersediaan kredit dan dengan demikian mempengaruhi investasi dan konsumsi di seluruh ekonomi.

Regulasi industri dan kebijakan perdagangan juga merupakan alat penting yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi struktur ekonomi. Regulasi dapat digunakan untuk memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen dan lingkungan, serta mendorong inovasi dan efisiensi. Kebijakan perdagangan, termasuk penerapan tarif dan perjanjian perdagangan bebas, memainkan peran penting dalam menentukan akses pasar untuk produk domestik dan impor. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk melindungi industri baru atau strategis dari persaingan internasional, sambil secara bertahap membukanya ke pasar global sebagai bagian dari strategi pertumbuhan.

Investasi dalam infrastruktur merupakan komponen penting lain dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi struktur ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, tidak hanya penting untuk efisiensi operasional perusahaan tetapi juga membuka akses ke pasar baru dan memfasilitasi perdagangan. Investasi dalam infrastruktur hijau dan energi terbarukan, misalnya, tidak hanya membantu transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan di sektor-sektor baru dan mendorong inovasi teknologi.

Selain itu, investasi pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja adalah fundamental untuk memastikan bahwa populasi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam ekonomi yang terus berubah. Dengan berkembangnya sektor berbasis pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) meningkat. Kebijakan pendidikan yang menargetkan peningkatan akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional, serta pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, kritis untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan masa depan.

Akhirnya, kebijakan pemerintah harus adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan tantangan global. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, globalisasi, dan revolusi teknologi, kebijakan yang mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan inklusi sosial

akan penting untuk memastikan bahwa struktur ekonomi berkembang dengan cara yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terkoordinasi terhadap kebijakan ekonomi, yang mempertimbangkan interaksi antara berbagai instrumen kebijakan dan dampaknya terhadap struktur ekonomi, menjadi sangat penting.

2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat memiliki dampak yang mendalam dan beragam terhadap struktur ekonomi suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor seperti pergeseran nilai, demografi, dan dinamika tenaga kerja memainkan peran kunci dalam menentukan jenis dan distribusi aktivitas ekonomi, serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Misalnya, pergeseran nilai sosial dan preferensi konsumen dapat secara langsung mempengaruhi sektor industri yang berkembang atau menyusut, mengarah pada permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tren seperti peningkatan kesadaran lingkungan telah mendorong pertumbuhan industri-produk ramah lingkungan dan energi terbarukan, mencerminkan perubahan preferensi konsumen terhadap pilihan yang lebih berkelanjutan.

Demografi sebuah negara, termasuk laju pertumbuhan penduduk, komposisi usia, dan pola migrasi, juga memiliki implikasi penting terhadap struktur ekonomi. Penuaan populasi, misalnya, dapat menyebabkan peningkatan permintaan untuk layanan kesehatan dan jaminan sosial, sementara secara bersamaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia, mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada tenaga kerja berlimpah. Di sisi lain, migrasi, baik internasional maupun domestik, dapat menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dan keterampilan khusus, mempengaruhi distribusi dan ketersediaan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Perubahan dalam partisipasi tenaga kerja memiliki efek yang luas pada ekonomi. Penambahan jumlah wanita dalam tenaga kerja, misalnya, tidak hanya meningkatkan output ekonomi keseluruhan tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu, seperti layanan perawatan anak dan pendidikan. Ini juga memerlukan kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti cuti keluarga yang berbayar dan

akses terhadap layanan perawatan anak yang terjangkau, untuk memungkinkan partisipasi penuh wanita dalam ekonomi.

Lebih lanjut, perubahan sosial juga mencakup pergeseran ke arah ekonomi digital dan peningkatan konektivitas. Perkembangan ini mengubah cara bisnis beroperasi dan barang serta jasa dikonsumsi, menyebabkan pertumbuhan eksplosif di sektor e-commerce, teknologi informasi, dan komunikasi. Perubahan ini menuntut tenaga kerja yang terampil dalam teknologi baru dan sering kali mengarah pada transformasi sektor tradisional, seperti ritel dan perbankan, yang harus beradaptasi dengan kehadiran online untuk tetap kompetitif.

Akhirnya, kesadaran yang tumbuh terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan telah mendorong permintaan untuk produksi yang lebih berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. Ini menciptakan peluang baru di sektor-sektor seperti energi terbarukan, konstruksi hijau, dan pertanian berkelanjutan, sambil menantang industri yang berbasis pada sumber daya tidak terbarukan untuk berinovasi atau mengalami penyusutan. Perubahan sosial ini, bersama dengan dukungan kebijakan pemerintah, mendorong restrukturisasi ekonomi menuju model yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dalam keseluruhan, perubahan sosial mempengaruhi struktur ekonomi melalui berbagai saluran, menuntut adaptasi dan inovasi dari semua pelaku ekonomi, mulai dari individu dan bisnis hingga pemerintah. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan strategi ekonomi dan kebijakan publik yang efektif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Interaksi antara teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial menentukan jalur evolusi ekonomi suatu wilayah. Seiring waktu, faktor-faktor ini dapat membawa ekonomi dari dominasi satu sektor ke sektor lain, mempengaruhi distribusi geografis aktivitas ekonomi, dan mengubah keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Keterbukaan terhadap inovasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan kebijakan yang responsif dan inklusif dapat memfasilitasi transisi yang sukses ke struktur ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan.

BAB 5 HAMBATAN PEMBANGUNAN

Hambatan pembangunan merujuk pada berbagai faktor dan kondisi yang menghambat proses pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara atau wilayah. Pembangunan yang dimaksud bisa meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hambatan ini terdiri dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi, kebijakan dan tata kelola, lingkungan, serta lingkungan global.

A. FAKTOR EKONOMI

1. Ketidaksetaraan Pendapatan

Ketidaksetaraan pendapatan adalah salah satu isu terbesar dalam konteks pembangunan ekonomi. Ketidaksetaraan ini merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara berbagai lapisan populasi dalam sebuah negara. Dalam banyak kasus, sebagian kecil populasi mengontrol sebagian besar kekayaan dan pendapatan negara, sedangkan mayoritas lainnya memiliki akses yang sangat terbatas ke sumber daya ekonomi. Ketidaksetaraan ini sering diukur menggunakan indeks Gini, yang merupakan alat statistik untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan di antara penduduk suatu negara.

Ketidaksetaraan pendapatan memiliki beberapa konsekuensi negatif dalam pembangunan ekonomi. Pertama, ketidaksetaraan yang tinggi cenderung mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ini terjadi karena ketidaksetaraan mengurangi daya beli masyarakat umum, yang pada gilirannya membatasi permintaan agregat dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi seringkali dikaitkan dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih rendah di antara populasi miskin, yang mengurangi potensi modal manusia suatu negara. Ketidaksetaraan juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, yang menghambat investasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, ketidaksetaraan pendapatan dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial ekonomi. Anak-anak yang lahir di keluarga miskin sering kali memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas, nutrisi yang memadai, dan layanan kesehatan. Ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka di masa depan, sehingga meneruskan siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. Ketidaksetaraan yang kronis dan terstruktur sering mengakibatkan terciptanya "perangkap kemiskinan," di mana orang-orang miskin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan pendapatan, berbagai strategi telah diusulkan dan diterapkan, termasuk kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan transfer sosial, investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan, dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan ekonomi yang mempromosikan pertumbuhan inklusif. Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan pendapatan diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Tujuan 10 yang berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan di dalam dan antar negara.

2. Ketergantungan Pada Sektor Tertentu

Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, seperti hanya pada sektor pertanian atau pertambangan, dan fokus utama pada ekspor komoditas, dapat menempatkan negara dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Ketika ekonomi suatu negara sangat bergantung pada satu sektor atau beberapa komoditas ekspor utama, perubahan dalam kondisi pasar global dapat memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada keseluruhan perekonomiannya. Contohnya, negara yang ekonominya didominasi oleh ekspor minyak akan sangat terpengaruh oleh volatilitas harga minyak di pasar dunia. Fluktuasi harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

perubahan kebijakan di negara-negara produsen utama, pergeseran dalam kebijakan energi global, atau perubahan dalam teknologi energi.

Selain fluktuasi harga, ketergantungan pada sektor tertentu juga meningkatkan risiko dari penurunan permintaan global. Misalnya, negara yang ekonominya tergantung pada ekspor komoditas seperti bijih besi atau tembaga akan sangat terpengaruh oleh penurunan permintaan dari industri manufaktur global, yang mungkin disebabkan oleh resesi ekonomi di negara-negara industri utama atau perubahan dalam teknologi produksi. Penurunan permintaan seperti ini bisa menyebabkan penurunan harga, yang berdampak pada pendapatan ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja di negara yang bergantung pada komoditas tersebut.

Untuk mengurangi kerentanan ini, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting. Diversifikasi dapat mencakup pengembangan sektor-sektor baru dalam ekonomi, seperti manufaktur atau jasa, serta diversifikasi pasar ekspor dan sumber pendapatan. Hal ini membantu mengurangi risiko yang berkaitan dengan ketergantungan pada satu sektor atau pasar tunggal. Selain itu, investasi dalam peningkatan nilai tambah melalui pemrosesan dan manufaktur lokal juga dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas mentah. Mempromosikan inovasi dan pengembangan kapasitas domestik, bersama dengan kebijakan ekonomi yang mendukung lingkungan bisnis yang sehat, juga krusial untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga dan permintaan global.

B. ASPEK SOSIAL

1. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan memiliki dampak yang mendalam terhadap mobilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu alat paling efektif untuk mobilitas sosial, memberikan individu keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan mereka. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas bagi sebagian populasi — terutama bagi mereka dari keluarga berpenghasilan rendah, komunitas minoritas, atau daerah terpencil — kesenjangan ini menciptakan hambatan besar terhadap

kemampuan individu untuk meningkatkan posisi sosial ekonomi mereka. Anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik lebih mungkin untuk tetap berada dalam kemiskinan, melanjutkan siklus kemiskinan antar generasi. Selain itu, ketidaksetaraan dalam pendidikan sering kali memperburuk disparitas lainnya, termasuk dalam hal kesetaraan gender, akses ke pekerjaan, dan keadilan sosial.

Demikian pula, ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat dasar untuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tanpa akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, individu sering kali menghadapi kesulitan dalam bekerja atau belajar secara efektif. Penyakit kronis atau gangguan kesehatan yang tidak diobati dapat menyebabkan ketidakmampuan berkerja, yang berdampak pada pendapatan individu dan keluarganya. Lebih jauh, beban biaya kesehatan yang tinggi dapat menguras tabungan keluarga dan mendorong mereka ke dalam kemiskinan, terutama di negara-negara tanpa asuransi kesehatan universal atau perlindungan sosial yang memadai. Kesehatan yang buruk juga mempengaruhi kapasitas belajar anak-anak, sehingga menutup peluang mereka untuk kemajuan sosial dan ekonomi di masa depan.

Mobilitas sosial yang terhambat dan kesenjangan dalam kesejahteraan akibat ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang karakteristiknya adalah ketidaksetaraan yang signifikan cenderung mengalami ketidakstabilan sosial yang lebih besar, tingkat kejahatan yang lebih tinggi, dan partisipasi politik dan sosial yang lebih rendah. Dari perspektif ekonomi, ketidaksetaraan ini menyebabkan pemborosan potensi manusia yang besar, dengan banyak individu yang tidak dapat berkontribusi secara penuh terhadap ekonomi karena keterbatasan pendidikan atau kesehatan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas tidak hanya penting untuk memastikan mobilitas sosial yang lebih baik dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih produktif secara ekonomi.

2. Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan. Ketidaksetaraan ini seringkali termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas bagi perempuan ke berbagai sumber daya dan peluang, seperti pendidikan, pekerjaan, kepemilikan tanah, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak masyarakat, norma dan praktik sosial-budaya secara tradisional membatasi peran perempuan, menjadikan mereka kurang terwakili dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada hak dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Ketika setengah dari populasi - yaitu perempuan - tidak dapat berkontribusi penuh karena hambatan sistemik, potensi penuh masyarakat untuk tumbuh dan berkembang menjadi tidak tercapai.

Pemberdayaan perempuan, termasuk memberikan mereka akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi lainnya, adalah kunci untuk mengatasi banyak tantangan pembangunan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Misalnya, mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja dapat secara substansial meningkatkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Selain itu, pendidikan perempuan telah terbukti memiliki dampak multi-generasi: perempuan yang berpendidikan lebih cenderung memiliki anak yang juga berpendidikan, lebih sehat, dan memiliki prospek ekonomi yang lebih baik, sehingga membantu memutus siklus kemiskinan.

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga mempengaruhi aspek pembangunan lain seperti kesehatan, nutrisi, dan pendidikan anak. Perempuan yang berpendidikan dan memiliki sumber daya cenderung membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Ini berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di negara mereka. Pada tingkat politik, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan pengalaman seluruh populasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam proses politik, isu-isu seperti kesehatan,

pendidikan, dan kebijakan keluarga cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian.

Kesimpulannya, mengatasi hambatan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan masalah keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga strategi pembangunan yang efektif. Meningkatkan status perempuan dan memberikan mereka kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

C. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

1. Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam bidang transportasi dan energi, adalah hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang tidak memadai menghambat efisiensi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi. Dalam konteks transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang tidak memadai atau kurang berkualitas sering menyebabkan kesulitan dalam pengangkutan barang. Ini menyebabkan peningkatan biaya logistik, memperlambat waktu pengiriman, dan mengurangi daya saing produk dalam pasar global. Misalnya, produk pertanian yang memerlukan pengiriman cepat untuk menjaga kesegarannya dapat mengalami kerusakan atau penurunan nilai karena infrastruktur transportasi yang buruk. Demikian juga, industri yang memerlukan bahan baku atau komponen dari berbagai sumber akan mengalami keterlambatan dan inefisiensi produksi jika jaringan transportasi tidak memadai.

Selanjutnya, infrastruktur energi yang terbatas juga menjadi kendala besar bagi pertumbuhan ekonomi. Akses yang tidak andal atau mahal ke listrik dan sumber energi lainnya membatasi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efisien. Industri memerlukan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk menjalankan mesin dan peralatan, dan ketidakpastian dalam pasokan energi dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi produktivitas. Di rumah tangga, akses terbatas ke energi bersih dan terjangkau dapat mempengaruhi kualitas

hidup dan kesehatan, serta membatasi akses ke informasi dan teknologi. Ini tidak hanya mengurangi kesejahteraan langsung, tetapi juga berpotensi mengurangi produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, infrastruktur yang terbatas dapat memperburuk ketidaksetaraan antar wilayah dalam sebuah negara. Daerah dengan infrastruktur yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi dan kegiatan ekonomi, sedangkan daerah yang kurang dilayani bisa tertinggal. Ini menciptakan disparitas dalam peluang ekonomi dan akses ke layanan dasar, menghambat usaha untuk pembangunan yang merata dan inklusif. Ketimpangan regional ini bisa memperburuk masalah sosial seperti migrasi internal, kemiskinan urban, dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur transportasi dan energi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang efisien dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, memfasilitasi perdagangan, dan mendorong investasi. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Kesenjangan Teknologi

Kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan suatu negara untuk bersaing dan berinovasi dalam konteks global. Negara dengan akses yang terbatas terhadap teknologi canggih sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam ekonomi global, terutama dalam industri yang bergantung pada inovasi dan efisiensi teknologi tinggi. Teknologi canggih memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mengembangkan produk dan layanan baru, yang semuanya penting untuk daya saing di pasar global. Tanpa akses ke teknologi seperti ini, negara-negara berkembang sering kali terbatas pada produksi barang dan jasa dengan nilai tambah yang lebih rendah, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan mereka.

Selain itu, kesenjangan teknologi mempengaruhi kapasitas inovasi suatu negara. Inovasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan. Negara-negara dengan infrastruktur teknologi yang maju memiliki lingkungan yang lebih

kondusif untuk penelitian dan pengembangan (R&D), yang memungkinkan mereka untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan produk, layanan, dan proses baru. Di sisi lain, negara berkembang yang kekurangan sumber daya untuk investasi dalam R&D sering tertinggal dalam inovasi, membuat mereka bergantung pada teknologi yang dikembangkan di tempat lain dan sering kali harus membayar royalti atau lisensi yang mahal, yang menguras sumber daya finansial mereka.

Dampak kesenjangan teknologi juga terlihat dalam pembangunan sosial. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), misalnya, memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi dan pendidikan, yang penting untuk pengembangan modal manusia. Negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur TIK yang memadai terancam tertinggal dalam era informasi global ini, meninggalkan penduduk mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang kurang relevan untuk ekonomi modern. Hal ini memperluas kesenjangan digital dan memperburuk ketidaksetaraan global, mempengaruhi tidak hanya perekonomian tetapi juga aspek sosial dan politik kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan teknologi, kerjasama internasional dan investasi dalam pendidikan dan infrastruktur teknologi sangat penting. Peningkatan akses ke teknologi, transfer pengetahuan, dan pembangunan kapasitas lokal dapat membantu negara berkembang mengejar ketertinggalan dan berpartisipasi lebih efektif dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan dan inovasi.

D. KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

1. Korupsi dan Ketidakstabilan Politik

Korupsi dan ketidakstabilan politik memberi dampak pada pembangunan satu negara melalui dampak terhadap investasi, kebijakan pembangunan, sampai kepada kepercayaan masyarakat. Korupsi dan ketidakstabilan politik adalah dua faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap iklim investasi di suatu negara. Dampak negatif dari kedua fenomena ini terhadap investasi dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk penurunan kepercayaan investor, ketidakpastian hukum, serta gangguan pada stabilitas ekonomi.

Pertama, korupsi menimbulkan biaya tambahan bagi investor dan mengganggu prinsip persaingan yang sehat. Dalam lingkungan yang korup, biaya untuk melakukan bisnis meningkat karena adanya permintaan suap dan biaya tidak resmi yang harus dibayar untuk mempercepat atau memungkinkan proses bisnis tertentu. Hal ini membuat investasi menjadi kurang menarik, terutama bagi investor asing yang mungkin tidak terbiasa atau tidak mau terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, korupsi seringkali berarti bahwa kontrak bisnis tidak selalu diberikan kepada perusahaan yang paling kompeten atau efisien, melainkan kepada mereka yang memiliki hubungan atau bersedia membayar suap, yang dapat mengakibatkan pelaksanaan proyek yang tidak efisien dan berkualitas rendah.

Kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakpastian yang tinggi terhadap lingkungan investasi. Ketidakpastian politik, seperti pergantian pemerintahan yang sering, kebijakan yang berubah-ubah, atau konflik, dapat membuat sulit bagi investor untuk merencanakan dan membuat keputusan investasi jangka panjang. Hal ini karena investor tidak dapat memprediksi dengan akurat peraturan, kebijakan pajak, atau kondisi ekonomi di masa depan, yang semua ini sangat penting dalam menghitung potensi keuntungan dan risiko dari investasi. Akibatnya, investor mungkin memilih untuk menunda atau bahkan menarik investasi mereka, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, kombinasi dari korupsi dan ketidakstabilan politik dapat erosi kepercayaan publik dan investor terhadap lembaga dan proses pemerintahan. Kepercayaan adalah aset yang sangat penting dalam perekonomian, dan kehilangannya dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika investor merasa bahwa sistem pemerintahan tidak dapat diandalkan atau adil, mereka kurang cenderung untuk berinvestasi atau memperluas operasi bisnis mereka di negara tersebut. Ini tidak hanya berdampak pada investasi asing langsung, tetapi juga pada investasi domestik, karena pelaku usaha lokal juga menjadi ragu untuk berinvestasi dalam kondisi yang tidak stabil dan korup.

Korupsi dan ketidakstabilan politik juga secara signifikan merusak efektivitas kebijakan pembangunan. Kedua masalah ini tidak hanya

mengurangi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif tetapi juga menimbulkan rintangan besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dampak negatif ini dapat dilihat melalui berbagai cara, termasuk pengalokasian sumber daya yang tidak efisien, penurunan kualitas layanan publik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Pertama, korupsi mengarah pada pengalokasian sumber daya yang tidak efisien. Dalam sistem yang korup, keputusan pembangunan sering kali didasarkan pada kepentingan pribadi pejabat pemerintah daripada kebutuhan publik. Akibatnya, proyek pembangunan yang vital bagi kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, mungkin tidak mendapatkan pembiayaan yang cukup. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan tersebut dapat diarahkan ke proyek-proyek yang kurang penting tetapi menguntungkan segelintir orang. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan infrastruktur dan layanan sosial tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

Kedua, ketidakstabilan politik sering kali menyebabkan kebijakan pembangunan yang inkonsisten dan pendekatan jangka pendek. Pemerintahan yang tidak stabil, dengan pergantian kebijakan yang sering dan tidak terprediksi, membuat sulit untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan jangka panjang. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dalam proyek-proyek pembangunan penting dan merusak upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Ketidakstabilan politik juga sering kali berdampak pada efisiensi layanan publik, karena perubahan kebijakan yang konstan dapat menyebabkan kebingungan dan penundaan dalam pelaksanaan proyek.

Terakhir, baik korupsi maupun ketidakstabilan politik secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya. Ini mengikis legitimasi pemerintah dan mengurangi kemampuannya untuk menerapkan kebijakan. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak bersedia untuk menangani korupsi dan menciptakan stabilitas politik, hal ini dapat menyebabkan apatis atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Kepercayaan adalah komponen penting dalam pembangunan sosial dan

ekonomi, karena tanpa kepercayaan masyarakat, sulit untuk menerapkan kebijakan yang memerlukan partisipasi dan dukungan publik.

Selain itu, korupsi dan ketidakstabilan politik ikut serta memberi dampak yang sangat merugikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses politik. Dampak ini tidak hanya mengikis kepercayaan pada individu dan partai politik tertentu tetapi juga pada sistem pemerintahan dan kebijakan publik secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan melemahkan fondasi dari tata kelola yang baik.

Pada tingkat paling dasar, korupsi mengungkapkan kegagalan para pejabat dan lembaga pemerintah untuk bertindak demi kepentingan umum. Ketika pejabat pemerintah memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, masyarakat mulai meragukan integritas dan keadilan sistem. Skandal korupsi yang terungkap ke publik menimbulkan persepsi bahwa keputusan politik dan administratif bisa dibeli dan dijual, yang secara langsung merusak prinsip dasar demokrasi dan keadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi sinis dan kurang bersedia untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih atau berpartisipasi dalam kegiatan sipil lainnya, karena mereka merasa tindakan mereka tidak akan membuat perbedaan yang signifikan.

Ketidakstabilan politik, yang seringkali ditandai dengan pergantian pemerintah yang cepat, konflik politik, dan ketidakpastian kebijakan, juga sangat merusak kepercayaan publik. Ketidakpastian ini membuat sulit bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan mereka dan mengandalkan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar atau melindungi hak-hak mereka. Ketika masyarakat tidak bisa memprediksi bagaimana atau apakah pemerintah akan bertindak dalam kepentingan mereka, kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah menurun. Hal ini dapat mengarah pada apatis atau kekecewaan terhadap sistem politik, yang pada gilirannya, melemahkan legitimasi pemerintah dan mengurangi efektivitasnya dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam jangka panjang, kerugian kepercayaan ini menciptakan lingkaran setan. Tanpa kepercayaan masyarakat, sulit bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan, bahkan jika kebijakan tersebut dirancang untuk memperbaiki masalah yang sama yang menyebabkan kehilangan

kepercayaan. Kurangnya partisipasi publik dalam proses politik juga memperlemah demokrasi dan membuat ruang bagi praktek koruptif dan ketidakstabilan politik untuk terus berlangsung. Untuk membangun kembali kepercayaan, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dan sistematis dari semua sektor masyarakat untuk memerangi korupsi, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan menciptakan lingkungan politik yang stabil dan dapat diprediksi.

2. Ketidakefektifan Kebijakan Pembangunan

Implementasi kebijakan pembangunan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan memerlukan pemahaman tentang konteks politik, ekonomi, dan sosial di mana kebijakan itu diterapkan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses implementasi. Berikut adalah analisis tentang sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana tantangan konkret dapat diatasi.

Pertama, keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan desain kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas institusional lebih mungkin untuk berhasil. Hal ini melibatkan partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan dan penilaian risiko yang komprehensif. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi dan sumber daya yang tersedia, kebijakan pembangunan bisa gagal mencapai target atau bahkan memperburuk situasi yang ada.

Kedua, implementasi kebijakan pembangunan sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan mungkin kekurangan sumber daya, baik dalam hal keuangan, personel, maupun keahlian teknis. Selain itu, ketidakstabilan politik dan korupsi dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan kapasitas lembaga, termasuk pelatihan pegawai, peningkatan sistem manajemen, dan penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Ketiga, keberhasilan kebijakan pembangunan juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan yang muncul. Dunia yang berubah cepat menuntut kebijakan yang fleksibel dan dapat diadaptasi. Ini berarti bahwa proses implementasi harus mencakup mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan secara real-time. Tidak adanya mekanisme adaptasi ini dapat mengakibatkan kebijakan yang kaku dan tidak efektif.

Keempat, partisipasi dan dukungan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan. Masyarakat yang merasa memiliki kepemilikan atas kebijakan lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif dan strategi keterlibatan masyarakat yang memastikan bahwa suara-suara dari berbagai kelompok dalam masyarakat didengar dan diakui. Ketidakpercayaan dan apatis masyarakat dapat menjadi penghalang besar terhadap implementasi yang sukses.

Terakhir, tantangan konkret dalam implementasi kebijakan pembangunan sering kali bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan kolaboratif untuk diatasi. Kerjasama antar lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional dapat memberikan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Pendekatan holistik dan kolaboratif ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dan memaksimalkan dampak kebijakan pembangunan.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan pembangunan yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, investasi dalam kapasitas institusional, fleksibilitas dan adaptabilitas, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antar sektor. Menghadapi tantangan konkret dalam implementasi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait serta strategi yang inovatif dan responsif terhadap kondisi yang berubah.

E. ASPEK LINGKUNGAN

Kebijakan pembangunan seringkali ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa perencanaan dan pertimbangan yang

memadai terhadap aspek lingkungan, kebijakan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan yang berkelanjutan. Dampak ini dapat meliputi degradasi lingkungan, kehilangan biodiversitas, perubahan iklim, dan berbagai masalah lingkungan lainnya yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hidup dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Pertama, degradasi lingkungan adalah salah satu dampak negatif yang paling langsung dari kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Contohnya termasuk deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi pertanian atau pembangunan infrastruktur, polusi air dan udara dari industri dan transportasi, serta pencemaran tanah akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Degradasi ini tidak hanya merusak lingkungan secara fisik tapi juga mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyediakan layanan ekosistem yang penting, seperti penyaringan air, penyerapan karbon, dan perlindungan terhadap bencana alam.

Kedua, kehilangan biodiversitas adalah konsekuensi lain dari kebijakan pembangunan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kehilangan habitat alami untuk pembangunan infrastruktur, pertambangan, atau kegiatan ekonomi lainnya dapat menyebabkan penurunan atau kepunahan spesies flora dan fauna lokal. Biodiversitas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan kehilangannya dapat mengganggu fungsi ekosistem yang esensial bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan spesies lain.

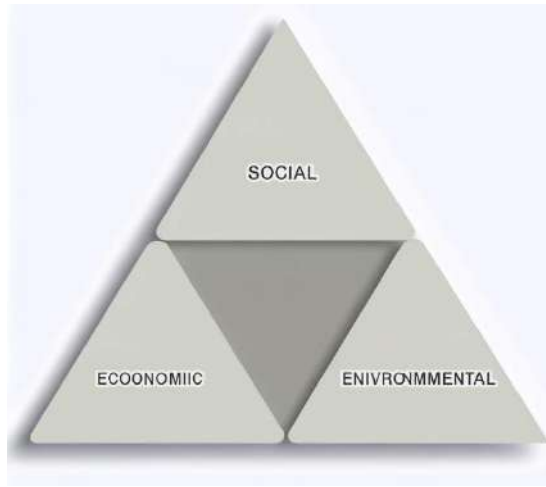
Ketiga, perubahan iklim merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, transportasi, dan industri merupakan kontributor utama perubahan iklim. Akibatnya, dunia menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca yang dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan keamanan air.



Gambar 5. 1 Kerusakan Lingkungan

Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan ekosistem. Pendekatan yang melibatkan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dilaksanakan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, solusi harus diarahkan pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan perubahan dalam cara kita memandang pertumbuhan dan pembangunan, menekankan pada kebutuhan untuk memperhatikan kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang. Berikut adalah beberapa solusi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.



Gambar 5. 2 Keterkaitan Aspek Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan

Pertama, penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya adalah fundamental. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, seperti matahari, angin, dan hidro, untuk menggantikan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tinggi. Dalam industri, proses produksi harus dioptimalkan untuk efisiensi energi dan minimalisasi limbah, dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular di mana sampah dari satu proses dapat menjadi input untuk proses lain. Inovasi dalam teknologi pertanian juga penting untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan, seperti penggunaan pestisida organik dan teknik irigasi hemat air.

Kedua, perlindungan dan pemulihan ekosistem adalah esensial untuk mempertahankan layanan ekosistem yang mereka sediakan, dari penyerapan karbon hingga perlindungan terhadap erosi tanah dan bencana alam. Hal ini melibatkan penghentian deforestasi, reboisasi, dan restorasi habitat alami yang rusak. Kebijakan yang mendukung konservasi biodiversitas dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus diperkuat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan memastikan bahwa keuntungan dari konservasi dinikmati oleh masyarakat setempat.

Ketiga, pembangunan sosial harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang tidak

hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan juga krusial, karena kemiskinan sering kali berkaitan dengan praktik lingkungan yang tidak berkelanjutan. Program pembangunan sosial harus dirancang untuk meningkatkan akses ke sumber daya, layanan, dan peluang, sambil mendorong praktek-praktek berkelanjutan.

Akhirnya, tata kelola yang baik dan kebijakan yang efektif adalah dasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini memerlukan kebijakan yang konsisten dan koheren yang mendukung tujuan berkelanjutan, serta mekanisme untuk memastikan pelaksanaannya. Kerjasama internasional juga penting, karena banyak tantangan lingkungan bersifat global dan memerlukan tindakan kolektif. Pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan harus ditingkatkan, dan insentif harus diberikan kepada sektor swasta untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Dengan menerapkan solusi ini, kita dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan berjalan beriringan, memastikan kesejahteraan bagi semua, saat ini dan di masa depan.

F. GLOBALISASI

Globalisasi adalah proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar negara-negara di dunia melalui pertukaran barang, jasa, teknologi, informasi, dan modal lintas batas. Fenomena ini didorong oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang transportasi dan komunikasi, yang memungkinkan interaksi dan integrasi antar individu, perusahaan, dan pemerintahan dari berbagai negara dengan lebih cepat dan efisien. Globalisasi memiliki berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang semuanya berinteraksi dalam cara yang kompleks.

Dari perspektif ekonomi, globalisasi ditandai dengan peningkatan perdagangan internasional dan aliran investasi asing langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan di banyak negara, memanfaatkan keunggulan komparatif dan akses ke pasar yang lebih luas. Namun, ini juga menimbulkan tantangan, seperti hilangnya pekerjaan di industri tertentu yang tidak dapat bersaing dengan impor murah dan tekanan terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan.

Dalam konteks sosial dan budaya, globalisasi memfasilitasi penyebaran ide, nilai, dan pengalaman melalui media digital, pariwisata, dan migrasi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya, tetapi juga dapat mengancam identitas budaya lokal dan tradisional karena dominasi budaya populer global dan homogenisasi budaya.

Politik globalisasi terlihat dalam meningkatnya pentingnya organisasi internasional dan transnasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam mengatur masalah-masalah lintas batas. Globalisasi juga menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan negara, karena keputusan yang diambil dalam forum internasional dapat mempengaruhi kebijakan domestik.

Meskipun globalisasi membawa banyak peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan, ia juga menyajikan sejumlah tantangan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi antar dan dalam negara, kerusakan lingkungan, dan ketegangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama internasional dan pendekatan kebijakan yang inklusif yang mempertimbangkan baik keuntungan maupun kerugian dari globalisasi.

Ketergantungan pada pasar global secara signifikan dapat meningkatkan kerentanan suatu negara terhadap fluktuasi ekonomi global dan volatilitas harga komoditas. Fenomena ini terjadi karena ekonomi yang terintegrasi dengan pasar global lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, kebijakan, dan trend di negara lain. Berikut adalah beberapa cara ketergantungan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.

Pertama, negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas tertentu dapat mengalami ketidakstabilan pendapatan nasional akibat volatilitas harga komoditas. Harga komoditas global, seperti minyak, gas, dan mineral, cenderung sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pasokan dan permintaan global, spekulasi pasar, dan perubahan kebijakan di negara produsen utama. Ketika harga komoditas turun secara tajam, negara-negara penghasil komoditas dapat mengalami penurunan pendapatan ekspor yang signifikan, yang berdampak pada keseimbangan perdagangan, nilai tukar mata uang, dan kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik.

Kedua, globalisasi keuangan meningkatkan kemungkinan penyebaran krisis keuangan dari satu negara ke negara lain. Negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada modal asing untuk pembiayaan defisit anggaran

atau investasi dapat menghadapi risiko penarikan investasi secara tiba-tiba, yang dikenal sebagai "sudden stop," jika investor global kehilangan kepercayaan terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Hal ini dapat menyebabkan krisis likuiditas, depresiasi mata uang yang tajam, dan kontraksi ekonomi.

Ketiga, integrasi pasar global memperluas cakupan dampak kebijakan ekonomi dari ekonomi besar. Misalnya, kebijakan moneter yang ketat di negara dengan ekonomi besar, seperti peningkatan suku bunga oleh Federal Reserve AS, dapat menyebabkan aliran modal keluar dari pasar berkembang, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengurangi investasi di negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan kebijakan di satu negara dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi global.

Keempat, ketergantungan pada rantai pasokan global juga menimbulkan risiko. Gangguan pada rantai pasokan global, baik karena alasan alamiah seperti bencana alam atau alasan politik seperti konflik perdagangan, dapat menghambat produksi dan distribusi barang di negara-negara yang bergantung pada impor bahan baku atau komponen.

Untuk mengurangi kerentanan ini, negara-negara dapat menerapkan strategi diversifikasi ekonomi, memperkuat ketahanan sektor keuangan, dan membangun cadangan devisa untuk menanggulangi shock eksternal. Selain itu, kerjasama internasional dan koordinasi kebijakan dapat membantu mengurangi volatilitas ekonomi global dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan internasional.

BAB 6 PRASYARAT PEMBANGUNAN

A. STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tanpa stabilitas ekonomi makro, upaya pembangunan dapat terganggu oleh ketidakpastian dan volatilitas ekonomi yang menghambat pertumbuhan. Tiga komponen utama yang menjadi fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi makro adalah stabilitas inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan tingkat pengangguran.

Stabilitas inflasi adalah kondisi di mana tingkat kenaikan harga barang dan jasa umum berada dalam batas yang moderat dan dapat diprediksi. Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan nilai riil pendapatan, sementara inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat mengindikasikan permintaan yang lemah dan stagnasi ekonomi (Mishkin & Serletis, 2016). Untuk menjaga stabilitas inflasi, bank sentral memainkan peran penting melalui kebijakan moneter. Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan target inflasi dan menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga inflasi dalam kisaran yang ditetapkan (Bank Indonesia, 2018).

Keseimbangan neraca pembayaran adalah situasi di mana total transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain tidak menghasilkan defisit atau surplus yang ekstrem. Neraca pembayaran mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Keseimbangan ini penting karena defisit yang besar dapat menyebabkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbesar risiko krisis mata uang. Sebaliknya, surplus yang besar dapat menunjukkan bahwa negara tersebut tidak memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk meningkatkan investasi domestik (Acharyya,

2023; Krugman et al., 2018). Di Indonesia, upaya untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran melibatkan berbagai kebijakan, termasuk promosi ekspor, pengelolaan impor, dan pengendalian arus modal. Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama untuk memantau aliran devisa dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung stabilitas eksternal.

Tingkat pengangguran adalah indikator penting lain dalam stabilitas ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa sejumlah besar tenaga kerja tidak digunakan secara produktif, yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan pelatihan vokasional, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah (Blanchard et al., 2010; Mankiw, 2019). Di Indonesia, program-program seperti Kartu Prakerja dan berbagai inisiatif pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Stabilitas ekonomi makro juga memerlukan koordinasi kebijakan yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian PPN/Bappenas harus bekerja sama untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi. Misalnya, kebijakan fiskal yang bertanggung jawab diperlukan untuk menghindari defisit anggaran yang berlebihan, sementara kebijakan moneter yang hati-hati diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar (Blanchard et al., 2010; Mankiw, 2019).

Pentingnya stabilitas ekonomi makro tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan ekonomi. Tanpa stabilitas ini, perekonomian dapat mengalami volatilitas yang menghambat investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan tingkat pengangguran yang rendah adalah tugas utama bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Melalui kebijakan yang terkoordinasi dan pelaksanaan yang efektif, stabilitas ekonomi makro dapat dicapai, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

B. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Infrastruktur dan teknologi merupakan komponen vital dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keduanya memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara. Infrastruktur fisik mencakup elemen-elemen seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi yang memfasilitasi pergerakan barang dan manusia. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi integrasi pasar dan pengurangan kesenjangan regional. Selain itu, infrastruktur fisik yang kuat memungkinkan terjadinya peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur teknologi dan informasi, di sisi lain, meliputi jaringan telekomunikasi, internet, dan sistem data yang mendukung komunikasi dan transfer informasi yang efisien. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang kuat, perusahaan dan individu dapat lebih mudah terhubung dan berkolaborasi, yang pada akhirnya mempercepat inovasi dan mempermudah akses ke pasar global. Selain itu, keberadaan infrastruktur teknologi yang baik juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien, seperti layanan e-government yang semakin memudahkan interaksi antara warga negara dan pemerintah.

Sementara itu, inovasi dan teknologi baru memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan, suatu negara dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi jejak karbon, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang sedang berkembang. Inovasi juga memungkinkan terciptanya solusi baru untuk tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur dan teknologi tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi saat ini, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

1. Infrastruktur Fisik (Jalan, Listrik, Air)

Pembangunan infrastruktur, yang mencakup bidang seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi, memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Penyediaan

infrastruktur yang kuat sangat penting untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Lukoševičius, 2021; Waberi, 2024). Investasi dalam infrastruktur telah terbukti dapat merangsang aktivitas ekonomi, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Bounphone, 2023; Nketiah-Amponsah & Sarpong, 2019). Selain itu, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memastikan kesejahteraan yang adil, dan mengurangi kemiskinan serta ketidaksetaraan (Du et al., 2022; Olaoye, 2023).

Berbagai studi telah menyoroti dampak positif infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menekankan peran infrastruktur dalam mengurangi biaya produksi, menarik investasi langsung asing, dan menjaga pertumbuhan ekonomi (Tsaurai & Ndou, 2019; Usman, 2024). Investasi infrastruktur juga dikaitkan dengan peningkatan inovasi teknologi, struktur industri, dan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (Pratama, 2023). Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi (Keothephar, 2024).

Infrastruktur, yang diklasifikasikan menjadi kategori ekonomi dan sosial, tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup. Ketersediaan infrastruktur listrik, misalnya, telah terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi infrastruktur, terutama dalam infrastruktur listrik, telah diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastruktur fisik mencakup fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan air yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Jalan yang baik dan terawat memfasilitasi pergerakan barang dan orang, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan akses ke pasar. Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan jalan tol dan jalan raya untuk meningkatkan konektivitas

antar wilayah. Proyek Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera adalah contoh inisiatif besar yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai daerah di pulau-pulau utama, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Listrik merupakan elemen krusial lain dalam infrastruktur fisik. Ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau sangat penting untuk mendukung industri, bisnis, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik melalui proyek-proyek seperti program 35.000 MW, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi juga semakin ditingkatkan untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (PLN, 2018).

Air bersih dan sanitasi adalah aspek lain dari infrastruktur fisik yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Akses yang memadai terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik dapat mengurangi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia, program-program seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah diluncurkan untuk meningkatkan akses air bersih di daerah pedesaan dan perkotaan yang belum terlayani (Kementerian PUPR, 2019).

2. Infrastruktur Teknologi dan Informasi

Infrastruktur teknologi dan informasi (*Information and Communication Technology*, ICT) mencakup jaringan telekomunikasi, internet, dan teknologi informasi yang mendukung komunikasi dan pertukaran data. Infrastruktur ICT yang kuat memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien, memperluas akses ke informasi, dan mendorong inovasi. Di era digital ini, konektivitas internet yang cepat dan andal sangat penting untuk mendukung ekonomi digital dan perdagangan elektronik.

Infrastruktur, terutama infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan ekonomi di berbagai negara. Penelitian telah menunjukkan bahwa infrastruktur TIK, bersama dengan faktor-faktor makroekonomi lainnya, merupakan pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di

negara-negara Uni Eropa (Toader et al., 2018). Selain itu, pengembangan infrastruktur inti, termasuk transportasi, TIK, energi, sistem air, dan sanitasi, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi (Mačiulytė-Šniukienė et al., 2022).

Investasi dalam infrastruktur, seperti infrastruktur digital dan konektivitas internet, dapat mendorong perkembangan ekonomi berkualitas tinggi dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing internasional (Cao, 2024). Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur tidak hanya menyediakan peluang kerja tetapi juga meningkatkan produktivitas di berbagai sektor melalui penerapan TIK (Yusliana, 2023). Penggunaan teknologi informasi yang efektif ditegaskan sebagai faktor inti untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan mengorganisir masyarakat informasi baru (Maximov et al., 2019).

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan regional di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana infrastruktur berperan sebagai penopang ekspansi ekonomi (Jatayu, 2024). Studi juga menekankan dampak positif infrastruktur terhadap pertumbuhan regional, distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Calderón & Servén, 2004; Shrestha, 2022). Infrastruktur yang memadai telah lama diakui sebagai faktor vital dalam pembangunan ekonomi (Seneviratne & Sun, 2013).

Selain itu, investasi infrastruktur, seperti pada infrastruktur listrik, telah terbukti menjadi pendorong penting dalam mempercepat ekspansi ekonomi (Keothephar, 2024). Pengembangan infrastruktur regional secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Ignatieva et al., 2020). Dampak positif dari investasi infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi telah diamati di berbagai negara, termasuk China dan India (Sreenu, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk memperkuat infrastruktur ICT. Proyek Palapa Ring, misalnya, bertujuan untuk membangun jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh provinsi di Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan akses internet di seluruh negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital (Kementerian Kominfo, 2019).

Selain itu, pengembangan pusat data dan infrastruktur cloud computing menjadi semakin penting untuk mendukung bisnis dan layanan pemerintah. Pusat data yang canggih dan aman memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih efisien, sementara cloud computing menyediakan fleksibilitas dan skalabilitas untuk berbagai aplikasi bisnis. Pemerintah Indonesia mendorong investasi dalam infrastruktur ini untuk meningkatkan daya saing digital dan mendorong inovasi di sektor teknologi (Das et al., 2019).

3. Inovasi dan Teknologi Baru

Inovasi memainkan peran krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi di berbagai negara. Secara luas diakui bahwa inovasi merupakan faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing (Shahinyan, 2024). Negara-negara yang memprioritaskan inovasi cenderung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan seperti 'middle income trap' atau perangkap pendapatan menengah (Бажап, 2019). Dampak inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, dengan kemajuan teknologi berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional menuju daya saing yang lebih tinggi (Nugroho & Santiago, 2023).

Penelitian menekankan bahwa inovasi, penelitian, dan pengembangan adalah faktor-faktor esensial yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, memungkinkan terciptanya strategi pembangunan yang efektif untuk berbagai perekonomian nasional (Virgilio et al., 2023). Kewirausahaan juga diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam mendorong perkembangan dinamis, inovasi, dan fleksibilitas baik di ekonomi yang sangat maju maupun yang sedang berkembang (Iaroslav et al., 2020). Kapasitas inovasi nasional diakui sebagai penentu kritis dari kemajuan ekonomi, yang mencerminkan kemampuan suatu negara untuk menciptakan dan mengkomersialkan inovasi di pasar (Cvetanović et al., 2021).

Inovasi tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk model ekonomi baru, terutama di negara-negara maju (Dominiak, 2021). Pengembangan inovasi teknologi telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang semakin menekankan pentingnya inovasi dalam

mendorong kemajuan ekonomi (Wang & Xu, 2021). Selain itu, penanganan inovasi hijau dan kendala institusional di tingkat nasional telah terbukti berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi berkualitas tinggi (Li et al., 2021).

Inovasi dan teknologi baru adalah pendorong utama perubahan ekonomi dan sosial. Inovasi mencakup pengembangan produk, proses, dan model bisnis baru yang meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), blockchain, dan teknologi finansial (FinTech) telah mengubah berbagai sektor ekonomi, dari manufaktur hingga jasa keuangan.

Di Indonesia, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mendorong inovasi melalui berbagai inisiatif. Satu contoh adalah Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang diluncurkan oleh Kementerian Kominfo. Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem startup yang kuat dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di bidang teknologi digital. Dengan memberikan dukungan berupa pelatihan, mentoring, dan akses ke jaringan investor, program ini diharapkan dapat menciptakan banyak perusahaan teknologi baru yang inovatif.

Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) sangat penting untuk mendorong inovasi. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran untuk R&D dan mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri. Inisiatif seperti Dana Abadi Penelitian bertujuan untuk menyediakan pendanaan yang berkelanjutan bagi proyek-proyek penelitian yang strategis dan inovatif.

Adopsi teknologi baru seperti AI dan IoT juga didorong dalam berbagai sektor. Misalnya, di sektor pertanian, teknologi IoT digunakan untuk meningkatkan efisiensi irigasi dan pemantauan kondisi tanaman, sementara AI digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat kepada petani. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan (Trendov et al., 2019).

C. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingginya

kualitas sumber daya manusia memungkinkan terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif, yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar global. Pendidikan dan pelatihan menjadi elemen utama dalam membentuk keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tenaga kerja. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu memperoleh kemampuan berpikir kritis, inovasi, serta keterampilan teknis yang relevan dengan industri. Pelatihan yang berkesinambungan juga penting untuk memperbarui keterampilan agar tetap kompetitif dalam pasar tenaga kerja yang dinamis.

Selain itu, kesehatan dan gizi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, absen kerja yang lebih rendah, dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Gizi yang baik mendukung perkembangan otak dan fisik, yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Produktivitas tenaga kerja, sebagai elemen ketiga, dipengaruhi oleh lingkungan kerja, teknologi yang tersedia, serta kesejahteraan pekerja. Produktivitas yang tinggi memungkinkan peningkatan output ekonomi tanpa harus meningkatkan jumlah tenaga kerja secara signifikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan adalah faktor krusial dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai negara. Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen kunci dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, sehingga berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja (Permana, 2024). Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya mencakup pendidikan dan pelatihan, tetapi juga memerlukan dukungan manajemen, insentif yang jelas, serta sanksi (Siregar, 2024). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia unggul di lembaga pendidikan ditekankan melalui pendidikan dan pelatihan untuk membentuk profesionalisme dan keunggulan (Firdaus, 2023).

Dalam kasus Vietnam, inisiatif telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, peningkatan

alokasi keuangan, pelatihan guru, dan pembentukan kemitraan antara lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan industri (Binh, 2021). Demikian pula, di Vietnam, pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan Revolusi Industri Keempat (Anh et al., 2022). Pendidikan ditekankan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor-sektor seperti transportasi, di mana fokusnya adalah pada peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja (Nopriyanto, 2021).

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga mencakup manajemen lembaga pendidikan, di mana pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pendidik dan staf, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi tersebut (Pusvitasari, 2021). Dalam konteks madrasah, pelatihan dalam jabatan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru serta karyawan, yang berkontribusi pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (Farisi, 2021). Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga diakui sebagai mekanisme untuk meningkatkan kreativitas di antara karyawan, menyoroti pentingnya pembelajaran terus-menerus dan pengembangan keterampilan (Gifari, 2023).

Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia ditegaskan dalam berbagai studi yang berfokus pada berbagai sektor dan tingkat pendidikan. Mulai dari sekolah menengah kejuruan hingga sekolah dasar swasta, penekanannya adalah pada penerapan pendidikan berkualitas untuk memberdayakan sumber daya manusia dan menghasilkan lulusan yang kompeten (Nusraningrum, 2023). Program pelatihan dan pengembangan di sekolah diidentifikasi sebagai strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja keseluruhan (Trihapsari et al., 2021). Selain itu, peran modal manusia dalam meningkatkan sumber daya auditor melalui pelatihan dan keahlian juga ditekankan, menyoroti hubungan langsung antara kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan organisasi (Kusumaningrum et al., 2022).

Pendidikan dan pelatihan adalah dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal dari tingkat dasar hingga

perguruan tinggi membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di Indonesia, program wajib belajar 12 tahun telah diluncurkan untuk memastikan semua anak mendapatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah. Namun, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, dengan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan guru yang kurang terlatih (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019).

Di tingkat internasional, negara-negara seperti Finlandia dan Singapura dikenal memiliki sistem pendidikan yang unggul. Finlandia, misalnya, menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan, dengan fokus pada kesejahteraan siswa dan pengembangan keterampilan kritis. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan menerima pelatihan terus-menerus, yang berkontribusi pada kualitas pendidikan yang tinggi (Franklin-Rahkonen, 2017). Singapura, di sisi lain, berfokus pada pendidikan berbasis teknologi dan keterampilan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), yang membantu negara tersebut bersaing di kancah global (OECD, 2016).

Selain pendidikan formal, pelatihan vokasional dan keterampilan juga sangat penting. Di Indonesia, program pelatihan kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK) berusaha untuk meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja. Namun, efektivitas program ini sering kali terbatas oleh keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Sebagai perbandingan, Jerman memiliki sistem pendidikan dual yang menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pelatihan praktis di tempat kerja. Sistem ini berhasil menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja, yang sangat dihargai oleh industri.

2. Kesehatan dan Gizi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai negara melalui kesehatan dan gizi merupakan upaya penting yang membutuhkan pendekatan multifaset. Status gizi individu, terutama anak-anak, memainkan peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Andriani, 2023; Anshory et al., 2023; Mariana, 2024; Mutalazimah & Mustikaningrum, 2020). Kekurangan gizi tidak hanya memiliki dampak langsung pada kesehatan, tetapi juga menyebabkan efek jangka panjang seperti penurunan fungsi kognitif, yang mempengaruhi tingkat kecerdasan dan pada akhirnya berdampak pada kualitas modal

manusia (Anshory et al., 2023; Mariana, 2024). Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah gizi buruk, wasting, dan stunting pada anak-anak sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Roza, 2023; Wulandari et al., 2021).

Selain itu, hubungan antara gizi dan kesehatan sudah mapan, dengan gizi yang baik menjadi faktor fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia (Andriani, 2023; Mutalazimah & Mustikaningrum, 2020). Malnutrisi dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat, sehingga menekankan pentingnya gizi yang memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Mutalazimah & Mustikaningrum, 2020; Andriani, 2023). Selain itu, implementasi program dan kebijakan peningkatan gizi oleh pemerintah, seperti di Indonesia, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi yang terarah (Wulandari et al., 2021; Roza, 2023).

Dalam konteks pandemi COVID-19, pentingnya layanan kesehatan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin ditekankan (Sarihati & Santosa, 2021). Pengembangan kesehatan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu tetapi juga memiliki dampak positif pada kualitas keseluruhan sumber daya manusia dalam suatu negara (Sarihati & Santosa, 2021). Investasi dalam pendidikan, gizi, dan kesehatan, seperti yang ditekankan dalam transisi demografi Oman, dapat meningkatkan modal manusia dan kualitas sumber daya manusia (M. M. Islam, 2020).

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di sektor konstruksi dan gizi klinis, sangat penting untuk memastikan kualitas dan kinerja (Pan et al., 2021; Zhang, 2015). Sistem manajemen mutu dan kepemimpinan memainkan peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dan meningkatkan hasil, seperti yang terlihat dalam inisiatif yang menangani malnutrisi di lingkungan perawatan kesehatan (Arensberg et al., 2019; McCauley et al., 2019)). Dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan model perawatan gizi yang komprehensif, negara-negara dapat meningkatkan kualitas modal manusia mereka (Pham & Dung, 2022; Tappenden et al., 2013).

Kesehatan dan gizi yang baik adalah prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan berkontribusi penuh terhadap perekonomian. Di Indonesia, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah memberikan akses layanan kesehatan kepada jutaan warga. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam hal distribusi layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah terpencil.

Secara internasional, negara-negara seperti Jepang dan Swedia memiliki sistem kesehatan yang sangat maju. Jepang memiliki salah satu sistem kesehatan dengan harapan hidup tertinggi di dunia, berkat akses yang luas terhadap perawatan medis dan fokus pada pencegahan penyakit. Swedia, dengan sistem kesehatan universalnya, memastikan bahwa semua warganya memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang kemampuan finansial (World Health Organization, 2023).

Gizi juga memainkan peran penting dalam kesehatan. Di Indonesia, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil. Namun, masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Sebagai perbandingan, Brasil telah berhasil mengurangi angka stunting melalui program Bolsa Família, yang mengkondisikan bantuan tunai pada persyaratan seperti pemeriksaan kesehatan dan imunisasi anak (Soares et al., 2010).

3. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah indikator penting dari kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan keterampilan, dan kondisi kesehatan yang kurang optimal (World Bank, 2019).

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Korea Selatan, misalnya, telah berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi, yang mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor

ekonomi. Jerman, dengan sistem pendidikannya, berhasil menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil dan produktif, yang menjadi tulang punggung industri manufaktur negara tersebut (Anonymous, 2018).

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta memastikan kesehatan dan gizi yang baik bagi semua warganya. Program-program pelatihan keterampilan dan peningkatan akses layanan kesehatan harus diperkuat dan diperluas. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi di tempat kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Lund et al., 2019; McKinsey and Company, 2019).

D. LEMBAGA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Lembaga dan kebijakan publik memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Efektivitas pemerintah, transparansi dan akuntabilitas, serta kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung adalah tiga elemen utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan. Analisis ini akan mengkaji kasus di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik dan kondisi internasional.

1. Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif serta memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah yang efektif dapat menciptakan kondisi yang stabil yang diperlukan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, tantangan masih tetap ada, seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Di tingkat internasional, negara seperti Singapura dikenal dengan pemerintahannya yang sangat efektif. Singapura memiliki birokrasi yang efisien dan profesional, serta kebijakan yang jelas dan konsisten. Pendekatan ini memungkinkan Singapura untuk menarik investasi asing dan menjadi salah satu pusat bisnis global. Faktor-faktor seperti meritokrasi, teknologi informasi yang canggih, dan komitmen terhadap

inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan di Singapura.

Selain itu, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark juga dikenal dengan efektivitas pemerintahannya. Kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang desentralisasi, yang memungkinkan otoritas lokal untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pendekatan partisipatif dan inklusif dalam perumusan kebijakan juga membantu meningkatkan efektivitas pemerintahan (*Government at a Glance 2019 (Summary in English)*, 2019).

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip penting yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka (TI, 2019).

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti penerapan e-government dan keterbukaan informasi publik. Sistem e-procurement, misalnya, telah membantu mengurangi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.

Sebagai perbandingan, negara seperti Selandia Baru dan Kanada sering disebut sebagai model transparansi dan akuntabilitas. Selandia Baru memiliki peraturan yang ketat mengenai keterbukaan informasi dan audit publik, yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat. Kanada, dengan sistem federalnya, mendorong akuntabilitas melalui mekanisme checks and balances antara pemerintah pusat dan provinsi (TI, 2019).

3. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Mendukung

Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung adalah kebijakan yang dirancang untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan distribusi kesejahteraan yang adil. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran pemerintah, termasuk penerimaan dari

pajak dan pengeluaran publik, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral (Blanchard et al., 2010; Mankiw, 2019).

Di Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter telah berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah telah berusaha untuk menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman dan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik melalui reformasi pajak dan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Secara internasional, negara seperti Jerman dan Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Jerman, dengan kebijakan fiskalnya yang hati-hati dan komitmen terhadap anggaran berimbang, telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi bahkan di tengah krisis ekonomi global. Bank Sentral Eropa, yang mempengaruhi kebijakan moneter di Jerman, juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga di zona euro (IMF, 2020).

Amerika Serikat, di sisi lain, sering menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa resesi. Federal Reserve, sebagai bank sentral, menggunakan berbagai alat kebijakan moneter, termasuk pengaturan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah (Mankiw, 2019).

Dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, penting untuk memiliki koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral. Koordinasi ini membantu menghindari kebijakan yang saling bertentangan dan memastikan bahwa tujuan makroekonomi dapat tercapai dengan lebih efektif.

E. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Kondisi sosial dan budaya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai dan norma sosial, kohesi sosial dan integrasi, serta peran gender dalam pembangunan adalah tiga elemen utama yang mempengaruhi dinamika sosial dan keberhasilan

pembangunan. Analisis ini akan mengkaji situasi di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik dan kondisi internasional.

1. Nilai dan Norma Sosial

Nilai dan norma sosial adalah pedoman perilaku yang dianut oleh masyarakat dan mempengaruhi interaksi sosial serta pembentukan kebijakan publik. Di Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (konsensus), dan kekeluargaan sangat kuat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta pengambilan keputusan di berbagai tingkatan masyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya kolektivisme di mana kepentingan kelompok sering kali diutamakan di atas kepentingan individu (Geertz, 2022).

Secara internasional, nilai dan norma sosial juga bervariasi dan mempengaruhi pembangunan dengan cara yang berbeda. Di negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia, nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas sangat menonjol. Kebijakan sosial dan ekonomi dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Ini mencerminkan budaya egalitarianisme yang mengutamakan kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial (O'Connell & Esping-Anderson, 1991).

Nilai-nilai sosial yang kuat dapat mendukung pembangunan dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan kooperatif. Di Indonesia, misalnya, praktik gotong royong membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga respons terhadap bencana alam. Namun, tantangan tetap ada, termasuk bagaimana menjaga dan mengadaptasi nilai-nilai tradisional dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.

2. Kohesi Sosial dan Integrasi

Kohesi sosial dan integrasi adalah aspek penting dari kondisi sosial yang mempengaruhi stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Kohesi sosial mengacu pada kekuatan hubungan sosial dan rasa solidaritas di antara anggota masyarakat, sementara integrasi mengacu pada inklusi dan partisipasi semua kelompok dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, negara dengan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, kohesi sosial dan integrasi sering kali diuji oleh perbedaan dan konflik. Pemerintah telah berupaya untuk mempromosikan integrasi melalui berbagai kebijakan, termasuk pendidikan multikultural

dan program pembangunan daerah. Program seperti Desa Tangguh Sosial bertujuan untuk meningkatkan kohesi sosial dengan memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, negara seperti Kanada dikenal dengan pendekatan multikulturalisme yang berhasil dalam mempromosikan kohesi sosial dan integrasi. Kanada mengakui dan merayakan keragaman budaya, dan kebijakan imigrasinya dirancang untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi imigran. Kebijakan ini membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan produktif, di mana semua warga negara merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama (Berry, 2013).

Namun, tantangan dalam menjaga kohesi sosial tetap ada, termasuk isu ketidaksetaraan dan diskriminasi. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, serta memastikan bahwa kebijakan sosial dan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial (Putnam, 2007).

3. Peran Gender dalam Pembangunan

Peran gender dalam pembangunan adalah aspek penting yang menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat pembangunan dengan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.

Gender memainkan peran penting dalam pembangunan, memengaruhi berbagai aspek masyarakat dan individu. Peran gender dalam pembangunan ekonomi berdampak pada pertumbuhan, distribusi kekayaan, dan kemajuan secara keseluruhan (Daffa, 2024). Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan secara keseluruhan (Pardi et al., 2023). Pengembangan gender memiliki implikasi jangka panjang bagi pendidikan, pilihan karir, dan perilaku keluarga, menekankan perlunya memahami faktor sosial budaya dalam membentuk perbedaan individu (Updegraff et al., 2014).

Upaya menuju pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah berlangsung selama beberapa dekade, yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi kepentingan perempuan dalam kerangka organisasi (Mukhopadhyay, 2013).

Kesetaraan gender dan kurangnya pembangunan gender tetap menjadi tantangan yang signifikan di banyak negara berkembang, menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender untuk kemajuan yang berkelanjutan (Self & Grabowski, 2009). Penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan kesetaraan gender menyebabkan penyempitan perbedaan gender dalam preferensi, menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan peran gender (Falk & Hermle, 2018).

Di Indonesia, peran perempuan dalam pembangunan terus meningkat meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan pemerintah seperti Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik. Selain itu, inisiatif seperti pemberian akses kredit mikro untuk perempuan pengusaha telah membantu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.

Secara internasional, negara seperti Islandia dan Rwanda menunjukkan bagaimana kebijakan proaktif dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dan mendukung pembangunan. Islandia, yang secara konsisten berada di peringkat atas dalam Indeks Kesetaraan Gender Global, telah menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan upah, cuti orang tua yang adil, dan representasi perempuan di pemerintahan. Rwanda, setelah mengalami genosida, telah membuat kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perempuan memegang hampir setengah dari kursi di parlemen, yang merupakan salah satu proporsi tertinggi di dunia (Schwab, 2020).

Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam angkatan kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Tidak hanya di tingkat nasional, pada tingkat regional dan secara khusus di tingkat keluarga, peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga telah meningkat pesat. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mendidik anak. Lebih dari itu perempuan telah mengambil peran ganda yaitu sebagai pekerja di luar rumah baik itu di kantor pemerintah, kantor

swasta, mengembangkan usaha dalam skala besar, dan paling signifikan pada usaha mikro kecil dan menengah. Tidak sedikit juga perempuan yang bekerja menjadi buruh pada perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan kakao, perkebunan kopi dan perkebunan kelapa sawit (Guampe & Kayupa, 2022). Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di semua sektor (Woetzel et al., 2015).

F. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM

Ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Sumber daya alam, seperti mineral, energi, air, dan lahan, memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian, menyediakan bahan mentah untuk industri, dan menjadi penopang utama bagi berbagai sektor, termasuk pertanian, energi, dan manufaktur.

Namun, ketersediaan ini saja tidak cukup; pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Keberlanjutan lingkungan menjadi elemen krusial dalam konteks ini, mengingat eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang serius, seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di samping itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya ini secara efektif. Dengan membandingkan situasi di Indonesia dengan praktik internasional yang berhasil, kita dapat menarik pelajaran berharga tentang bagaimana negara lain mengoptimalkan sumber daya mereka untuk pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi acuan bagi kebijakan Nasional.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya seperti mineral, hutan, dan air digunakan secara efisien dan berkelanjutan. Di Indonesia,

pengelolaan sumber daya alam menghadapi berbagai tantangan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti moratorium pembukaan hutan baru dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ilegal.

Salah satu inisiatif penting di Indonesia adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Program ini melibatkan penanaman pohon, pemulihan lahan kritis, dan pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif penduduk lokal dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, negara seperti Norwegia dikenal dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Norwegia telah berhasil mengelola sumber daya minyak dan gasnya dengan cara yang berkelanjutan melalui Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund). Dana ini menginvestasikan pendapatan dari minyak dan gas ke dalam berbagai aset global, yang tidak hanya membantu menstabilkan ekonomi Norwegia tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Røste & Røste, 2021).

2. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan kesehatan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup untuk jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan polusi, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Di Indonesia, upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan mencakup berbagai inisiatif seperti Program Kampung Iklim (ProKlim), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Melalui partisipasi dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun, tantangan tetap ada, termasuk pengawasan yang efektif dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan.

Negara lain seperti Jerman juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Jerman telah menetapkan target ambisius untuk energi terbarukan dan efisiensi energi melalui inisiatif *Energiewende*. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti angin dan matahari. Selain itu, Jerman juga memiliki sistem pengelolaan limbah yang efisien dan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon (IPCC, 2023).

3. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah proses menyesuaikan diri dengan efek nyata atau yang diharapkan dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap iklim, peningkatan kapasitas sistem irigasi, dan pengelolaan risiko bencana. Program Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) adalah contoh inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (Bappenas-KLH-DNPI, 2012).

Di tingkat internasional, negara seperti Belanda dikenal dengan pendekatan inovatifnya dalam adaptasi terhadap perubahan iklim. Belanda telah mengembangkan sistem pengelolaan air yang canggih untuk melindungi negara dari banjir. Proyek seperti *Ruimte voor de Rivier* (*Room for the River*) bertujuan untuk memberikan ruang lebih bagi sungai untuk mengalir dengan aman selama periode curah hujan tinggi, mengurangi risiko banjir. Selain itu, Belanda juga berinvestasi dalam teknologi dan penelitian untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur dan masyarakat terhadap perubahan iklim (Dutch Water Sector, 2019).

Adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim ke

dalam semua aspek perencanaan dan pembangunan, serta untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (IPCC, 2022).

BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA

A. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

1. Definisi dan Pengukuran

Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang terjadi dalam perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh entitas asing yang beroperasi di negara tersebut (Case et al., 2012; Mankiw, 2014). Pendapatan nasional merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB): Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam batas geografis suatu negara dalam periode waktu tertentu.
- b. Produk Nasional Bruto (PNB): Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh dari luar negeri, dikurangi pendapatan yang diperoleh oleh entitas asing di dalam negeri.
- c. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income, NNI): PNB dikurangi penyusutan atau depresiasi dari aset-aset produktif.
- d. Pendapatan Disposable (Disposable Income): Pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga setelah dikurangi pajak langsung dan ditambah dengan transfer dari pemerintah.

Ada tiga metode utama yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, yaitu:

- a. Metode Produksi (Output Approach): Mengukur total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam perekonomian. Nilai tambah dihitung dengan mengurangi nilai input antara dari nilai output total masing-masing sektor.
- b. Metode Pendapatan (Income Approach): Menghitung total pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi dalam proses produksi barang dan jasa. Ini mencakup upah dan gaji, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh tenaga kerja, pemilik tanah, penyedia modal, dan pengusaha.
- c. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach): Menghitung total pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Pengeluaran ini mencakup konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah contoh sederhana dari penghitungan pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran:

Misalkan dalam satu tahun, suatu negara memiliki data sebagai berikut:

- Konsumsi rumah tangga: \$500 miliar
- Investasi domestik bruto: \$200 miliar
- Pengeluaran pemerintah: \$150 miliar
- Ekspor: \$100 miliar
- Impor: \$50 miliar

Pendapatan nasional (PDB) akan dihitung sebagai:

$$\text{PDB} = \text{Konsumsi Rumah Tangga} + \text{Investasi Domestik Bruto} + \text{Pengeluaran Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$$

$$\text{PDB} = \$500 \text{ miliar} + \$200 \text{ miliar} + \$150 \text{ miliar} + (\$100 \text{ miliar} - \$50 \text{ miliar})$$

$$\text{PDB} = \$500 \text{ miliar} + \$200 \text{ miliar} + \$150 \text{ miliar} + \$50 \text{ miliar}$$

$$\text{PDB} = \$900, \text{ miliar}$$

Pengukuran pendapatan nasional penting untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara dan merencanakan kebijakan ekonomi. Dengan mengukur pendapatan nasional, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja ekonomi, membuat perbandingan antar waktu dan antar negara, serta merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai moneter dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam batas geografis suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. PDB dihitung dengan menjumlahkan empat komponen utama:

- a. Konsumsi Rumah Tangga (C): Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk barang dan jasa.
- b. Investasi (I): Pengeluaran untuk barang modal, seperti peralatan, bangunan, dan persediaan, serta investasi dalam properti perumahan.
- c. Pengeluaran Pemerintah (G): Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, seperti belanja pegawai negeri, infrastruktur, dan layanan publik.
- d. Ekspor Neto (X-M): Selisih antara ekspor (barang dan jasa yang dijual ke luar negeri) dan impor (barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri).

Rumus PDB dapat dinyatakan sebagai:

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Ada tiga metode utama untuk menghitung PDB:

- a. Metode Produksi (Output Approach): Menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu negara.
- b. Metode Pendapatan (Income Approach): Menghitung total pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah.
- c. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach): Menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara.

Pada bagian ini juga kita mengenal dua istilah utama yaitu PDB Nominal dan PDB Riil. PDB Nominal mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam harga pasar yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan PDB Riil mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi

dengan menyesuaikan perubahan harga (inflasi atau deflasi) menggunakan tahun dasar tertentu.

Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah total nilai moneter dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara suatu negara (baik yang berada di dalam maupun luar negeri) selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PNB mencakup pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dari luar negeri dan mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh entitas asing di dalam negeri. PNB mencakup semua komponen PDB, ditambah pendapatan faktor bersih dari luar negeri, yaitu:

- a. Pendapatan dari Tenaga Kerja: Gaji, upah, dan kompensasi lainnya yang diperoleh oleh warga negara yang bekerja di luar negeri.
- b. Pendapatan dari Investasi: Bunga, dividen, dan laba yang diperoleh dari investasi di luar negeri. Transfer Netto: Transfer uang yang dikirim oleh warga negara yang tinggal di luar negeri.

Rumus PNB dapat dinyatakan sebagai:

$$\text{PNB} = \text{PDB} + \text{Pendapatan Faktor Neto dari Luar Negeri}$$

Perbedaan Antara PDB dan PNB dapat dilihat dari PDB mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam batas geografis suatu negara tanpa memperhitungkan apakah faktor produksinya dimiliki oleh warga negara atau oleh entitas asing. Sedangkan PNB mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh dari luar negeri dan mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh entitas asing di dalam negeri.

Contoh Penghitungan PNB:

Misalkan suatu negara memiliki data sebagai berikut:

- PDB: \$1 triliun
- Pendapatan dari warga negara di luar negeri: \$100 miliar
- Pendapatan dari entitas asing di dalam negeri: \$50 miliar

PNB akan dihitung sebagai:

$\text{PNB} = \text{PDB} + (\text{Pendapatan dari warga negara di luar negeri} - \text{Pendapatan dari entitas asing di dalam negeri})$

$\text{PNB} = \$1 \text{ triliun} + (\$100 \text{ miliar} - \$50 \text{ miliar})$

$\text{PNB} = \$1 \text{ triliun} + \50 miliar

$\text{PNB} = \$1.05 \text{ triliun}$

PDB dan PNB adalah dua indikator penting dalam ekonomi untuk mengukur output dan pendapatan suatu negara. PDB fokus pada aktivitas produksi dalam batas geografis suatu negara, sedangkan PNB memperhitungkan pendapatan warga negara yang dihasilkan dari luar negeri. Keduanya memberikan gambaran yang berbeda namun saling melengkapi mengenai kinerja ekonomi suatu negara.

B. PENDAPATAN PER KAPITA

1. Pengertian dan Pengukuran

Pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi total pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, karena memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran rata-rata yang dapat dinikmati oleh penduduk negara tersebut. Rumus Pendapatan Per Kapita:

$\text{Pendapatan Per Kapita} = \text{Pendapatan Nasional} / \text{Jumlah Penduduk}$

Di mana:

- a. Pendapatan Nasional dapat berupa Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).
- b. Jumlah Penduduk adalah total populasi negara pada periode yang sama.

Pendapatan per kapita dapat diukur menggunakan dua metode utama, yaitu berdasarkan PDB dan berdasarkan PNB. Keduanya memberikan perspektif yang berbeda tentang pendapatan rata-rata yang dihasilkan dalam suatu negara.

- a. Pendapatan Per Kapita Berdasarkan PDB: Mengukur pendapatan per kapita menggunakan PDB memberikan gambaran tentang rata-rata nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas geografis suatu negara yang dapat dinikmati oleh penduduk negara tersebut.

Rumus:

Pendapatan Per Kapita (PDB) = $\text{PDB} / \text{Jumlah Penduduk}$

Contoh:

Jika suatu negara memiliki PDB sebesar \$1 triliun dan jumlah penduduknya 50 juta, maka pendapatan per kapita berdasarkan PDB adalah:

Pendapatan Per Kapita (PDB) = $\$1 \text{ triliun} / 50 \text{ juta}$

Pendapatan Per Kapita (PDB) = \$20,000

- b. Pendapatan Per Kapita Berdasarkan PNB: Mengukur pendapatan per kapita menggunakan PNB memberikan gambaran tentang rata-rata nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh dari luar negeri, yang dapat dinikmati oleh penduduk negara tersebut.

Rumus:

Pendapatan Per Kapita (PNB) = $\text{PNB} / \text{Jumlah Penduduk}$

Contoh:

Jika suatu negara memiliki PNB sebesar \$1.05 triliun dan jumlah penduduknya 50 juta, maka pendapatan per kapita berdasarkan PNB adalah:

Pendapatan Per Kapita (PNB) = $\$1.05 \text{ triliun} / 50 \text{ juta}$

Pendapatan Per Kapita (PNB) = \$21,000

Keunggulan Pengukuran Pendapatan Per Kapita:

- a. Indikator Kesejahteraan Ekonomi: Pendapatan per kapita memberikan gambaran umum tentang tingkat kemakmuran rata-rata yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu negara.
- b. Perbandingan Antar Negara: Pendapatan per kapita memungkinkan perbandingan kesejahteraan ekonomi antar negara dengan memperhitungkan ukuran populasi.
- c. Perencanaan Kebijakan: Pemerintah dapat menggunakan data pendapatan per kapita untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Keterbatasan Pengukuran Pendapatan Per Kapita:

- a. Distribusi Pendapatan Tidak Merata: Pendapatan per kapita hanya menunjukkan rata-rata, tanpa memperhitungkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam suatu negara. Sebuah negara dengan pendapatan per kapita tinggi bisa saja memiliki ketimpangan pendapatan yang besar.
- b. Tidak Mencerminkan Kesejahteraan Non-ekonomi: Pendapatan per kapita tidak memperhitungkan faktor-faktor non-ekonomi seperti kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Pengaruh Nilai Tukar: Pendapatan per kapita yang diukur dalam mata uang lokal dan kemudian dikonversi ke mata uang asing bisa dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, yang dapat mendistorsi perbandingan antar negara.

Pendapatan per kapita adalah alat penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Meskipun memiliki keterbatasan, pengukuran ini memberikan indikasi yang berguna tentang standar hidup rata-rata yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu negara dan memungkinkan perbandingan kesejahteraan ekonomi antar negara. Pemerintah dan pembuat kebijakan sering menggunakan pendapatan per kapita sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pendapatan per kapita:

Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Alam

Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam memainkan peran penting dalam menentukan pendapatan per kapita suatu negara. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan tanah subur cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk mengeksport komoditas-komoditas tersebut, yang kemudian dapat menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan Nasional. Sumber daya alam yang melimpah memberikan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat, karena mereka menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk industri domestik serta produk-produk yang dapat dijual di pasar internasional.

Namun, tidak hanya ketersediaan sumber daya alam yang penting, tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Efisiensi dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari sumber daya tersebut. Negara-negara yang memiliki manajemen yang baik dalam memanfaatkan sumber daya alamnya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara signifikan. Pengelolaan yang efisien melibatkan berbagai aspek, termasuk teknologi yang digunakan, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta praktik-praktik yang berkelanjutan. Misalnya, penerapan teknologi canggih dalam ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, sementara kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi dapat menarik lebih banyak modal dan meningkatkan kapasitas produksi.

Di sisi lain, pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Negara yang tidak mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik mungkin menghadapi berbagai masalah, seperti ketergantungan berlebihan pada satu komoditas, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dari sumber

daya alam, serta degradasi lingkungan yang dapat merusak sumber daya tersebut di masa depan. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas sumber daya alam, bersama dengan pengelolaan yang baik, merupakan faktor-faktor kunci yang menentukan pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Tingkat pendidikan yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik cenderung menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan produktif. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga mengembangkan keterampilan teknis dan profesional yang diperlukan dalam berbagai sektor ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan inovasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan output dalam produksi barang dan jasa. Akibatnya, peningkatan tingkat pendidikan di suatu negara sering kali berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan per kapita, karena tenaga kerja yang lebih produktif berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan faktor krusial dalam menentukan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat lebih mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Negara dengan sistem kesehatan yang baik, yang menyediakan akses luas terhadap layanan kesehatan berkualitas, cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja lebih lama dan dengan kualitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita. Selain itu, kesehatan yang baik juga mengurangi beban biaya medis dan kehilangan produktivitas akibat penyakit, sehingga lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.

Secara keseluruhan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek kunci dari sumber daya manusia yang secara signifikan mempengaruhi

pendapatan per kapita. Negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan warganya akan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan kompeten, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan strategi penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang, karena dampaknya yang luas terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja.

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita. Infrastruktur fisik yang baik, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Jalan raya yang memadai memungkinkan transportasi barang dan jasa yang lebih cepat dan murah, mengurangi biaya logistik, dan mempercepat distribusi produk ke pasar. Jembatan yang kokoh menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, membuka akses bagi penduduk untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Pelabuhan dan bandara yang efisien memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan ekspor dan impor, serta menarik investasi asing. Semua ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita, karena ekonomi yang efisien dan produktif menghasilkan output yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi juga memainkan peran krusial dalam perekonomian modern. Akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Internet yang cepat dan andal memungkinkan bisnis untuk mengakses pasar global, berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis secara real-time, serta mengimplementasikan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi informasi juga memfasilitasi pendidikan dan pelatihan jarak jauh, yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan, pada gilirannya, produktivitas mereka. Inovasi yang didorong oleh TIK mencakup pengembangan aplikasi dan perangkat lunak baru,

otomatisasi proses produksi, dan peningkatan layanan publik, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Dengan demikian, infrastruktur, baik fisik maupun teknologi, merupakan fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Investasi dalam infrastruktur yang memadai dan modern sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Negara-negara yang berhasil mengembangkan infrastruktur yang baik cenderung menikmati tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan pendapatan per kapita yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Stabilitas Politik dan Kebijakan Pemerintah

Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah adalah faktor penting yang mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Negara yang stabil secara politik cenderung menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing. Investasi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika investor merasa yakin akan stabilitas politik suatu negara, mereka lebih cenderung untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai proyek infrastruktur, industri, dan layanan. Kepercayaan terhadap stabilitas politik juga mengurangi risiko investasi, sehingga biaya pinjaman menurun dan akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah. Dengan demikian, stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita.

Selain stabilitas politik, kebijakan ekonomi pemerintah memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan. Misalnya, kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan anggaran yang seimbang, pengeluaran pemerintah yang efisien, dan sistem perpajakan yang adil dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Di sisi lain, kebijakan moneter yang efektif, seperti pengendalian inflasi dan suku bunga, dapat menjaga stabilitas harga dan mendorong kegiatan ekonomi.

Reformasi struktural juga merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Reformasi ini mungkin mencakup deregulasi pasar, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penguatan lembaga-lembaga ekonomi. Dengan mengurangi hambatan-hambatan birokratis dan meningkatkan transparansi, reformasi struktural dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi serta investasi. Regulasi yang efisien, yang melindungi hak-hak properti dan menegakkan kontrak, juga penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat diprediksi.

Secara keseluruhan, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang mendukung adalah dua pilar utama yang saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika negara mampu menjaga stabilitas politik dan menerapkan kebijakan ekonomi yang bijaksana, hasilnya adalah peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Investasi yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, dan efisiensi ekonomi yang lebih baik semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan ini.

Tingkat Investasi

Tingkat investasi dalam perekonomian, baik dari sumber domestik maupun asing, merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Investasi yang tinggi memberikan suntikan modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan infrastruktur. Ketika investasi meningkat, sektor-sektor ekonomi menjadi lebih produktif, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan individu. Investasi asing juga membawa keuntungan tambahan berupa transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pengalaman kerja.

Selain investasi dalam skala besar, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) juga memainkan peran vital dalam perekonomian. UKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dukungan terhadap UKM melalui pembiayaan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Pembiayaan yang mudah diakses memungkinkan UKM untuk

berkembang dan berinovasi, sementara pelatihan membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengusaha serta karyawan UKM. Kebijakan yang mendukung, seperti pengurangan beban regulasi dan pemberian insentif pajak, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UKM.

Secara keseluruhan, investasi yang tinggi, baik dari sumber domestik maupun asing, serta pengembangan UKM yang efektif, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendukung inovasi, investasi dalam berbagai bentuknya membantu menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang mendukung peningkatan investasi dan pengembangan UKM merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi adalah faktor-faktor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Adopsi teknologi baru dalam proses produksi dapat membawa perubahan besar dalam efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan produksi yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan output keseluruhan ekonomi. Misalnya, otomatisasi dalam pabrik manufaktur dapat menggantikan pekerjaan manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan, menghasilkan produk yang lebih banyak

Teknologi dan inovasi adalah faktor-faktor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Adopsi teknologi baru dalam proses produksi dapat membawa perubahan besar dalam efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan produksi yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan output keseluruhan ekonomi. Misalnya, otomatisasi dalam pabrik manufaktur dapat menggantikan pekerjaan manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan, menghasilkan produk yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, adopsi teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membantu mengurangi biaya produksi, yang pada akhirnya berdampak positif pada pendapatan per kapita.

Selain adopsi teknologi, investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan pendorong utama inovasi. R&D memainkan peran penting

dalam menciptakan produk baru dan meningkatkan proses produksi yang ada. Investasi dalam R&D mendorong inovasi yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih kompetitif di pasar global. Pengembangan teknologi baru dan penemuan produk inovatif membantu perusahaan untuk tetap unggul dalam persaingan, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan ekspor. Misalnya, industri farmasi yang berinvestasi dalam R&D dapat mengembangkan obat-obatan baru yang lebih efektif, yang tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang besar melalui penjualan domestik dan ekspor.

Dengan meningkatkan daya saing ekonomi melalui teknologi dan inovasi, negara dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita. Investasi dalam teknologi dan R&D juga memperkuat infrastruktur pengetahuan suatu negara, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong penciptaan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dan investasi dalam R&D sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengekspor barang dan jasa yang mereka produksi dengan efisien serta mengimpor barang yang mereka butuhkan dengan biaya lebih rendah. Ketika suatu negara dapat menjual produknya di pasar internasional, ia dapat memperluas basis pelanggannya dan meningkatkan skala produksi. Peningkatan skala produksi ini sering kali menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas perusahaan dan pendapatan para pekerja. Di sisi lain, dengan mengimpor barang-barang yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri, negara dapat memenuhi kebutuhan domestiknya dengan harga yang lebih rendah, yang meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, perjanjian dagang memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan internasional. Perjanjian

dagang yang menguntungkan dapat membuka pasar baru bagi produk-produk domestik, meningkatkan volume perdagangan, dan memperluas peluang ekonomi. Perjanjian ini biasanya mencakup pengurangan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan peningkatan akses pasar, yang semuanya membantu mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan keuntungan dari ekspor dan impor. Misalnya, perjanjian dagang regional atau bilateral dapat memberikan akses preferensial kepada negara-negara tertentu, sehingga produk mereka dapat lebih bersaing di pasar internasional. Dengan akses yang lebih luas ke pasar global, perusahaan dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan.

Perdagangan internasional juga membawa manfaat tambahan berupa transfer teknologi dan pengetahuan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di negara-negara berkembang. Ketika perusahaan domestik berinteraksi dengan mitra internasional, mereka sering kali mengadopsi praktik terbaik dan teknologi baru yang membantu mereka meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Transfer teknologi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita dengan memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar global.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional dan perjanjian dagang yang menguntungkan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan mengeksport barang dan jasa yang diproduksi secara efisien dan mengimpor barang yang dibutuhkan dengan biaya lebih rendah, negara dapat meningkatkan daya saing ekonominya, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lingkungan Bisnis dan Kelembagaan

Lingkungan bisnis dan kelembagaan adalah faktor-faktor kritis yang mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Lingkungan bisnis yang kondusif ditandai oleh regulasi yang jelas dan birokrasi yang efisien. Ketika regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi mudah dipahami dan diterapkan, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih lancar dan menghadapi lebih sedikit hambatan administratif. Birokrasi yang efisien mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis, yang pada gilirannya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, proses perizinan yang cepat dan sederhana serta kebijakan perpajakan yang adil dan transparan

membuat iklim usaha menjadi lebih menarik bagi investor domestik dan asing. Investasi yang meningkat ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita.

Selain itu, kelembagaan yang kuat dan transparan memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan investor dan mendukung aktivitas ekonomi yang sehat. Lembaga-lembaga seperti sistem peradilan, bank sentral, dan badan pengatur lainnya perlu berfungsi dengan efisien dan bebas dari korupsi untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan ditegakkan dengan adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini memberikan jaminan kepada investor bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bahwa mereka dapat mengandalkan penegakan kontrak dan resolusi sengketa yang adil. Transparansi dalam administrasi publik dan tata kelola perusahaan juga penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Ketika lembaga berfungsi dengan baik, risiko yang terkait dengan investasi berkurang, yang mendorong lebih banyak modal masuk ke dalam perekonomian.

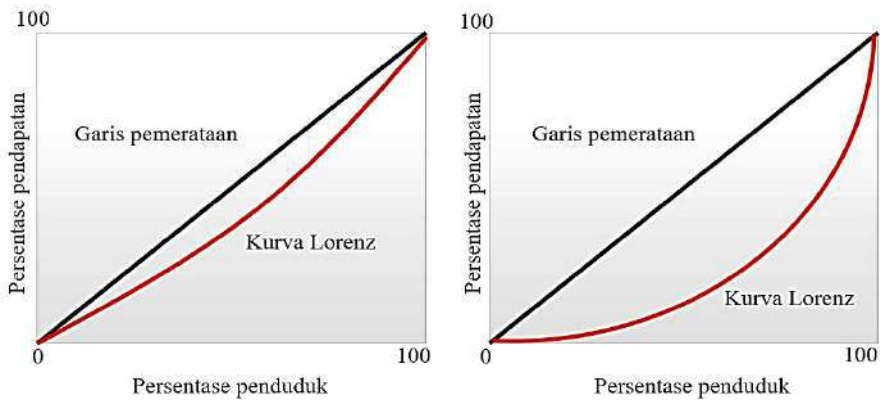
Lingkungan bisnis yang kondusif dan kelembagaan yang kuat bersama-sama menciptakan fondasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan bahwa hak-hak investor dilindungi, negara dapat menarik lebih banyak investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan yang mendukung peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kelembagaan sangat penting untuk mencapai tujuan ini, karena mereka membangun dasar yang stabil dan dapat diandalkan untuk aktivitas ekonomi yang sehat.

C. DISTRIBUSI PENDAPATAN

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi yang tidak merata dari pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini menunjukkan seberapa besar perbedaan dalam pendapatan yang diterima oleh orang-orang di berbagai lapisan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk koefisien Gini, kurva Lorenz, dan rasio pendapatan.

Koefisien Gini adalah alat statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata (setiap orang menerima pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan yang maksimal (satu orang menerima seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak menerima apa-apa). Kurva Lorenz adalah alat grafik yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan di suatu masyarakat. Pada sumbu horizontal, kurva Lorenz menunjukkan persentase kumulatif rumah tangga, sementara pada sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis kesetaraan sempurna (garis 45 derajat), semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Rasio pendapatan adalah perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh kelompok pendapatan tinggi dan kelompok pendapatan rendah, dengan contoh umum adalah rasio pendapatan antara kuintil tertinggi dan kuintil terendah dalam distribusi pendapatan (Mankiw, 2014; Todaro & Smith, 2020).



Gambar 7. 1 Kurva Lorenz

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah perbedaan dalam pendidikan dan keterampilan. Orang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung menerima pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah. Akses terhadap peluang ekonomi juga menjadi faktor penentu, di mana perbedaan dalam akses terhadap pekerjaan, kredit, dan peluang bisnis dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan.

Kebijakan fiskal dan redistribusi pendapatan yang tidak efektif dapat memperburuk ketimpangan. Globalisasi dan perkembangan teknologi juga turut memperluas kesenjangan antara tenaga kerja berkemampuan tinggi dan rendah, karena tenaga kerja berkemampuan tinggi mendapatkan manfaat lebih besar dari perubahan tersebut. Struktur pasar kerja yang diskriminatif, perbedaan dalam sektor pekerjaan, dan kebijakan upah yang tidak adil juga memperburuk ketimpangan pendapatan.

Dampak ketimpangan pendapatan terhadap masyarakat dan perekonomian sangat signifikan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi sering kali menyebabkan ketidakstabilan sosial, di mana ketidakpuasan sosial muncul di antara kelompok-kelompok yang merasa tertinggal atau terpinggirkan dalam distribusi pendapatan. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik yang pada akhirnya mengganggu tatanan sosial dan ekonomi negara. Selain itu, ketimpangan pendapatan dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, daya beli mayoritas penduduk menurun. Penurunan konsumsi ini berdampak negatif pada permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Masalah kesehatan dan pendidikan juga sering kali berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan. Kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas dan pendidikan yang baik, yang mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

Dengan demikian, ketimpangan pendapatan tidak hanya berdampak pada individu yang terkena dampak langsung, tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengatasi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan yang adil dan inklusif adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Indeks Gini, yang dikembangkan oleh statistikawan Italia, Corrado Gini, menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu negara atau wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata, dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum. Indeks Gini dihitung menggunakan kurva Lorenz, yang menggambarkan

distribusi kumulatif pendapatan di suatu masyarakat. Berikut langkah-langkah untuk menghitung Indeks Gini:

- a. Mengurutkan Data Pendapatan: Data pendapatan diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi.
- b. Menghitung Persentase Kumulatif Pendapatan dan Populasi: Menentukan persentase kumulatif dari pendapatan dan populasi.
- c. Membuat Kurva Lorenz: Menggambar kurva Lorenz dengan sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif populasi dan sumbu vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan.
- d. Menghitung Indeks Gini: Indeks Gini adalah rasio antara luas daerah antara garis kesetaraan sempurna (garis 45 derajat) dan kurva Lorenz terhadap luas total di bawah garis kesetaraan sempurna.

Rumus Indeks Gini:

$$G = A / A + B$$

Di mana:

A adalah luas area antara garis kesetaraan sempurna dan kurva Lorenz.

B adalah luas area di bawah kurva Lorenz.

Indeks Gini adalah alat penting untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan kurva Lorenz dan menghitung luas area yang relevan, kita dapat menentukan seberapa merata distribusi pendapatan dan membuat kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Indeks Gini yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar, sementara indeks yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

2. Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan

Pemerintah dan lembaga internasional telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa kebijakan utama:

- a. Pajak dan Redistribusi Pendapatan. Penerapan sistem pajak progresif adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pajak progresif berarti bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan cara ini, beban pajak didistribusikan lebih merata, dan

pendapatan yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk mendanai program-program publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, program transfer pendapatan, seperti tunjangan sosial, bantuan tunai langsung, dan subsidi, dirancang untuk memberikan dukungan keuangan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Transfer pendapatan ini membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke kebutuhan dasar.

- b. Akses Pendidikan dan Pelatihan. Meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan adalah kebijakan penting lainnya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang baik memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Program pelatihan keterampilan membantu tenaga kerja mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil. Dengan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada semua lapisan masyarakat, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
- c. Kebijakan Ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penerapan upah minimum dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif, juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan upah minimum menetapkan batas bawah gaji yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja, memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini membantu mengurangi eksploitasi tenaga kerja dan memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, yang mencakup berbagai inisiatif untuk mendorong partisipasi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam pasar kerja, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, membantu mengurangi ketimpangan dengan

- memberikan lebih banyak peluang bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka.
- d. **Perlindungan Sosial.** Perlindungan sosial adalah komponen penting dari kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Program-program perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan bantuan sosial, dirancang untuk memberikan jaminan keamanan finansial bagi individu dan keluarga yang rentan terhadap risiko ekonomi. Dengan menyediakan jaringan pengaman sosial, pemerintah dapat membantu mencegah jatuhnya individu ke dalam kemiskinan akibat kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana alam. Perlindungan sosial yang kuat juga membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi, memberikan stabilitas kepada rumah tangga, dan memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.

D. PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN

1. Hubungan Antara Pendapatan dan Kesejahteraan

Pendapatan dan kesejahteraan adalah dua konsep yang saling terkait erat dalam kajian ekonomi dan pembangunan sosial. Pendapatan sering dianggap sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan karena memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, kesejahteraan mencakup lebih dari sekadar pendapatan dan juga melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan emosional.

Pendapatan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan karena menentukan daya beli individu. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, individu dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, pendapatan yang cukup memungkinkan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan berkualitas, dan aktivitas rekreasi yang meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Mankiw, (2019), pendapatan adalah salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sering digunakan sebagai proxy untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Negara dengan PDB per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang

lebih baik karena warganya memiliki akses yang lebih besar terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk hidup yang layak.

Meskipun pendapatan adalah faktor penting, kesejahteraan juga mencakup aspek non-material yang tidak langsung terkait dengan pendapatan. Misalnya, kesehatan yang baik, lingkungan yang bersih, keamanan, dan hubungan sosial yang kuat merupakan komponen penting dari kesejahteraan. Amartya Sen dalam bukunya "Development as Freedom" menekankan bahwa kesejahteraan seharusnya dilihat dari perspektif kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (Sen, 2017). Ini berarti akses ke pendidikan, kebebasan politik, dan hak asasi manusia juga sangat penting.

Kesenjangan pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ketika ketimpangan pendapatan tinggi, perbedaan dalam akses terhadap sumber daya penting menjadi lebih nyata. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketidakstabilan politik, dan bahkan konflik. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata dapat mendukung kohesi sosial dan stabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut laporan dari OECD (2017), negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang rendah cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini karena distribusi pendapatan yang lebih merata memastikan bahwa lebih banyak orang memiliki akses ke layanan dasar dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Untuk mengukur kesejahteraan secara komprehensif, berbagai indikator digunakan selain pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP, misalnya, menggabungkan data tentang harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesejahteraan. IPM menunjukkan bahwa meskipun pendapatan penting, kualitas hidup juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan.

Pendapatan adalah komponen penting dari kesejahteraan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Kesejahteraan yang sebenarnya mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan harus memperhatikan peningkatan

pendapatan serta penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial yang baik.

2. Indikator Kesejahteraan Selain Pendapatan

Kesejahteraan merupakan konsep yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan yang berkontribusi pada kualitas hidup individu. Selain pendapatan, ada beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan secara lebih komprehensif. Indikator-indikator ini meliputi kesehatan, pendidikan, kondisi lingkungan, serta keamanan dan kesejahteraan sosial.

- a. Kesehatan. Kesehatan adalah salah satu indikator utama kesejahteraan. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk hidup produktif dan bahagia. Indikator kesehatan yang sering digunakan meliputi harapan hidup, angka kematian bayi, prevalensi penyakit menular, dan akses ke layanan kesehatan. Harapan hidup mengukur berapa lama rata-rata seseorang diharapkan hidup, dan angka ini sering kali mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan kondisi hidup secara umum. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO, 2015), negara dengan akses layanan kesehatan yang baik cenderung memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dan angka kematian bayi yang lebih rendah.
- b. Pendidikan. Pendidikan juga merupakan indikator penting kesejahteraan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan, partisipasi sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Indikator pendidikan meliputi tingkat melek huruf, rata-rata tahun sekolah, dan tingkat partisipasi pendidikan tinggi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2019) menekankan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan global.
- c. Kondisi Lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik adalah indikator kesejahteraan yang penting karena lingkungan yang sehat mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Indikator lingkungan mencakup kualitas udara dan air, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta keberlanjutan penggunaan sumber daya alam.

- d. Keamanan dan Kesejahteraan Sosial. Keamanan dan kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan rasa aman dan kohesi sosial dalam masyarakat. Indikator ini meliputi tingkat kejahatan, keamanan publik, jaminan sosial, dan kebijakan perlindungan sosial. Negara dengan tingkat kejahatan yang rendah dan sistem jaminan sosial yang kuat cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil.
- e. Kualitas Hidup dan Kepuasan Subjektif. Indikator kesejahteraan juga mencakup kualitas hidup dan kepuasan subjektif, yang mencerminkan bagaimana individu menilai kehidupan mereka sendiri. Indikator ini sering diukur melalui survei kepuasan hidup dan kebahagiaan.

Indikator kesejahteraan selain pendapatan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas hidup individu dan masyarakat. Kesehatan, pendidikan, kondisi lingkungan, keamanan dan kesejahteraan sosial, serta kualitas hidup dan kepuasan subjektif adalah beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, kebijakan publik dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Komisi Brundtland dalam laporan "*Our Common Future*" pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Terdapat tiga pilar pembangunan berkelanjutan:

- a. Ekonomi Berkelanjutan: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mencakup praktik-praktik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup tanpa merusak sumber daya alam. Ekonomi berkelanjutan juga melibatkan penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab serta inovasi teknologi untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.
- b. Sosial Berkelanjutan: Pembangunan sosial yang berkelanjutan menekankan keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, kesetaraan

gender, akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keadilan sosial penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang tertinggal.

- c. Lingkungan Berkelanjutan: Perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan pilar penting dari pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan polusi. Lingkungan yang sehat adalah dasar bagi kesejahteraan manusia, karena menyediakan sumber daya alam yang vital seperti air, udara bersih, dan tanah subur.

Pembangunan berkelanjutan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan. Dengan memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berjalan seimbang, pembangunan berkelanjutan menciptakan kondisi yang kondusif untuk peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

- a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Ini termasuk penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Ekonomi yang stabil dan inklusif meningkatkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Keadilan sosial dan inklusi memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan dan marginal, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan perlindungan sosial membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan bagi individu untuk berkembang. Kesejahteraan sosial juga mencakup rasa aman dan partisipasi aktif dalam masyarakat, yang meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Lingkungan: Lingkungan yang sehat dan terjaga memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk

generasi mendatang. Pengelolaan lingkungan yang baik mengurangi risiko bencana alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan kualitas udara dan air yang baik. Ini semua berkontribusi pada kesehatan dan kualitas hidup manusia. Selain itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim, seperti bencana alam yang lebih sering dan ekstrem.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan, berbagai indikator digunakan, termasuk:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Menggabungkan data tentang harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan manusia.
- b. Indikator Kinerja Lingkungan (EPI): Mengukur kinerja negara dalam menjaga kualitas lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
- c. Indikator Ekonomi Hijau: Menilai sejauh mana ekonomi suatu negara mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang holistik dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menyeimbangkan ketiga pilar ini, pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Melalui kebijakan dan praktik yang bertanggung jawab, pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

BAB 8 PERTUMBUHAN, KEMISKINAN, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Definisi dan Konsep Dasar

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dibandingkan periode waktu sebelumnya. Pertumbuhan ini biasanya diukur dalam bentuk persentase peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita. PDB riil mengacu pada total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, disesuaikan dengan inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemajuan ekonomi.

Gregory Mankiw dalam bukunya "*Principles of Economics*" mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang beragam" (Mankiw, 2019). Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan output fisik tetapi juga mencakup peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan serta peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Output dan Produktivitas: Pertumbuhan ekonomi sering diukur melalui peningkatan output total atau PDB. Peningkatan output ini bisa berasal dari peningkatan jumlah faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, serta peningkatan produktivitas faktor-faktor tersebut. Produktivitas yang lebih tinggi berarti bahwa lebih banyak

output dapat dihasilkan dari jumlah input yang sama, yang sering kali dihasilkan dari inovasi teknologi dan perbaikan proses produksi.

- b. Peran Teknologi dan Inovasi: Teknologi dan inovasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan penciptaan produk baru yang meningkatkan kualitas hidup. Joseph Schumpeter dalam teorinya tentang "Destructive Creation" menjelaskan bahwa inovasi dan proses pembaruan industri melalui penciptaan dan penghancuran adalah inti dari pertumbuhan ekonomi (Schumpeter, 2017).
- c. Investasi dalam Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Demikian pula, kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dengan mengurangi absensi dan meningkatkan energi serta fokus tenaga kerja.
- d. Peran Institusi dan Kebijakan Pemerintah: Institusi yang kuat dan kebijakan pemerintah yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Institusi yang baik memastikan bahwa hak properti dilindungi, kontrak ditegakkan, dan regulasi yang jelas serta adil diterapkan. Kebijakan pemerintah yang mendorong investasi, perdagangan, dan inovasi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- e. Globalisasi dan Perdagangan Internasional: Perdagangan internasional dan globalisasi membuka pasar baru dan memungkinkan negara untuk mengekspor barang dan jasa yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dengan efisien. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas global, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. Stabilitas Makroekonomi: Stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas harga, stabilitas fiskal, dan stabilitas keuangan, adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah dan stabil, anggaran pemerintah yang seimbang, dan sistem keuangan yang sehat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari studi ekonomi yang mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa ekonomi suatu negara tumbuh dari waktu ke waktu. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi utama diuraikan sebagai berikut:

Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dipelopori oleh ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus, menekankan peran faktor produksi – tanah, tenaga kerja, dan modal – dalam menentukan output ekonomi.

Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” (1776) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, perluasan pasar, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja. Smith juga menekankan pentingnya “tangan tak terlihat” pasar yang mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif (Smith, 2020).

David Ricardo dalam teori “*The Principles of Political Economy and Taxation*” (1817) memperkenalkan konsep keuntungan komparatif dan distribusi pendapatan antara pemilik tanah, tenaga kerja, dan pemilik modal. Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat karena kenaikan biaya produksi dan menurunnya produktivitas tanah (Ricardo, 2018).

Thomas Malthus dalam “*An Essay on the Principle of Population*” (1798) berargumen bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu mengimbangi peningkatan produksi, yang mengarah pada stagnasi ekonomi. Malthus percaya bahwa peningkatan populasi akan meningkatkan permintaan pangan dan sumber daya alam, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan dan penurunan standar hidup (Malthus, 2023).

Teori Neoklasik Pertumbuhan Ekonomi

Teori neoklasik, yang dirumuskan oleh ekonom seperti Robert Solow dan Trevor Swan, menekankan peran akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Model Solow-Swan (1956)

adalah model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang paling terkenal. Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat tabungan serta investasi. Menurut Solow, tanpa kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan karena "diminishing returns" pada modal. Solow juga menekankan bahwa perbedaan dalam tingkat pertumbuhan antara negara-negara disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat teknologi dan kebijakan ekonomi (Solow, 1956).

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen, yang berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an, berargumen bahwa faktor-faktor internal dalam perekonomian, seperti inovasi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Paul Romer dalam karyanya "*Increasing Returns and Long-Run Growth*" (1986) berpendapat bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dan pendidikan dapat menghasilkan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Romer menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong inovasi dan akumulasi pengetahuan dapat memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi (Romer, 1986, 1990).

Robert Lucas dalam "*On the Mechanics of Economic Development*" (1988) menekankan pentingnya modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Lucas berargumen bahwa peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja dapat menghasilkan keuntungan produktivitas yang signifikan dan berkelanjutan (Lucas, 1988).

Teori Pertumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru menggabungkan elemen-elemen dari teori neoklasik dan endogen untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses pertumbuhan ekonomi. Philippe Aghion dan Peter Howitt dalam model "*Schumpeterian Growth*" menekankan peran inovasi dan persaingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Aghion et al., 1998). Mereka berpendapat bahwa persaingan mendorong

perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi sumber daya manusia, akumulasi modal, inovasi dan teknologi, kelembagaan dan kebijakan pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta perdagangan internasional.

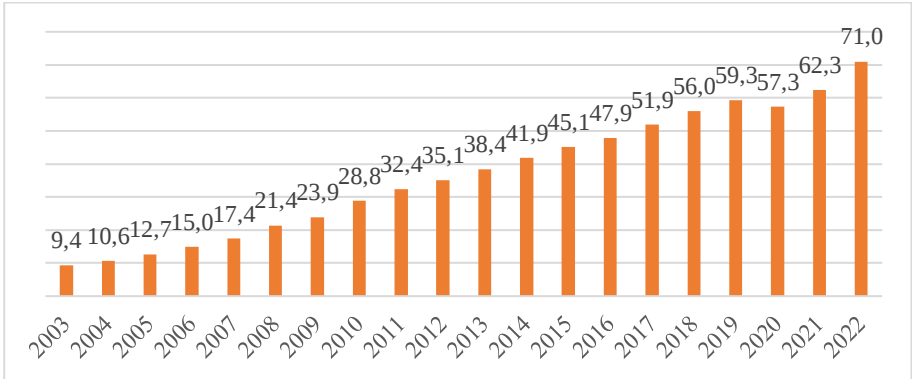
- a. **Sumber Daya Manusia.** Sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja berperan penting dalam menentukan produktivitas dan kemampuan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang terdidik lebih mampu mengadopsi teknologi baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar, yang meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi. Oleh karena itu investasi dalam pendidikan berkualitas adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kesehatan yang baik juga penting untuk produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat lebih mampu bekerja dengan efisien dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Oleh karena itu kesehatan yang baik adalah dasar untuk pembangunan ekonomi yang kuat.
- b. **Akumulasi Modal.** Modal fisik dan manusia merupakan faktor penting dalam proses produksi. Akumulasi modal mencakup investasi dalam infrastruktur, peralatan, teknologi, dan pendidikan. Infrastruktur yang baik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan memfasilitasi perdagangan. Dengan investasi pada infrastruktur akan mendorong pengikatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi dalam pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu modal manusia berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi.
- c. **Inovasi dan Teknologi.** Inovasi dan teknologi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan penggunaan

sumber daya yang lebih efisien dan penciptaan produk baru. Investasi dalam R&D mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Selain itu, kemampuan suatu negara untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Teknologi baru memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.

- d. ***Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah.*** Institusi yang kuat dan kebijakan pemerintah yang efektif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Hak properti yang dilindungi dengan baik memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi. Kebijakan ekonomi yang mendukung, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, serta reformasi struktural, dapat mendorong investasi dan pertumbuhan. Kebijakan yang mendorong perdagangan, investasi asing, dan inovasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. ***Stabilitas Makroekonomi.*** Stabilitas makroekonomi mencakup stabilitas harga, stabilitas fiskal, dan stabilitas keuangan. Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diprediksi bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah dan stabil penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat merusak ekonomi dengan meningkatkan ketidakpastian dan mengurangi investasi. Kebijakan fiskal yang bijaksana, seperti pengelolaan anggaran yang seimbang, dan kebijakan moneter yang efektif, seperti pengendalian suku bunga, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.
- f. ***Perdagangan Internasional.*** Perdagangan internasional membuka pasar baru bagi produk domestik dan memungkinkan negara untuk mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Ekspor meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa domestik, sementara impor memungkinkan akses ke barang dan jasa dengan biaya lebih rendah. Perdagangan internasional adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Krugman, 1987). Perjanjian dagang yang menguntungkan membuka pasar baru dan meningkatkan

volume perdagangan, yang berdampak positif pada perekonomian dan pendapatan per kapita.

4. Contoh Kasus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Gambar 7. 2 Pertumbuhan PDB Perkapita Indonesia Tahun 2003-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia dari tahun 2003 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Pada tahun 2003, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar 9,4 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 71,0 pada tahun 2022.

Selama periode ini, Indonesia mengalami beberapa fase pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2003 hingga 2007, pertumbuhan PDB per kapita meningkat secara bertahap dari 9,4 menjadi 17,4. Periode ini menandai awal dari stabilitas ekonomi setelah krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, di mana kebijakan ekonomi yang lebih baik mulai diterapkan. Tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan peningkatan yang lebih tajam, dengan PDB per kapita melonjak dari 21,4 pada tahun 2008 menjadi 32,4 pada tahun 2010. Pertumbuhan ini bisa dikaitkan dengan peningkatan harga komoditas dan ekspor yang kuat.

Pada tahun-tahun berikutnya, dari 2011 hingga 2014, PDB per kapita terus meningkat dengan rata-rata kenaikan yang stabil, mencapai 38,4 pada tahun 2013 dan kemudian naik menjadi 41,9 pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi selama periode ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi infrastruktur yang signifikan. Setelah 2014, pertumbuhan terus berlanjut dengan peningkatan PDB per kapita mencapai 45,1 pada tahun 2015 dan 47,9 pada tahun 2016.

Dari 2017 hingga 2019, pertumbuhan PDB per kapita Indonesia menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, mencapai 56,0 pada tahun 2018 dan 59,3 pada tahun 2019. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan stabilitas politik, peningkatan investasi asing, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 57,3, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi global dan domestik.

Pada tahun 2021, pertumbuhan PDB per kapita kembali meningkat menjadi 62,3, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDB per kapita mencapai titik tertinggi sebesar 71,0, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mempertahankan pertumbuhan PDB per kapita yang kuat dan konsisten selama dua dekade terakhir, meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini mencerminkan kebijakan ekonomi yang efektif, stabilitas politik, dan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur serta peningkatan investasi. Tantangan ke depan adalah mempertahankan momentum ini dengan memastikan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan ketimpangan sosial.

B. KEMISKINAN

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Definisi kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik, serta standar yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Kemiskinan sering kali dibedakan menjadi dua kategori utama: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

- a. **Kemiskinan Absolut:** Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup sehat. Bank Dunia mendefinisikan garis kemiskinan internasional sebagai pendapatan kurang dari \$1.90 per

hari, diukur dalam paritas daya beli (PPP) (World Bank, 2017). Garis ini digunakan untuk menilai kemiskinan ekstrem di seluruh dunia.

- b. **Kemiskinan Relatif:** Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup rata-rata dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Ini mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai gaya hidup yang layak menurut norma-norma sosial yang berlaku. Kemiskinan relatif biasanya diukur sebagai persentase tertentu dari pendapatan median nasional, misalnya, 50% atau 60% dari pendapatan median.

2. Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan melibatkan berbagai indikator dan metodologi untuk memahami sejauh mana dan dampak kemiskinan dalam suatu populasi. Beberapa metode utama untuk mengukur kemiskinan meliputi:

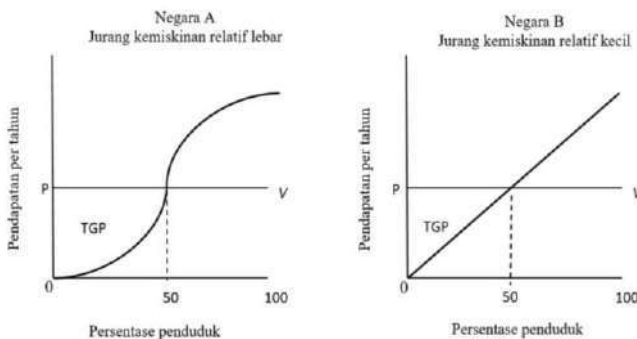
- a. **Garis Kemiskinan.** Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan atau konsumsi yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga berada dalam kemiskinan. Individu atau rumah tangga yang pendapatannya berada di bawah garis ini dianggap miskin. Di banyak negara, garis kemiskinan nasional ditetapkan berdasarkan biaya hidup dan kebutuhan dasar lokal.
- b. **Headcount Index.** Headcount Index adalah proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah ukuran sederhana yang menunjukkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Namun, indeks ini tidak memperhitungkan sejauh mana orang miskin di bawah garis kemiskinan atau intensitas kemiskinan.
- c. **Poverty Gap Index.** Poverty Gap Index mengukur rata-rata kesenjangan antara pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan, dinyatakan sebagai persentase dari garis kemiskinan. Indeks ini memberikan gambaran tentang kedalaman kemiskinan dengan menunjukkan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk mengangkat semua orang miskin ke garis kemiskinan.
- d. **Multidimensional Poverty Index (MPI).** Multidimensional Poverty Index (MPI) adalah alat pengukuran kemiskinan yang memperhitungkan berbagai indikator kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. MPI dikembangkan oleh

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) dan UNDP, dan digunakan untuk menangkap dimensi kemiskinan yang lebih luas daripada sekadar pendapatan. MPI mengidentifikasi deprivasi dalam berbagai aspek kehidupan yang mendasar, memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kemiskinan (Alkire & Foster, 2011).

- e. **Human Poverty Index (HPI):** Human Poverty Index (HPI) dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur kemiskinan di negara berkembang dan negara maju. HPI memperhitungkan indikator seperti harapan hidup, literasi, akses terhadap air bersih, dan kekurangan gizi anak-anak. Meskipun tidak lagi digunakan secara luas setelah digantikan oleh MPI, HPI tetap memberikan pandangan tentang kemiskinan multidimensi.

Dalam ekonomi pembangunan, kita mengenal tentang jurang kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Jurang Kemiskinan mengacu pada perbedaan antara pendapatan rata-rata orang miskin dengan garis kemiskinan. Jurang kemiskinan memberikan gambaran tentang seberapa jauh pendapatan kelompok miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin besar jurang ini, semakin parah kondisi kemiskinan di suatu negara.

Keparahan Kemiskinan, di sisi lain, mengacu pada tingkat kekurangannya dalam distribusi pendapatan di antara orang miskin. Ini mencakup tidak hanya berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa jauh mereka berada di bawah garis tersebut. Keparahan kemiskinan menyoroti intensitas dan kedalaman kemiskinan, menunjukkan bahwa dua negara dengan tingkat kemiskinan yang sama mungkin memiliki keparahan yang berbeda karena distribusi pendapatan di kalangan orang miskin berbeda.



Gambar 7. 3 Jurang Kemiskinan

Sebagai contoh kita dapat melihat kasus tingkat keparahan kemiskinan pada Gambar 7.3 dimana terdapat dua kasus Negara A dan Negara B. Pada Negara A, kita melihat kurva yang menunjukkan jurang kemiskinan yang relatif lebar. Kurva ini mencerminkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan (yang ditandai dengan P). Titik TGP (Titik Garis Kemiskinan) menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang lebih tinggi dibandingkan Negara B. Kurva yang melengkung menunjukkan bahwa terdapat distribusi pendapatan yang tidak merata di antara orang miskin, dengan beberapa orang yang sangat jauh dari garis kemiskinan.

Pada Negara B, jurang kemiskinan relatif lebih kecil, yang terlihat dari kurva yang lebih dekat dengan garis lurus diagonal. Ini menunjukkan bahwa pendapatan orang miskin di Negara B lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan dengan Negara A. TGP di sini juga menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih kecil, dan distribusi pendapatan di antara orang miskin lebih merata. Kurva ini mencerminkan kondisi kemiskinan yang tidak terlalu parah dan lebih sedikit ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin.

Dari perbandingan gambar ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara mungkin memiliki tingkat kemiskinan yang sama jika dilihat dari persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, keparahan kemiskinan di Negara A jauh lebih tinggi daripada di Negara B. Negara A tidak hanya memiliki jurang kemiskinan yang lebih lebar, tetapi juga menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata di kalangan orang miskin, yang mengindikasikan masalah kemiskinan yang lebih mendalam. Sebaliknya, Negara B, dengan jurang kemiskinan yang lebih kecil dan distribusi pendapatan yang lebih merata, memiliki keparahan kemiskinan yang lebih rendah.

Selain indikator-indikator di atas, beberapa indikator tambahan juga sering digunakan untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan, termasuk: **Tingkat Pengangguran**, Pengangguran yang tinggi sering dikaitkan dengan kemiskinan, karena ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dapat mempengaruhi pendapatan dan standar hidup. **Akses terhadap Layanan Dasar**, Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi adalah indikator penting yang menunjukkan kemampuan individu untuk hidup dengan standar hidup yang layak.

Ketidaksetaraan Pendapatan, Indeks Gini dan koefisien ketimpangan lainnya digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat, memberikan gambaran tentang sejauh mana ketidaksetaraan berkontribusi terhadap kemiskinan.

3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks dan multifaset yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Faktor Ekonomi

a. Pengangguran dan Kekurangan Lapangan Kerja

Pengangguran dan kekurangan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau hanya memiliki pekerjaan dengan upah rendah, mereka tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sering kali diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan keterampilan, pendidikan yang tidak memadai, atau ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja.

Pengangguran menyebabkan kemiskinan karena orang yang menganggur tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Tanpa pekerjaan, mereka tidak dapat mengakses layanan dasar, meningkatkan kualitas hidup, atau memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Keadaan ini dapat menciptakan lingkaran setan kemiskinan di mana generasi berikutnya juga terjebak dalam kemiskinan karena kurangnya akses terhadap peluang yang lebih baik (Todaro & Smith, 2020).

b. Ketidakadilan Distribusi Pendapatan

Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan berarti bahwa sebagian besar kekayaan dan pendapatan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi. Ketimpangan ini menghalangi sebagian besar populasi dari akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam masyarakat di mana

kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu, sebagian besar populasi sering kali tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus karena kurangnya akses terhadap peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Menurut laporan dari OECD (2015), ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi, daya beli mayoritas masyarakat menurun, yang pada gilirannya mengurangi permintaan barang dan jasa. Ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat karena konsumsi rumah tangga adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi juga dapat mengurangi investasi dalam modal manusia, karena keluarga dengan pendapatan rendah mungkin tidak mampu menginvestasikan cukup dana dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang (OECD, 2015).

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga berhubungan erat dengan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan berkualitas, dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ketidakmampuan untuk mengakses peluang ini menghambat mobilitas sosial dan memperkuat ketimpangan pendapatan antar generasi (Stiglitz, 2012).

Untuk mengatasi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, diperlukan kebijakan yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi. Ini bisa mencakup reformasi pajak yang lebih progresif, peningkatan upah minimum, dan kebijakan sosial yang mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau. Selain itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan inklusif, seperti dukungan untuk usaha kecil dan menengah serta investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja, juga penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (World Bank, 2016).

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk diatasi. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang tepat, negara dapat menciptakan kondisi yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial.

c. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sering kali mengakibatkan peningkatan kesenjangan antara daerah yang berkembang dan yang tertinggal. Dalam konteks ini, daerah pedesaan dan terpencil sering kali tidak menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota-kota besar, sehingga penduduknya tetap berada dalam kemiskinan. Ketidakmerataan ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam hal pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi.

Di Indonesia, misalnya, pertumbuhan ekonomi yang cepat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sering kali tidak diiringi oleh perkembangan yang sama di daerah pedesaan dan terpencil. Kota-kota besar menikmati infrastruktur yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Sebaliknya, daerah pedesaan dan terpencil sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses yang terbatas ke layanan dasar, serta keterbatasan dalam peluang ekonomi. Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk di daerah tersebut tetap terjebak dalam kemiskinan ((Stromquist, 2019).

Ketimpangan ini juga diperparah oleh migrasi tenaga kerja. Banyak penduduk pedesaan yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Migrasi ini sering kali meninggalkan daerah pedesaan dengan populasi yang menua dan kurangnya tenaga kerja produktif, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, migrasi ke kota sering kali menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kota-kota besar, seperti kemiskinan perkotaan, kemacetan, dan tekanan pada infrastruktur perkotaan (Todaro & Smith, 2020).

Lebih lanjut, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan dan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-

sekolah di daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas, sementara akses terhadap layanan kesehatan juga terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan, yang menghambat potensi ekonomi jangka panjang penduduk di daerah tersebut (UNDP, 2019b).

Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, diperlukan kebijakan yang fokus pada pembangunan daerah pedesaan dan terpencil. Pembangunan infrastruktur yang memadai di daerah-daerah ini, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan juga sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk di daerah-daerah tersebut memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.

Kebijakan lain yang dapat membantu mengurangi ketimpangan adalah desentralisasi dan pemberdayaan pemerintah daerah. Dengan memberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah-daerah tersebut dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Desentralisasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Smoke, 2015).

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menciptakan tantangan signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah pusat dan daerah, serta kerjasama antara sektor publik dan swasta, untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil.

Faktor Sosial

a. Pendidikan yang Tidak Memadai

Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas membatasi kesempatan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik. Investasi dalam pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Pendidikan yang tidak memadai merupakan salah satu faktor sosial utama yang menyebabkan kemiskinan. Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan, karena memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik. Namun, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas membatasi kesempatan individu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ketika anak-anak dan remaja tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai, mereka cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan.

Investasi dalam pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang baik memberikan landasan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan, mengurangi angka kelahiran, dan memperkuat partisipasi sosial dan politik.

Di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Banyak sekolah di daerah ini kekurangan fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas, buku, dan alat peraga. Selain itu, kualitas pengajaran sering kali rendah karena kurangnya guru yang terlatih dan bermotivasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan prestasi siswa, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memasuki pasar kerja yang kompetitif.

Lebih jauh lagi, biaya pendidikan juga menjadi hambatan signifikan bagi banyak keluarga miskin. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga miskin, banyak keluarga masih kesulitan membiayai biaya pendidikan tambahan seperti transportasi, seragam, dan alat tulis. Hal ini mengakibatkan banyak anak putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, yang memperkuat siklus kemiskinan.

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan telah menunjukkan bagaimana investasi dalam pendidikan berkualitas dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Di Finlandia, sistem pendidikan yang inklusif dan berfokus pada kualitas pengajaran telah menghasilkan tingkat literasi yang tinggi dan partisipasi pendidikan yang hampir universal. Sementara itu, Korea Selatan telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui investasi besar dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan guru, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan kemiskinan (OECD, 2012a).

Untuk mengatasi masalah pendidikan yang tidak memadai dan kemiskinan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif. Ini termasuk peningkatan anggaran pendidikan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pelatihan guru, dan menyediakan lebih banyak bantuan finansial kepada keluarga miskin. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mengurangi hambatan budaya yang sering kali menghalangi anak-anak, terutama perempuan, untuk mengakses pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas pada masyarakat. Pendidikan yang baik dapat mengurangi ketidaksetaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah strategi yang sangat penting dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

b. Diskriminasi dan Eksklusi Sosial

Diskriminasi dan eksklusi sosial merupakan faktor sosial yang signifikan dalam menciptakan dan mempertahankan kemiskinan. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, etnis, atau status sosial dapat menghalangi akses individu atau kelompok ke peluang ekonomi dan sosial yang setara. Diskriminasi ini sering kali menyebabkan eksklusi sosial, di mana individu atau kelompok tertentu tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Ketika kelompok tertentu mengalami diskriminasi, mereka cenderung terpinggirkan dari proses pembangunan, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, diskriminasi berbasis gender adalah salah satu bentuk diskriminasi yang paling umum dan memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Misalnya, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarga mereka (World Bank, 2012).

Diskriminasi etnis juga menjadi masalah serius di banyak negara. Di Indonesia, beberapa kelompok etnis minoritas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Misalnya, masyarakat adat dan kelompok etnis tertentu di daerah pedesaan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Diskriminasi ini memperkuat siklus kemiskinan, karena kelompok-kelompok ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Diskriminasi dan eksklusi sosial tidak hanya merugikan individu yang mengalami diskriminasi, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketika kelompok-kelompok tertentu dikecualikan dari partisipasi ekonomi dan sosial, potensi produktivitas mereka tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan yang disebabkan oleh diskriminasi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan ketegangan dalam masyarakat (Stiglitz, 2012).

Untuk mengatasi diskriminasi dan eksklusi sosial, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu mengimplementasikan Undang-Undang dan regulasi yang melindungi hak-hak semua individu tanpa memandang ras, gender, etnis, atau status sosial. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan inklusivitas. Program-program yang mendukung akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Misalnya, program beasiswa bagi kelompok minoritas, pelatihan keterampilan bagi perempuan dan orang dengan disabilitas, serta kampanye anti-diskriminasi dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan inklusivitas.

Secara internasional, negara-negara seperti Kanada dan Swedia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan inklusif yang mengurangi diskriminasi dan eksklusi sosial. Kanada memiliki undang-undang hak asasi manusia yang kuat yang melindungi individu dari diskriminasi dan mendorong inklusivitas di semua sektor masyarakat. Swedia, dengan sistem kesejahteraan sosialnya yang inklusif, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, tanpa memandang latar belakang mereka (OECD, 2012b).

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, penting untuk terus memperjuangkan hak-hak semua individu dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal. Dengan mengurangi diskriminasi dan eksklusi sosial, negara dapat memanfaatkan potensi penuh dari semua warganya, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Faktor Politik

a. Korupsi.

Korupsi adalah penyebab utama kemiskinan di banyak negara berkembang. Korupsi merusak institusi publik dan mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat luas ke tangan individu atau kelompok yang berkuasa. Praktik-praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai rendahan, dan mencakup berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penggelapan dana, dan nepotisme. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya disalahgunakan, dampaknya terhadap masyarakat sangat merusak.

Menurut Transparency International (2019), korupsi mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Misalnya, dana yang dialokasikan untuk membangun sekolah dan rumah sakit sering kali tidak mencapai tujuannya karena dikorupsi oleh pejabat yang tidak jujur. Hal ini mengakibatkan fasilitas yang buruk dan layanan yang tidak memadai bagi masyarakat miskin, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, di mana kelompok-kelompok yang berkuasa

mendapatkan keuntungan lebih besar daripada mereka yang benar-benar membutuhkan (Pelizzo, 2020).

Korupsi juga berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor asing dan domestik cenderung menghindari negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi karena ketidakpastian hukum dan biaya bisnis yang meningkat akibat praktik korupsi. Hal ini menghambat penciptaan lapangan kerja dan mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga mengurangi pendapatan negara dari pajak, karena perusahaan dan individu sering kali menyuap pejabat untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya. Dengan pendapatan negara yang berkurang, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk membiayai program-program sosial yang penting bagi pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, korupsi merupakan tantangan besar yang telah diakui oleh berbagai pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk menangani kasus-kasus korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun KPK telah mencapai beberapa keberhasilan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, tantangan tetap ada dalam bentuk tekanan politik dan hambatan struktural yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Korupsi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika pejabat publik memeras suap untuk menyediakan layanan dasar, seperti surat izin atau akses layanan kesehatan, masyarakat miskin yang tidak mampu membayar suap ini menjadi sangat dirugikan. Mereka sering kali harus menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis atau dengan biaya rendah. Ini mengurangi daya beli mereka dan memperburuk kondisi kemiskinan.

Untuk mengatasi korupsi dan mengurangi dampaknya terhadap kemiskinan, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, memperkuat lembaga anti-korupsi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Selain itu, pendidikan anti-korupsi dan promosi etika di kalangan pejabat publik dan masyarakat luas sangat penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi (Pelizzo, 2020).

Beberapa negara telah menunjukkan bahwa korupsi dapat diberantas dengan komitmen politik yang kuat dan strategi yang tepat. Singapura, misalnya, berhasil mengurangi tingkat korupsinya secara signifikan melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang ketat, dan kampanye anti-korupsi yang luas. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, korupsi dapat dikurangi dan dampaknya terhadap kemiskinan dapat diminimalkan (Caiden, 2011).

Korupsi adalah hambatan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Nasional. Dengan mengurangi korupsi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan segelintir individu atau kelompok yang berkuasa.

b. Ketidakstabilan Politik dan Konflik

Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata sering kali mengakibatkan kehancuran infrastruktur, gangguan ekonomi, dan dislokasi penduduk. Kondisi ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan mata pencaharian dan akses ke layanan dasar, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan. Ketika sebuah negara atau wilayah mengalami ketidakstabilan politik, fungsi-fungsi pemerintahan sering kali terganggu, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dan penegakan hukum yang tidak efektif. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, menghalangi investasi, dan memperburuk kondisi pasar tenaga kerja.

Konflik bersenjata memiliki dampak yang lebih destruktif. Kehancuran infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit membuat masyarakat tidak dapat mengakses layanan dasar yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Selain itu, konflik bersenjata sering kali menyebabkan dislokasi besar-besaran, di mana penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi atau orang terlantar di dalam negeri (*internally displaced persons*). Dislokasi ini menghancurkan mata pencaharian dan memutus jaringan sosial, yang sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari (Collier, 2007).

Ketidakstabilan politik juga mengarah pada gangguan ekonomi yang signifikan. Ekonomi yang terganggu oleh ketidakstabilan dan konflik cenderung mengalami penurunan produksi, inflasi yang tinggi, dan penurunan nilai tukar mata uang. Perusahaan-perusahaan mungkin menunda atau membatalkan investasi mereka, dan perdagangan internasional bisa terhenti. Semua ini berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan meningkat karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan mereka dan biaya hidup menjadi lebih tinggi.

Konflik berkepanjangan adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di banyak negara. Konflik yang berlangsung lama tidak hanya menghancurkan aset fisik, tetapi juga merusak modal manusia dan sosial. Anak-anak yang tumbuh di daerah konflik sering kali kehilangan kesempatan pendidikan, yang membatasi potensi mereka di masa depan. Selain itu, trauma psikologis yang dialami oleh korban konflik dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara normal.

Di banyak negara, seperti Suriah, Yaman, dan Sudan Selatan, dampak konflik bersenjata terhadap kemiskinan sangat jelas terlihat. Infrastruktur yang hancur, layanan kesehatan yang tidak tersedia, dan ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan adalah beberapa dampak langsung dari konflik yang berkepanjangan. Masyarakat di negara-negara ini sering kali bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka sangat terbatas (UNDP, 2016).

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara yang terkena dampak ketidakstabilan politik dan konflik harus mencakup pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk mencapai perdamaian dan stabilitas politik sebagai dasar untuk pembangunan. Proses perdamaian harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mengatasi akar penyebab ketidakstabilan, seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, rekonstruksi infrastruktur yang hancur dan pemulihan layanan dasar harus menjadi prioritas utama setelah konflik berakhir (Collier, 2007).

Kedua, diperlukan upaya untuk membangun kembali ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat membantu memulihkan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian.

Pembangunan kembali sistem pendidikan dan kesehatan juga sangat penting untuk memulihkan modal manusia dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke layanan dasar yang mereka butuhkan.

Akhirnya, komunitas internasional harus berperan aktif dalam mendukung negara-negara yang terkena dampak konflik. Bantuan kemanusiaan jangka pendek harus diikuti dengan dukungan jangka panjang untuk pembangunan dan pemulihan. Kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk pembangunan perdamaian dapat membantu mencegah kembalinya konflik dan memastikan bahwa negara-negara tersebut dapat bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (UNDP, 2016).

Faktor Lingkungan

a. Bencana Alam

Bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, dan badai dapat menghancurkan infrastruktur, lahan pertanian, dan sumber mata pencaharian. Ketika bencana alam terjadi, dampaknya sering kali sangat merusak, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan membahayakan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampaknya. Infrastruktur yang hancur, termasuk rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum, membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan untuk diperbaiki. Selain itu, kerusakan pada lahan pertanian dan hilangnya hasil panen menyebabkan penurunan pendapatan bagi petani dan komunitas pedesaan, yang sering kali sangat bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.

Bencana alam sering kali mendorong orang yang sebelumnya tidak miskin ke dalam kemiskinan karena kehilangan aset dan penghasilan. Misalnya, ketika banjir besar melanda, rumah dan properti hancur, dan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka serta barang-barang berharga. Kehilangan ini tidak hanya memerlukan biaya besar untuk pemulihan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan gagal panen, mengurangi pasokan pangan, dan menaikkan harga makanan, yang sangat membebani masyarakat miskin yang sudah rentan (Cavallo & Noy, 2012).

Gempa bumi dan badai juga memiliki dampak yang merusak. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur penting, menyebabkan korban jiwa dan cedera, serta memerlukan upaya penyelamatan dan pemulihan yang besar. Badai dengan angin kencang dan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rentan menjadi semakin terpuruk karena kehilangan sumber penghasilan dan menghadapi biaya pemulihan yang tinggi (Cavallo & Noy, 2012).

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dampak bencana alam sering kali diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan kapasitas respon yang rendah. Misalnya, sistem peringatan dini yang tidak memadai, kurangnya akses ke asuransi bencana, dan keterbatasan dalam kapasitas tanggap darurat semuanya berkontribusi pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana alam. Selain itu, perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam semakin memperburuk situasi, menempatkan lebih banyak orang pada risiko kemiskinan.

Untuk mengurangi dampak bencana alam terhadap kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam manajemen risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya ini termasuk meningkatkan sistem peringatan dini, memperkuat infrastruktur untuk lebih tahan terhadap bencana, dan meningkatkan kapasitas respon darurat. Selain itu, penting untuk mempromosikan kesadaran dan pendidikan tentang risiko bencana di kalangan masyarakat, serta mengembangkan mekanisme perlindungan sosial seperti asuransi bencana yang dapat membantu masyarakat pulih lebih cepat setelah bencana terjadi.

Selain itu, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan lokal sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan tidak meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Misalnya, perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pelestarian lingkungan alam dapat mengurangi dampak bencana alam dan membantu masyarakat lebih cepat pulih. Program-program mitigasi bencana seperti penanaman pohon untuk mencegah

erosi tanah, pembangunan tanggul dan bendungan untuk mengendalikan banjir, serta penggunaan teknologi adaptif untuk pertanian dapat membantu mengurangi risiko dan kerentanan masyarakat.

Dengan demikian, mengatasi dampak bencana alam terhadap kemiskinan memerlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak ini akan membantu menciptakan ketahanan yang lebih besar terhadap bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Degradasi Lingkungan.

Degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan penipisan tanah, merupakan masalah serius yang dapat mengurangi produktivitas pertanian dan sumber daya alam lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat pedesaan. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, kemampuan tanah untuk mendukung pertanian menurun, sumber air menjadi tercemar, dan hutan yang sebelumnya menyediakan kayu serta produk hutan lainnya menjadi tidak dapat diakses. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Deforestasi adalah salah satu bentuk degradasi lingkungan yang paling merusak. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga menyebabkan erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, dan perubahan iklim lokal. Masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan untuk kayu bakar, obat-obatan tradisional, dan bahan pangan lainnya mengalami penurunan akses terhadap sumber daya ini, yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka. Selain itu, deforestasi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur.

Pencemaran air adalah masalah lingkungan lain yang signifikan. Sumber air yang tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk irigasi. Hal ini mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat pedesaan dan berdampak negatif pada kesehatan mereka. Pencemaran air juga

mempengaruhi produktivitas pertanian, karena tanaman yang disirami dengan air tercemar dapat mengalami penurunan hasil dan kualitas. Akibatnya, pendapatan petani menurun, dan mereka semakin terjebak dalam kemiskinan.

Penipisan tanah, yang disebabkan oleh praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, serta penggembalaan berlebihan, juga berdampak buruk pada produktivitas pertanian. Tanah yang mengalami penipisan kehilangan kesuburan dan kemampuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini mengakibatkan penurunan hasil panen dan pendapatan petani, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan di daerah pedesaan. Tanah yang tidak subur juga meningkatkan ketergantungan petani pada input pertanian yang mahal, seperti pupuk dan pestisida, yang dapat menambah beban finansial mereka.

Degradasi lingkungan adalah faktor penting yang menyebabkan kemiskinan di banyak negara berkembang. Di banyak negara, masyarakat pedesaan sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Ketika sumber daya ini rusak atau hilang, mereka kehilangan sumber pendapatan utama mereka dan menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Degradasi lingkungan juga mempengaruhi kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyakit yang terkait dengan pencemaran air dan udara, serta kekurangan gizi akibat penurunan produktivitas pertanian.

Untuk mengatasi dampak degradasi lingkungan terhadap kemiskinan, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Misalnya, agroforestri, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Selain itu, perlindungan dan rehabilitasi hutan, serta pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung konservasi lingkungan dan pengurangan kemiskinan. Ini termasuk memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta menyediakan dukungan finansial dan teknis untuk inisiatif-inisiatif lingkungan yang berkelanjutan. Kerjasama ini akan membantu memastikan bahwa upaya konservasi lingkungan tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Dengan demikian, degradasi lingkungan adalah masalah kritis yang mempengaruhi kemiskinan di banyak negara berkembang. Upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan praktik-praktik berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

4. Dampak Kemiskinan terhadap Pembangunan

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, stabilitas sosial, serta kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Dampak Ekonomi

a. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu dampak utama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi produktivitas dan daya beli masyarakat. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan, yang berarti mereka kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi. Akibatnya, potensi produktivitas nasional tidak dapat dimaksimalkan, dan ini menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas mengakibatkan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Pendidikan adalah fondasi utama bagi peningkatan produktivitas, karena memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Ketika

sebagian besar populasi tidak memiliki akses ke pendidikan, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan produktivitas rendah. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena tanpa keterampilan yang memadai, sulit bagi individu untuk meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Daya beli masyarakat yang rendah juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki pendapatan yang terbatas, yang berarti mereka tidak dapat membeli barang dan jasa yang cukup untuk mendorong permintaan dalam perekonomian. Daya beli yang rendah ini mengurangi konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumsi menurun, perusahaan mengalami penurunan penjualan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Siklus ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan stagnasi.

Ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi, yang sering kali berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi akses terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Ketidaksetaraan pendapatan menciptakan jurang antara yang kaya dan yang miskin, yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Ketika hanya sebagian kecil populasi yang memiliki akses ke peluang pendidikan dan pekerjaan yang baik, sebagian besar populasi tetap terpinggirkan dan tidak mampu berkontribusi secara penuh pada perekonomian.

Ketidaksetaraan pendapatan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika ketidaksetaraan meningkat, rasa ketidakadilan sosial dan ekonomi juga meningkat, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik. Ketidakstabilan ini membuat investor enggan menanamkan modal mereka di negara tersebut, yang mengurangi aliran investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Untuk mengatasi dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan yang holistik dan inklusif. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Investasi dalam pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas serta pelatihan keterampilan vokasional dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas Nasional. Kedua, kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan upah yang adil sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif, seperti sistem pajak progresif dan program bantuan sosial, untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Program-program seperti bantuan tunai bersyarat, subsidi pangan, dan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dapat membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan stabil, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan memiliki dampak yang merusak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan redistribusi pendapatan yang adil.

b. Beban pada Anggaran Publik

Kemiskinan meningkatkan beban pada anggaran publik karena pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program bantuan sosial, subsidi, dan layanan kesehatan serta pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ketika kemiskinan meluas dalam suatu negara, pemerintah terpaksa mengarahkan anggaran yang signifikan untuk menangani kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti pangan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Alokasi anggaran yang besar untuk program-program ini, meskipun penting untuk mengurangi penderitaan jangka pendek, dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek

pembangunan jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program bantuan sosial seperti tunjangan pengangguran, bantuan pangan, dan subsidi energi merupakan biaya besar bagi anggaran publik. Bantuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Namun, ketika sebagian besar anggaran publik digunakan untuk program bantuan sosial, investasi dalam sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, seperti infrastruktur, teknologi, dan pendidikan tinggi, dapat terhambat. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik, mengurangi biaya bisnis, dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin juga menambah beban pada anggaran publik. Pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk menangani masalah kesehatan yang sering kali lebih umum dan lebih parah di kalangan masyarakat miskin. Penyakit menular, malnutrisi, dan kondisi kesehatan kronis lebih sering terjadi pada populasi yang miskin, yang memerlukan intervensi kesehatan publik yang lebih intensif dan biaya yang lebih tinggi. Pendidikan bagi masyarakat miskin juga memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, baik untuk menyediakan akses pendidikan dasar maupun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Kemiskinan yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk jaring pengaman sosial, yang pada gilirannya mengurangi ruang fiskal untuk investasi produktif. Ketika anggaran negara lebih banyak digunakan untuk program-program sosial jangka pendek, alokasi untuk pembangunan jangka panjang seperti proyek infrastruktur besar, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan keterampilan kerja menjadi terbatas. Investasi jangka panjang ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas Nasional.

Lebih lanjut, beban pada anggaran publik yang disebabkan oleh kemiskinan juga dapat mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar dan peningkatan utang publik. Pemerintah yang terus-menerus

mengeluarkan dana besar untuk menangani masalah kemiskinan tanpa peningkatan pendapatan yang seimbang dapat menghadapi masalah keuangan yang serius. Defisit anggaran yang besar memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan melalui pinjaman, yang dapat meningkatkan beban utang negara dan membatasi kemampuan untuk membiayai program-program pembangunan di masa depan.

Untuk mengurangi beban pada anggaran publik akibat kemiskinan, diperlukan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dengan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk memantau distribusi bantuan dan mengurangi kebocoran anggaran. Kedua, pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Selain itu, reformasi pajak yang adil dan progresif dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa membebani kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penerapan sistem pajak yang lebih adil dapat memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik berkontribusi secara proporsional terhadap anggaran publik. Pendapatan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada program bantuan sosial.

Dengan demikian, meskipun kemiskinan meningkatkan beban pada anggaran publik, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan mengurangi beban ini melalui kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan efisiensi program bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan menerapkan reformasi pajak yang adil, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dampak Sosial

a. Kesehatan yang Buruk

Kemiskinan sering kali berhubungan erat dengan kesehatan yang buruk karena kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang baik, dan lingkungan hidup yang sehat. Orang miskin lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan kronis, yang tidak hanya mengurangi produktivitas mereka tetapi juga meningkatkan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai menyebabkan banyak orang miskin tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, yang mengakibatkan kondisi kesehatan mereka semakin memburuk. Nutrisi yang tidak memadai juga merupakan masalah serius, karena diet yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, anemia, dan stunting pada anak-anak. Lingkungan hidup yang tidak sehat, termasuk sanitasi yang buruk dan tempat tinggal yang padat, juga berkontribusi pada penyebaran penyakit menular.

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang buruk. Orang miskin cenderung memiliki harapan hidup yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Kondisi lingkungan yang tidak higienis, kurangnya akses ke air bersih, dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti diare, malaria, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga lebih umum di kalangan masyarakat miskin karena mereka sering kali tidak memiliki akses ke perawatan pencegahan dan pengobatan yang diperlukan (WHO, 2016).

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas juga berarti bahwa orang miskin sering kali tidak menerima diagnosis dan perawatan yang tepat waktu. Ini dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang dapat diobati menjadi lebih serius atau bahkan fatal. Misalnya, kurangnya akses ke vaksinasi dan perawatan prenatal meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu. Demikian pula, orang dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi mungkin tidak dapat mengelola kondisi mereka dengan baik, yang dapat menyebabkan komplikasi serius.

Kemiskinan juga berdampak pada kesehatan mental. Stres kronis yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi, kurangnya keamanan

pekerjaan, dan kondisi hidup yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Masalah kesehatan mental ini sering kali diperparah oleh stigma sosial dan kurangnya akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kesehatan mental yang buruk memperburuk kemiskinan, dan kemiskinan memperburuk kesehatan mental.

Dampak kesehatan yang buruk akibat kemiskinan juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Orang yang tidak sehat kurang produktif dan lebih mungkin absen dari pekerjaan, yang mengurangi pendapatan mereka dan meningkatkan kemiskinan. Selain itu, biaya kesehatan yang tinggi dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan keluarga miskin, meninggalkan mereka dengan sedikit sumber daya untuk kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah dan sulit diatasi.

Untuk mengatasi dampak kesehatan buruk akibat kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, peningkatan gizi melalui program bantuan pangan, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Program kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Selain itu, pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan preventif dan gaya hidup sehat (WHO, 2015).

Kebijakan kesehatan yang inklusif dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah dan organisasi internasional dapat membantu memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang miskin, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Program-program seperti asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, klinik kesehatan bergerak, dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil dapat membantu mengurangi kesenjangan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, kemiskinan dan kesehatan yang buruk saling terkait erat dalam siklus yang merugikan, dan upaya untuk memutus siklus

ini harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kita dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Pendidikan yang Tidak Memadai

Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas. Kurangnya pendidikan ini mengurangi kesempatan mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan dan berpartisipasi dalam ekonomi formal. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat mengakses pendidikan yang memadai, mereka kehilangan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang baik di masa depan. Tanpa pendidikan, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk, yang membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari kemiskinan.

Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja masa depan yang tidak terdidik dengan baik tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterampilan yang rendah berarti produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menghambat inovasi dan efisiensi dalam ekonomi. Ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (World Bank, 2018).

UNESCO (2016) menunjukkan bahwa kemiskinan adalah hambatan utama bagi akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung putus sekolah lebih awal dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih kaya. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan di kalangan anak-anak miskin, termasuk biaya sekolah yang tinggi, kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kualitas pengajaran yang rendah. Selain itu, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali mengalami malnutrisi dan kondisi kesehatan yang buruk, yang dapat mempengaruhi

kemampuan mereka untuk belajar dan berkonsentrasi di sekolah (UNESCO, 2016).

Biaya pendidikan adalah salah satu hambatan terbesar bagi keluarga miskin. Meskipun banyak negara telah menghapus biaya sekolah resmi, masih ada biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, dan uang saku yang harus ditanggung oleh keluarga. Biaya-biaya ini dapat menjadi beban berat bagi keluarga miskin, menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka atau memaksa anak-anak untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga. Ini menyebabkan banyak anak miskin terpaksa putus sekolah lebih awal dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, kualitas pendidikan di daerah miskin sering kali jauh lebih rendah dibandingkan dengan di daerah yang lebih makmur. Sekolah di daerah miskin sering kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat peraga. Guru-guru di sekolah ini sering kali kurang terlatih dan kurang mendapatkan dukungan profesional yang memadai. Kurangnya sumber daya dan dukungan ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak miskin, yang membatasi kemampuan mereka untuk mencapai prestasi akademik yang baik dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan inklusif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak miskin. Ini termasuk program beasiswa dan bantuan keuangan untuk keluarga miskin, investasi dalam infrastruktur pendidikan di daerah miskin, serta pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Selain itu, penting untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan memberikan pendidikan vokasional yang dapat membantu anak-anak miskin memperoleh keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Program-program yang mendukung pendidikan inklusif dan berkualitas dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara anak-anak miskin dan kaya. Dengan memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, kita dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pendidikan

adalah kunci untuk memberdayakan individu dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, pendidikan yang tidak memadai merupakan hambatan besar bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Melalui investasi yang tepat dan kebijakan yang inklusif, kita dapat memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas dan mencapai potensi penuh mereka, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

c. Eksklusi Sosial dan Ketidakadilan

Kemiskinan dapat menyebabkan eksklusi sosial, di mana individu atau kelompok masyarakat tertentu tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan sosial. Ketika kelompok masyarakat tertentu merasa dipinggirkan dan tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, mereka cenderung mengalami eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat, di mana peluang dan sumber daya tidak didistribusikan secara merata.

Ketidakadilan yang timbul dari eksklusi sosial sering kali menyebabkan ketidakpuasan sosial. Masyarakat yang merasa dipinggirkan dan diabaikan oleh sistem cenderung mengembangkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan institusi sosial. Ketidakpuasan ini dapat memicu konflik sosial, yang dapat bermanifestasi dalam bentuk protes, kekerasan, dan kerusuhan. Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh konflik sosial mengganggu proses pembangunan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial dialihkan untuk menangani ketegangan dan konflik (UNDP, 2016).

Eksklusi sosial yang disebabkan oleh kemiskinan dapat menghambat kohesi sosial dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Kohesi sosial adalah keadaan di mana anggota masyarakat merasa terhubung dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Ketika kohesi sosial terganggu oleh eksklusi dan ketidakadilan, rasa solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat berkurang. Ketegangan sosial ini menghambat kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam proyek-proyek pembangunan dan mengurangi efektivitas kebijakan publik.

Eksklusi sosial juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ketika kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki akses ke peluang ekonomi yang setara, mereka tidak dapat berkontribusi secara penuh terhadap perekonomian. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Selain itu, eksklusi sosial memperburuk kemiskinan karena kelompok-kelompok yang terpinggirkan tidak memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lingkaran setan ini terus berlanjut, di mana kemiskinan menyebabkan eksklusi sosial, dan eksklusi sosial memperburuk kemiskinan.

Untuk mengatasi eksklusi sosial dan ketidakadilan yang disebabkan oleh kemiskinan, diperlukan kebijakan inklusif yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Ini termasuk kebijakan pendidikan yang memberikan akses yang setara kepada semua anak, kebijakan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang inklusif, serta kebijakan sosial yang melindungi hak-hak kelompok yang rentan. Selain itu, penting untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara semua kelompok masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan komunitas juga dapat membantu mengatasi eksklusi sosial. Misalnya, program pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan inisiatif pemberdayaan perempuan dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Secara keseluruhan, eksklusi sosial dan ketidakadilan adalah hambatan besar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi eksklusi sosial dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera.

5. Dampak Politik

a. Ketidakstabilan Politik

Kemiskinan yang meluas dapat menyebabkan ketidakstabilan politik karena orang-orang yang merasa tertinggal dan tidak puas dengan kondisi ekonomi mereka mungkin akan mendukung gerakan politik radikal atau terlibat dalam protes dan kerusuhan. Ketidakpuasan sosial yang timbul akibat kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari alternatif terhadap status quo, sering kali melalui dukungan terhadap gerakan politik yang menjanjikan perubahan radikal. Ketidakpuasan ini dapat memanifestasikan diri dalam bentuk protes massal, kerusuhan, dan kekerasan politik, yang mengancam stabilitas politik dan keamanan Nasional.

Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh kemiskinan juga dapat mengganggu investasi dan aktivitas ekonomi. Investor cenderung menghindari negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik karena risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketidakpastian ekonomi. Penurunan investasi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, ketidakstabilan politik sering kali mengalihkan fokus pemerintah dari upaya pembangunan ekonomi dan sosial menuju penanganan krisis politik, yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan jangka panjang.

Transparency International (2019) mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali mengalami tingkat korupsi yang tinggi dan ketidakstabilan politik, yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi yang merajalela menggerogoti institusi publik dan mengalihkan sumber daya dari program-program pembangunan yang vital ke tangan individu atau kelompok yang berkuasa. Hal ini mengurangi efektivitas kebijakan publik dan memperburuk ketidakadilan sosial, yang meningkatkan ketidakpuasan masyarakat dan memperdalam siklus ketidakstabilan politik dan kemiskinan (TI, 2019).

Korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil, di mana akses terhadap peluang ekonomi dan sosial ditentukan oleh koneksi

politik dan kemampuan untuk membayar suap, bukan berdasarkan meritokrasi. Ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan ketidakpuasan sosial dan potensi konflik. Negara-negara yang tinggi tingkat korupsinya sering kali gagal dalam menyediakan layanan publik yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh kemiskinan, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif dan adil. Ini termasuk program-program redistribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, penting untuk memperkuat institusi publik dan menegakkan hukum untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar di kalangan masyarakat. Melalui partisipasi yang lebih luas, kebijakan publik dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang dapat mengurangi ketidakpuasan sosial dan meningkatkan stabilitas politik. Program-program pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan kepemimpinan dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses demokratis dan memperkuat kohesi sosial.

Ketiga, dukungan internasional dan kerjasama regional juga memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Bantuan pembangunan dari negara-negara maju dan organisasi internasional dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, kerjasama regional dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pembangunan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik suatu negara. Dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

b. Rendahnya Partisipasi Politik

Kemiskinan dapat mengurangi partisipasi politik karena orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka mungkin tidak memiliki waktu, sumber daya, atau minat untuk terlibat dalam proses politik. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, sehingga mereka mungkin tidak memiliki energi atau sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Waktu dan usaha mereka terfokus pada kelangsungan hidup sehari-hari, bukan pada keterlibatan dalam proses politik yang dianggap tidak langsung terkait dengan kebutuhan mendesak mereka.

Rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat miskin dapat mengakibatkan pengabaian kepentingan mereka dalam pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin cenderung tidak efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ketika suara orang miskin tidak didengar, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih cenderung menguntungkan kelompok yang lebih kaya dan berkuasa, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Norris, 2002).

Ketika masyarakat miskin tidak berpartisipasi dalam politik, mereka kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini termasuk kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, yang semuanya sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa partisipasi politik yang efektif, kepentingan masyarakat miskin dapat diabaikan atau dianggap kurang penting oleh pembuat kebijakan, yang mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak adil dan prioritas kebijakan yang tidak seimbang (UNDP, 2016).

Partisipasi politik yang rendah juga dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Ketika masyarakat miskin tidak terlibat dalam proses politik, ada lebih sedikit tekanan pada pemerintah untuk

bertindak demi kepentingan umum. Ini dapat membuka pintu bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik masyarakat miskin tidak hanya merugikan mereka secara langsung, tetapi juga merugikan seluruh sistem demokrasi (Norris, 2002).

Untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat miskin, diperlukan langkah-langkah yang proaktif. Pertama, pendidikan politik dan kesadaran harus ditingkatkan melalui program-program pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya partisipasi politik dan hak-hak sipil. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik (Dalton, 2000).

Kedua, hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik masyarakat miskin harus diatasi. Ini termasuk mengurangi biaya finansial dan waktu yang terkait dengan partisipasi politik, seperti menyediakan transportasi gratis ke tempat pemungutan suara, memperpanjang jam pemungutan suara, dan menyediakan fasilitas penitipan anak selama pemilihan. Selain itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan platform dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi politik yang lebih mudah dan lebih inklusif (Eliasoph et al., 1996).

Ketiga, penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik secara aktif melibatkan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa melalui mekanisme partisipatif seperti dewan konsultatif komunitas, anggaran partisipatif, dan forum-forum dialog publik. Dengan memberi masyarakat miskin suara dalam pembuatan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka (Gaventa, 2020).

Rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat miskin memiliki dampak yang luas pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan partisipasi politik dan memastikan bahwa suara orang miskin didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

Dampak Lingkungan

Orang-orang miskin sering kali terpaksa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk bertahan hidup, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Ketika orang miskin tidak memiliki akses ke sumber daya yang berkelanjutan dan dukungan ekonomi yang memadai, mereka cenderung mengandalkan cara-cara yang merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, penebangan hutan secara ilegal untuk kayu bakar atau pembukaan lahan pertanian dapat menyebabkan deforestasi, yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Deforestasi yang terjadi karena aktivitas manusia ini mengurangi kemampuan hutan untuk berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana alam. Hutan yang hilang tidak lagi dapat menahan air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, hilangnya akar pohon yang menahan tanah dapat menyebabkan tanah longsor, terutama di daerah yang berbukit. Keanekaragaman hayati juga terancam oleh deforestasi, karena banyak spesies hewan dan tumbuhan kehilangan habitat mereka, yang dapat menyebabkan kepunahan beberapa spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain deforestasi, pencemaran air dan tanah juga merupakan masalah lingkungan yang serius yang sering kali diakibatkan oleh aktivitas ekonomi orang miskin. Ketika sumber daya air yang bersih tidak tersedia, orang miskin mungkin terpaksa menggunakan air yang tercemar untuk minum, memasak, dan irigasi. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan di lahan pertanian juga dapat mencemari tanah dan air, yang mengurangi kualitas dan produktivitas lahan serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Pencemaran ini mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan yang penting bagi kehidupan manusia dan memperburuk kondisi kemiskinan.

Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kemiskinan dapat memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Ketika lingkungan rusak, sumber daya alam yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup masyarakat miskin menjadi tidak dapat diandalkan lagi. Misalnya, tanah yang terdegradasi tidak lagi produktif, sehingga hasil panen menurun dan pendapatan petani berkurang. Ini memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan alternatif, yang sering kali melibatkan aktivitas

yang semakin merusak lingkungan. Siklus ini terus berlanjut, di mana kemiskinan menyebabkan degradasi lingkungan, dan degradasi lingkungan semakin memperparah kemiskinan.

Untuk memutus siklus degradasi lingkungan dan kemiskinan, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk meningkatkan akses orang miskin terhadap sumber daya yang berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Program-program seperti agroforestri, penggunaan energi terbarukan, dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu masyarakat miskin memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka.

Kedua, pemerintah dan organisasi internasional perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung konservasi lingkungan dan pengurangan kemiskinan. Ini termasuk perlindungan kawasan hutan dan habitat alami, serta pemberian insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan. Kebijakan redistribusi tanah dan sumber daya juga dapat membantu mengurangi tekanan pada lingkungan dengan memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat miskin untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ketiga, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masalah degradasi lingkungan dan kemiskinan. Proyek-proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi, telah terbukti efektif dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau dapat membuka peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Secara keseluruhan, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kemiskinan adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan dan degradasi lingkungan secara bersamaan, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

C. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

1. Definisi dan Konsep Pemerataan

Pemerataan pembangunan adalah konsep yang menekankan distribusi manfaat pembangunan ekonomi secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah geografis. Tujuan utama dari pemerataan pembangunan adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling miskin dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan hasil dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2015) dalam bukunya *“Economic Development”*, pemerataan pembangunan adalah upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Konsep pemerataan pembangunan melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk keadilan distributif, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing aspek:

Keadilan Distributif

Keadilan distributif merujuk pada distribusi sumber daya dan pendapatan yang adil di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi lainnya. Konsep ini sangat penting dalam konteks pemerataan pembangunan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pendapatan dan Kekayaan, pemerataan pembangunan menargetkan pengurangan ketimpangan pendapatan dan kekayaan melalui kebijakan pajak yang progresif, transfer pendapatan, dan program perlindungan sosial. Kebijakan pajak yang progresif, di mana orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan lebih tinggi membayar pajak lebih banyak, adalah salah satu alat utama untuk redistribusi pendapatan. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Transfer pendapatan, seperti tunjangan sosial dan bantuan langsung tunai, juga merupakan cara efektif untuk mengurangi ketimpangan. Program-program ini menyediakan dukungan finansial langsung kepada individu dan keluarga yang paling membutuhkan, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, program perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun dapat memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas.

Kebijakan redistribusi yang efektif dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah, stabilitas sosial yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, ketimpangan yang rendah juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas sosial, memungkinkan individu untuk naik ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi berdasarkan usaha dan kemampuan mereka, bukan latar belakang ekonomi mereka.

Akses terhadap Layanan Dasar, pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan adalah komponen penting dari pemerataan pembangunan. Layanan ini memberikan dasar bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ketika semua orang memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar, potensi ekonomi dan sosial setiap individu dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan adalah kunci untuk mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas memungkinkan anak-anak dari semua latar belakang ekonomi untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan sekolah yang terjangkau adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pendidikan yang inklusif juga membantu mengurangi ketimpangan jangka panjang dengan menyediakan dasar yang kuat untuk partisipasi ekonomi yang produktif.

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga sangat penting. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program asuransi kesehatan, klinik kesehatan komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Ketika layanan kesehatan tersedia dan terjangkau, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi beban ekonomi dari penyakit dan kondisi kesehatan kronis.

Perumahan yang layak adalah kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan distributif. Akses ke perumahan yang terjangkau dan berkualitas memberikan stabilitas dan keamanan bagi keluarga, memungkinkan mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Program perumahan subsidi, proyek perumahan sosial, dan regulasi pasar perumahan yang adil dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki tempat tinggal yang layak. Perumahan yang aman dan stabil juga berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan fisik individu, yang penting untuk produktivitas dan partisipasi sosial.

Secara keseluruhan, keadilan distributif adalah konsep yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil serta akses yang setara terhadap layanan dasar, kita dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup semua anggota masyarakat. Pemerataan pembangunan melalui keadilan distributif adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Inklusi Sosial

Inklusi sosial berarti memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk yang miskin, rentan, dan terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Konsep inklusi sosial bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang mencegah partisipasi penuh dari semua individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menciptakan kondisi di mana setiap orang memiliki akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya.

Partisipasi dalam proses pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat. Partisipasi inklusif berarti melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang biasanya terpinggirkan, dalam dialog dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti dewan komunitas, forum konsultasi publik, dan proses perencanaan partisipatif.

Partisipasi inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan dan memperkuat kohesi sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih responsif dan relevan, karena didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman lokal. Selain itu, partisipasi inklusif dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, yang sangat penting untuk stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga dapat memperkuat kapasitas lokal dan memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil tindakan yang memperbaiki kondisi hidup mereka. Ini mencakup pemberian pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta dukungan teknis dan finansial untuk inisiatif komunitas. Dengan meningkatkan kapasitas lokal, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif, yang tidak hanya berkontribusi pada pembangunan lokal tetapi juga memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik (Gaventa, 2020).

Pengurangan diskriminasi, pemerataan pembangunan juga mencakup upaya untuk mengurangi diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, dan status sosial, yang dapat menghalangi akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Diskriminasi adalah hambatan besar bagi inklusi sosial karena menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam dan menghalangi kelompok-kelompok tertentu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Pengurangan diskriminasi dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang mempromosikan kesetaraan dan inklusi. Ini termasuk

penerapan undang-undang anti-diskriminasi, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan, dan inisiatif yang mendukung akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana semua individu merasa dihargai dan dihormati, terlepas dari latar belakang mereka.

Misalnya, promosi kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan dapat membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, yang sering kali kurang terwakili dalam sektor-sektor tertentu dan menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Program pelatihan keterampilan khusus untuk perempuan, dukungan untuk wirausaha perempuan, dan kebijakan cuti orang tua yang adil adalah beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan mengurangi ketimpangan gender.

Demikian pula, pengurangan diskriminasi rasial dan etnis memerlukan kebijakan yang mendukung integrasi dan inklusi kelompok minoritas. Ini termasuk memastikan bahwa kelompok minoritas memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang pekerjaan. Program-program seperti beasiswa untuk siswa dari latar belakang etnis minoritas, dukungan bahasa untuk komunitas imigran, dan promosi keanekaragaman di tempat kerja adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, inklusi sosial adalah elemen kunci dari pemerataan pembangunan. Dengan memastikan partisipasi penuh semua kelompok dalam proses pembangunan dan mengurangi diskriminasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Inklusi sosial tidak hanya penting untuk keadilan sosial, tetapi juga untuk efektivitas dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Pemerataan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat tetapi juga

memberikan manfaat yang luas bagi seluruh populasi, sambil menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam.

Lingkungan, pembangunan berkelanjutan melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan perlindungan lingkungan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana berarti memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien dan bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Ini termasuk praktik-praktik seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang lestari, dan penggunaan energi terbarukan. Perlindungan lingkungan juga melibatkan upaya untuk mengurangi polusi, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi habitat alami.

Integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan adalah esensial untuk keberlanjutan jangka panjang. Tanpa perhatian yang memadai terhadap dampak lingkungan, pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam, yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan ekonomi dan sosial. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi tanah, banjir, dan hilangnya habitat satwa liar. Demikian pula, polusi air dan udara dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi penduduk setempat dan mengurangi produktivitas ekonomi.

Pengelolaan sumber daya air adalah salah satu contoh penting dari integrasi aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Air adalah sumber daya yang kritis untuk kehidupan manusia, pertanian, dan industri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa air tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Ini bisa dilakukan melalui pengelolaan cekungan sungai yang terintegrasi, perlindungan kawasan tangkapan air, dan teknologi irigasi yang efisien. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Ekonomi, pembangunan ekonomi yang inklusif memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan meraih manfaat dari pertumbuhan. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak, penyediaan peluang kewirausahaan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Pembangunan

ekonomi yang inklusif berarti bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan, dan setiap orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya.

Penciptaan lapangan kerja yang layak adalah salah satu aspek kunci dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Pekerjaan yang layak tidak hanya berarti upah yang memadai tetapi juga kondisi kerja yang aman dan sehat, perlindungan sosial, dan hak-hak pekerja yang dihormati. Pekerjaan yang layak memberikan stabilitas ekonomi bagi individu dan keluarga, serta berkontribusi pada kohesi sosial. Program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada peningkatan keterampilan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonom).

Peluang kewirausahaan juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Program pinjaman mikro, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar adalah beberapa cara untuk mendukung pengembangan UKM. Selain itu, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi, menyediakan insentif pajak, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan informasi.

Pengurangan ketimpangan ekonomi juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif, transfer tunai, dan program perlindungan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Pendidikan inklusif dan layanan kesehatan yang terjangkau adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.

Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya penting untuk kesejahteraan generasi saat ini tetapi juga untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Pendekatan dan Kebijakan untuk Pemerataan Pembangunan

Untuk mencapai pemerataan pembangunan, diperlukan berbagai pendekatan dan kebijakan yang komprehensif, termasuk:

- a. Kebijakan Redistribusi: Kebijakan redistribusi seperti pajak progresif, transfer pendapatan, dan program jaminan sosial bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memungkinkan partisipasi penuh dalam pembangunan ekonomi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan layanan dasar.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Pemerataan pembangunan adalah konsep yang menekankan distribusi manfaat pembangunan ekonomi secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah geografis. Ini mencakup keadilan distributif, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pemerataan pembangunan, diperlukan kebijakan dan pendekatan yang komprehensif yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan hasil dari pertumbuhan ekonomi.

2. Indikator Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana pemerataan pembangunan tercapai, digunakan berbagai indikator yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Indikator Ekonomi

a. Koefisien Gini. Koefisien

Gini adalah ukuran statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata dan 1 menunjukkan ketimpangan maksimal. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatan dalam masyarakat.

b. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan.

Indikator ini mengukur persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional atau internasional. Garis kemiskinan internasional, misalnya, sering kali ditetapkan oleh Bank Dunia pada \$1.90 per hari dalam paritas daya beli (PPP). Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemiskinan tersebar dalam suatu masyarakat. World Bank (2015) menggunakan persentase populasi di bawah garis kemiskinan sebagai salah satu indikator utama untuk menilai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

c. Rasio Pendapatan 20% Teratas dan 20% Terbawah

Rasio ini membandingkan total pendapatan yang diperoleh oleh 20% populasi dengan pendapatan tertinggi dengan total pendapatan yang diperoleh oleh 20% populasi dengan pendapatan terendah. Indikator ini membantu mengidentifikasi tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Indikator Sosial

a. Akses terhadap Pendidikan

Akses terhadap pendidikan diukur melalui indikator seperti tingkat melek huruf, rata-rata tahun sekolah, dan tingkat partisipasi pendidikan tinggi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, yang penting untuk pembangunan manusia dan ekonomi.

b. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Indikator ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan dasar, seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan prevalensi penyakit menular. Akses yang merata terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah indikator penting dari pemerataan pembangunan.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indikator komposit yang mengukur kemajuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat (dihitung dari harapan hidup), pengetahuan (diukur dari rata-rata tahun sekolah dan harapan tahun sekolah), dan standar hidup layak (diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita).

Indikator Lingkungan

a. Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi

Indikator ini mengukur persentase populasi yang memiliki akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Akses yang merata terhadap sumber daya ini penting untuk kesehatan masyarakat dan kesejahteraan lingkungan.

b. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup diukur melalui indikator seperti kualitas udara dan air, tingkat deforestasi, dan pengelolaan limbah. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan yang produktif dan berkualitas.

Indikator Kesejahteraan Sosial

a. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan bahwa lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, yang merupakan tanda pemerataan pembangunan.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan mengukur jumlah individu yang tidak bekerja (anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan jumlah individu yang bekerja. Rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa lebih banyak orang berkontribusi terhadap perekonomian, mengurangi beban pada sistem sosial dan ekonomi.

Indikator pemerataan pembangunan mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bersama-sama memberikan gambaran tentang sejauh mana manfaat pembangunan didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Penggunaan indikator seperti koefisien Gini, persentase populasi di bawah garis kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, IPM,

dan kualitas lingkungan hidup membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

3. Kebijakan untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah geografis secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai kebijakan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, meningkatkan akses terhadap kesempatan, serta memastikan inklusi dan keadilan sosial.

Kebijakan Redistribusi Pendapatan

a. Sistem Pajak Progresif

Penerapan sistem pajak progresif di mana individu atau entitas dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi adalah salah satu cara utama untuk redistribusi pendapatan. Pendapatan dari pajak ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial dan layanan publik yang bermanfaat bagi kelompok berpendapatan rendah.

b. Transfer Pendapatan dan Program Bantuan Sosial

Program transfer pendapatan, seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan jaminan sosial, dirancang untuk memberikan dukungan keuangan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Program-program ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan

a. Pendidikan Universal dan Berkualitas

Investasi dalam pendidikan universal dan berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta mendorong partisipasi dalam pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan. Pendidikan berkualitas adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang inklusif.

b. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan pencegahan, perawatan primer, dan pengobatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan dan pelatihan tenaga medis sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Akses terhadap layanan kesehatan yang merata adalah fundamental untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur

a. Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi

Investasi dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi di daerah terpencil dan kurang berkembang dapat membantu mengurangi kesenjangan wilayah. Akses yang lebih baik ke jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan teknologi komunikasi meningkatkan konektivitas dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang merata adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

b. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya juga harus dibangun dan diperbaiki di daerah-daerah yang kurang berkembang. Ini memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar yang penting untuk kesejahteraan mereka.

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial

a. Kebijakan Upah Minimum

Penerapan kebijakan upah minimum membantu memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini membantu mengurangi kemiskinan pekerja dan meningkatkan standar hidup.

b. Program Ketenagakerjaan

Pemerintah harus menciptakan program ketenagakerjaan yang inklusif, seperti pelatihan keterampilan, program magang, dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang berkembang. Program-program ini

membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.

Kebijakan Pemberdayaan dan Inklusi Sosial

a. Pengurangan Diskriminasi

Pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan Undang-Undang yang mengurangi diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, dan status sosial. Ini termasuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat diperhitungkan. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum masyarakat, dan mekanisme partisipasi lainnya.

Kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan melibatkan pendekatan yang komprehensif yang mencakup redistribusi pendapatan, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, kebijakan ketenagakerjaan, dan pemberdayaan serta inklusi sosial. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, memastikan akses yang merata terhadap sumber daya dan kesempatan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

D. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN, KEMISKINAN, DAN PEMERATAAN

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pemerataan adalah tiga aspek penting dari pembangunan yang saling berkaitan. Memahami hubungan antara ketiga aspek ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai alat utama untuk mengurangi kemiskinan, karena ketika ekonomi suatu negara tumbuh, pendapatan nasional juga meningkat. Peningkatan pendapatan ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat menciptakan

lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan dengan demikian mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, ketika sektor industri dan jasa berkembang, permintaan tenaga kerja meningkat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pertumbuhan ekonomi secara otomatis mengarah pada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan tidak didistribusikan dengan baik di seluruh lapisan masyarakat, justru dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika pertumbuhan ekonomi terpusat pada sektor-sektor tertentu atau pada kelompok elit, masyarakat miskin mungkin tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Dalam kasus seperti ini, meskipun ekonomi suatu negara tumbuh, kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat efek positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, daya beli masyarakat umum tidak meningkat, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Ketimpangan ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan merata.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui kebijakan redistribusi yang efektif, seperti pajak progresif, subsidi untuk kelompok rentan, dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Program-program sosial yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan akses masyarakat miskin ke pasar tenaga kerja juga dapat membantu mereka memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, didukung oleh kebijakan yang tepat, dapat menjadi kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan secara signifikan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah konsep yang menekankan bahwa manfaat dari peningkatan pendapatan nasional harus dirasakan oleh semua segmen masyarakat, termasuk yang paling miskin dan terpinggirkan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan angka GDP (Produk Domestik Bruto) semata, tetapi juga dari bagaimana manfaat ekonomi tersebut didistribusikan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang inklusif berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan akses terhadap kesempatan, dan peningkatan kesejahteraan umum.

Investasi dalam pendidikan adalah salah satu pilar utama dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pendidikan yang berkualitas memberikan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang penting untuk partisipasi produktif dalam ekonomi. Ketika semua anak memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Program-program beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan kualitas guru adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi suatu negara dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Kesehatan juga merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Akses yang setara ke layanan kesehatan berkualitas memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi beban ekonomi dari penyakit dan kondisi kesehatan kronis. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan, program asuransi kesehatan universal, dan penyediaan layanan kesehatan di daerah terpencil sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika masyarakat sehat, mereka dapat berkontribusi lebih efektif pada ekonomi, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur yang baik adalah pendorong lain dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih di daerah-daerah terpencil memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan akses ke layanan dasar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mobilitas sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang baik juga menarik investasi, baik domestik maupun asing, yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan yang inklusif juga melibatkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif, program perlindungan sosial, dan transfer tunai langsung kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dapat membantu mengurangi ketimpangan. Kebijakan ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang kaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Dengan mengurangi ketimpangan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pendekatan yang memastikan bahwa semua segmen masyarakat mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan Nasional. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjangkau daerah terpencil dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umum dan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

3. Ketimpangan dan Efeknya terhadap Pertumbuhan

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang, daya beli masyarakat umum menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa. Ketika sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok kaya,

masyarakat umum yang memiliki pendapatan rendah tidak memiliki cukup uang untuk berbelanja. Hal ini mengurangi permintaan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan mungkin menghadapi penurunan penjualan, yang dapat memaksa mereka untuk mengurangi produksi dan tenaga kerja, menciptakan siklus penurunan ekonomi.

Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika pendapatan terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, keluarga berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menginvestasikan dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Pendidikan dan kesehatan yang buruk membatasi kemampuan individu untuk berkembang dan berkontribusi secara produktif dalam ekonomi. Menurut Stiglitz, (2012), ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya mengurangi kualitas tenaga kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketimpangan pendapatan juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik, yang berdampak negatif pada iklim investasi. Ketika ketimpangan ekonomi semakin melebar, masyarakat dapat menjadi semakin tidak puas dan frustrasi dengan sistem ekonomi dan politik yang ada. Ketidakpuasan ini sering kali memicu protes, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik, yang menakuti investor dan mengurangi aliran investasi domestik dan asing. Investasi yang berkurang berarti lebih sedikit peluang untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi negara.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mendorong kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan merusak. Ketika kekayaan dan kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok kecil orang kaya, kebijakan publik cenderung lebih menguntungkan mereka daripada mayoritas masyarakat. Ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil dan tidak efisien, seperti pengurangan pajak bagi orang kaya atau pemotongan anggaran untuk program sosial, yang semakin memperburuk

ketimpangan pendapatan dan merusak dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketimpangan pendapatan juga berdampak pada mobilitas sosial. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, kesempatan bagi individu dari latar belakang miskin untuk meningkatkan status ekonomi mereka sangat terbatas. Ketidakmampuan untuk meningkatkan status ekonomi melalui pendidikan dan pekerjaan yang layak menciptakan siklus kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin tetap terjebak dalam kemiskinan sepanjang hidup mereka. Ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merugikan ekonomi secara keseluruhan karena banyak potensi produktivitas yang terbuang.

Untuk mengatasi dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pajak yang progresif, di mana orang kaya membayar pajak lebih besar, dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan menyediakan dana untuk program sosial yang mendukung masyarakat miskin. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam ekonomi. Dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan inklusi ekonomi, kita dapat menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan yang tinggi merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mengadopsi kebijakan yang mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Mengatasi ketimpangan pendapatan adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan (Stiglitz, 2012).

4. Kemiskinan dan Pemerataan

Mengurangi ketimpangan pendapatan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Redistribusi pendapatan melalui kebijakan pajak progresif, transfer pendapatan, dan program bantuan

sosial dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan pajak progresif, di mana individu dan perusahaan yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi, memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang menguntungkan masyarakat miskin. Transfer pendapatan, seperti bantuan tunai langsung, dapat memberikan dukungan finansial langsung kepada rumah tangga yang membutuhkan, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program bantuan sosial, seperti subsidi pangan, tunjangan anak, dan bantuan perumahan, juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada kelompok-kelompok yang rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak, dan orang lanjut usia, untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan memberikan bantuan yang ditargetkan, program bantuan sosial dapat mengurangi beban finansial rumah tangga miskin dan membantu mereka mencapai stabilitas ekonomi.

Laporan dari (UNDP, 2019a) menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara bersamaan. Ketika kebijakan redistribusi berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan, masyarakat menjadi lebih inklusif dan adil. Ini tidak hanya membantu individu dan keluarga yang paling membutuhkan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar. Masyarakat yang lebih setara cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah, tingkat kesehatan yang lebih baik, dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kemiskinan yang meluas dapat memperburuk ketimpangan dengan menciptakan hambatan bagi mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Tanpa akses yang memadai ke pendidikan berkualitas, anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di

masa depan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan berarti bahwa orang miskin lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan kronis, yang dapat menghambat produktivitas dan kemampuan mereka untuk bekerja.

Ketiadaan peluang ekonomi yang inklusif juga memperburuk siklus kemiskinan. Orang miskin sering kali menghadapi diskriminasi dan hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja, yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya mewarisi kemiskinan dan ketidaksetaraan dari orang tua mereka. Ketimpangan dalam akses terhadap peluang ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat potensi ekonomi keseluruhan negara.

Untuk memutus siklus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, diperlukan kebijakan yang holistik dan inklusif. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dapat membantu orang miskin mendapatkan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung kewirausahaan dan inovasi, sehingga lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha sendiri.

Pemerintah dan lembaga internasional juga harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan. Ini termasuk reformasi sistem perpajakan untuk membuatnya lebih adil dan progresif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, kita dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan redistribusi adalah strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Dengan memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, kita dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan

masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Menurut UNDP, (2019a), kebijakan redistribusi yang efektif tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Sinergi antara Pertumbuhan, Pengurangan Kemiskinan, dan Pemerataan

Sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan merupakan elemen krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, tidak hanya dapat mengurangi tingkat kemiskinan tetapi juga mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif, seperti investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dapat menghasilkan manfaat ganda: mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Investasi dalam sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang merata. Pendidikan yang berkualitas memberikan individu keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Layanan kesehatan yang baik memastikan bahwa pekerja tetap sehat dan produktif, yang pada gilirannya meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Ketika masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada perekonomian, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Selain itu, perlindungan sosial yang kuat juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi. Program perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan bantuan tunai, memberikan jaring pengaman bagi kelompok yang paling rentan dan memastikan bahwa mereka tidak jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi atau kesehatan. Perlindungan sosial ini juga meningkatkan stabilitas ekonomi secara

keseluruhan dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mendukung perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pemerataan adalah tiga aspek yang saling terkait dari pembangunan. Ketika pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan disertai dengan kebijakan redistribusi yang adil, maka manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan, menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, investasi dalam sumber daya manusia, dan perlindungan sosial yang kuat.

Pendekatan yang holistik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan umum tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mengintegrasikan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ke dalam strategi pembangunan ekonomi, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh warganya. Sinergi ini menjadi landasan penting dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan.

6. **Teori *Trickle-Down Effect***

Teori *trickle-down*, atau efek tetesan ke bawah, adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar dan orang kaya pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Teori ini berargumen bahwa keuntungan finansial yang diperoleh oleh kelompok berpenghasilan tinggi akan mengalir ke bawah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi, sehingga memperbaiki kondisi ekonomi keseluruhan.

Teori *trickle-down* muncul pada awal abad ke-20, tetapi menjadi sangat populer pada era 1980-an selama masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Reagan, yang dikenal sebagai "Reaganomics," didasarkan pada prinsip-prinsip *trickle-down*. Kebijakan ini meliputi pemotongan pajak

bagi orang kaya dan perusahaan, deregulasi, dan pengurangan pengeluaran pemerintah untuk program sosial.

Menurut (Hughes, 2014), teori *trickle-down* juga terkait erat dengan pendekatan ekonomi pasokan (supply-side economics), yang berfokus pada pengurangan hambatan terhadap produksi dan investasi sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori trickle-down beroperasi melalui beberapa mekanisme utama:

- a. **Pemotongan Pajak.** Pemotongan pajak untuk perusahaan dan individu berpenghasilan tinggi diyakini akan meningkatkan investasi dalam bisnis, yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Argumen ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang kaya lebih cenderung menginvestasikan tambahan pendapatan mereka daripada membelanjakannya untuk konsumsi langsung.
- b. **Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.** Dengan adanya lebih banyak investasi, perusahaan dapat memperluas operasi mereka, membuka cabang baru, dan meningkatkan produksi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan upah pekerja. Perusahaan yang lebih produktif juga dapat menurunkan harga barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat.
- c. **Peningkatan Konsumsi.** Dengan lebih banyak orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan, konsumsi masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Peningkatan konsumsi ini, pada gilirannya, merangsang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa.

Kritik terhadap Teori Trickle-Down

Teori *trickle-down* adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar dan orang kaya pada akhirnya akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling miskin, melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Namun, teori ini telah menjadi subjek banyak kritik karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan. Berikut adalah beberapa kritik utama terhadap teori trickle-down:

- a. **Kesenjangan Ekonomi yang Meningkat.** Kritik utama terhadap teori *trickle-down* adalah bahwa kebijakan yang menguntungkan orang kaya tidak serta-merta mengalir ke lapisan bawah masyarakat. Sebaliknya,

kebijakan ini sering kali memperlebar kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak dan insentif lainnya untuk orang kaya lebih cenderung meningkatkan kekayaan mereka daripada mendistribusikan kekayaan tersebut ke seluruh masyarakat.

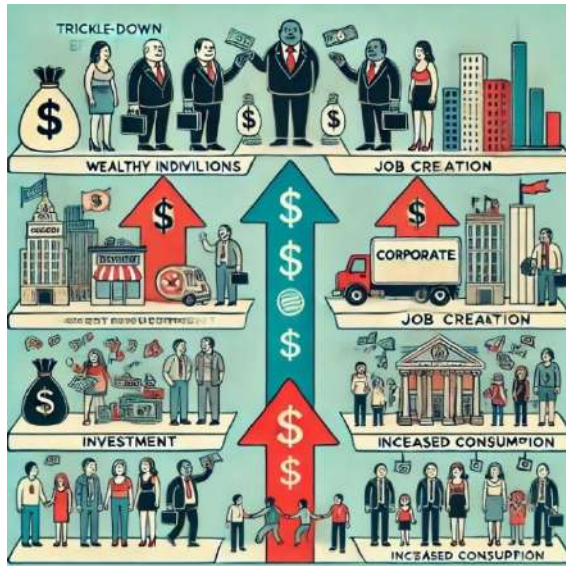
- b. **Peningkatan Ketidaksetaraan.** Kebijakan *trickle-down* sering kali mengakibatkan peningkatan ketidaksetaraan. Studi oleh organisasi seperti IMF dan OECD menunjukkan bahwa ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan merusak kohesi sosial. Ketika orang kaya semakin kaya sementara orang miskin tetap berada di bawah garis kemiskinan, ketidaksetaraan sosial semakin parah (Dabla-norris & Kochhar, 2015).
- c. **Kurangnya Investasi dalam Layanan Publik.** Kritikus berargumen bahwa kebijakan *trickle-down* sering kali mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, yang kemudian berdampak pada pengurangan investasi dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama mereka yang bergantung pada layanan publik.
- d. **Pengaruh Terbatas pada Penciptaan Lapangan Kerja.** Argumen bahwa pemotongan pajak dan insentif untuk orang kaya akan mendorong penciptaan lapangan kerja sering kali tidak terbukti secara empiris. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar mungkin menggunakan keuntungan tambahan untuk membeli kembali saham atau meningkatkan gaji eksekutif daripada menginvestasikannya dalam penciptaan lapangan kerja baru atau peningkatan upah pekerja.
- e. **Ketergantungan pada Pasar Bebas.** Teori *trickle-down* sangat bergantung pada asumsi bahwa pasar bebas akan secara otomatis mendistribusikan keuntungan secara merata. Namun, dalam praktiknya, pasar bebas sering kali memperkuat kekuatan ekonomi dan politik mereka yang sudah kuat, sementara mereka yang lemah tetap terpinggirkan.

Berbagai studi empiris telah mengevaluasi efektivitas teori *trickle-down*. Misalnya, penelitian oleh Jones dan Keen (2011) menemukan bahwa pemotongan pajak untuk orang kaya memiliki dampak yang terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan sering kali meningkatkan ketimpangan pendapatan. Studi lain oleh (Binder, 2016) menunjukkan bahwa kebijakan

trickle-down di Amerika Serikat telah berkontribusi pada konsentrasi kekayaan yang semakin tinggi di tangan segelintir orang kaya.

Teori *trickle-down* berargumen bahwa kebijakan yang menguntungkan orang kaya dan perusahaan besar pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi. Meskipun konsep ini memiliki beberapa pendukung, banyak kritik yang menunjukkan bahwa kebijakan *trickle-down* sering kali meningkatkan ketimpangan pendapatan dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih fokus pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan mungkin lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah ilustrasi tentang Teori *Trickle-down Effect* yang menggambarkan bagaimana kekayaan dari individu kaya dan perusahaan besar di puncak mengalir ke berbagai segmen masyarakat melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi. Bagian bawah menunjukkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja, keluarga, dan usaha kecil, yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dimulai di puncak.



Gambar 8. 1 *Trickle-down Effect*

7. Pendekatan Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan inklusif adalah konsep multifaset yang bertujuan untuk melibatkan semua komponen ekonomi nasional dan regional, serta berbagai kategori warga negara dan entitas hukum, dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sevastyanova et al., 2018). Ini mencakup dimensi seperti inklusi sosial, inklusi fisik, dan pemberdayaan kelompok terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat (Kurniasari et al., 2021). Pendidikan inklusif, misalnya, telah memperoleh relevansi di berbagai negara selama beberapa dekade terakhir, mencerminkan pemahaman masyarakat yang lebih luas dan kemajuan menuju implementasinya (Margevica-Grinberga & Šūmane, 2021).

Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pembangunan inklusif memainkan peran penting, mendorong diskusi tentang maknanya dan sejauh mana hal itu dipertimbangkan dalam merumuskan SDGs (Gupta & Vegelin, 2016). Konsep pertumbuhan inklusif, khususnya di wilayah seperti Karibia, menyoroti kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekologis yang masih ada meskipun ada kontribusi ekonomi (Peterson et al., 2020). Selain itu, karakteristik spasial-temporal dari pertumbuhan hijau inklusif di negara-negara seperti Tiongkok menunjukkan perbedaan spasial yang signifikan, menekankan pentingnya memahami dan mengatasi ketimpangan dalam pembangunan (Zhou, 2022).

Upaya untuk mempromosikan pembangunan inklusif juga meluas ke sektor-sektor seperti pariwisata, di mana fokusnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan memberi manfaat bagi semua segmen masyarakat (Bakker & Messerli, 2016). Narasi inovasi inklusif, sebagaimana dieksplorasi dalam konteks sektor pertanian Kenya, menggarisbawahi pentingnya menjembatani teori dan praktik untuk mendorong praktik inklusif (Opola et al., 2020). Selain itu, kepemimpinan inklusif diidentifikasi sebagai faktor penting dalam mengatasi masalah kesetaraan, keadilan sosial, dan keragaman di lingkungan pendidikan (Murwanto, 2024).

Secara keseluruhan, pembangunan inklusif memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan, dan

mendorong praktik inklusif di berbagai sektor untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Prinsip Utama Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip utama pembangunan inklusif mencakup kesetaraan dan keadilan, partisipasi aktif, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi.

Kesetaraan dan keadilan adalah prinsip utama dalam pembangunan inklusif yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau gender. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya. Kesetaraan berarti menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan ekonomi. Keadilan berarti memastikan bahwa distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan dilakukan secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal atau dipinggirkan.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat. Ini mencakup penerapan kebijakan pajak yang progresif, program bantuan sosial, dan inisiatif yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum dan institusional yang melindungi hak-hak semua individu dan memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, pembangunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, adalah prinsip penting dalam pembangunan inklusif. Mendorong partisipasi aktif berarti melibatkan berbagai kelompok

masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Partisipasi yang inklusif memastikan bahwa suara dan perspektif semua kelompok masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ini tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan pembangunan tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Partisipasi aktif dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum konsultasi publik, dewan komunitas, dan proses perencanaan partisipatif. Penting untuk menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Program pendidikan dan pelatihan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam proses politik dan pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, pembangunan inklusif dapat menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Keberlanjutan adalah prinsip yang memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kebijakan dan praktik pembangunan. Ini berarti mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi polusi, dan mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan produktif untuk generasi mendatang (Estupiñán & Alvarez, 2016).

Keberlanjutan juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi, di mana pembangunan harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk menciptakan lapangan kerja yang layak, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan bahwa risiko dan biaya pembangunan tidak ditanggung oleh kelompok yang paling rentan.

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan juga berarti memperkuat kerangka hukum dan institusional untuk melindungi lingkungan dan mendukung praktik-praktik berkelanjutan. Pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan tahan terhadap tantangan masa depan.

Strategi Implementasi Pembangunan Inklusif

Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbagai strategi implementasi dapat diterapkan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan meliputi penguatan kapasitas masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan reformasi kebijakan.

Penguatan kapasitas masyarakat adalah langkah penting dalam pembangunan inklusif. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap informasi serta teknologi. Pendidikan yang berkualitas dan relevan membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program pelatihan keterampilan dan akses terhadap teknologi juga penting untuk memberdayakan masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas (Spatscheck, 2012).

Penguatan kapasitas masyarakat juga melibatkan pemberian dukungan teknis dan finansial kepada komunitas untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif dan berkelanjutan. Ini termasuk dukungan untuk inisiatif kewirausahaan lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses ke layanan keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, pembangunan inklusif dapat menciptakan lingkungan di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi.

Pengentasan kemiskinan adalah strategi kunci dalam pembangunan inklusif. Merancang program pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat

pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Program-program bantuan sosial, seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan tunjangan anak, dapat memberikan dukungan finansial langsung kepada rumah tangga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka (UNDP, 2019b).

Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi juga sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Layanan dasar ini memberikan fondasi yang kuat bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi secara produktif dalam ekonomi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang layak melalui investasi dalam infrastruktur, industri, dan sektor jasa dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin, membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan.

Strategi pengentasan kemiskinan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan memiliki akses ke layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi. Ini dapat membantu mereka mengelola risiko dan membangun aset, yang penting untuk stabilitas ekonomi jangka panjang.

Reformasi kebijakan adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif. Reformasi ini melibatkan perubahan dalam kebijakan publik untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan perlindungan hak-hak semua individu. Kebijakan redistribusi tanah, misalnya, dapat membantu mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan memberikan akses yang lebih adil kepada sumber daya alam. Redistribusi tanah dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan peluang ekonomi bagi petani kecil (Stiglitz, 2012).

Pengenaan pajak progresif adalah kebijakan lain yang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendanai program-program sosial yang mendukung masyarakat miskin. Pajak progresif, di mana individu dan perusahaan yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi, dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program bantuan sosial.

Perlindungan hak-hak pekerja juga merupakan bagian penting dari reformasi kebijakan. Ini termasuk memastikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan sosial bagi semua pekerja. Perlindungan hak-

hak pekerja membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, strategi implementasi pembangunan inklusif memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan menguatkan kapasitas masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan melakukan reformasi kebijakan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pembangunan inklusif tidak hanya penting untuk keadilan sosial tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Indikator Pembangunan Inklusif

Mengukur keberhasilan pembangunan yang inklusif memerlukan indikator yang komprehensif dan tepat sasaran. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur pembangunan inklusif mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Koefisien Gini, dan Indikator Kemiskinan Multidimensi. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup, kesetaraan, dan tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat, serta bagaimana berbagai aspek pembangunan saling berinteraksi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Dimensi kesehatan diukur melalui harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan status kesehatan umum dan akses terhadap layanan kesehatan. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang menunjukkan tingkat akses dan partisipasi dalam pendidikan. Dimensi standar hidup diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, yang mencerminkan tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat (UNDP, 2019b).

IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pembangunan manusia di suatu negara dan memungkinkan perbandingan antar negara. IPM yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang baik dan pembangunan yang inklusif, di mana semua individu memiliki akses yang setara terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Sebaliknya, IPM yang

rendah menunjukkan perlunya peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Koefisien Gini adalah indikator yang mengukur tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Koefisien ini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang ekstrem (satu orang memiliki semua pendapatan). Koefisien Gini digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat (World Bank, 2013).

Ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi, sebagaimana diukur oleh Koefisien Gini, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh semua segmen masyarakat. Ini dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural yang mencegah kelompok tertentu untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan menikmati manfaat dari pembangunan. Sebaliknya, Koefisien Gini yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan inklusif, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Indikator Kemiskinan Multidimensi (IKM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemiskinan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IKM dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011) dan dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan dibandingkan dengan ukuran kemiskinan moneter tradisional. IKM mempertimbangkan berbagai indikator yang mencerminkan kekurangan dalam akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup, seperti malnutrisi, angka kematian anak, akses ke sanitasi yang layak, air bersih, listrik, pendidikan, dan aset rumah tangga.

IKM memungkinkan identifikasi yang lebih tepat dari berbagai bentuk kemiskinan dan memberikan informasi yang lebih rinci tentang kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Dengan mengukur kemiskinan dalam berbagai dimensi, IKM membantu pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi kemiskinan. Penggunaan IKM juga membantu dalam memantau kemajuan pembangunan inklusif dan memastikan bahwa semua dimensi kesejahteraan manusia diperhatikan.

BAB 9 KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN

A. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengarahkan perekonomian menuju tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal mencakup penggunaan instrumen seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan utang untuk mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, misalnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan logistik.

Selain itu, kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem pajak yang progresif dan program transfer dana kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Melalui kebijakan pajak yang adil, pemerintah dapat memastikan bahwa beban pajak lebih banyak ditanggung oleh mereka yang mampu, sementara pendapatan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan fiskal juga memungkinkan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian selama masa-masa ketidakpastian atau krisis, misalnya dengan memberikan stimulus fiskal untuk meningkatkan permintaan domestik. Dengan demikian, kebijakan fiskal bukan hanya alat untuk mengelola perekonomian, tetapi juga instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

1. Pengertian dan Tujuan

Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan perpajakan dan pengeluaran oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan ini memainkan peran krusial dalam pengelolaan ekonomi dengan mempengaruhi permintaan agregat, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Efektivitas kebijakan fiskal bergantung pada berbagai faktor seperti desain aturan fiskal, struktur pengeluaran pemerintah, dan dampak intervensi fiskal terhadap keberlanjutan ekonomi.

Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Pendapatan negara terutama diperoleh dari pajak, sementara pengeluaran negara meliputi belanja pemerintah untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi (Musgrave, 2012; Ulbrich, 2013).

Penelitian oleh Diallo et al., (2007) memberikan wawasan tentang pengeluaran pemerintah dan belanja modal di Aljazair, yang menyoroti pentingnya memahami kebijakan fiskal dalam konteks investasi modal. Hal ini menegaskan signifikansi kebijakan fiskal dalam membentuk pembangunan ekonomi melalui keputusan pengeluaran yang strategis. Mengistu, (2021) menekankan peran kebijakan fiskal dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di Ethiopia. Studi ini menyarankan bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada perumusan kebijakan pengeluaran dan perpajakan yang memprioritaskan investasi produktif sambil meminimalkan pengeluaran yang tidak produktif. Ini menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan fiskal dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Stähler & Thomas, (2012) mengembangkan model dinamis keseimbangan umum stokastik (DSGE) untuk simulasi kebijakan fiskal, yang menunjukkan kompleksitas dalam menganalisis dampak langkah-langkah fiskal terhadap perekonomian. Pendekatan pemodelan yang canggih ini menegaskan perlunya analisis yang ketat dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan fiskal. Selain itu, (Bjørnland & Thorsrud, 2018) membahas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kaya sumber daya alam dalam merancang kebijakan fiskal yang bersifat

countercyclical untuk melindungi perekonomian dari fluktuasi harga komoditas. Ini menekankan pentingnya mengadopsi kerangka kerja fiskal yang tepat untuk memastikan stabilitas ekonomi dalam lingkungan yang bergejolak.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal adalah alat yang kuat bagi pemerintah untuk mengelola kondisi ekonomi, mempromosikan pertumbuhan, dan memastikan keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan wawasan dari penelitian tentang aturan fiskal, pengganda pengeluaran pemerintah, dan dampak intervensi fiskal terhadap kinerja ekonomi, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat untuk mencapai hasil ekonomi yang diinginkan.

Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan mengenakan pajak progresif dan menyediakan layanan publik yang berkualitas, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan siklus ekonomi, di mana pada saat perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan agregat, dan sebaliknya, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak saat ekonomi mengalami overheating untuk mencegah inflasi (Keynes, 2018).

2. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan belanja pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, seperti pajak penghasilan, dikenakan langsung pada pendapatan individu atau perusahaan. Pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat (Stiglitz, 1990; Stiglitz, Joseph. E; Rosengard, 2015).

Belanja pemerintah mencakup berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai operasional negara dan menyediakan layanan publik. Belanja ini dapat dibagi menjadi belanja konsumsi dan belanja investasi. Belanja konsumsi meliputi pengeluaran untuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran rutin lainnya, sedangkan belanja investasi meliputi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan

investasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang (Tanzi, 2003; Tresch, 2022).

Selain itu, pemerintah dapat menggunakan defisit anggaran sebagai instrumen kebijakan fiskal. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Pemerintah dapat membiayai defisit ini melalui pinjaman domestik atau internasional. Kebijakan defisit anggaran sering digunakan untuk merangsang perekonomian selama masa resesi (Blanchard & Sheen, 2013).

3. Peran Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pertama, melalui belanja pemerintah, kebijakan fiskal dapat meningkatkan investasi publik dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta menarik investasi swasta (Easterly & Rebelo, 1993).

Kedua, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi (Becker, 1993).

Ketiga, kebijakan fiskal dapat membantu menstabilkan perekonomian. Dengan mengatur tingkat pengeluaran dan penerimaan, pemerintah dapat mengelola permintaan agregat dan mencegah fluktuasi ekonomi yang ekstrem. Misalnya, selama masa resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang perekonomian, sedangkan selama masa booming, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mencegah inflasi (Keynes, 2018).

Keempat, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan menerapkan sistem pajak yang progresif dan menyediakan layanan sosial, seperti bantuan tunai dan subsidi, pemerintah dapat membantu mendistribusikan kekayaan lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Stiglitz, 2012).

B. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian. Kebijakan ini berperan penting dalam mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, dan operasi pasar terbuka, bank sentral dapat menstabilkan perekonomian dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga. Misalnya, dengan menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mendorong investasi dan konsumsi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam situasi di mana inflasi terlalu tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga dengan memperlambat laju kredit dan pengeluaran.

Selain itu, kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan. Selama krisis ekonomi, kebijakan moneter yang ekspansif dapat digunakan untuk mendukung likuiditas dan mencegah kebangkrutan lembaga keuangan yang dapat berdampak sistemik. Penggunaan kebijakan moneter yang tepat waktu dan terukur membantu meminimalkan risiko resesi dan menjaga tingkat pengangguran tetap rendah. Dalam konteks global, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter adalah instrumen yang esensial dalam manajemen ekonomi makro yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Pengertian dan Tujuan

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Blanchard et al., 2010; Mishkin & Serletis, 2016).

Kebijakan moneter mengacu pada proses di mana bank sentral atau otoritas moneter mengelola pasokan uang, suku bunga, dan kredit dalam suatu perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saluran transmisi kebijakan moneter

memainkan peran penting dalam bagaimana keputusan kebijakan moneter mempengaruhi berbagai variabel ekonomi, khususnya inflasi (Lawrence, 2023). Praktik komunikasi bank sentral dan transparansi merupakan komponen penting dari kerangka kerja kebijakan moneter, yang memengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut dipahami dan diimplementasikan (Geraats, 2009, 2014). Selain itu, independensi bank sentral sangat penting untuk keberhasilan perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter (A. Khan, 2018).

Efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kredibilitas bank sentral, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta mekanisme di mana guncangan risiko gagal bayar dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi (Jordan et al., 2010; Marques & Correia, 2017). Memahami dinamika inflasi dan desain kebijakan moneter yang optimal sangat penting bagi bank sentral dalam mencapai tujuan mereka (Moessner, 2005).

Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter adalah alat yang kompleks dan multifaset yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Kebijakan ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari penyesuaian suku bunga yang konvensional hingga langkah-langkah tidak konvensional, semuanya bertujuan untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mencapai tingkat pengangguran yang rendah dan stabilitas nilai tukar. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya mendorong investasi dan konsumsi. Dengan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, kebijakan moneter membantu mempertahankan daya beli masyarakat (Blanchard & Sheen, 2013).

2. Instrumen Kebijakan Moneter

Bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan moneter, antara lain:

- a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operations, OMO): Ini adalah instrumen utama kebijakan moneter di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Dengan membeli surat

berharga, bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan dengan menjualnya, bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar.

- b. Suku Bunga Acuan (Interest Rate Policy): Bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga lainnya di pasar. Perubahan dalam suku bunga acuan akan mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan, yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi dan investasi. Penurunan suku bunga cenderung meningkatkan pinjaman dan pengeluaran, sementara kenaikan suku bunga cenderung mengurangi pinjaman dan pengeluaran.
- c. Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirements): Bank sentral menentukan persentase tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral. Dengan menaikkan cadangan wajib, bank sentral mengurangi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial, dan sebaliknya .
- d. Fasilitas Diskonto (Discount Window): Bank sentral menyediakan fasilitas pinjaman bagi bank komersial dengan suku bunga tertentu. Ini digunakan untuk mengatasi masalah likuiditas jangka pendek di bank komersial dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

3. Peran Kebijakan Moneter dalam Pembangunan

Kebijakan moneter memiliki peran yang krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi. Pertama, dengan mengendalikan inflasi, kebijakan moneter menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil yang mendorong investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, kebijakan moneter yang efektif dapat mengurangi volatilitas siklus bisnis dan memperkuat stabilitas ekonomi. Dengan menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka, bank sentral dapat merespons berbagai guncangan ekonomi dan menjaga kestabilan makroekonomi.

Ketiga, kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama krisis keuangan, bank sentral dapat menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk mencegah kebangkrutan bank dan menjaga fungsi normal sistem keuangan. Misalnya, selama krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral di seluruh dunia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk menstabilkan

pasar keuangan dan memulihkan kepercayaan. Keempat, kebijakan moneter dapat mendukung pembangunan melalui pengelolaan nilai tukar. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengelola nilai tukar dan menjaga stabilitas eksternal. Nilai tukar yang stabil penting untuk perdagangan internasional dan investasi asing, yang merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi.

C. KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kebijakan perdagangan adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi aliran barang dan jasa antar negara. Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, seperti tarif, kuota, subsidi, dan perjanjian perdagangan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan perdagangan adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspor dan impor, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses ke pasar internasional, dan memperluas pilihan bagi konsumen domestik.

Selain itu, kebijakan perdagangan juga dirancang untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak adil dari luar negeri. Melalui penerapan tarif impor yang tinggi atau pemberian subsidi kepada industri tertentu, pemerintah dapat membantu perusahaan domestik bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kebijakan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Namun, kebijakan perdagangan juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks globalisasi dan perjanjian perdagangan multilateral. Ketika kebijakan proteksionis diterapkan secara berlebihan, hal ini dapat memicu perang dagang dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus dirancang dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi industri domestik dan pentingnya menjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara lain.

Dalam era ekonomi global yang semakin terintegrasi, kebijakan perdagangan juga memainkan peran penting dalam mendukung inovasi dan transfer teknologi, yang dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar

global. Dengan demikian, kebijakan perdagangan yang efektif tidak hanya berfokus pada regulasi perdagangan, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan kompetitif industri domestik.

1. Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional merujuk pada kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dagang dengan negara lain. Kebijakan ini mencakup perjanjian perdagangan, tarif, kuota, dan regulasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi atau menghambat perdagangan internasional. Tujuan utama dari kebijakan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan impor, serta untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri (Acharyya, 2023; Krugman et al., 2018).

Perjanjian perdagangan internasional, seperti perjanjian bilateral dan multilateral, memainkan peran penting dalam kebijakan perdagangan internasional. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, serta untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diprediksi bagi pelaku bisnis. Contoh perjanjian perdagangan internasional termasuk Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Bhagwati, 2014, 2004; Cammett & Bhagwati, 2005).

2. Tarif dan non-tarif

Tarif dan non-tarif adalah dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan perdagangan internasional. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor. Tarif dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dengan membuat barang impor lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan barang produksi dalam negeri. Selain itu, tarif juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah (Irwin, 2020; Maneschi & Irwin, 2003).

Non-tarif mencakup berbagai hambatan perdagangan yang tidak berbentuk tarif, seperti kuota, lisensi impor, regulasi teknis, standar kesehatan dan keselamatan, serta prosedur bea cukai yang kompleks. Kuota adalah batasan jumlah barang yang dapat diimpor atau diekspor selama periode tertentu. Lisensi impor adalah izin yang harus diperoleh oleh importir sebelum mereka dapat membawa barang masuk ke dalam negeri (Katrak & Baldwin, 1972; Oppenheimer & Baldwin, 1972).

Regulasi teknis dan standar kesehatan dan keselamatan sering digunakan untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar tertentu. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan, regulasi ini juga dapat berfungsi sebagai hambatan perdagangan yang signifikan (Mann et al., 2004; Wilson et al., 2005).

3. Peran Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi

Peran perdagangan dalam pembangunan ekonomi sangatlah krusial, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Hubungan antara perdagangan dan pertumbuhan ekonomi telah dieksplorasi secara luas. Keterbukaan perdagangan secara konsisten dikaitkan dengan hasil ekonomi positif di banyak negara. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun panjang (Keho, 2017). Selain itu, dampak keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti signifikan di negara-negara pasar berkembang (Raghutla, 2020). Negara seperti Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat peningkatan aktivitas perdagangan (Abendin & Duan, 2021; Ifa & Yahdi, 2020).

Lebih lanjut, efek positif perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi telah diamati di berbagai wilayah, seperti Afrika (Abendin & Duan, 2021), Asia (Tahir & Khan, 2014), dan negara-negara tertentu seperti Malaysia (Makun, 2017), Botswana (Malefane, 2020), dan Nepal (Neupane, 2023). Penelitian-penelitian ini menyoroti bahwa keterbukaan perdagangan mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi dan kemakmuran. Selain itu, peran perdagangan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi juga ditekankan dalam konteks negara-negara tertentu seperti Pakistan (Suleman et al., 2019), Afghanistan (Hemat, 2023), dan India (SenGupta, 2020).

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas institusi bersama dengan keterbukaan perdagangan saat menilai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa baik keterbukaan perdagangan maupun kualitas institusi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Duodu & Baidoo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan institusional yang kondusif sangat

penting untuk memaksimalkan manfaat perdagangan terhadap pembangunan ekonomi.

Perdagangan internasional juga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dengan membuka pasar internasional, negara-negara berkembang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perdagangan dapat meningkatkan standar hidup dan mengurangi ketidaksetaraan (Dollar & Kraay, 2004).

Namun, perdagangan internasional juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan pendapatan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan didistribusikan secara merata dan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan (Persson, 2005; Yueh, 2019).

Sebagai kesimpulan, literatur mendukung gagasan bahwa perdagangan adalah pendorong fundamental pembangunan ekonomi. Negara-negara yang menerima keterbukaan perdagangan cenderung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang lebih tinggi. Namun, kualitas institusi dan faktor lainnya juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana perdagangan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

D. KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan investasi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi, karena melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini dirancang untuk menarik modal, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang strategis, seperti manufaktur, infrastruktur, dan teknologi informasi. Dengan menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas basis ekonomi negara.

Kebijakan investasi mencakup berbagai langkah, seperti pemberian insentif pajak, penyederhanaan regulasi, perlindungan terhadap hak-hak investor, dan peningkatan infrastruktur. Insentif pajak, misalnya, dapat

mengurangi beban biaya bagi perusahaan yang ingin berinvestasi, sementara penyederhanaan regulasi membantu mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menghambat aliran investasi. Perlindungan terhadap hak-hak investor juga penting untuk memastikan bahwa investasi terlindungi dari risiko politik atau hukum, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat aliran modal masuk.

Selain itu, kebijakan investasi juga berperan dalam mendorong alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing industri domestik di pasar global. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendiversifikasi ekonomi. Dengan demikian, kebijakan investasi tidak hanya berfokus pada peningkatan aliran modal, tetapi juga pada penciptaan dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian.

Namun, untuk mencapai keberhasilan yang optimal, kebijakan investasi harus diiringi dengan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta membangun infrastruktur yang memadai. Stabilitas ini penting untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa investasi mereka aman dan memiliki potensi untuk tumbuh. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan investasi dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

1. Iklim Investasi

Iklim investasi merujuk pada kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi oleh pelaku usaha. Iklim investasi yang baik adalah kondisi di mana investor merasa aman dan yakin untuk menanamkan modal mereka di suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi antara lain kualitas institusi, stabilitas ekonomi, dan kerangka regulasi (Degourmond, 2020). Evaluasi terhadap iklim investasi melibatkan analisis komponen individu serta indeks komposit untuk memahami pengaruh keseluruhannya terhadap pembangunan ekonomi (Degourmond, 2020). Lembaga nasional dan organisasi internasional sering menggunakan metode sistematis untuk mengevaluasi iklim investasi dengan tujuan meningkatkan lingkungan institusional dan menarik investasi asing (Вакулич, 2014).

Stabilitas politik dan ekonomi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Negara yang sering mengalami pergolakan politik atau ketidakstabilan ekonomi cenderung kurang menarik bagi investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan prediktabel. Iklim bisnis dan investasi yang efektif dapat meningkatkan investasi, profitabilitas, dan produktivitas dengan menciptakan lingkungan di mana barang-barang publik berkualitas tinggi disediakan (Giovanis & Ozdamar, 2022).

Regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Investor membutuhkan kepastian hukum untuk mengurangi risiko investasi mereka. Regulasi yang berubah-ubah atau tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat aliran investasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi investasi diterapkan secara transparan dan adil (Djankov et al., 2002). Meningkatkan iklim investasi memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor seperti daya tarik, stabilitas politik, dan frekuensi penilaian untuk mengembangkan basis data yang mendukung pengambilan keputusan (Kuznetsova & Вакулич, 2016).

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi, juga merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan daya saing investasi di negara tersebut. Investasi dalam infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi. Mengenali dampak perubahan iklim terhadap investasi semakin penting, menyoroti kebutuhan untuk secara teratur mengukur dan mengkuantifikasi dampak iklim pada investasi (Schmiemann et al., 2021).

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, reformasi pasar tenaga kerja yang meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja juga penting untuk menarik investasi. Investor dapat memanfaatkan analitik prediktif dan mengintegrasikan data iklim dengan indikator sosio-

ekonomi untuk menilai risiko dan peluang, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang terinformasi (Ofodile, 2024).

Sebagai kesimpulan, iklim investasi adalah konsep multifaset yang mempengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengevaluasi dan meningkatkan faktor-faktor seperti kualitas institusi, kerangka regulasi, dan risiko iklim, para pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

2. Kebijakan untuk Meningkatkan Investasi

Untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor. Salah satu kebijakan utama adalah memberikan insentif fiskal, seperti keringanan pajak, kredit pajak, dan pembebasan bea masuk. Insentif ini dapat mengurangi biaya investasi dan meningkatkan keuntungan yang diharapkan, sehingga menarik lebih banyak investasi. Ren et al., (2023) menyarankan bahwa kebijakan keterbukaan dan regulasi lingkungan dapat mempromosikan investasi R&D, keunggulan komparatif regional, dan investasi asing.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan perizinan dan pengurangan birokrasi. Proses perizinan yang cepat dan transparan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai investasi. Reformasi birokrasi yang mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Ibarra-Armenta, (2018) mengkategorikan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi swasta menjadi strategi berbasis insentif yang lembut dan strategi peningkatan daya saing yang keras, tergantung pada jenis keunggulan kompetitif yang dikembangkan.

Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dengan membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai. Investasi dalam infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, sehingga menarik lebih banyak investasi. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Buntaine & Pizer, (2014) menyoroti bahwa institusi demokratis dapat

meningkatkan investasi swasta dengan mengurangi risiko ekspropriasi dan mencegah perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

Kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap keuangan juga penting untuk mendorong investasi. Pemerintah dapat memfasilitasi akses terhadap kredit dengan memperbaiki sistem perbankan dan pasar modal, serta memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Akses yang lebih baik terhadap keuangan dapat membantu investor memperoleh modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Ezeibekwe, (2020) menemukan bahwa kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan pinjaman perusahaan dan mendorong investasi korporat.

Selain itu, pemerintah dapat mendorong investasi dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang ramah. Kebijakan moneter dan fiskal yang prudent, serta upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong aliran investasi. Anwar, (2023) menekankan bahwa kebijakan investasi yang diatur langsung oleh pemerintah dapat secara efektif mendukung investor potensial dan yang sudah ada, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam hal ketidakpastian kebijakan ekonomi, Wen et al., (2022) menyebutkan bahwa bisnis yang menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan mengharapkan intervensi pemerintah untuk memperbaiki lingkungan investasi, mendukung pengembangan perusahaan. Selain itu, Julio & Yook, (2009) menemukan bahwa selama tahun pemilihan, perusahaan cenderung mengurangi pengeluaran investasi, yang menunjukkan dampak ketidakpastian politik terhadap siklus investasi korporat. Dengan demikian, kebijakan yang tepat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Dampak Investasi terhadap Pembangunan

Investasi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan konsumsi

masyarakat. Selain itu, peningkatan investasi juga dapat mendorong inovasi dan transfer teknologi, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Solow, 1956).

Investasi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam sektor-sektor produktif menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Pentingnya investasi dalam meningkatkan infrastruktur juga tidak bisa diabaikan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang baik juga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI) memiliki dampak positif khusus terhadap pembangunan ekonomi. FDI tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, keterampilan manajerial, dan akses ke pasar internasional. Melalui FDI, perusahaan domestik dapat belajar dari perusahaan asing dan meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu, FDI juga mendorong integrasi ekonomi global dan diversifikasi ekonomi (Borensztein et al., 1998).

Namun, investasi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, investasi yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan investasi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Kramer & Porter, 2011).

Penelitian telah menunjukkan bahwa berbagai bentuk investasi, seperti investasi berdampak, investasi asing langsung (FDI), dan investasi infrastruktur, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Akbar et al., 2021; Apurv & Uzma, 2020; Azman et al., 2019). Misalnya, investasi berdampak telah diidentifikasi sebagai sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan membiayai organisasi sektor sosial (S. Islam, 2021). Demikian pula, FDI terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi di negara-negara berkembang (Azman et al., 2019). Selain itu, aliran masuk FDI greenfield telah dikaitkan dengan pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara berkembang (Akbar et al., 2021).

Investasi infrastruktur juga diakui sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional (Apurv & Uzma, 2020; Karpenko et al., 2021). Peningkatan kualitas infrastruktur melalui investasi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perdagangan, terutama di negara-negara berkembang (Do, 2023). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa investasi di bidang pertanian dan energi bersih juga dapat memberikan efek positif pada pembangunan ekonomi (Lin et al., 2022; Zhuang & Pan, 2022).

Pentingnya investasi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan juga ditekankan dalam berbagai studi (Zukauskienė & Snieska, 2023). Investasi berdampak dan integral telah diidentifikasi sebagai alat potensial untuk mengatasi tantangan masyarakat saat ini dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Kubátová & Kročil, 2020). Investasi transformatif juga diakui sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB dan meningkatkan standar hidup (Dvoryadkina et al., 2020).

Secara keseluruhan, investasi dalam berbagai bentuknya memainkan peran kritis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang. Baik melalui investasi berdampak, FDI, pengembangan infrastruktur, atau investasi dalam teknologi hijau, bukti menunjukkan bahwa investasi strategis sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. KEBIJAKAN SOSIAL

Kebijakan sosial merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan, seperti kaum miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui kebijakan sosial, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki

akses yang adil dan setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup.

Salah satu aspek penting dari kebijakan sosial adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Program-program pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi memungkinkan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat.

Selain pendidikan, kebijakan sosial juga fokus pada peningkatan layanan kesehatan. Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang berkualitas membantu mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan harapan hidup, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Program-program kesehatan yang efektif juga berperan dalam mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh keluarga, terutama dalam situasi krisis kesehatan.

Kebijakan sosial juga mencakup inisiatif untuk membangun kapasitas desa dan komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program pelatihan, dukungan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur dasar memungkinkan desa-desa untuk menjadi lebih mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan sosial tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan langsung, tetapi juga pada pembangunan kapasitas jangka panjang yang dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui penerapan kebijakan sosial yang komprehensif dan inklusif, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan yang holistik.

1. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan dan kemiskinan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program perlindungan sosial mencakup bantuan tunai, jaminan sosial, asuransi kesehatan, serta program-program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan (Barrientos & Hulme, 2016).

Di Indonesia, salah satu contoh program perlindungan sosial yang signifikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Program ini mensyaratkan penerima bantuan untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan dasar. PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selain PKH, ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan berupa kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di toko-toko yang telah ditentukan. BPNT bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Perlindungan sosial juga mencakup jaminan sosial bagi pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Indonesia menyediakan berbagai manfaat, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja dan keluarga mereka dalam menghadapi berbagai risiko.

Program perlindungan sosial yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk dalam hal cakupan, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperluas program-program perlindungan sosial (Barrientos, 2011).

2. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam kebijakan sosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Becker, 1993). Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Nasional.

Salah satu inisiatif utama dalam sektor pendidikan di Indonesia adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga miskin untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Dengan adanya PIP, pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Program ini sangat penting mengingat masih tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah terpencil di Indonesia.

Selain PIP, Indonesia juga memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP memberikan bantuan tunai kepada siswa untuk keperluan pendidikan, seperti membeli buku, seragam, dan alat tulis. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin dan mendorong partisipasi sekolah. Dengan adanya KIP, banyak siswa yang sebelumnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan kini dapat melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir tentang biaya.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan juga didukung oleh kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing global Indonesia, terutama dalam pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) (Syarif, 2023). Melalui Merdeka Belajar, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan potensi individu. Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan Nasional.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. JKN merupakan program asuransi kesehatan nasional yang memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia. Program ini bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Melalui JKN, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Selain JKN, Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan bagian penting dari kebijakan kesehatan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan

meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan menyediakan akses terhadap layanan kontrasepsi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Program KB telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pembangunan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sementara kesehatan yang baik dapat meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Menurut (Todaro & Smith, 2020), kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan.

Di Indonesia, investasi dalam kedua sektor ini telah menunjukkan beberapa hasil positif. Misalnya, peningkatan akses pendidikan melalui PIP dan KIP telah membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa. Di sisi lain, program JKN telah memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai daerah. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Implementasi kebijakan seringkali terbentur oleh hambatan hukum dan sistemik yang menghalangi pencapaian kesetaraan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, keragaman linguistik di Indonesia juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan kebijakan pendidikan.

Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam kebijakan sosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Program-program seperti PIP, KIP, JKN, dan KB menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan kesehatan dapat benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Nasional.

3. Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Indonesia, pembangunan desa telah menjadi fokus utama pemerintah melalui berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup di desa-desa.

Salah satu program utama dalam pembangunan desa di Indonesia adalah Dana Desa. Program ini memberikan alokasi dana langsung kepada desa-desa untuk digunakan dalam berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan publik. Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan regional.

Selain Dana Desa, pemerintah juga meluncurkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. P3MD menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat desa dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Program lain yang mendukung pembangunan desa adalah Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di daerah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan produktivitas ekonomi di desa (BAPPENAS, 2014).

Kebijakan pembangunan desa juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan akses pembiayaan bagi UMKM di pedesaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka. Pemberdayaan ekonomi desa ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di pedesaan (Guampe, 2021).

Contoh keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Desa ini berhasil memanfaatkan Dana

Desa untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat melalui pengelolaan sumber air alami dan fasilitas wisata. Pendapatan dari sektor pariwisata ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa tersebut.

Kebijakan pembangunan desa merupakan suatu upaya yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Berbagai penelitian menyoroti aspek-aspek krusial terkait kebijakan pembangunan desa. Salah satunya adalah pentingnya instrumen kebijakan yang komprehensif untuk pemberdayaan masyarakat, penciptaan ekonomi produktif, dan penanaman nilai inklusivitas dalam pembangunan desa (Herdiana, 2022). Selain itu, kebijakan pembangunan desa juga harus memperhatikan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat mandiri dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional (Wahidah, 2023).

Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa juga menjadi fokus penting, terutama dalam konteks mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) (Yunas, 2024). Dalam hal ini, BUMDes memegang peran vital dalam mendukung pembangunan desa dengan memanfaatkan berbagai fasilitas digital untuk meningkatkan kemandirian desa (Ridwansyah et al., 2021). Selain itu, peran aparatur gampong atau pemerintahan desa sangat penting dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal di tingkat desa (Nazaruddin, 2023). Diperlukan juga perencanaan strategis yang baik dalam pengembangan potensi ekonomi lokal untuk memandu kegiatan pembangunan desa (Jaya et al., 2021).

Selain itu, keberadaan kebijakan otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan (Sumarsono et al., 2022). Dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan desa, penting untuk memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menerapkan model implementasi kebijakan yang efektif dalam bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat (Sumarsono et al., 2022). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, seperti melalui musyawarah desa, juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Sudianing &

Ardana, 2022). Dengan demikian, kebijakan pembangunan desa haruslah holistik, melibatkan berbagai aspek seperti pemberdayaan masyarakat, inklusi sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

BAB 10 SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN

A. SUMBER PEMBIAYAAN DOMESTIK

Pembiayaan pembangunan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Tanpa adanya pembiayaan yang memadai, proyek-proyek pembangunan yang esensial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Sumber pembiayaan domestik, yang mencakup pajak, pinjaman domestik, dan investasi swasta, memainkan peran penting dalam mendukung berbagai proyek pembangunan ini. Pajak yang dikelola secara efektif dapat menyediakan pendapatan yang stabil bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, investasi dalam sektor pendidikan melalui pembiayaan domestik memungkinkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi suatu negara. Di sisi lain, pembiayaan yang memadai untuk sektor kesehatan memungkinkan penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja.

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa pembiayaan domestik sering kali memiliki keterbatasan, terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, sinergi antara sumber pembiayaan domestik dan pembiayaan internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi. Melalui kombinasi yang efektif dari sumber-sumber pembiayaan ini, negara dapat lebih berhasil dalam mencapai tujuan-

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi adalah sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang tidak mendapatkan imbalan langsung, sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat (A. Musgrave, 2012).

Pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan, dikenakan langsung kepada individu atau entitas berdasarkan pendapatan atau kekayaan mereka. Pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea cukai, dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Pajak langsung biasanya lebih progresif karena tingkatannya meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, sementara pajak tidak langsung cenderung bersifat regresif (Stiglitz, 1990).

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari berbagai sumber, termasuk pajak penghasilan, PPN, dan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Retribusi, di sisi lain, adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau fasilitas yang disediakan kepada masyarakat. Contohnya termasuk retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan mereka dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.

Meskipun pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang penting, tantangan tetap ada dalam hal kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan sistem administrasi pajak dan retribusi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya

membayar pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Bird & Zolt, 2008).

2. Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah adalah salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai proyek-proyek pembangunan yang besar. Pinjaman ini dapat berasal dari sumber domestik maupun internasional. Pinjaman domestik biasanya dilakukan melalui penerbitan obligasi pemerintah, sementara pinjaman internasional dapat berasal dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan donor bilateral.

Di Indonesia, pemerintah secara rutin menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendapatkan dana dari pasar domestik. SBN ini termasuk Obligasi Negara, Sukuk Negara, dan Surat Utang Negara. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penerbitan SBN juga membantu mengembangkan pasar keuangan domestik.

Pinjaman internasional juga memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) sering kali memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek-proyek infrastruktur dan program-program sosial. Misalnya, pinjaman dari Bank Dunia telah digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil.

Namun, penggunaan pinjaman pemerintah harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari masalah utang yang berlebihan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pinjaman digunakan secara efektif dan efisien, serta bahwa proyek yang dibiayai memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana pinjaman untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan (Reinhart & Rogoff, 2010).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman pemerintah juga sangat penting. Pemerintah perlu melaporkan penggunaan dana pinjaman secara jelas dan terperinci, serta memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi tersebut. Ini akan

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pasar keuangan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

3. Tabungan Masyarakat dan Investasi

Tabungan masyarakat dan investasi domestik adalah sumber pembiayaan yang penting bagi pembangunan ekonomi. Tabungan masyarakat, yang mencakup simpanan di bank dan instrumen keuangan lainnya, dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk pembiayaan investasi. Pemerintah dapat memobilisasi tabungan ini melalui sistem perbankan dan pasar keuangan (Beck et al., 2007).

Di Indonesia, menurut Laporan Bank Indonesia tahun 2019 tingkat tabungan masyarakat telah meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Tabungan masyarakat di bank-bank komersial digunakan oleh bank untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor produktif, seperti industri, pertanian, dan jasa. Kredit ini membantu memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain tabungan, investasi domestik oleh sektor swasta juga memainkan peran kunci dalam pembiayaan pembangunan. Investasi ini mencakup investasi langsung dalam bentuk pabrik, peralatan, dan infrastruktur, serta investasi portofolio dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi domestik meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja baru (Rodrik & Subramanian, 2009).

Pemerintah dapat mendorong tabungan dan investasi melalui kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi dan iklim investasi yang kondusif. Ini termasuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, memastikan nilai tukar yang stabil, serta memberikan insentif fiskal bagi investasi. Kebijakan yang mendukung pengembangan pasar keuangan, seperti reformasi perbankan dan pasar modal, juga penting untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan.

Salah satu contoh sukses di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur oleh sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam membiayai dan mengelola proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Skema KPBU

telah membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan.

B. SUMBER PEMBIAYAAN INTERNASIONAL

Sumber pembiayaan internasional adalah elemen penting dalam strategi pembangunan ekonomi banyak negara, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan modal tambahan untuk mencapai tujuan pembangunan mereka. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengumpulkan dana dari sumber domestik, sehingga mereka bergantung pada sumber pembiayaan internasional untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya. Sumber pembiayaan ini mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan luar negeri, pinjaman dari lembaga internasional, dan investasi asing langsung (FDI).

Bantuan luar negeri, yang sering kali diberikan oleh negara-negara maju atau melalui organisasi internasional, memainkan peran penting dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Bantuan ini dapat berupa hibah atau pinjaman dengan suku bunga rendah, yang dirancang untuk membantu negara penerima meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai sektor.

Pinjaman dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), juga merupakan sumber pembiayaan penting. Pinjaman ini sering kali disertai dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk mendorong reformasi ekonomi dan kebijakan yang berkelanjutan. Meski demikian, negara-negara penerima harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri yang dapat menyebabkan masalah keuangan di masa depan.

Investasi asing langsung (FDI) adalah sumber pembiayaan lain yang vital, di mana investor internasional menanamkan modal di negara tertentu untuk membangun pabrik, menjalankan bisnis, atau mengembangkan proyek infrastruktur. FDI tidak hanya membawa modal tetapi juga transfer teknologi, keahlian, dan menciptakan lapangan kerja di negara tuan rumah. Hal ini dapat membantu negara berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

Namun, ketergantungan pada sumber pembiayaan internasional juga membawa tantangan, seperti potensi ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi pasar global dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan atau pinjaman. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara penerima untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan internasional ini dengan bijak, mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pembiayaan internasional dapat menjadi katalisator yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah dana yang diberikan oleh negara atau organisasi internasional kepada negara lain untuk mendukung program pembangunan ekonomi dan sosial. Bantuan ini dapat berupa hibah, pinjaman lunak, atau bantuan teknis. Tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat kapasitas institusi di negara penerima (Lancaster, 2007).

Di Indonesia, bantuan luar negeri telah memainkan peran penting dalam berbagai program pembangunan. Misalnya, hibah dari negara donor seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, Proyek Infrastruktur Hijau yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan melalui pembangunan infrastruktur hijau (JICA, 2018).

Selain itu, bantuan teknis dari lembaga-lembaga seperti United Nations Development Programme (UNDP) membantu meningkatkan kapasitas pemerintah dan institusi lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Bantuan ini sering kali melibatkan transfer pengetahuan dan teknologi, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan (UNDP, 2019).

Namun, bantuan luar negeri tidak selalu bebas dari kritik. Beberapa argumen menyatakan bahwa ketergantungan pada bantuan luar negeri dapat mengurangi insentif bagi negara penerima untuk meningkatkan pendapatan domestik dan mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik. Selain itu, bantuan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah korupsi dan salah urus dana (Moyo, 2009).

Untuk memaksimalkan manfaat bantuan luar negeri, penting bagi negara penerima untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Transparansi dalam penggunaan dana bantuan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dapat membantu memastikan bahwa bantuan digunakan secara efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan (Easterly, 2006).

2. Pinjaman dari Lembaga Internasional

Pinjaman dari lembaga internasional adalah sumber penting pembiayaan pembangunan bagi banyak negara berkembang. Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB) menyediakan pinjaman dengan syarat yang lebih lunak dibandingkan dengan pinjaman komersial. Pinjaman ini sering kali digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar, reformasi ekonomi, dan program sosial (Todaro & Smith, 2020).

Bank Dunia, misalnya, memberikan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem air bersih di Indonesia. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan akses ke layanan dasar.

IMF, di sisi lain, sering memberikan pinjaman untuk stabilisasi makroekonomi dan reformasi struktural. Misalnya, pada masa krisis ekonomi, IMF memberikan bantuan keuangan untuk membantu negara-negara mengatasi defisit anggaran dan krisis neraca pembayaran. Syarat-syarat pinjaman IMF sering mencakup kebijakan penyesuaian struktural yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter negara penerima.

ADB juga memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Melalui pinjaman yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan, ADB mendukung berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan meningkatkan daya saing ekonomi. Contoh proyek ADB di Indonesia adalah proyek pengembangan transportasi perkotaan yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas di kota-kota besar (Canton, 2021).

Namun, pinjaman dari lembaga internasional juga membawa risiko, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Ketergantungan pada pinjaman

dapat menyebabkan peningkatan beban utang dan masalah keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, penting bagi negara penerima untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan secara efisien dan proyek yang didanai memberikan manfaat ekonomi yang signifikan (Reinhart & Rogoff, 2010).

3. Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi Asing Langsung (FDI) adalah modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing di negara lain untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan, pabrik, atau aset lainnya. FDI berbeda dengan investasi portofolio karena melibatkan kontrol langsung atas perusahaan atau aset yang diinvestasikan. FDI dianggap sebagai sumber pembiayaan yang sangat penting karena dapat membawa teknologi, keterampilan manajerial, dan akses pasar internasional ke negara penerima (Verbeke, 2008).

Indonesia telah menjadi salah satu tujuan utama FDI di Asia Tenggara. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertambangan, dan jasa telah menarik investasi asing yang signifikan. Contohnya, investasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan Unilever telah membantu meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, investasi di sektor teknologi oleh perusahaan seperti Google dan Microsoft telah mendorong perkembangan industri teknologi informasi di negara ini.

FDI juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi dan peningkatan produktivitas. Perusahaan asing sering membawa teknologi canggih dan praktik bisnis yang efisien, yang dapat meningkatkan daya saing industri domestik. Selain itu, FDI dapat membantu meningkatkan standar kerja dan gaji pekerja lokal melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan (Borensztein et al., 1998).

Namun, FDI juga dapat menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan pada modal asing dan risiko eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi investasi asing dengan hati-hati, serta memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi lokal. Kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif, seperti perlindungan hukum bagi investor dan stabilitas politik, sangat penting

untuk menarik dan mempertahankan FDI (Rodrik, 1991). Contoh kebijakan yang mendukung FDI di Indonesia adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor asing. KEK ini dirancang untuk menarik investasi di sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur, logistik, dan pariwisata, dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor.

C. PEMBIAYAAN MELALUI PASAR KEUANGAN

Pasar keuangan merupakan mekanisme penting dalam perekonomian yang memungkinkan pengalihan dana dari pemilik modal kepada mereka yang membutuhkan modal untuk berbagai tujuan produktif. Pasar keuangan ini menyediakan platform di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung investasi, ekspansi, dan pengembangan proyek-proyek besar. Dengan menyediakan akses terhadap modal, pasar keuangan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembiayaan melalui pasar keuangan mencakup berbagai instrumen, seperti pasar modal dan saham, obligasi, serta instrumen utang lainnya. Pasar modal dan saham memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual kepemilikan perusahaan kepada publik melalui penawaran saham. Ini tidak hanya memberikan perusahaan modal yang dibutuhkan untuk tumbuh, tetapi juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Obligasi, di sisi lain, adalah instrumen utang yang memungkinkan pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain untuk meminjam dana dari investor dengan jaminan pembayaran kembali dengan bunga. Obligasi sering digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang lainnya.

Selain itu, peran bank dan lembaga keuangan juga sangat penting dalam pasar keuangan. Bank menyediakan pinjaman kepada individu dan bisnis, memungkinkan mereka untuk mendanai kegiatan operasional dan ekspansi. Lembaga keuangan lainnya, seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana, juga memainkan peran kunci dalam mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya ke investasi yang produktif. Dengan adanya

berbagai instrumen dan institusi ini, pasar keuangan membantu menciptakan likuiditas dan mengurangi risiko, yang memungkinkan aliran dana yang lebih efisien di seluruh perekonomian.

Namun, penting untuk diingat bahwa pasar keuangan juga dapat membawa risiko, seperti volatilitas harga aset dan potensi krisis keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan yang tepat, pasar keuangan dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Pasar Modal dan Saham

Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menjual saham atau sekuritas lainnya kepada investor. Pasar modal memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dengan menyediakan modal jangka panjang yang diperlukan untuk investasi produktif. Pasar modal yang efisien membantu mempercepat alokasi sumber daya yang optimal dalam perekonomian (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2010).

Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang memfasilitasi perdagangan saham dan sekuritas lainnya. Perusahaan yang ingin mendapatkan dana dapat melakukan penawaran umum perdana (IPO) di BEI untuk menjual saham mereka kepada publik. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal yang signifikan tanpa harus mengambil pinjaman dengan bunga tinggi (Bursa Efek Indonesia, 2019).

Selain IPO, perusahaan juga dapat melakukan rights issue, private placement, atau penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan. Investor yang membeli saham mendapatkan bagian kepemilikan di perusahaan dan berhak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham (Fabozzi, 2000).

Pasar modal yang aktif dan likuid dapat menarik investasi asing langsung (FDI) karena memberikan exit strategy yang jelas bagi investor. Selain itu, pasar modal yang berkembang dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, karena perusahaan yang terdaftar

di bursa efek diharuskan untuk memenuhi standar pelaporan yang ketat dan regulasi yang jelas (La Porta et al., 1997).

Namun, pasar modal juga menghadapi tantangan seperti volatilitas harga saham dan risiko pasar. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk mengawasi pasar dan memastikan bahwa ada mekanisme perlindungan bagi investor. Edukasi dan literasi keuangan juga penting untuk membantu investor memahami risiko dan manfaat dari investasi di pasar modal (Securities Commission Malaysia, 2017).

2. Obligasi dan Instrumen Hutang Lainnya

Obligasi dan instrumen hutang lainnya merupakan alat penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan dana tanpa harus menjual bagian kepemilikan mereka. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan janji untuk membayar bunga secara periodik dan mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo (Fabozzi & Fabozzi, 2021).

Di Indonesia, pemerintah secara rutin menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) seperti Obligasi Negara, Sukuk Negara, dan Surat Utang Negara untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Obligasi ini menarik bagi investor karena memberikan tingkat bunga yang tetap dan jaminan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Selain itu, obligasi pemerintah dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena didukung oleh kemampuan pemerintah untuk memungut pajak (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Perusahaan juga dapat menerbitkan obligasi korporasi untuk mendapatkan dana. Obligasi korporasi sering kali menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah untuk mengkompensasi risiko yang lebih besar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti ekspansi bisnis, restrukturisasi utang, atau investasi dalam proyek-proyek baru (Gokhale & Adhikari, 2023; Mondello, 2022; Vishwanath, 2007).

Selain obligasi, ada juga instrumen hutang lainnya seperti commercial paper, medium-term notes, dan sekuritisasi aset. Commercial paper adalah instrumen hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara. Medium-term notes adalah surat utang dengan jangka waktu menengah yang sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu (Fabozzi & Fabozzi, 2021).

Sekuritisasi aset adalah proses di mana aset keuangan seperti pinjaman hipotek, pinjaman mobil, atau piutang dikumpulkan dan dijual sebagai sekuritas kepada investor. Sekuritisasi memungkinkan perusahaan untuk memobilisasi likuiditas dari aset yang tidak likuid dan mendiversifikasi sumber pembiayaan mereka. Namun, sekuritisasi juga dapat meningkatkan risiko jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global 2008 (Gorton & Metrick, 2012).

3. Peran Bank dan Lembaga Keuangan

Bank dan lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk simpanan, pinjaman, dan investasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam, mengumpulkan dana dari penabung dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada individu, perusahaan, dan pemerintah (Mishkin & Serletis, 2016). Fungsi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas (Donev, 2021), terutama di negara berkembang di mana pasar modal dan lembaga keuangannya kurang berkembang, sehingga peran bank komersial menjadi semakin krusial untuk pembangunan ekonomi.

Bank dan lembaga keuangan semakin diakui atas upaya mereka dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dan konservasi lingkungan (Moon & Hasan, 2022). Dengan mengadopsi praktik keuangan hijau dan mendukung inisiatif ramah lingkungan, bank dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Moon & Hasan, 2022).

Evolusi dan inovasi dalam lembaga keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi telah menunjukkan bahwa semakin efisien dan efektif operasi lembaga keuangan, semakin signifikan peran mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Qamruzzaman, 2017). Selain itu, lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan stabilitas dan inklusivitas keuangan dalam perekonomian. Stabilitas sektor perbankan adalah dasar bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Donev, 2021). Lembaga keuangan, termasuk bank komersial, penting untuk stabilitas keuangan dengan menyediakan layanan esensial dan memastikan kelancaran fungsi sistem keuangan. Lembaga perbankan juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan inklusi keuangan dengan

memperluas akses ke layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ehigiamusoe & Samsurijan, 2020; Sharma, 2016).

Hubungan antara lembaga keuangan dan pembangunan ekonomi semakin ditekankan oleh pentingnya kualitas institusi dan stabilitas makroekonomi. Kerangka kelembagaan yang kuat dan tingkat pembangunan keuangan dan ekonomi yang lebih tinggi meningkatkan dampak perkembangan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ehigiamusoe & Samsurijan, 2020). Institusi sangat penting dalam mengatasi masalah seperti kutukan keuangan dan memastikan bahwa perkembangan sektor perbankan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Law et al., 2018).

Di Indonesia, bank komersial merupakan sumber utama pembiayaan bagi sektor swasta. Bank memberikan berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan kredit konsumsi. Pinjaman ini membantu perusahaan memperluas operasi mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan berinvestasi dalam teknologi baru. Bank juga memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) melalui program kredit mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Perusahaan asuransi, misalnya, membantu melindungi individu dan perusahaan dari risiko finansial melalui berbagai produk asuransi. Dana pensiun mengelola tabungan pensiun dan menyediakan pendapatan bagi pensiunan. Perusahaan pembiayaan menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumen seperti mobil dan peralatan rumah tangga (Fabozzi & Fabozzi, 2021; Porta et al., 1997).

Lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam pengembangan pasar modal. Mereka berfungsi sebagai penjamin emisi (underwriter) dalam penawaran umum saham dan obligasi, membantu perusahaan dalam proses penerbitan sekuritas dan menarik investor. Selain itu, lembaga keuangan seperti manajer investasi dan dana ekuitas swasta mengelola portofolio investasi atas nama klien mereka, membantu mengalokasikan modal ke proyek-proyek yang produktif (Mishkin & Serletis, 2016; Porta et al., 1997).

Regulasi dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. OJK berupaya untuk melindungi kepentingan konsumen, mencegah praktik bisnis yang tidak sehat, dan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Bank dan lembaga keuangan juga menghadapi tantangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mengatasi tantangan ini dan tetap beroperasi dengan baik. Penerapan teknologi keuangan (fintech) juga membawa peluang dan tantangan baru bagi sektor keuangan, yang memerlukan adaptasi dan inovasi terus-menerus (Mishkin & Serletis, 2016).

D. INOVASI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN

Inovasi dalam pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di era modern ini, kebutuhan akan solusi pembiayaan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan semakin mendesak. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pembiayaan hijau dan berkelanjutan, yang berfokus pada pendanaan proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek infrastruktur hijau. Pembiayaan hijau ini tidak hanya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menarik investor yang peduli terhadap lingkungan, sehingga menciptakan pasar baru yang potensial.

Teknologi finansial (FinTech) juga menjadi salah satu inovasi penting dalam pembiayaan pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, FinTech memungkinkan akses yang lebih luas dan inklusif ke layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan tradisional. FinTech dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya, dan mempercepat aliran dana, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, FinTech juga menawarkan solusi pembiayaan alternatif,

seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending, yang memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan modal tanpa harus bergantung pada pinjaman bank konvensional.

Kemitraan publik-swasta (PPP) merupakan inovasi lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan pembangunan. Melalui PPP, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Model ini memungkinkan pembagian risiko dan tanggung jawab, serta pemanfaatan keahlian dan sumber daya dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian proyek dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, inovasi dalam pembiayaan, seperti pembiayaan hijau, FinTech, dan PPP, menawarkan berbagai keuntungan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi dan mengembangkan inovasi-inovasi ini, negara-negara dapat menciptakan lingkungan pembiayaan yang lebih dinamis, responsif, dan berdaya saing tinggi, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

1. Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan

Pembiayaan hijau dan berkelanjutan mengacu pada alokasi dana untuk proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Inisiatif ini mencakup berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau, pinjaman hijau, dan investasi dalam proyek energi terbarukan serta teknologi ramah lingkungan.

Obligasi hijau, misalnya, adalah instrumen keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek yang bertujuan mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, atau melindungi sumber daya alam. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan obligasi hijau atau sukuk hijau untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Selain itu, pembiayaan hijau juga mencakup investasi dalam teknologi bersih dan efisiensi energi. Misalnya, investasi dalam pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro dapat mengurangi

ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah mendukung proyek-proyek energi terbarukan melalui berbagai insentif dan kebijakan, termasuk tarif feed-in dan subsidi untuk energi terbarukan (International Renewable Energy Agency (IRENA), 2017).

Pembiayaan hijau dan berkelanjutan juga melibatkan peran lembaga keuangan dalam menilai risiko lingkungan dan sosial dalam portofolio investasi mereka. Bank dan investor mulai mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi mereka. Ini membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang (PRI, 2018).

Namun, pembiayaan hijau dan berkelanjutan menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat jangka panjang, serta kendala dalam mengakses dana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempromosikan edukasi dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan hijau melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung.

2. Teknologi Finansial (FinTech)

Teknologi Finansial (FinTech) mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. FinTech mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pembayaran digital dan peminjaman online hingga investasi dan manajemen keuangan berbasis teknologi. Inovasi FinTech memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan, terutama di negara berkembang (Arner et al., 2016).

Di Indonesia, FinTech telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana telah merevolusi cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi smartphone, platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan berbagai layanan keuangan lainnya dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional.

Selain pembayaran digital, FinTech juga mencakup layanan pinjaman peer-to-peer (P2P) yang memungkinkan individu dan bisnis kecil untuk

mengakses pinjaman dengan lebih mudah. Platform P2P lending seperti Modalku dan Investree menyediakan alternatif pembiayaan yang fleksibel bagi UKM yang sering kali kesulitan mendapatkan kredit dari bank tradisional. Dengan menggunakan algoritma dan analisis data untuk menilai risiko kredit, platform ini dapat menyediakan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

FinTech juga membuka peluang untuk inovasi dalam investasi dan manajemen keuangan. Robo-advisors, misalnya, menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan pengguna. Ini memungkinkan investor ritel untuk mengakses layanan manajemen kekayaan yang sebelumnya hanya tersedia bagi investor kaya (Grimsey & Lewis, 2004).

Namun, perkembangan FinTech juga membawa tantangan, termasuk risiko keamanan siber, perlindungan konsumen, dan regulasi. Pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa inovasi FinTech diimbangi dengan perlindungan yang memadai untuk konsumen dan integritas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengawasi dan mendukung perkembangan sektor FinTech.

3. Kemitraan Publik-Swasta

Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership*, PPP) adalah mekanisme di mana sektor publik dan sektor swasta bekerja sama untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. PPP memungkinkan pemerintah untuk mengakses modal dan keahlian sektor swasta, sementara sektor swasta mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek yang stabil dan menguntungkan (Grimsey & Lewis, 2004).

Di Indonesia, PPP telah digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas air bersih. Contohnya adalah Proyek Jalan Tol Trans-Jawa, yang melibatkan berbagai perusahaan swasta dalam pembiayaan, konstruksi, dan operasi. Proyek ini telah membantu meningkatkan konektivitas antar kota dan mengurangi waktu perjalanan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi.

PPP juga digunakan dalam sektor energi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik. Misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara merupakan salah satu proyek PPP terbesar di Indonesia. Proyek ini melibatkan beberapa perusahaan energi internasional dan didukung oleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB). Proyek ini tidak hanya meningkatkan kapasitas listrik nasional tetapi juga mendukung penggunaan energi terbarukan.

Keberhasilan PPP sangat bergantung pada kerangka regulasi dan kebijakan yang jelas serta pembagian risiko yang adil antara sektor publik dan swasta. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada insentif yang memadai untuk menarik investasi swasta, sambil menjaga kepentingan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Yescombe, 2007).

Salah satu tantangan utama dalam PPP adalah kompleksitas kontrak dan kebutuhan untuk manajemen proyek yang efektif. Pemerintah dan mitra swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses sangat penting untuk menghindari korupsi dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan nilai bagi uang publik.

Berikut adalah ilustrasi dari Public-Private Partnership (PPP) yang menunjukkan kolaborasi antara entitas pemerintah dan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur. Gambar ini menggambarkan kegiatan konstruksi dengan pekerja dan mesin di latar belakang, menunjukkan kemajuan dan kerja sama dalam pembangunan.



Gambar 10. 1 Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

E. MANAJEMEN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Manajemen pembiayaan pembangunan merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal, diperlukan pendekatan yang efektif dan efisien dalam pembiayaan, pengelolaan risiko keuangan yang baik, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

Efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan pembangunan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi proyek. Efektivitas pembiayaan mengacu pada sejauh mana tujuan pembangunan dapat dicapai dengan dana yang tersedia, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah dan lembaga keuangan harus memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek pembangunan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perencanaan dan pemantauan proyek. Sistem informasi manajemen proyek (Project Management Information Systems, PMIS) dapat membantu dalam mengintegrasikan berbagai aspek proyek, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan dan penggunaan anggaran.

Pengelolaan risiko keuangan adalah elemen penting lainnya dalam manajemen pembiayaan pembangunan. Risiko keuangan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, dan risiko operasional. Untuk mengelola risiko ini, pemerintah dan lembaga keuangan harus mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Misalnya, diversifikasi portofolio investasi dan penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Selain itu, penting untuk memiliki cadangan keuangan yang memadai sebagai buffer terhadap kejutan ekonomi yang tidak terduga. Penggunaan asuransi proyek dan kontrak berjangka juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola risiko finansial dalam proyek-proyek besar.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pembangunan adalah prinsip yang tidak kalah penting. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dana untuk bertindak sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai transparansi, pemerintah dan lembaga keuangan harus menyediakan akses publik terhadap informasi mengenai anggaran, pelaksanaan, dan hasil proyek pembangunan. Ini bisa dilakukan melalui publikasi laporan tahunan, audit independen, dan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau kemajuan proyek secara *real-time*.

Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Internal audit dan kontrol manajemen adalah alat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan rencana. Sementara itu, audit eksternal oleh badan-badan independen dapat memberikan jaminan tambahan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan proyek juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, program-program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi proyek pembangunan telah terbukti efektif dalam memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan lokal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, pengelolaan risiko keuangan yang baik, serta transparansi dan akuntabilitas, manajemen pembiayaan pembangunan dapat menjadi lebih robust dan adaptif terhadap tantangan yang ada. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal, tetapi juga bahwa tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih baik.

REFERENSI

- Abendin, S., & Duan, P. (2021). International Trade and Economic Growth in Africa: The Role of the Digital Economy. *Cogent Economics & Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911767>
- Acharyya, R. (2023). International Economics: An Introduction to Theory and Policy. In *International Economics: An Introduction to Theory and Policy*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192865144.001.0001>
- Aghion, P., Howitt, P., Brant-Collett, M., & García-Peñalosa, C. (1998). *Endogenous growth theory*. MIT press.
- Akbar, S., Raza, A., & Raza, Z. (2021). Does Greenfield Foreign Direct Investment Inflow Contribute in Socioeconomic Development? Empirical Evidence From Developing Countries. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 9(3). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2021.0903.0152>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Andriani, I. (2023). Nutrition, Dental, and Oral Health Education for Aisyiah Pakualaman Yogyakarta Cadres. *Iccs*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.209>
- Anh, P. T., Thuy, N. T. N., Chung, L. Q., & Quyet, N. T. (2022). Improve the Effectiveness of Training Vietnamese Human Resources to Meet the Requirements of the Industrial Revolution 4.0. *Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío*, 34(1), 274–282. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol34n1.885>
- Anonymous. (2018). Economic Policy Reforms 2018: GOING FOR GROWTH INTERIM REPORT: Going for Growth Going for Growth. In *Economic Policy Reforms*.
- Anshory, J., Anggraini, A. D. N., & Satriani, S. (2023). Protein Intake, Nutritional Status, and Family Socioeconomic Relationships With Learning Achievement of Children Aged 13-15 Years at Nabil Husein Junior High School Samarinda Year 2022. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 5(1), 50–55. <https://doi.org/10.25026/jsk.v5i1.1669>

- Anwar, C. J. (2023). Monetary Policy and Investment in ASEAN-5 Countries. *European Journal of Development Studies*, 3(5), 112–118. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.5.309>
- Apurv, R., & Uzma, S. H. (2020). The Impact of Infrastructure Investment and Development on Economic Growth on BRICS. *Indian Growth and Development Review*, 14(1), 122–147. <https://doi.org/10.1108/igdr-01-2020-0007>
- Arensberg, M. B., D'Andrea, C., & Khan, M. (2019). Clinical Leadership and Innovation Help Achieve Malnutrition Quality Improvement Initiative Success. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 119(9), S49–S55. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.05.021>
- Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., NOS BARBERIST, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4).
- Azman, A. I., Hussain, N. E., & Padli, J. (2019). Effect of Economic Recession on Development Expenditure, Domestic Investment and Foreign Direct Investments in Malaysia. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 1(2), 83–91. <https://doi.org/10.46754/umtjur.v1i2.70>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Perdagangan Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Statistik Kesehatan 2023. *Profil Statistik Kesehatan*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Indonesia Tahun 2024. *Statistik Indonesia 2024*.
- Bakker, M., & Messerli, H. (2016). Inclusive Growth Versus Pro-Poor Growth: Implications for Tourism Development. *Tourism and Hospitality Research*, 17(4), 384–391. <https://doi.org/10.1177/1467358416638919>
- Bank Indonesia. (2018). Indonesian Economic Report 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia*.
- BAPPENAS. (2014). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.

- Bappenas-KLH-DNPI. (2012). Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia. *Kerjasama Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Dan DNPI*.
- Barkanov, B. (2016). institutionalism. In *Britannica*. Britannica.
- Barrientos, A. (2011). Social protection and poverty. *International Journal of Social Welfare*, 20(3). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x>
- Barrientos, A., & Hulme, D. (2016). *Social protection for the poor and poorest: Concepts, policies and politics*. Springer.
- Basheer, K. C. S. (2024). *Top 10 Countries Leading in AI Research & Technology in 2024*. Analytics Vidhya.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Approach with Special References to Education. In *Evaluation* (Vol. 24).
- Berry, J. W. (2013). Immigration, acculturation and adaptation. In *Immigration: Policies, Challenges and Impact*.
- Bhagwati. (2014). In Defense of Globalisation. *Igarss 2014*, 1.
- Bhagwati, J. N. (2004). In Defense of Globalization : It Has a Human Face. *Rivista Di Politica Economica*, XI y XII.
- Binder, A. (2016). The hidden wealth of nations: the scourge of tax havens. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(3). <https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1231364>
- Binh, P. T. T. (2021). The Solutions of Education and Training in Improving the Quality of Human Resources: The Case of Vietnam. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(4), 733–744. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.4.62>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging countries. In *Environment and Planning C: Government and Policy* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.1068/cav3>
- Bjørnland, H. C., & Thorsrud, L. A. (2018). Commodity Prices and Fiscal Policy Design: Procyclical Despite a Rule. *Journal of Applied Econometrics*, 34(2), 161–180. <https://doi.org/10.1002/jae.2669>

- Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2010). Macroeconomics: a european perspective. In *Business*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Blanchard, O., & Sheen, J. (2013). *Macroeconomics; Australasian Edition*. Pearson Higher Education AU.
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1). [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)
- Bounphone, K. (2023). The Effect of Foreign Direct Investment and Infrastructure on Economic Growth in Laos. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(10), 432–441. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i10.003>
- Buntaine, M. T., & Pizer, W. A. (2014). Encouraging Clean Energy Investment in Developing Countries: What Role for Aid? *Climate Policy*, 15(5), 543–564. <https://doi.org/10.1080/14693062.2014.953903>
- Burhan, F. A. (2023). Rapor Hijau Kinerja Industri Perbankan Indonesia Sepanjang 2023 dari OJK. *Bisnis.Com*.
- Caiden, G. E. (2011). Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream? In *Asian Journal of Political Science* (Vol. 19, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/02185377.2011.628152>
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). *The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400>
- Cammett, M., & Bhagwati, J. (2005). In Defense of Globalization. *International Journal*, 60(2). <https://doi.org/10.2307/40204318>
- Canton, H. (2021). Asian Development Bank—ADB. In *The Europa Directory of International Organizations 2021* (pp. 444–448). Routledge.
- Cao, J. (2024). *Internet, Entrepreneurship and High-Quality Economic Development*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3821392/v1>
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. E. (2012). *Principles of Economics* (10th Editi). Pearson Education, Inc.,.

- Cavallo, E. A., & Noy, I. (2012). The Economics of Natural Disasters: A Survey. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1817217>
- Collier, P. (2007). The bottom billion [Ressource électronique]: why the poorest countries are failing and what can be done about it / Paul Collier. In *The bottom billion why the poorest countries are failing and what can be done about it: Vol. null*.
- Conte, N., & Venditti, B. (2024). *Mapped: The World's Top 50 Science and Technology Hubs*. Visual Capitalist.
- Corbett, D. C., & Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. *International Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.2307/40198523>
- Cvetanović, S., Panić, A. A., & Kostić, A. (2021). National Innovation Capacity and Economic Progress of Countries. *Economic Themes*, 59(3), 297–314. <https://doi.org/10.2478/ethemes-2021-0017>
- Dabla-norris, E., & Kochhar, K. (2015). Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective. *Imf*.
- Daffa, D. R. (2024). Gender Role Dynamics in Economic Development: Challenges and Opportunities for Women's Empowerment. *International Journal of Education Social Studies and Management (Ijessm)*, 4(2), 357–367. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i2.255>
- Dalton, R. J. (2000). Citizen politics. Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. *Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies.*, April.
- Das, K., Gryseels, M., Sudhir, P., & Tan, K. T. (2019). Unlocking Indonesia's Digital Opportunity. *McKinsey & Company, October*.
- Data Padas. (2024). *HDI by Country*. Data Padas.
- Degourmond, N. P. R. (2020). Institutions and Economic Growth in Sub-Saharan African Countries: The Effect of Investment Climate Quality. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8(04), 1706–1730. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v8i04.em04>
- Diallo, O., Loko, B., & Kpodar, K. (2007). Buoyant Capital Spending and Worries Over Real Appreciation: Cold Facts From Algeria. *Imf Working Paper*, 07(286), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451868494.001>

- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1). <https://doi.org/10.1162/003355302753399436>
- Do, D. T. (2023). Public Financial Management in Vietnam: A Study for the Investment in Infrastructure Construction in Vietnam. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(11). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-58>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *Economic Journal*, 114(493). <https://doi.org/10.1111/j.0013-0133.2004.00186.x>
- Dominiak, J. (2021). Specificity of Innovation in the Service Sector: The Example of Poland. *Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society*, 35(2), 27–37. <https://doi.org/10.24917/20801653.352.2>
- Donev, B. (2021). *Macroeconomic and Macro-Financial Factors of the Stability of the Banking Sector - The Case of the Republic of North Macedonia*. <https://doi.org/10.47063/ebtsf.2021.0022>
- Du, Xin, Zhang, H., & Han, Y. (2022). How Does New Infrastructure Investment Affect Economic Growth Quality? Empirical Evidence From China. *Sustainability*, 14(6), 3511. <https://doi.org/10.3390/su14063511>
- Duodu, E., & Baidoo, S. T. (2020). How Does Quality of Institutions Affect the Impact of Trade Openness on Economic Growth of Ghana? *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1812258. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1812258>
- Dutch Water Sector. (2019). *Room for the River Programme*. Dutch Water Sector.
- Dvoryadkina, E., Kvon, G. M., & Pozdeeva, O. G. (2020). Transformative Investments in Sustainable Economic Development: Infrastructure Aspect. *E3s Web of Conferences*, 208, 03031. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020803031>
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: an Empirical Investigation. In *Journal of Monetary Economics* (Vol. 32, Issue 3).
- Ehigiamusoe, K. U., & Samsurijan, M. S. (2020). What Matters for Finance-growth Nexus? A Critical Survey of Macroeconomic Stability, Institutions, Financial and Economic Development. *International*

- Journal of Finance & Economics*, 26(4), 5302–5320.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2066>
- Eliasoph, N., Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1996). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. *Contemporary Sociology*, 25(6). <https://doi.org/10.2307/2077276>
- Estupiñán, J. M. T., & Alvarez, J. F. (2016). The age of sustainable development. In *Revista Finanzas y Política Económica* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.2.1>
- Ezeibekwe, O. F. (2020). Monetary Policy and Domestic Investment in Nigeria: The Role of the Inflation Rate. *Economics and Business*, 34(1), 139–155. <https://doi.org/10.2478/eb-2020-0010>
- Fabozzi, F. J., & Fabozzi, F. A. (2021). *Bond markets, analysis, and strategies*. MIT Press.
- Falk, A., & Hermle, J. (2018). Relationship of Gender Differences in Preferences to Economic Development and Gender Equality. *Science*, 362(6412). <https://doi.org/10.1126/science.aas9899>
- Farisi, Y. A. (2021). Improving the Quality of Human Resources in Madrasah. *Managere Indonesian Journal of Educational Management*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.52627/ijeam.v3i2.156>
- Firdaus, A. B. (2023). Social Capital as Planning Human Resources in Efforts to Improve the Quality of Islamic Education Institutions. *Leadership Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 233–244. <https://doi.org/10.32478/leadership.v4i2.1638>
- Franklin-Rahkonen, S. (2017). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? *Journal of Finnish Studies*, 20(1). <https://doi.org/10.5406/28315081.20.1.13>
- Gaventa, J. (2020). Excerpts from Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley. In *Inequality in the United States: A Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003071709-36>
- Geertz, C. (2022). THE IMPACT OF THE CONCEPT OF CULTURE ON THE CONCEPT OF MAN. In *Man in Adaptation: The Cultural Present, Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429337949-3>

- Geraats, P. M. (2009). Trends in Monetary Policy Transparency^{*}. *International Finance*, 12(2), 235–268. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2362.2009.01239.x>
- Geraats, P. M. (2014). *Monetary Policy Transparency*. 67–97. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199917693.013.0003>
- Gifari, F. (2023). Education and Training (Diklat)-Based Human Resource Development to Increasing Employee Creativity: Literature Study. *Aaem*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/aaem.v1i2.45>
- Giovanis, E., & Ozdamar, O. (2022). The Nexus Between Business–investment Climate and Firm Performance in the Middle East and North Africa (MENA) Region. *Review of Economics and Political Science*, 7(4), 257–285. <https://doi.org/10.1108/repss-09-2020-0138>
- Gokhale, J., & Adhikari, H. (2023). Corporate Finance. In *Corporate Finance*. <https://doi.org/10.15394/eaglepub.2023.1068>
- Gorton, G., & Metrick, A. (2012). Getting up to speed on the financial crisis: A one-weekend-reader’s guide. *Journal of Economic Literature*, 50(1). <https://doi.org/10.1257/jel.50.1.128>
- Government at a Glance 2019 (Summary in English)*. (2019). <https://doi.org/10.1787/93a2269c-en>
- Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). Public private partnerships: The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. In *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. <https://doi.org/10.4337/9781845423438>
- Guampe, F. A. (2014). *DINAMIKA USAHA TANI PERKEBUNAN: Studi Pada Petani Perkebunan di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara*. Satya Wacana University Press.
- Guampe, F. A. (2021a). *Literasi dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan* (H. F. Ningrum, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A. (2021b). *Literasi Dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan* (H. F. Ningrum, Ed.). PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Guampe, F. A., Hasan, M., Huruta, A. D., Dewi, C., & Chen, A. P. S. (2022). Entrepreneurial Literacy of Peasant Families during the COVID-19

- Pandemic: A Case in Indonesia. *Sustainability*, 14(19), 12337. <https://doi.org/10.3390/su141912337>
- Guampe, F. A., & Kayupa, O. O. (2022). The Role of Woman Workers in Oil Palm Plantation on Family's Economy. *Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*, 24(1). <https://doi.org/10.37149/bpsosek.v24i1.24483>
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *Kebijakan Publik (Dari Sejarah, Teori, Proses, dan Prakteknya)* (A. Hendrayady, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A., Rosidah, Razak, M. R. R., Mustanir, A., Sahi, N. A., Syahriar, I., Malik, Putri, D. P. H., Firdaus, Iskandar, A., Baharuddin, Wardhana, A., Heryani, A., Firman, Poti, J., Samin, R. Bin, Wiryanto, W., Amane, A. P. O., Pakpahan, R. R., ... Ekawati. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik Di Indonesia (Penerapan Di Era Inovasi Digitalisasi)* (A. Hendrayady, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable Development Goals and Inclusive Development. *International Environmental Agreements Politics Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Hamadeh, N., Rompaey, C. Van, & Metreau, E. (2023). *World Bank Group country classifications by income level for FY24 (July 1, 2023- June 30, 2024)*. World Bank Blogs.
- Hemat, W. (2023). Causal Relationship Between Trade Openness and Economic Growth: Pieces of Evidence From Afghanistan. *International Journal of Applied Research*, 9(6), 100–106. <https://doi.org/10.22271/allresearch.2023.v9.i6b.10923>
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa. *Jim*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>
- Hughes, T. (2014). After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead. *Quantitative Finance*, 14(9). <https://doi.org/10.1080/14697688.2014.949836>

- Iaroslav, Mariia, Alona, Tamila, Anastasiia, & Iryna. (2020). Innovative Entrepreneurship in Countries of Eastern Europe. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(Special Issue 1), 127–140. <https://doi.org/10.35808/ijeaba/531>
- Ibarra-Armenta, C. I. (2018). Private Investment and the Effects of Decentralisation and Regional Competition Between Mexican Cities. *Advances in Economics and Business*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.13189/aeb.2018.060105>
- Ifa, K., & Yahdi, Moh. (2020). Trade Openness and Economic Growth in Indonesia. *Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 10(2), 163–170. <https://doi.org/10.30741/wiga.v10i2.599>
- IMF. (2020). World Economic Outlook Update June 2020. *International Monetary Fund*, 2.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2017). Renewable Energy Prospects: Indonesia. In *REmap A Renewable Energy Roadmap*.
- IPCC. (2022). Global Warming of 1.5°C. In *Global Warming of 1.5°C*. <https://doi.org/10.1017/9781009157940>
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In *Diriba Korecha Dadi*.
- Irwin, D. A. (2020). Free Trade under Fire. In *Free Trade under Fire*. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691201009.001.0001>
- Islam, M. M. (2020). Demographic Transition in Sultanate of Oman: Emerging Demographic Dividend and Challenges. *Middle East Fertility Society Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s43043-020-00022-7>
- Islam, S. (2021). Impact Investing in Social Sector Organisations: A Systematic Review and Research Agenda. *Accounting and Finance*, 62(1), 709–737. <https://doi.org/10.1111/acfi.12804>
- Jatayu, A. (2024). Measuring Levels of Infrastructure Development and Its Impact on Regional Growth - Insights From Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1353(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012011>
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi

- Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061–1076.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16484>
- Jordan, T., Peytrignet, M., & Rossi, E. (2010). Ten Years' Experience With the Swiss National Bank's Monetary Policy Strategy. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 146(1), 9–90.
<https://doi.org/10.1007/bf03399293>
- Julio, B., & Yook, Y. (2009). Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1344087>
- Karpenko, L., Izha, M., Chunytska, I., Maiev, A., & Hunko, K. (2021). The Growth of the Country's Economic Security Level Based on the Investment Infrastructure Development Projects. *Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(4), 713–729.
[https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(44\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(44))
- Katrak, H., & Baldwin, R. E. (1972). Non-Tariff Distortions of International Trade. *Economica*, 39(154). <https://doi.org/10.2307/2552648>
- Keho, Y. (2017). The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Cote D'Ivoire. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1332820.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1332820>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia2022. In *Pusdatin.Kemenkes.Go.Id*.
- Keothephar, K. (2024). Assessing the Key Drivers of Sustainable Economic Growth in Laos: Emphasis on Infrastructure Investment. *International Journal of Science and Business*, 32(1), 1–15.
<https://doi.org/10.58970/ijsb.2291>
- Keynes, J. M. (2018). The general theory of employment, interest, and money. In *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2>
- Khan, A. (2018). Legal Protection: Liability and Immunity Arrangements of Central Banks and Financial Supervisors. *Imf Working Paper*, 18(176), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484372272.001>
- Khan, Z., & Slavador, M. (2017). Summarizing the Miscellaneous Criticism on Rostow's Model of Economic Growth: An Overview. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 2.

- Kramer, M. R., & Porter, M. (2011). *Creating shared value* (Vol. 17). FSG Boston, MA, USA.
- Krugman, P. (1987). Rethinking International Trade Theory. *Economic Perspectives*, 1(2).
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). International Economics: Theory and Policy, Global Edition. In *International Economics: Theory and Policy, Global Edition*.
- Kubátová, J., & Kročil, O. (2020). The Potential of Impact and Integral Investing for Sustainable Social Development and the Role of Academia in Their Dissemination. *Sustainability*, 12(17), 6939. <https://doi.org/10.3390/su12176939>
- Kurniasari, M., Hayati, A., & Setijanti, P. (2021). Enabling Inclusive Development Concept in Marginalized Settlement Community (Case Study: Kampung Jodipan, Kota Malang). *Iptek Journal of Proceedings Series*, 0(6), 533. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i6.11155>
- Kusnandar, V. B. (2022). Sektor Transportasi dan Pergudangan Tumbuh 3,24% pada 2021. *Katadata Media Network*.
- Kusumaningrum, A., Sandradewi, K., Harsanto, H., & Pradana, A. I. (2022). The Role of Human Capital on Remote Audit Through a Quality Audit Approach. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (Ijebar)*, 6(1), 394. <https://doi.org/10.29040/ijebars.v6i1.4832>
- Kuznetsova, S., & Вакулич, М. М. (2016). Impact of Rating Evaluation on Development of Investment Climate: Case of Ukrainian Economy. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 69, 57–68. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.69.57>
- Law, S. H., Kutan, A. M., & Naseem, N. A. M. (2018). The Role of Institutions in Finance Curse: Evidence From International Data. *Journal of Comparative Economics*, 46(1), 174–191. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.04.001>
- Lawrence, A. O. (2023). Impact of Monetary Policy on Disaggregate Inflation in Nigeria: A Structural Var Approach. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(5), 139–149. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2023.4.5.139-149>
- Li, C., Wan, J., Xu, Z., & Lin, T. (2021). Impacts of Green Innovation, Institutional Constraints and Their Interactions on High-Quality

- Economic Development Across China. *Sustainability*, 13(9), 5277. <https://doi.org/10.3390/su13095277>
- Lin, H., Zrelli, H., Mohamed, N. H. A. A., Li, Y., Alam, M. M., Guo, W., & Khan, Y. A. (2022). The Impact of Agricultural Water Salvation Investment on Economics Development: Evidence From Eastern China. *Plos One*, 17(7), e0267627. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267627>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1). [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Lukoševičius, I. (2021). European Union Electric Energy Sector's Infrastructure Impact on Economic Growth. *Applied Economics Systematic Research*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.7220/aesr.2335.8742.2020.14.1.1>
- Lund, S., Manyika, J., Segel, L. H., Dua, A., Hancock, B., Rutherford, S., & Macon, B. (2019). Future of work in America. *Report, July*.
- Makun, K. (2017). Trade Openness and Economic Growth in Malaysia. *Foreign Trade Review*, 52(3), 157–170. <https://doi.org/10.1177/0015732516663317>
- Malefane, M. R. (2020). Trade Openness and Economic Growth in Botswana: Evidence From Cointegration and Error-Correction Modelling. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1783878. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1783878>
- Malthus, T. (2023). An essay on the principle of population. In *British Politics And The Environment In The Long Nineteenth Century*. <https://doi.org/10.4324/9781003194651-15>
- Maneschi, A., & Irwin, D. A. (2003). Free Trade under Fire. *Southern Economic Journal*, 69(3). <https://doi.org/10.2307/1061708>
- Mankiw. (2014). Principle of economics. In *Igarss 2014* (Issue 1).
- Mankiw, N. G. (2019). Macroeconomics (10th Ed). In *Worth Publishers*.
- Mann, C., Wilson, J., Otsuki, T., & Bank, W. (2004). Assessing the Potential Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective. In *Assessing the Potential Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3224>

- Margevica-Grinberga, I., & Šūmane, I. (2021). The Advantages and Disadvantages of Inclusive Education From the Perspective of Future Teachers. *Society Integration Education Proceedings of the International Scientific Conference*, 1, 432–441. <https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6352>
- Mariana, Y. (2024). Integrated Approach for Early Detection and Prevention of Abnormal Child Growth: A Kansei Design and Quality Function Deployment Study. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1324(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012019>
- Marques, K., & Correia, F. M. (2017). Mechanisms of Default Risk Transmission and Economic Policy Coordination. *Cepal Review*, 2016(120), 31–49. <https://doi.org/10.18356/c9de48e8-en>
- Marshall, A. (2005). From Principles of economics. In *Readings In The Economics Of The Division Of Labor: The Classical Tradition*. https://doi.org/10.1142/9789812701275_0021
- Maximov, R., Krupenin, A., Sharifullin, S., & Sokolovsky, S. (2019). Innovative Development of Tools and Technologies to Ensure the Russian Information Security and Core Protective Guidelines. *Voprosy Kiberbezopasnosti*, 1(29), 10–17. <https://doi.org/10.21681/2311-3456-2019-1-10-17>
- McCauley, S. M., Barrocas, A., & Malone, A. (2019). Hospital Nutrition Care Betters Patient Clinical Outcomes and Reduces Costs: The Malnutrition Quality Improvement Initiative Story. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 119(9), S11–S14. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.05.027>
- McKinsey and Company. (2019). *Future of work in America* | McKinsey. Report.
- Mengistu, S. T. (2021). *Does Fiscal Policy Stimulate Economic Growth in Ethiopia? An ARDL Approach*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-255756/v1>
- Mishkin, F. S., & Serletis, A. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. In *Policy*.

- Moessner, R. (2005). Inflation Persistence and Monetary Policy Design: An Overview. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.828965>
- Mondello, E. (2022). Corporate Finance. In *Corporate Finance*.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5>
- Moon, Z. K., & Hasan, Md. M. (2022). Impact of COVID-19 on Green Financial Practices of Banks and Financial Institutions in Bangladesh. *Journal of Business and Social Sciences Research*, 7(1), 21–40.
<https://doi.org/10.3126/jbssr.v7i1.47682>
- Mukhopadhyay, M. (2013). Mainstreaming Gender or Reconstituting the Mainstream? Gender Knowledge in Development. *Journal of International Development*, 26(3), 356–367.
<https://doi.org/10.1002/jid.2946>
- Murwanto, P. (2024). Developing and Practicing Inclusive Leadership in Schools. *Progres Pendidikan*, 5(1), 93–100.
<https://doi.org/10.29303/prospek.v5i1.710>
- Musgrave, R. A. (2012). Public finance in theory and practice (Fifth edition). In *Economists' Voice*.
- Mutalazimah, M., & Mustikaningrum, L. (2020). Knowledge About Intestinal Worm Infection and Helminthiasis in Pregnant Women. *Electronic Journal of General Medicine*, 17(3), em215.
<https://doi.org/10.29333/ejgm/7876>
- Nasarudin, A. (2023). Faktor Sosial Budaya: Contoh dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Bisnis. In *Cerdasco*.
- Nazaruddin, N. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *J. Pengabd. Kreativitas*, 2(2), 23.
<https://doi.org/10.29103/jpek.v2i2.13304>
- Neupane, D. (2023). Trade Openness and Economic Growth of Nepal: An Econometric Analysis. *Journal of Business and Management*, 7(02), 32–45. <https://doi.org/10.3126/jbm.v7i02.62585>
- Nketiah-Amponsah, E., & Sarpong, B. (2019). Effect of Infrastructure and Foreign Direct Investment on Economic Growth in Sub-Saharan Africa. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 11(3), 183–201.
<https://doi.org/10.1177/0974910119887242>

- Nopriyanto, W. (2021). Human Resources Education in the Transportation Sector. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i1.8304>
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Nugroho, A. D., & Santiago, F. (2023). The Effect of Patent Rights on Innovation of the Technology Industry in Indonesia. *Journal Research of Social Science Economics and Management*, 2(11), 2610–2620. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.468>
- Nusraningrum, D. (2023). Implementation of Quality Education Through Human Resources in Vocational High School. *Iccd*, 5(1), 388–395. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.632>
- O’Connell, P. J., & Esping-Anderson, G. (1991). The Three Worlds of Welfare Capitalism. *Social Forces*, 70(2). <https://doi.org/10.2307/2580262>
- OECD. (2012a). Education at a Glance 2016. *Editions OECD*, 90.
- OECD. (2012b). Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools. In *Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools* (Vol. 9789264130852). <https://doi.org/10.1787/9789264130852-en>
- OECD. (2015). In It Together. Why Less Inequality Benefits All ...in The Netherlands. In *oecd.org*.
- OECD. (2016). PISA 2015 Results, Excellence and Equity in Education. In *Pisa: Vol. I*.
- Ofodile, O. C. (2024). Predictive Analytics in Climate Finance: Assessing Risks and Opportunities for Investors. *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(2), 423–433. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.2.0076>
- Olaoye, O. O. (2023). Facilitating Economic Growth by Leveraging on Infrastructure Development. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 06(05). <https://doi.org/10.47191/jeffms/v6-i5-59>
- Opola, F. O., Klerkx, L., Leeuwis, C., & Kilelu, C. (2020). The Hybridity of Inclusive Innovation Narratives Between Theory and Practice: A Framing Analysis. *European Journal of Development Research*, 33(3), 626–648. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00290-z>

- Oppenheimer, P., & Baldwin, R. E. (1972). Non-tariff Distortions of International Trade. *The Economic Journal*, 82(325). <https://doi.org/10.2307/2230243>
- Our World in Data. (2024). *Literacy*. Our World in Data.
- Pan, C., Jin, W., & Ma, X. (2021). *Assessment of Quality Management System for Clinical Nutrition in Jiangsu*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-289615/v1>
- Pardi, I. W., Lasmawan, I. W., & Giri, M. K. W. (2023). *The Illusion of Gender Equality: Development, Empowerment and Gender Inequality in Bali*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326363>
- Pelizzo, R. (2020). Corruption Perception Index 2019. *Transparency International*.
- Permana, P. D. (2024). The Influence of Education and Training on Labor Productivity in Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(6), 369–379. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i6.2705>
- Persson, G. (2005). Making globalisation work for all. In *OECD Observer* (Issue 249). <https://doi.org/10.5089/9781475536461.076>
- Peterson, R. R., DiPietro, R. B., & Harrill, R. (2020). In Search of Inclusive Tourism in the Caribbean: Insights From Aruba. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 12(3), 225–243. <https://doi.org/10.1108/whatt-02-2020-0009>
- Pham, K. T., & Dung, B. X. (2022). Human Resource Development Experience of Some Developed Countries and Lessons Drawn for Vietnam Today. *Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío*, 34(1), 118–127. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol34n1.858>
- Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal Determinants of External Finance. *The Journal of Finance*, 52(3). <https://doi.org/10.2307/2329518>
- Pratama, M. T. Y. (2023). Analysis of the Influence of Economic and Social Infrastructure on Economic Growth in East Java. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(3), 881–898. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i3.5039>
- PRI. (2018). Principles for Responsible Investment (PRI) 2018 Annual Report. In *Annual Report*.

- Pusvitasari, R. (2021). Human Resources Management in Improving the Quality of Education. *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 125–135. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2549>
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte prize lecture. *Scandinavian Political Studies*, 30(2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x>
- Qamruzzaman. (2017). Innovation and Economic Growth: Evidence From Financial Institutional Innovation. *Journal on Innovation and Sustainability Risus*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.24212/2179-3565.2017v8i2p126-141>
- Raghutla, C. (2020). The Effect of Trade Openness on Economic Growth: Some Empirical Evidence From Emerging Market Economies. *Journal of Public Affairs*, 20(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2081>
- Rao, P., & Conte, N. (2023). Ranked: The World's Biggest Oil Producers. *Elements*.
- Rao, P., Conte, N., & Kostandi, C. (2023). *Charted: The World's Biggest Oil Producers*. Visual Capitalis.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. *American Economic Review*, 100(2). <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.573>
- Ren, M., Zhou, T., Wang, D., & Wang, C. (2023). Does Environmental Regulation Promote the Infrastructure Investment Efficiency? Analysis Based on the Spatial Effects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 2960. <https://doi.org/10.3390/ijerph20042960>
- Ricardo, D. (2018). The Principles of Political Economy and Taxation. In *The Economics of Population: Key Classic Writings*. <https://doi.org/10.4324/9781351291521-9>
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>
- Ritchie, H., Samborska, V., Ahuja, N., Ortiz-Ospina, E., & Roser, M. (2024). *Global Education*. Our World in Data .

- Rodrik, D. (1991). Policy uncertainty and private investment in developing countries. *Journal of Development Economics*, 36(2). [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(91\)90034-S](https://doi.org/10.1016/0304-3878(91)90034-S)
- Rodrik, D., & Subramanian, A. (2009). Why did financial globalization disappoint? *IMF Staff Papers*, 56(1). <https://doi.org/10.1057/imfsp.2008.29>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5). <https://doi.org/10.1086/261420>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5). <https://doi.org/10.3386/w3210>
- Rosenstein-Rodan, P. N. (1961). Notes on the Theory of the 'Big Push.' In *Economic Development for Latin America*. https://doi.org/10.1007/978-1-349-08449-4_3
- Røste, O. B., & Røste. (2021). *Norway's Sovereign Wealth Fund*. Springer.
- Roza, N. (2023). Stunting Management With Exclusive Breastfeeding, Early Breastfeeding Initiation Toddlers at Sei Panas Community Health Center. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 503–511. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.260>
- Sarihati, T., & Santosa, P. (2021). The EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION OF BASIC HEALTH SERVICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC (Study of Implementation of Basic Health Services in West Java Province). *Sosiohumaniora*, 23(3), 429. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32832>
- Schmiemann, G., Steuber, C., Gogolewska, J., Lehmkuhl, D., & Schulz, C. (2021). Medical Responsibility in the Climate Crisis-the Investment Strategies of German Doctors' Pension Funds: A Conflict Between Ethics and Monetisation. *Ohir*. <https://doi.org/10.20517/ohir.2021.04>
- Schumpeter, J. A. (2017). Capitalism, Socialism and Democracy. In *Modern Economic Classics-Evaluations Through Time*. <https://doi.org/10.4324/9781315270548-17>
- Schwab, K. (2020). Gender Global Gap Report 2020. In *World Economic Forum* (Issue June).

- Seers, D. (1972). What are we Trying to Measure? *The Journal of Development Studies*, 8(3).
<https://doi.org/10.1080/00220387208421410>
- Seers, D. (2016). The meaning of development. In *Development Studies Revisited: Twenty-five Years of the "Journal of Development Studies."*
<https://doi.org/10.4324/9781315827902>
- Self, S., & Grabowski, R. (2009). Gender Development, Institutions, and Level of Economic Development. *Review of Development Economics*, 13(2), 319–332. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2008.00490.x>
- Sen, A. (2015). The idea of justice: A response. *Philosophy and Social Criticism*, 41(1). <https://doi.org/10.1177/0191453714553501>
- Sen, A. (2017). Development as Freedom. In *The Top 50 Sustainability Books*.
<https://doi.org/10.4324/9781351279086-33>
- Seneviratne, D., & Sun, Y. (2013). Infrastructure and Income Distribution in ASEAN-5: What Are the Links? *Imf Working Paper*, 13(41), 1.
<https://doi.org/10.5089/9781589068018.001>
- SenGupta, S. (2020). How Trade Openness Influenced Economic Growth in India: An Empirical Investigation. *Indian Journal of Economics and Development*, 8, 1–14. <https://doi.org/10.17485/ijed/v8.21>
- Sevastyanova, A. Ye., Tokarev, A. N., & Illmat, B. B. (2018). Peculiarities of Applying the Inclusive Development Concept for Resource Regions. *Regional Research of Russia*, 8(1), 101–109.
<https://doi.org/10.1134/s2079970518010094>
- Shahinyan, T. V. (2024). *The Role of Innovations in Economic Development*. 28–39. <https://doi.org/10.54503/1829-4324.2024.1-28>
- Sharma, D. (2016). Nexus Between Financial Inclusion and Economic Growth. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13–36.
<https://doi.org/10.1108/jfep-01-2015-0004>
- Shrestha, O. (2022). Assessing the Socio-Economic Impact of Infrastructure Development on Local Communities: A Mixed-Methods Approach. *Sosateris*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.35335/3xahcj54>
- Siregar, M. B. (2024). Empowered Women: Strategies to Increase Competitiveness in the Era of Society 5.0 Through Entrepreneurship.

- Randwick International of Social Science Journal*, 5(1), 25–38.
<https://doi.org/10.47175/rissj.v5i1.886>
- Smith, A. (1776). An inquiry into the wealth of nations. *Strahan and Cadell, London*.
- Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. In *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*.
<https://doi.org/10.2307/2221259>
- Smoke, P. (2015). Managing Public Sector Decentralization in Developing Countries: Moving Beyond Conventional Recipes. *Public Administration and Development*, 35(4).
<https://doi.org/10.1002/pad.1736>
- Soares, F. V., Ribas, R. P., & Osório, R. G. (2010). Evaluating the impact of Brazil's Bolsa Família: Cash transfer programs in comparative perspective. *Latin American Research Review*, 45(2).
<https://doi.org/10.1017/s0023879100009390>
- Sofian, A., Ayuni, S., Ihsan, M., & dkk. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1).
<https://doi.org/10.2307/1884513>
- Spatscheck, C. (2012). Creating Capabilities: The Human Development Approach. *European Journal of Social Work*, 15(3). <https://doi.org/10.1080/13691457.2012.705970>
- Sreenu, N. (2021). Does Transportation Infrastructure Impact Economic Growth in India? *Journal of Facilities Management*, 21(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1108/jfm-03-2021-0032>
- Stähler, N., & Thomas, C. (2012). FiMod — A DSGE Model for Fiscal Policy Simulations. *Economic Modelling*, 29(2), 239–261.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2011.10.001>
- Stiglitz, J. E. (1990). Economics of the public sector Fourth Edition. *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 5(3).
- Stiglitz, J. E. (2012a). Book Review: The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. In *Sustainable Humanity , Sustainable Nature: Our Responsibility*.

- Stiglitz, J. E. (2012b). Book Review: The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. In *Sustainable Humanity , Sustainable Nature: Our Responsibility*.
- Stiglitz, Joseph. E; Rosengard, Jay. K. (2015). Economics of the public sector, Fourth international student edition. In *New York: WW Norton & Company*.
- Streeten, P. (1979). From growth to basic needs. *Finance & Development*, 16(3). <https://doi.org/10.1515/9781685857899-006>
- Streeten, P. (2023). Chapter three. From Growth to Basic Needs. In *Latin America's Economic Development*. <https://doi.org/10.1515/9781685852481-006>
- Stromquist, N. P. (2019). World Development Report 2019: The changing nature of work. *International Review of Education*, 65(2). <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09762-9>
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2), 100–115. <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Suleman, A., Khalid, F., & Bokhari, I. H. (2019). Role of Political Instability in Trade Pattern and Economic Growth: A Case of Pakistan. *Journal of Research in Administrative Sciences*, 8(2), 10–15. <https://doi.org/10.47609/jras2019v8i2p3>
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228–249. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Syarif, M. I. (2023). An in-Depth Comparative Analysis of Science Curricula in Türkiye and Indonesia. *Journal of Natural Science and Integration*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v6i1.16745>
- Tahir, M., & Khan, I. (2014). Trade Openness and Economic Growth in the Asian Region. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 7(3), 136–152. <https://doi.org/10.1108/jcefts-05-2014-0006>
- Tanzi, V. (2003). Public Finance and Public Policy in the New Century. In *Public Finance and Public Policy in the New Century*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/5689.001.0001>

- Tappenden, K. A., Quatrara, B., Parkhurst, M., Malone, A., Fanjiang, G., & Ziegler, T. R. (2013). Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 37(4), 482–497. <https://doi.org/10.1177/0148607113484066>
- TI. (2019). Corruption Perceptions Index 2018. *Transparency International*, November.
- Toader, E., Fîrțescu, B., Roman, A., & Anton, S. G. (2018). Impact of Information and Communication Technology Infrastructure on Economic Growth: An Empirical Assessment for the EU Countries. *Sustainability*, 10(10), 3750. <https://doi.org/10.3390/su10103750>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (Thirteenth). Pearson .
- Trendov, N. M., Varas, S., & Zeng, M. (2019). Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. In *Briefing Paper FAO* (Issue June 2018).
- Tresch, R. W. (2022). Public Finance: A Normative Theory. In *Public Finance: A Normative Theory*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822864-7.01001-0>
- Trihapsari, C., Mujahidah, F., & Humairoh, N. (2021). Enhancement of the Quality of Human Resources Through Training and Development Programs in Schools. *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 145–153. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2325>
- Tsaurai, K., & Ndou, A. (2019). Infrastructure, Human Capital Development and Economic Growth in Transitional Countries. *Comparative Economic Research Central and Eastern Europe*, 22(1), 33–52. <https://doi.org/10.2478/cer-2019-0003>
- Ulbrich, H. H. (2013). Public Finance in theory and practice second edition. In *Public Finance in Theory and Practice Second edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203817018>
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016 Human Development for Everyone*.
- UNDP. (2019a). Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today. In *United Nations Development Program*.

- UNDP. (2019b). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. In *United Nations Development Program*.
- UNESCO. (2016). *Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet-Creating Sustainable Futures for All*. UN.
- UNESCO. (2019). 2019 Global Education Monitoring report. In *Forced Migration Review* (Issue 60).
- UnitedNation. (2023). *The 17 Goals of Sustainable Development Goals*. United Nations.
- Updegraff, K. A., McHale, S. M., Zeiders, K. H., Umaña-Taylor, A. J., Perez-Brena, N. J., Wheeler, L. A., & Jesús, S. A. R. De. (2014). Mexican–American Adolescents’ Gender Role Attitude Development: The Role of Adolescents’ Gender and Nativity and Parents’ Gender Role Attitudes. *Journal of Youth and Adolescence*, 43(12), 2041–2053. <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0128-5>
- Usman, F. K. (2024). Infrastructure and Economic Growth in ECOWAS Member States: The Westerlund Co-Integration Approach. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 107–122. <https://doi.org/10.22437/ppd.v12i1.28460>
- Venditti, B., & Lam, S. (2022). *Which Countries Produce the Most Natural Gas?* Visual Capitalist.
- Verbeke, A. (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. *Journal of International Business Studies*, 39(7). <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400426>
- Victoria, A. O. (2023). BPS catat sektor transportasi tumbuh 15,93 persen pada triwulan I 2023. *Antara News*.
- Virgilio, F. D., DIMITROV, R., Dorokhova, L., Yermolenko, O., Dorokhov, O., & Petrova, M. (2023). Innovation Factors for High and Middle-Income Countries in the Innovation Management Context. *Access Access to Science Business Innovation in Digital Economy*, 4(3), 434–452. [https://doi.org/10.46656/access.2023.4.3\(8\)](https://doi.org/10.46656/access.2023.4.3(8))
- Vishwanath, S. R. (2007). Corporate Finance: Theory and Practice. In *Corporate Finance: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4135/9788132111801>

- Waberi, A. A. (2024). *Analysis of the Influence of Infrastructure Development on Economic Growth in Djibouti*. <https://doi.org/10.20944/preprints202405.1539.v1>
- Wahidah, I. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumedang. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 298–308. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7128>
- Wang, X., & Xu, L. (2021). *The Impact of Technological Innovation on Economic Growth: Evidence From China*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.311>
- Wen, K., Hu, X., & Liu, F. (2022). The Impact of Economic Policy Uncertainty on Firms' Investment in Innovation: Evidence From Chinese Listed Firms. *Plos One*, 17(11), e0272983. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272983>
- WHO. (2015). World Health Statistic Report 2015. In *Geneva* (Vol. 12, Issue 1).
- WHO. (2016). World Health Statistics 2015 Part II. *WHO*.
- Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T. (2005). Assessing the benefits of trade facilitation: A global perspective. *World Economy*, 28(6). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2005.00709.x>
- Woetzel, J., Madgavkar, A., Ellingrud, K., Labaye, E., Devillard, S., Kutcher, E., Manyika, J., Dobbs, R., & Krishnan, M. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth. In *McKinsey Global Institute* (Vol. 1, Issue September).
- World Bank. (2013). Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. In *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. <https://doi.org/10.1596/9781464800108>
- World Bank. (2017). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. In *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*.
- World Bank. (2022). World Bank country and lending groups. *World Bank Data Help Desk*.
- World Bank. (2023). *Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)*. World Bank.

- World Bank Group. (2016). *Taking on Inequality. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality, October*.
- World Economic Forum. (2022). *This is how much the global literacy rate grew over 200 years*. World Economic Forum.
- World Health Organization. (2023). World health statistics 2023: monitoring health for the sdgs, sustainable development goals. In *The Milbank Memorial Fund quarterly* (Vol. 27, Issue 2).
- World Population Review. (2024a). *Coal Production by Country 2024*. World Population Review.
- World Population Review. (2024b). *Education Rankings by Country 2024*. World Population Review.
- World Population Review. (2024c). *Life Expectancy by Country 2024*. World Population Review.
- World Population Review. (2024d). *Literacy Rate by Country 2024*. World Population Review.
- World Population Review. (2024e). *Most Technologically Advanced Countries 2024*. World Population Review.
- World Population Review. (2024f). *Oil Production by Country 2024*. World Population Review.
- Wulandari, N. A., Margawati, A., & Rahfiludin, Z. (2021). The Implementation of Nutrition Improvement Programs for Underweight Children, Wasting and Stunting in the Department of Health, Central Buton District, Southeast Sulawesi. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 9(2), 86–96. <https://doi.org/10.14710/jgi.9.2.86-96>
- Yescombe, E. R. (2007). Public-private partnerships: Principles of policy and finance. In *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8054-7.X5022-9>
- Yueh, L. (2019). Making globalisation work. *London Business School Review*, 30(2–3). <https://doi.org/10.1111/2057-1615.12301>
- Yunas, N. S. (2024). Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441>

- Yusliana, N. (2023). The Opportunities of Economic Corridor Infrastructure to Accelerate SDGS: Policy Review in D. I. Yogyakarta Province, Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1151(1), 012008. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1151/1/012008>
- Zhang, J. (2015). *Research on the Development and Enhancement of Architectural Design Industry Human Resources Management System Based on Comprehensive Performance Evaluation*. <https://doi.org/10.2991/iemb-15.2015.178>
- Zhou, R. (2022). Measurement and Spatial-Temporal Characteristics of Inclusive Green Growth in China. *Land*, 11(8), 1131. <https://doi.org/10.3390/land11081131>
- Zhuang, X., & Pan, L. (2022). Study on the Impact of Clean Power Investment on Regional High-Quality Economic Development in China. *Energies*, 15(22), 8364. <https://doi.org/10.3390/en15228364>
- Zukauskienė, J., & Snieska, V. (2023). The Importance of Investment for the Green Economy in Countries at Different Levels of Development. *Journal of Management*, 39(2). <https://doi.org/10.38104/vadyba.2023.2.06>
- Бажал, Ю. (2019). Innovations as a Crucial Factor of the Catch-Up Economic Growth. *Scientific Papers Naukma Economics*, 4(1), 3–8. <https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.3-8>
- Вакулич, М. М. (2014). Factor Model of Investment Climate Monitoring in Chaotically Structured Economy. *Journal of Finance and Accounting*, 2(6), 31. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.s.2014020601.15>

PROFIL PENULIS



Dr. Feliks Arfid Guampe, S.E., M.Si

Penulis adalah putra daerah Sulawesi Tengah yang lahir pada 08 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 2012. Pada tahun 2013 memperoleh gelar Magister Sains Studi Pembangunan di Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga, Jawa

Tengah. Penulis berkat beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program beasiswa BUDI-DN LPDP dapat Meraih gelar Doktor Pendidikan Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan, pembangunan perdesaan dan ekonomi pertanian. Oleh karena itu penulis aktif dalam melakukan berbagai penelitian serta publikasi jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku terkait dengan bidang kepakaran tersebut. Buku yang ditulis dan telah dipublikasikan adalah buku berjudul *Dinamika Usaha Tani perkebunan*, buku berjudul *Literasi dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan* serta lebih dari 20 book chapter.

Email: feliksguampe@gmail.com

Pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi banyak yang bertujuan menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan secara struktural dalam berbagai aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya baik pada tataran lokal, nasional, regional, bahkan global. Oleh sebab itu untuk memahami apalagi untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan maka idealnya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama birokrat, politisi, masyarakat dunia usaha dan akademisi perlu mempunyai pengetahuan dasar tentang apa itu pembangunan. Bagi mereka yang mempunyai pemahaman tentang konsep-konsep dasar tentang teori, pemikiran dan dialog-dialog terkait teori dan praktek-praktek pembangunan akan sangat membantu dalam berperan aktif pada berbagai tataran dan tahapan proses pembangunan.

Buku *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN* karya Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si ini merupakan buku teks yang bertujuan memperkenalkan dan meliterasi pembaca terhadap konsep-konsep dan teori-teori dasar serta praktek pembangunan ekonomi. Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si yang sukses memberikan literasi tersebut secara sistematis dan komprehensif serta mudah dipahami bahkan oleh pembaca yang tidak berlatar belakang ilmu ekonomi. Saya anjurkan buku ini untuk menjadi salah satu referensi bagi para dosen, mahasiswa, politisi dan birokrat bahkan untuk pembaca umum lainnya yang tertarik pada issue-issue pembangunan (ekonomi).



Dr. Feliks Arfid Guampe, S.E., M.Si

Penulis adalah putra daerah Sulawesi Tengah yang lahir pada 08 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 2012. Pada tahun 2013 memperoleh gelar Magister Sains Studi Pembangunan di Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga, Jawa Tengah. Penulis berkat beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program beasiswa BUDI-DN LPDP dapat Meraih gelar Doktor

Pendidikan Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan, pembangunan perdesaan dan ekonomi pertanian. Oleh karena itu penulis aktif dalam melakukan berbagai penelitian serta publikasi jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku terkait dengan bidang kepakaran tersebut. Buku yang ditulis dan telah dipublikasikan adalah buku berjudul *Dinamika Usaha Tani perkebunan*, buku berjudul *Literasi dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan* serta lebih dari 20 book chapter.

Email: feliksguampe@gmail.com



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

